



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMUS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

**MENERUSKAN HIDUP SETELAH KERUSUHAN :
Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca
Kekerasan Antar Etnis
di Kota Sampit, Kalimantan Tengah**

DISERTASI

**OLEH :
HERRY YOGASWARA
NPM : 0606028350**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Doktor
Dalam Bidang Antropologi di Universitas Indonesia**

**DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ihromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Faks : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Herry Yogaswara
NPM : 0606028350
Program Studi : Antropologi
Judul Disertasi : Meneruskan Hidup Setelah Kerusakan. Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antar Etnis Di Kota Sampit Kalimantan Tengah.

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

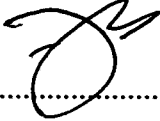
NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Muhammad Mustofa M.A.	Ketua	1.
Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, MA	Promotor	2.
Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum	Ko-Promotor	3.
Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, MA, SS	Anggota	4.
Dr. Hari Kustant	Anggota	5.
Iwan Tjitradjaja, Ph.D	Anggota	6.
Dr. Tony Rudyansjah, MA	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok
Tanggal : 11 Juli 2012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : HERRY YOGASWARA
NPM : 0606028350

Tanda Tangan : .....
Tanggal : 11 Juli 2012

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herry Yogaswara
NPM : 0606028350
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Disertasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MENERUSKAN HIDUP SETELAH KERUSUHAN :
Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antar Etnis
di Kota Sampit, Kalimantan Tengah**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 11 Juli 2012

Yang menyatakan,



(HERRY YOGASWARA)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
Gedung B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik KAMPUS BARU UI DEPOK
16424

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

MENERUSKAN HIDUP SETELAH KERUSUHAN :
Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antar Etnis
di Kota Sampit, Kalimantan Tengah

Oleh
HERRY YOGASWARA
NPM : 0606028350

PROMOTOR

PROF.DR. Dra SULISTYOWATI SUWARNO, MA

Ko Promotor

PROF.DR.SUSANTO ZUHDI, M,Hum.

Ko Promotor

IWAN TJITRADJAJA, Ph.D

KATA PENGANTAR

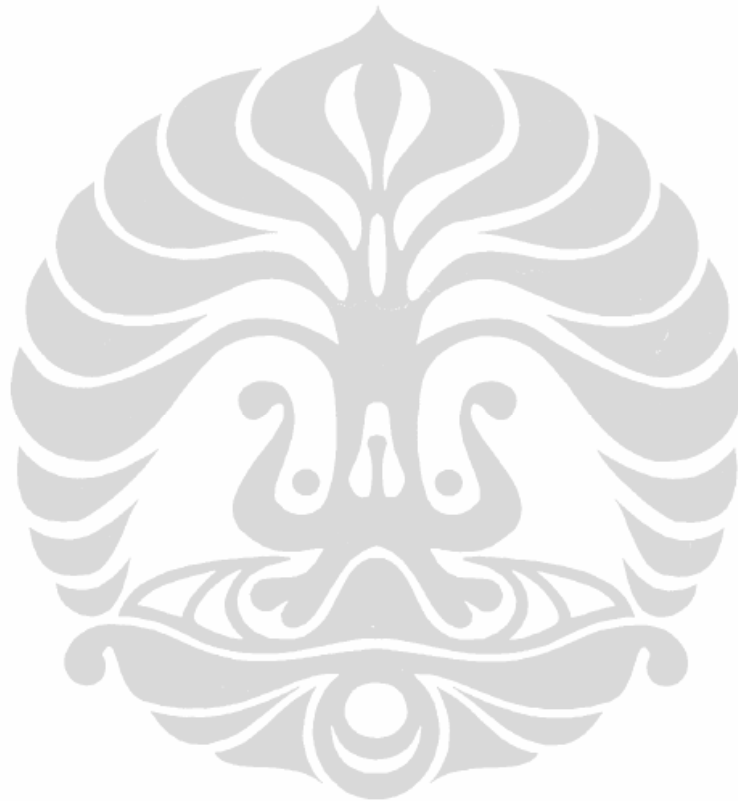
Disertasi ini membahas tentang orang-orang Madura yang meneruskan kembali kehidupannya di kota Sampit, pasca kekerasan antar etnis yang terjadi pada bulan Februari 2001. Kejadian yang dikenal sebagai “kerusuhan Sampit” itu, menambah daftar panjang terjadinya kekerasan komunal yang bernuansa agama dan etnis di Indonesia pada periode 1997-2001. Suatu periode yang dikenal sebagai masa transisi dari pemerintah orde baru yang otoriter menuju orde reformasi.

Ketika membaca kata “kekerasan komunal” maupun “kerusuhan” yang terbayangkan adalah pengalaman-pengalaman traumatik dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut; khususnya mereka yang menjadi kerabat, keluarga dan teman korban dari peristiwa tersebut. Kekerasan komunal telah menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat di kota Sampit, bahkan masyarakat di Kalimantan Tengah umumnya. Khususnya bagi orang-orang Madura yang pada saat itu berhadapan dengan orang-orang Dayak, dimana ratusan jiwa meninggal dunia di pihak Madura, dan puluhan ribu warga lainnya harus meninggalkan Kalimantan Tengah menuju Pulau Madura dan wilayah Kalimantan lainnya.

Penelitian ini mau menjelaskan, bagaimana peristiwa pada masa lalu membentuk *mental image* sebagai kerangka untuk bertindak pada masa sekarang. Khususnya pada orang-orang Madura yang kembali ke kota Sampit untuk meneruskan hidupnya pasca peristiwa yang bersifat traumatik tersebut. Melalui medium ingatan kolektif maupun ingatan-ingatan yang bersifat individual, orang-orang Madura ini melanjutkan hidupnya di kota Sampit. Ingatan-ingatan tentang relasi-relasi dengan orang-orang Dayak yang harmonis sebelum kerusuhan dijadikan *mental image* mereka untuk berhubungan kembali dengan masyarakat dari etnis lainnya di kota Sampit. Pada sisi lainnya, ingatan terhadap peristiwa-peristiwa traumatik pada masa lalu, khususnya yang terkait dengan kerusuhan disembunyikan dari ruang publik kota Sampit, bahkan dicoba untuk dilupakan (*forgetting*)

Saya menyadari bahwa masih banyak hal-hal dalam disertasi ini yang memerlukan pendalaman dan perbaikan. Karena itu, segala kritik yang konstruktif dan saran perbaikan untuk disertasi ini selalu dinantikan

Bogor, 11 Juli 2012



Universitas Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis merasa bersyukur telah dapat menyelesaikan naskah disertasi ini untuk tahap promosi pada Program Pascasarjana, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Satu tahapan dari perjalanan panjang menempuh pendidikan program Doktorat telah dilalui.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada tim promotor yang diketuai oleh Prof.Dr.Dra Sulistyowati Suwarno, MA; ko-promotor Prof.Dr.Susanto Zuhdi M.Hum dan Iwan Tjitradjaja, PhD. Ketiganya telah melakukan pembimbingan dan dialog yang intensif dalam rangka penelitian hingga proses penulisan disertasi hingga pada tahap promosi ini.

Kemudian kepada tim penguji, mulai dari tahap ujian hasil penelitian dan promosi, yaitu kepada Prof. Dr Mustafa Muhamad, Prof Dr Ahmad Fedyani Saifuddin, Dr Hari Kustanto dan Dr Toni Rudyansjah. Masukan-masukan yang berharga dari tim penguji telah merubah secara signifikan substansi dari disertasi ini.

Rasa terimakasih yang terhingga penulis sampaikan kepada setiap orang yang pernah menjadi subyek dari penelitian ini. Khususnya orang-orang yang pernah penulis wawancarai di Sampit, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Pulang Pisau dan Kabupaten Sampang Madura. Tanpa keberadaan mereka, disertasi ini tidak pernah dapat diwujudkan. Penulis merasa sangat sulit untuk menyebutkan mereka satu persatu; karena setiap subyek memberikan kontribusi yang sama dengan format yang berbeda-beda. Keberadaan penulis selama di Sampit sejak tahun 2005, kemudian intensif kembali sejak tahun 2008 untuk melakukan penelitian ini merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Peristiwa kekerasan antar etnis, justru memberikan banyak pelajaran tentang sisi kemanusiaan pada diri penulis.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung studi penulis di program pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia. Kepada Mbak Tina, Mbak Wiwin, Kang Tomi dan Mbak Wati yang setia menjaga kepentingan administrative peserta program. Mereka adalah *reminder* yang selalu mengingatkan waktu-waktu penting selama studi dan melayani berbagai kepentingan dari peserta program pada tahun 2006-2012 ini. Kawan-kawan peserta program S-2 dan S-3 angkatan tahun 2006 yaitu , Dr Marko Mahin, Riza Suarga, Purwadi, Murtado, Endang, Nursila, Simon, Azis, Sunjaya, Diah, Fikri, Paul, Yusran, Gonjes, Mita, dan Riri.

Ucapan terimakasih juga kepada staff peneliti dan karyawan di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tempat selama lebih dari 17 tahun ini penulis bekerja. Almarhum Prof Dr EKM Masinambow adalah orang pertama yang membuka jalan kepada penulis untuk dapat bekerja di LIPI. Dr Julfita Rahardjo, MA mantan Kapus Penelitian Kependudukan LIPI yang teguh mengajarkan dimensi moral seorang peneliti. Prof Dr Aswatini, MA, Deputi Ketua LIPI bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) yang memberikan banyak bekal tentang kepemimpinan, dan Dr Sri Sunarti Purwaningsih, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI yang selalu mendukung apapun yang penulis lakukan terkait dengan studi ini. Khusus bagi kawan-kawan bidang ekologi manusia PPK LIPI yang sangat bersabar di-"telantar"-kan kepentingannya oleh penulis pada saat menyelesaikan disertasi ini.

Kepada ibunda, Betty Elia, seorang ibu yang membesarkan kami sendirian pada masa-masa sulit, yang hingga kini tidak pernah mengerti mengapa anaknya memilih jurusan Antropologi sejak tahun 1986. Juga kepada keempat kakak-kakak penulis yang selalu memberikan *support* dalam kondisi apapun kepada penulis. Mereka itulah yang mengajarkan pentingnya nilai sebuah keluarga.

Alinea terakhir dari sebuah tulisan, seringkali merupakan bagian yang terpenting dari sebuah cerita. Bagian ini saya persembahkan kepada Eppy Yuniarti Ratih, seorang yang mendampingi saya selama 8 tahun ini, namun merelakan 6 tahun darinya untuk kepentingan studi saya di program pascasarjana Antropologi.

Bogor, 11 Juli 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
Gedung B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik KAMPUS BARU UI DEPOK
16424

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Jakarta, 11 Juli 2012

Herry Yogaswara

Abstrak

Nama : Herry Yogaswara
Program Studi : Antropologi
Judul : MENERUSKAN HIDUP SETELAH KERUSUHAN : Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antar Etnis di Kota Sampit, Kalimantan Tengah.

Disertasi ini membahas tentang orang-orang Madura yang kembali setelah terjadinya kekerasan antar etnis yang dikenal dengan Kerusuhan Sampit pada bulan Februari 2001. Mereka memutuskan untuk kembali ke Sampit setelah mempertimbangkan berbagai situasi yang pernah mereka alami pada saat hidup di kota Sampit sebelum terjadinya kerusuhan. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa berbagai peristiwa pada masa lalu membentuk mental image yang dijadikannya sebagai referensi untuk kerangka bertindak pada masa sekarang.

Melalui penelitian lapangan yang dilakukan Sawpit Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan Pulau Madura, Jawa Timur; dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan setengah terlibat dan penelusuran dokumentasi ditemukan bahwa orang-orang Madura menggunakan referensi kejadian pada masa lalu untuk memulai kembali kehidupannya di kota Sawpit. Ingatan-ingatan tentang harmonisasi hubungan dengan orang-orang Dayak diberi tempat yang luas. Namun, ingatan yang bersifat traumatic, khususnya tentang kekerasan komunal antar etnik tidak disembunyikan oleh orang-orang Madura dari ruang publik kota Sawpit.

Kata Kunci : Kesejarahan, Ingatan Kolektif, Identitas, Etnisitas, Kekerasan antar Etnis; Sampit Kalimantan Tengah

Daftar Isi

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Lembar Persetujuan Publikasi Ilmiah	
Abstrak	
Daftar Isi	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kekerasan Komunal di Kota Sawpit	8
1.3. Masalah Penelitian	16
1.4. Kerangka Teoritis : Kesejarahan, Ingatan Kolektif, Identitas dan Etnisitas	20
Kesejarahan (Historisitas)	22
Identitas Etnisitas	28
Identitas Etnisitas	29
1.5. Penelitian-Penelitian terdahulu tentang Kekerasan Antar Etnis di Sampit	32
1.5.1. Pembentukan Aktor	32
1.5.2. Analisis Struktural, Studi Arsitektural dan Peace Building	34
Analisis Struktural Konflik Sampit	35
Kontestasi Ruang Kota Sampit	39
Peace Building di Sawpit	40
1.6. Metode Penelitian	41
1.7. Struktur Disertasi	43
BAB 2 : REFLEKSI METODE : Pengalaman Melakukan Penelitian di Wilayah Pasca Konflik	45
2.1. Pengantar	45
2.2. Dimensi Waktu dan Multi Situs	49
2.3. Sampit Sebagai Jendela Memasuki Permasalahan Penelitian	50
2.4. Saya, Dayak dan Madura	53
2.4.1. Proses Memasuki Sampit	56
2.4.2. Memasuki Komunitas Madura	59
2.4.3. Komunitas Dayak dan Etnis Lainnya	62
2.5. Gugatan Identitas dari Kalangan Dayak	63
2.5.1. Gugatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000	64
2.5.2. Gugatan Identitas Agama Lokal	67
2.6. Kesimpulan Bab 2	68

Bab 3 : Kota Sampit : Lansekap Wilayah, Penduduk, Etnisitas dan Kesejarahan	70
3.1. Letak dan Demografi	70
3.2. Dimensi Sejarah	75
3.2.1. Sejarah Kedatangan Orang Madura di Sampit dan Persebaran Permukiman	76
3.2.2. Industri Kayu di Sampit dan Peran Bruynzel	78
3.3. Gelombang Migrasi Orang Madura di Kota Sampit	81
3.3.1 Gelombang Perintis : Migrasi Madura (1920-an)	82
3.3.2 Gelombang Migrasi 1950-1970 : Masa Brengsel	86
3.3.3. Gelombang Ketiga : Industri Kayu dan Benih-Benih Konflik Antar Etnis (1970-2000)	95
3.4. Kesimpulan Bab 3	98
Bab 4 : Kekerasan Antar Etnis di Kota Sawpit	99
4.1. Pengantar	99
4.2. Kronologis Kerusakan : Klaim Pembenaran Para Pihak	101
Kronologis versi LMMDD KT	101
Membaca ulang Kronologis versi LMMDD KT	104
Kronologis versi Penulis Buku Putih	110
4.3. Monumen Kerusakan dan Pembunuhan Orang-Orang Madura	117
Makam Masal	117
Tugu Perdamaian	119
Kuburan Kristen	121
Pembunuhan Massal Dalam Kerusakan Sampit	122
Narasi Pengendalian Kerusakan di Pangkalan Bun	123
4.4. Kerusakan Sampit dan Penghilangan Identitas Madura	125
Birokrasi Pemerintah dan Aktivitas Politik	126
Pelabuhan Sampit Minus Buruh Angkut Madura	127
Identitas Kuliner Madura	128
4.5. Kesimpulan Bab 4	131
Bab 5 : Orang-Orang Madura Pasca Kerusakan di Kota Sawpit	133
5.1. Pengantar	133
5.2. Masalah : Merintis Jalan Baru	134
5.3. Pak Tosan : Lurah yang Kehilangan Jabatan	143
5.4. Ramli : Anak Muda Madura	158
5.5. Bibi Nuraini : Penjual Pencok yang Membangun Kembali Usahanya	163
5.6. Pak Sadi : Tokoh Informal di Kalangan Masyarakat Madura	172
5.7. Pergi ke Madura, Pulang ke Sampit	180
5.7.1. Terpaksa Pergi ke Madura (2001-2003)	181

5.7.2. Pulang ke Sampit (2003-sekarang)	193
5.8. Kesimpulan Bab 5	205
Bab 6 Analisis dan Kesimpulan	207
6.1. Analisis	207
6.2. Kesimpulan	212
Daftar Pustaka	215



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnisitas di Kalimantan Barat Sebelum dan Sesudah Revisi	66
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Kalimantan Tengah Berdasarkan Etnisitas	72



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnisitas di Kalimantan Barat Sebelum dan Sesudah Revisi	66
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Kalimantan Tengah Berdasarkan Etnisitas	72



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada periode 1997-2001 telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan komunal di Indonesia. Mulai bulan Januari-Februari 1997, di sebuah kota kecamatan bernama Sanggau Ledo di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat antara orang-orang Dayak dan Madura. Kemudian akhir tahun 1998, masih di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat kekerasan komunal terjadi antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Madura. Sedangkan pada awal tahun 1999 kekerasan komunal terjadi di kota Poso, Sulawesi Tenggara, antara orang-orang Muslim dengan Kristen. Pada tahun 1999 juga kekerasan komunal antara orang-orang Muslim dan Kristen di kota Ambon, Provinsi Maluku. Lalu, pada akhir tahun 1999, kekerasan komunal antara Muslim dan Kristen dan faksi-faksi diantara kalangan Muslim meledak di Maluku Utara. Selanjutnya, pada bulan Februari 2001, di kota pelabuhan Sampit, ibu kota Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kekerasan antar etnis yang melibatkan orang-orang Dayak dan Madura.

Setelah kota Sampit, kekerasan antar etnis tersebut menyebar ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Selanjutnya ke kota Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat) dan hampir seluruh ibu kota kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Dilaporkan hampir seribu orang tewas (kebanyakan orang Madura), tidak terhitung jumlah penduduk yang luka-luka dan hampir 90% orang-orang Madura di Kalimantan Tengah mengungsi ke luar wilayah provinsi. Wilayah pengungsian terbanyak adalah pulau Madura dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kekerasan komunal yang terjadi di pulau Kalimantan, yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sering disebut kekerasan antar etnis yang melibatkan orang-orang Dayak melawan Madura dan orang Melayu melawan Madura di

Kalimantan Barat; serta orang-orang Dayak melawan Madura di Kalimantan Tengah. Orang-orang Dayak dan Melayu mengklaim sebagai “penduduk asli” provinsi Kalimantan Barat sedangkan orang-orang Madura dianggap sebagai “pendatang” di provinsi itu. Sedangkan di provinsi Kalimantan Tengah, orang-orang Dayak dan Banjar mengklaim sebagai “penduduk asli”, sedangkan orang-orang Madura adalah “penduduk pendatang”. Klaim “asli” dan “pendatang” tersebut merupakan hasil rekonstruksi identitas yang belum tentu mempunyai dasar legitimasi pada tataran keseharian masyarakat. Mengingat banyak orang-orang yang berasal dari etnis Madura dilahirkan, dibesarkan dan hidup dalam keseharian dengan orang-orang Dayak, termasuk perkawinan antar etnis.

Disertasi ini terinspirasi dari peristiwa kekerasan etnis yang terjadi di kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan bulan Februari 2001. Peristiwa kekerasan antar etnis Dayak-Madura yang dikenal dengan “Kerusuhan Sampit” atau “Kerusuhan” . Pada sebagian ingatan orang-orang di Kalimantan Tengah “kerusuhan” seolah-olah telah memposisikan orang-orang yang berasal dari etnis Dayak dan Madura sebagai dua kelompok yang saling bermusuhan, saling membenci dan tidak dapat dipersatukan kembali. Pandangan yang bersifat prasangka (*stereotype*) terhadap orang-orang Madura semakin menguat pada saat itu, yaitu orang-orang Madura adalah pembuat kerusuhan, melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Dayak, orang Madura seringkali mengambil tanah-tanah orang Dayak; orang Madura menguasai perdagangan di pasar dengan cara kekerasan; pelabuhan dikuasai buruh angkut orang Madura dengan cara kekerasan; orang-orang Madura menyelesaikan permasalahannya dengan cara *carok*.

Sebaliknya *stereotype* terhadap orang Dayak tentang kebiasaan *mengayau* (*head hunting*) dibangkitkan kembali, bahkan dibumbui dengan cerita-cerita yang seram. Kisah perburuan kepala manusia dalam kekerasan antar etnis bukan hanya monopoli cerita kerusuhan Sampit saja, melainkan kekerasan antar etnis Melayu dan Madura di

Kalimantan Baratpun terjadi peminggalan kepala. Oleh sebab itu, stereotype tersebut tidak mendapatkan basis kebenaran apabila dikaitkan dengan tradisi ke-Dayak-an saja

Pasca kerusuhan, gelombang orang-orang Madura-Sampit yang sempat menjadi pengungsi lokal di pulau Madura, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan mulai berdatangan kembali ke kota Sampit sekitar tahun 2003. Pada tahun 2005, saya mulai berinteraksi dengan masyarakat kota Sampit untuk melakukan penelitian tentang ketimpangan horisontal (*horisontal inequality*). Penelitian tersebut membawa kedekatan antara saya dengan berbagai kelompok etnis di kota Sampit, khususnya orang-orang Dayak, Madura, Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Cina dan orang-orang eks-tentara *KNIL* yang disebut dengan “keturunan Indo”. Interaksi saya dengan orang-orang tersebut, baik melalui kegiatan wawancara mendalam, sekedar berkawan atau hanya bertemu sesaat dalam pertemuan-pertemuan yang tidak direncanakan, telah menimbulkan beberapa kesan khusus. Kesan itu tentang orang-orang Madura melihat orang-orang Dayak; sebaliknya orang-orang Dayak memandang, mempersepsikan dan mengkonstruksikan orang-orang Madura. Beberapa cuplikan pembicaraan dibawah ini, memberikan kesan mendalam, sekaligus menginspirasi saya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang relasi antara orang-orang Dayak dengan Madura sebelum dan pasca kerusuhan Februari 2001.

Cuplikan pembicaraan pertama terjadi di sebuah desa di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sekitar bulan Desember 2006. Pembicaraan itu antara saya dengan seorang penduduk dari etnis Madura yang baru kembali dari pengungsian di pulau Madura. Pembicaraan tentang siapa itu orang Dayak. Orang Madura ini menganggap bahwa orang Dayak adalah mereka yang memeluk agama Kristen dan Kaharingan. Sedangkan Bupati Kabupaten Pulang Pisau yang berasal dari kabupaten Kapuas itu dianggap bukan orang Dayak, karena bupati tersebut beragama Islam dan berasal dari Kapuas. Bagi orang Madura ini, “orang Kapuas dan Muslim”, bukanlah orang Dayak.

Cuplikan kedua adalah tentang seorang kepala desa yang mengaku orang Dayak beragama Islam. Ia tinggal di kecamatan Cempaga, sekitar 15 kilometer dari Sampit. Pertemuan terjadi pada bulan April 2005. Bagi kalangan pegiat masyarakat sipil, Kepala desa ini sering dianggap sebagai tokoh rekonsiliasi antara orang-orang Madura dan Dayak. Khususnya peranannya bersama-sama beberapa organisasi non pemerintah (ornop) ketika mendatangi orang-orang Madura yang tinggal di pengungsian di Pulau Madura. Kepala desa ini telah berulang kali datang ke pulau Madura untuk menemui beberapa orang warganya yang berstatus sebagai pengungsi internal (*Internally Displaced Person*). Kepala desa ini mengajak warganya yang berasal dari etnis Madura yang berstatus “pengungsi internal” di pulau Madura untuk kembali ke desanya di Cempaga. Sikap kepala desa ini dianggap mencerminkan kepahlawanan dimata aktivis organisasi non pemerintah (ornop) hak-hak asasi manusia (HAM). Termasuk warga-warga Madura yang harus meninggalkan kampung halamannya pada bulan Februari 2001. Namun, pada wawancara lainnya di desa itu - -- *seorang anak muda Dayak yang beragama Kristen dan berulang kali mengatakan “membela kepentingan orang-orang Dayak”* --- mengecam tindakan kepala desa tersebut, karena melukai perasaan orang Dayak. Anak muda itu meniupkan rumor bahwa dari setiap kepala warga Madura yang kembali, Kepala Desa mendapatkan sejumlah uang tertentu.

Pembicaraan lainnya terjadi pada bulan Juni 2008, dengan seorang migran etnis Madura yang datang ke kota Sampit tahun 1968. Ia dianggap sebagai salah seorang “tokoh” Madura di wilayah jalan Pelita Timur Kota Sampit. Ia termasuk salah seorang Madura yang memiliki banyak bidang tanah di kota Sampit, karena berhasil membuka kawasan hutan untuk dijadikan permukiman dan pertanian. Lelaki yang berasal dari kawasan Sampang Madura ini, harus mengungsi ke pulau Madura, dan tinggal di kampung halamannya di kawasan Sampang hingga tahun 2005. Ia kembali ke Sampit setelah mendapat jaminan dari kawannya, orang Dayak yang pernah menjadi pemasok usaha kayunya. Padahal orang Dayak ini sebelumnya menduduki rumah-rumah yang ditinggalkan orang Madura pada saat mengungsi, dan meminta

kompensasi dari orang Madura yang akan mengambil kembali rumah atau persil tanahnya. Lelaki Madura ini mengaku tidak mempunyai ketakutan apapun tinggal di Sampit, karena ia tidak pernah terlibat dengan organisasi berbasis etnis Madura yang disebut IKAMA (Ikatan Keluarga Madura)¹ Baginya, IKAMA di Sampit adalah sebuah organisasi yang merupakan persekongkolan antara “*bajingan*” dan “*kaum sugih*”. Sebutan bajingan adalah kelompok-kelompok orang Madura yang sering terlibat kekerasan. Sedangkan *kaum sugih* adalah orang-orang kaya yang menguasai usaha ekonomi tertentu, seperti kontraktor, pompa bensin, pemilik hotel dan pimpinan buruh angkut di pelabuhan Sampit.

Kisah lain tentang seorang perempuan Madura berusia sekitar 40-an tahun. Ia adalah pedagang *pencok* (gado-gado) di jalan Pelita Barat kota Sampit. Pertemuan dengannya terjadi pada bulan Juni 2008. Ia adalah isteri kedua dari seorang Madura penarik becak yang berusia sekitar enam puluh tahunan. Seperti kebanyakan orang Madura lainnya di Sampit, ia juga baru kembali dari pengungsian di pulau Madura sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi karena ia kelahiran Sampit dan suaminya kelahiran Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, maka pulau Madura merupakan tempat yang asing bagi keluarga itu. Sebelum terjadi kerusuhan, penghasilan ibu ini cukup besar karena ia berdagang makanan di sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Tetapi ketika kembali dari pengungsian dan ingin berdagang kembali di sekolah itu ditolak oleh kepala sekolah. Alasan bahwa telah ada keluarga guru yang menjual makanan di kantin sekolah itu. Namun sebelumnya, kepala sekolah --- yang berasal dari kecamatan Baamang -- mengatakan bahwa ibu ini adalah orang Madura, maka ia tidak boleh berdagang di tempat itu, karena khawatir akan menimbulkan kekacauan.

¹ IKAMA adalah organisasi masyarakat Madura yang mempunyai cabang di berbagai kota di Indonesia. Keberadaannya tidak terlepas dari proses reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998, yaitu maraknya pembentukan organisasi berlatar belakang etnisitas dan agama. Terdapat tiga cabang IKAMA di Kalimantan Tengah, yaitu Palangka Raya, Sampit dan Pangkalan Bun. Dalam peristiwa kekerasan antar etnis Februari 2001, IKAMA telah dituding oleh organisasi LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah) sebagai sebuah organisasi yang mempunyai keinginan untuk menguasai kota Sampit sebagai wilayah “Madura” melalui jalan kekerasan. Kelompok IKAMA juga dituding menjadi pelindung bagi orang Madura yang terlibat dalam tindak kriminal.

Selain cuplikan-cuplikan pembicaraan yang dapat menandai relasi antar etnis Madura-Dayak, konteks-kontes sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam waktu-waktu yang tertentu di Kota Sampit memberikan peluang terhadap iklim relasi antar etnis.

Keberadaan orang-orang Madura (dan etnis lainnya yang dianggap migran, seperti Banjar, Jawa, Sunda, Bugis dan sebagainya) di kota Sampit sangat terkait dengan dinamika pengelolaan sumber-sumber daya alam dan strategi “pembangunan” yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur². Konsesi-konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sejak awal tahun 1970 telah memberikan efek berganda terhadap kota ini, yaitu munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang terkait dengan industri perkayuan. Akibatnya muncul sebuah kota kecil (*small town*) dengan pelabuhan yang menghubungkan kota ini dengan kota-kota pelabuhan penting di pulau Jawa, khususnya Semarang dan Surabaya. Demikian halnya dengan program transmigrasi pada masa orde baru, telah menyebabkan kepadatan penduduk di kawasan ini meningkat. Kota Sampit telah berubah menjadi kota migran, baik dalam statusnya sebagai migran spontan (*spontaneous migration*), yaitu mereka yang pindah atas keinginan sendiri, maupun berdasarkan *demographic engineering*, melalui program transmigrasi (Tirtosudarmo, 2007)

Perusahaan-perusahaan kayu yang mempunyai pabrik pengolahan dan kantor pusat di Sampit, sejak awal kemerdekaan merupakan faktor penarik (*pull factors*) yang menyebabkan migran datang ke Sampit. Mulai dari keberadaan perusahaan kayu swasta Belanda *NV Bruynzeel Dayak Houtbedrijven* atau *BDHNV* (1947), kemudian dinasionalisasi menjadi PT Sampit Dajak tahun 1955; selanjutnya menjadi bagian dari PT Perhutani tahun 1962 dan kemudian menjadi bagian dari PT Inhutani III tahun 1977 (anonymous, 2008). Perusahaan-perusahaan perkayuan ini menjadi

² Pada tahun 2002, kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan.

suatu simbol dari pengelolaan sumber daya alam kayu di wilayah Kotawaringin Timur.

Selain itu, kebijakan kehutanan nasional dengan dikeluarkannya UU Kehutanan No 5/1967 yang memberi konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada pihak swasta nasional telah menyuburkan pertumbuhan berbagai perusahaan pemilik HPH dan usaha-usaha yang mendukungnya, seperti industri kayu lapis dan jasa-jasa pendukung lainnya. Kemudian, ketika industri kayu mengalami penurunan drastis sejak tahun 1990-an, maka industri perkebunan kelapa sawit telah menjadi industri pengelola sumber daya alam utama di kabupaten tersebut pada dekade 2000-an.

Berbagai aktivitas ekonomi tersebut menjadikan kota Sampit sebagai basis untuk kegiatan perkantoran, perumahan, pemeliharaan alat dan sebagainya. Hal ini menyedot penduduk untuk bermukim di kota Sampit. Kemudian kota Sampit menjadi sebuah kota yang multi-etnis, walaupun sebenarnya secara statistik, menurut sensus penduduk tahun 2000 kota ini didominasi oleh 4 kelompok etnis utama, yaitu "Dayak Sampit", Banjar, Jawa dan Madura. Dalam perhitungan statistik, yang disebut dengan kota Sampit terwakili oleh dua kecamatan, yaitu Baamang dan Ketapang³

Sampit telah menjadi kota yang multi-etnis akibat dari munculnya berbagai kegiatan ekstraktif pengelolaan sumber daya alam di kabupaten Kotawaringin Timur. Khususnya industri per kayu dan perkebunan. Berkaitan dengan karakter multi-etnis tersebut, belum banyak studi yang memperhatikan hal tersebut dengan serius, kecuali setelah terjadinya kerusuhan Februari 2001. Dari sedikit yang pernah melakukannya

³ Berdasarkan penghitungan statistik pada tahun 2000, di kecamatan Baamang dari 44,750 penduduk, hampir 52% Dayak Sampit, lebih dari 15% Banjar, lebih dari 14% Madura dan lebih dari 12% Jawa. Sisanya adalah kelompok-kelompok sub suku Dayak lainnya (Dusun, Manyan, Lawangan, Ngaju, Katingan, dsb), Bugis, Cina, Sunda, dan kelompok lainnya yang secara statistik tidak signifikan. namun mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi maupun aktivitas politik dan pemerintahan local di kota Sampit. Sedangkan di kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, dari jumlah penduduk sebanyak 76,678 jiwa terdiri dari Dayak Sampit (26%), Banjar (24,6%), Jawa (23,4%) dan Madura (17.1%). Sisanya, seperti halnya di Baamang, yaitu berbagai sub-etnis Dayak, Sunda, Bugis dan Cina. Komposisi penduduk Cina di kecamatan ini relatif agak besar dibandingkan etnis lainnya yaitu sekitar 2%

adalah Douglas Milles (1976) yang melihat relasi antara orang-orang Banjar dan orang Dayak Ngaju di wilayah Kotawaringin Timur, yang pada intinya membicarakan rivalitas politik antara orang Banjar dengan Dayak Ngaju.⁴

1.2. Kekerasan Komunal di kota Sampit

Konflik kekerasan antar etnis, yang sering disebut dengan rangkaian peristiwa “kerusuhan Sampit” ataupun “tragedi Sampit” itu sendiri puncak kejadiannya terjadi pada malam tanggal 18 Februari 2001 (*Kronologi rinci tentang kejadian tersebut pada bab 4*). Peristiwa kerusuhan dimulai dengan serangan dari sekelompok orang-orang Dayak yang berasal dari sebuah desa kecamatan Seruyan (sejak tahun 2001 menjadi kabupaten Seruyan) terhadap kelompok orang Madura. Kelompok orang Madura ini dianggap bertanggung-jawab terhadap sebuah pembunuhan orang Dayak yang terjadi pada bulan Desember 2000.

Setelah itu kelompok orang Madura membalas dendam dengan cara menyekap satu keluarga orang Dayak dan membakar rumah tersebut yang menyebabkan orang-orang yang ada didalamnya mati terbakar. Sejak malam tersebut, orang-orang Madura menguasai kota Sampit, melakukan konvoi keliling kota, menantang orang-orang Dayak untuk berkelahi dan melakukan terror kepada siapapun orang-orang yang ada di kota Sampit, tidak terbatas orang-orang Madura. Setelah orang-orang Madura menguasai kota Sampit pada tanggal 18-19 Februari 2001, datang bantuan dari orang-orang Dayak yang ada diluar kota Sampit. Orang-orang Dayak dari luar kota Sampit, dibantu oleh orang Dayak yang ada di kota Sampit inilah yang melakukan pengejaran terhadap orang-orang Madura. Inilah saat pembunuhan yang bersifat masif terjadi pada orang-orang Madura dan dianggap sebagai kekerasan antar etnis yang bersifat komunal.

⁴ Namun beberapa studi Antropologis lainnya yang cukup penting untuk diantaranya dilakukan oleh Schiller (1997) dan Rini (2005). Studi Rini tersebut menggunakan nama samaran untuk menyebut nama lokasi sehingga tidak dapat diidentifikasi secara pasti lokasi kajiannya.

Selanjutnya pengejaran terhadap orang-orang Madura terjadi di hampir semua kecamatan di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur, melebar ke kota Pangkalan Bun kabupaten Kotawaringin Barat, kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas dan kabupaten-kabupaten wilayah sungai Barito. Pengungsian hampir seluruh warga Madura Kalimantan Tengah (kecuali warga Madura di Kotawaringin Barat) ke propinsi Kalimantan Selatan dan pulau Jawa (provinsi Jawa Timur, khususnya pulau Madura). Melalui kerusuhan, "identitas" Madura yang tadinya cair (karena faktor tempat kelahiran maupun perkawinan), mendadak dibekukan menjadi satu identitas, yaitu semua orang Madura harus keluar dari Kalimantan Tengah. Situasi kerusuhan yang *chaos* tidak lagi memandang apakah orang Madura itu kelahiran kota Sampit; berjasa bagi orang Dayak; berkawin dengan orang Dayak; bahkan sudah merasa orang Dayak, tetap saja diusir, bahkan banyak yang dibunuh karena ada pada tempat yang salah pada saat itu.

Peristiwa kekerasan komunal itu sendiri dapat menjadi titik intip (*hints*) dari studi ini. Relasi kekinian diantara etnis yang berbeda (juga kelompok-kelompok suatu intra etnis), bukanlah sebuah relasi yang datang tiba-tiba, melainkan melalui sebuah perjalanan kesejarahan yang terjadi di kota tersebut. Peristiwa kekerasan komunal yang melibatkan kelompok etnis Madura dan Dayak (juga keterlibatan masyarakat dari etnis lainnya terhadap Madura) pada bulan Februari 2001 merupakan suatu "interupsi" dari kesinambungan sejarah Dayak-Madura di kota Sampit yang telah membuka berbagai struktur-struktur hubungan Dayak-Madura di kota Sampit yang selama ini dianggap mapan. Kerusuhan diakhiri dengan jatuhnya korban yang besar di pihak orang-orang Madura dan pengungsian masal orang Madura ke luar Sampit. Kemudian ketika orang-orang Madura ini kembali ke kota Sampit, suatu reformatisasi (penataan ulang) relasi dengan orang-orang Dayak (dan etnis lainnya) dilakukan.

Telah ada beberapa studi untuk mencoba menjelaskan mengapa terjadi kekerasan komunal diberbagai tempat, termasuk di Sampit. Ada yang melihatnya sebagai akibat

dari pengelolaan sumber daya alam yang meminggirkan masyarakat asli (Down to Earth, 2002), peran militer yang terpinggirkan pasca keruntuhan orde baru (Human Right Watch, 2002), kemungkinan adanya ketimpangan horizontal (Khay Jin, dkk, 2005) tidak bekerjanya institusi negara dan rapuhnya institusi tradisional (Smith 2005), faktor kekerasan struktural dan kultural (Smith and Bouvier (eds) 2006). Miskomunikasi dan peran media yang mempertinggi iklim konflik⁵. Selain itu, tidak sedikit tulisan-tulisan dari kalangan jurnalis yang mencoba melihat kekerasan komunal ini melalui drama-drama kekerasan seperti pemenggalan kepala, pembantaian kelompok masyarakat dalam sebuah truk, tumpukan kepala manusia dalam sebuah hotel dan sebagainya.⁶

Penjelasan tentang perebutan pengelolaan sumber daya alam sebagai pemicu konflik Dayak Madura (*Down to Earth*, 2002) berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan berbagai Undang-undang tentang sumber daya alam, yaitu UU Pokok Kehutanan No 5/1967, UU Pertambangan dan Migas, UU Transmigrasi, UU Perkebunan dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut lebih memihak kepada pemilik modal dan menguntungkan penduduk migrant dibandingkan penduduk asli. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap telah meminggirkan (marginalisasi) penduduk asli dari wilayah tradisionalnya, sehingga penduduk asli hanya menjadi penonton. Akibatnya, posisi masyarakat asli yang semakin terpojok membuat mereka harus mengadakan perlawanan dengan cara-cara kekerasan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan keberadaan mereka.

Sedangkan penjelasan peran militer yang terpinggirkan pasca keruntuhan orde baru, sebagai penyebab kerusuhan didasarkan pada adanya peristiwa saling tembak antara

⁵ Spyer, Patricia (2002) : *Fire Without Smoke and Other Phantoms of Ambon's Violence : Media Effects, Agency And the Work of Imagination*. Indonesia 74 (October 2002). Pp. 21-36. Dalam makalahnya ini Spyer ingin menunjukkan bagaimana persepsi dan tindakan orang-orang biasa dalam kondisi yang luar biasa, krisis dan kekerasan yang kronis, serta bagaimana peran media dalam menciptakan situasi konflik.

⁶ Sebuah tesis yang telah dibukukan, berjudul "*Dayak yang Menang, Indonesia yang Kalah*" : *Representasi Identitas Etnik Dayak di Media Massa*" (Sulhan, 2006) merupakan analisis yang komprehensif tentang kekerasan komunal yang terjadi di Sampit dalam pandangan media massa

anggota TNI melawan anggota Polri di pelabuhan Sampit pada saat-saat evakuasi pengungsi Madura saat kerusuhan terjadi. Kemudian beredar rumor keterlibatan beberapa elemen militer dalam kerusuhan tersebut. Hal ini ini tidak terlepas dengan semakin melemahnya peranan militer di Indonesia pasca reformasi pada tahun 1998.

Penjelasan tentang ketimpangan horizontal (Khay Jin dkk, 2005) didasarkan pada analisis adanya ketimpangan antar etnis di Kalimantan Tengah berdasarkan indikator-indikator tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan pendapatan, dan fasilitas sosial. Analisis statistic tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang Dayak dan Madura berada pada tingkatan paling bawah. Dengan demikian, konflik antar etnis mempunyai potensi untuk terjadi pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang amat miskin, tingkat pendidikan rendah dan serba kekurangan fasilitas sosial. Tentu saja, hal tersebut hanya merupakan pre-kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan antar kelompok, dan masih membutuhkan faktor lain untuk memicu daya ledaknya.

Penjelasan lainnya berasal dari pandangan bahwa kekerasan antar etnis disebabkan oleh rapuhnya institusi negara dan institusi tradisional (Smith, 2005). Pada saat transisi dari orde baru menuju orde reformasi tahun 1998, berbagai institusi negara baik pemerintahan sipil dan penegakan hukum sedang mengalami kegamangan dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Otonomi daerah yang seharusnya memperkuat kelembagaan di daerah, malahan dipenuhi oleh semangat primordialisme, khususnya pada birokrasi dan kelembagaan politik lokal. Pada sisi lain, kelembagaan tradisional, seperti kelembagaan adat tidak diakui keberadaannya pada masa orde baru dan hanya menjadi simbol-simbol kelokalan, tetapi tidak mempunyai fungsi dalam keseharian masyarakat. Akibatnya ketika terjadi konflik antar etnik, tidak ada institusi negara maupun tradisional yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahannya.

Penjelasan yang bersifat kultural maupun struktural (Smith and Bouvier, 2006) adalah upaya untuk menjelaskan “akar kekerasan” dari hubungan antar etnis yang perlu dilihat secara lebih mendalam lagi. Ketika kekerasan sudah bersifat kultural dan struktural, maka tinggal menunggu faktor pemicu yang dapat menjadikan konflik antar etnis menjadi kekerasan antar etnis dengan *magnitude* yang jauh lebih besar.

Dari berbagai publikasi yang mencoba melihat kekerasan komunal di Indonesia, saya tertarik untuk memberikan sebuah tempat yang khusus bagi buku yang ditulis oleh Gerry van Klinken, berjudul *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia* (2007).⁷ Buku tersebut telah berhasil merangkum lima kasus kekerasan komunal di Indonesia, yaitu di Sanggau Ledo dan Sambas, Kalimantan Barat; Sampit di Kalimantan Tengah; Poso di Sulawesi Tenggara; Ambon di Maluku dan Halmahera di Maluku Tenggara. Kasus-kasus yang digunakan oleh Klinken bagi saya memang kasus-kasus yang dapat mewakili tipologi kekerasan antar etnis dan agama di Indonesia. Tetapi saya melihat adanya kelemahan teoritis yang digunakan oleh Klinken, khususnya ketika membahas kekerasan antar etnis yang terjadi di kota Sampit.

Teori gerakan sosial itu sendiri mempunyai berbagai varian. Salahsatu varian yang menjadi dasar pemikiran Klinken adalah dinamika perseteruan atau *dynamics of contention* (Adam, Tarrow and Tilly, 2006 dalam Klinken, 2007 : 16). Dalam penjelasannya, Klinken mengatakan terdapat lima proses kunci yang menjadi komponen untuk memahami suatu gerakan sosial, termasuk yang berujung pada kekerasan komunal. Komponen itu adalah *identity formation* (pembentuk identitas), *scale shift* atau eskalasi, *polarization* (polarisasi), *mobilization* (mobilisasi) dan *actor constitution* (pembentukan actor). Komponen terakhir, yaitu pembentukan aktor

⁷ Ketertarikan saya dengan buku van Klinken ini bukan karena saya menyetujui kerangka teoritis yang dianutnya. Justru setelah membacanya itu saya berkeberatan dengan cara pandang teoritisnya dalam melihat kasus kerusuhan Sampit yang terlampau memaksakan penggunaan teori gerakan sosial dalam pembentukan actor politik di Kalimantan Tengah. Saya pernah mendiskusikan temuan-temuan saya dengan temuan van Klinken untuk kasus Sampit melalui pembicaraan personal saya dengan van Klinken di Pontianak pada tahun 2009 (pers.comm)

diartikan melihat bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisasi atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik unggul (ibid : 18). Teori Klinken ini diterapkan secara berbeda dari satu lokasi kekerasan komunal dengan lokasi lainnya. Penjelasan Klinken untuk peristiwa di Sampit lebih menitik beratkan pada teori pembentukan actor, yaitu dengan cara menunjukkan keterlibatan sebuah organisasi Dayak bernama Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD KT) sebagai pihak yang memobilisasi terjadinya kekerasan antar etnis di kota Sampit dan upaya-upaya menghambat pengembalian masyarakat Madura ke wilayah Kalimantan Tengah (ibid : 207-229)

Kerangka kerja (*framework*) Klinken dalam melihat kekerasan antara etnis dan agama ini secara inheren menolak pendekatan budaya (ibid : 31). Bagi Klinken ada beberapa varian dari pandangan budaya tentang kekerasan komunal yang kesemuanya tidak relevan, karena (1) memandang kecenderungan jangka panjang akan kekerasan sebagai berakar pada konfigurasi-konfigurasi sosial di Indonesia, (2) prasangka etnis di antara orang-orang yang dianggap belum modern, (3) politik intoleransi, (4) loyalitas klen dan (5) *stereotyping primordialis*.

Pandangan Klinken yang menganggap “pendekatan budaya” tidak relevan digunakan dalam memahami kekerasan komunal di Indonesia justru terletak pada cara Klinken memahami apa yang disebut dengan “pendekatan budaya” kedalam lima varian tersebut. Padahal “pendekatan budaya” dalam memahami kekerasan komunal ini tidak hanya berhenti pada lima varian tersebut. Pendekatan budaya dalam artian bagaimana proses-proses kesejarahan yang membentuk identitas suatu kelompok etnis atau agama karena adanya suatu ingatan kolektif terhadap peristiwa penting tertentu perlu dimaknai secara kultural. *Collective memori is shaping identity*.

Namun, walaupun Klinken tidak memberikan preferensi terhadap pendekatan kultural, Ia sendiri mengemukakan suatu pertanyaan seperti ini....

”mengapa mesti ada konflik komunal dari jenis etnis yang lebih besar di Kalimantan, dan dari jenis religius di daerah timurnya, tetap merupakan sebuah misteri bagi saya, selain hanya bisa mengakui bahwa masing-masing pola muncul dari sebuah sejarah panjang aktivitas organisasional” (ibid : 22).

Klinken mengakui belum mampu menjawab mengapa kekerasan antar etnis terjadi di Kalimantan (Tengah dan Barat), sementara kekerasan bernuansa agama terjadi di Poso, Ambon dan Maluku Utara. Argumentasi saya, kesejarahan pembentukan identitas yang terjadi di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah lebih didasarkan pada sentimen etnisitas dibandingkan dengan agama. Budaya Dayak *huma betang* yang merupakan simbol diterimanya semua agama dalam suatu rumah panjang mencerminkan agama bukanlah faktor pembeda yang penting bagi masyarakat Dayak. Dalam suatu rumah panjang, orang-orang Dayak yang ada disitu bisa saja beragama Kaharingan (agama lokal), Protestan, Katolik atau Islam.

Kerangka kerja yang diajukan oleh Klinken tentu saja mempunyai paradigma tersendiri dan tidak dapat diperbandingkan. Namun, proses memilih informan, mengambil data-data dan memilih fakta-fakta lapangan sebagai akibat dari paradigma yang dianutnya mengabaikan dinamika identitas yang ada pada suatu entitas. Pilihannya untuk melihat LMMDD KT sebagai aktor dalam kerusuhan Sampit telah mengabaikan berbagai faksi yang ada dalam organisasi masyarakat Dayak; atau bahkan faksi didalam LMMDD KT itu sendiri.

Demikian halnya dengan kondisi pasca kerusuhan, pendekatan gerakan sosial ala van Klinken ini tidak membuka ruang yang lebar untuk proses rekonsiliasi antara orang-orang Dayak dan Madura. Menurut pandangan teori ala Klinken, maka yang harus diselesaikan adalah permasalahan politik lokal yang ada di daerah tersebut. Namun, sebetulnya rekonsiliasi akar rumput, melalui sentiment kesejarahan antara orang-orang Dayak dan Madura terbuka lebar untuk dilakukan.

Penjelasan tentang kekerasan komunal di lima kota kecil Indonesia, khususnya Sampit dari ranah teori politik perseteruan (*the dynamics of contention*) ala Klinken ini, bagi saya kurang memuaskan. Terdapat empat alasan keberatan saya dengan teori tersebut.

Pertama, melihat etnisitas berwujud dalam organisasi politik, seperti penyebutan "organisasi Dayak" untuk menyebut LMMDD-KT, maupun "orang Madura". Padahal Dayak adalah suatu entitas majemuk yang didalamnya tercampur definisi etnis, agama, aliran sungai, bahasa hingga definisi politis. Demikian halnya dengan dinamika yang ada di kalangan LMMDD KT Kalimantan Tengah juga kurang terdalami dengan baik. Klinken banyak membahas tentang LMMDD KT secara keseluruhan, tetapi kurang memperhatikan para aktor yang ada di LMMDD KT Kotawaringin Timur, khususnya elite Dayak di kota Sampit. Demikian halnya dengan kelompok Madura, ---dalam pandangan Klinken-- hanya diperlihatkan sebagai sebuah kelompok tunggal, korban dan tidak kelihatan dinamikanya. Padahal, orang-orang Madura di Sampit mempunyai kesejarahannya masing-masing, termasuk asal daerah, tempat lahir, afiliasinya dengan organisasi ke-Madura-an, gender dan usia. Kesejarahan itu membentuk relasi-relasi tertentu dengan orang-orang Dayak di Sampit.

Kedua, bagi Klinken pandangan budaya dalam melihat kekerasan komunal hanya bersifat stereotype dan etnosentrisme saja. Seharusnya melihat dalam dinamika dan proses yang terjadi. Proses tersebut tidak selalu dominasi, melainkan berbagai tindakan-tindakan resistensi, strategi untuk adaptasi dan tindakan yang akomodatif dari para aktor dalam sebuah kejadian dalam suatu konteks temporal tertentu.

Ketiga, proses-proses memberikan label atau pandangan stereotype harus dipandang tentang bagaimana suatu relasi kekuasaan bekerja, sehingga bagaimana suatu ideologi suatu kelompok dapat melabel kelompok lain dalam suatu konteks temporal

tertentu akan menyumbang pemahaman yang lebih baik khususnya tentang pembentukan aktor seperti dalam kerangka teoritis Klinken itu dapat terjadi.

Keempat, kekerasan komunal bukanlah suatu puncak gunung es dari relasi-relasi hubungan antar etnis yang mendadak mengakibatkan terjadinya pembekuan identitas menjadi hanya dua pihak yang saling berhadapan, melainkan sebuah *event* dari berbagai dinamika hubungan antar berbagai etnis pada suatu setting tertentu. Sebuah kekerasan komunal dapat menjadi sebuah “jendela” untuk melihat lebih kedalam lagi dinamika hubungan antar etnis tersebut.

Berdasarkan keempat alasan tersebut diatas saya tidak sependapat dengan teori politik perseteruan ala Klinken dalam menjelaskan peristiwa kekerasan antar etnis yang terjadi di Sampit, karena mengabaikan berbagai dinamika penting yang terjadi pada kelompok-kelompok Dayak maupun Madura.

1.3. Masalah Penelitian

Penjelasan tentang kekerasan antar etnis yang menggunakan teori perseteruan politik diantara elite-elite dari kelompok etnis (Klinken, 2009; Varshney, 2002 dan Davidson, 2007) hanya menjelaskan tentang permasalahan struktural dari relasi antar etnis sebagaimana yang tergambar dari konflik antar organisasi berlatar belakang etnisitas. Dalam kasus kerusuhan Sampit diwakili oleh LMMDD KT sebagai representasi Dayak dan IKAMA sebagai representasi orang-orang Madura. Namun konteks kultural dan keseharian dari orang-orang Dayak dan Madura diabaikan dalam pendekatan struktural seperti ini. Penjelasan-penjelasan tentang kekerasan komunal hanya memberikan tekanan terhadap perseteruan dari kelompok-kelompok elite mempunyai kelemahan yang pokok, yaitu hanya melihatnya pada satu lapisan (*layer*) relasi yang ada, yaitu lapisan perseteruan antar elite. Relasi-relasi berupa interaksi keseharian antar etnis pada konteks waktu dan tempat tertentu kurang diberikan perhatian, atau bahkan diabaikan sama sekali.

Selain itu, penjelasan yang bersifat politik-ekonomi (Usop, 2009, *Down to Earth*, 2001) terlalu memberikan fokus pada peran negara yang dianggap gagal dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika menjelaskan kaitan antara penyebab kekerasan antar etnis dan pemicu terjadinya kekerasan tersebut, penjelasan dari pendekatan politik-ekonomi ini tidak dapat mengkaitkannya secara langsung. Selain itu, dalam konteks pasca-kerusuhan --- *khususnya dalam proses rekonsiliasi*---, pendekatan politik-ekonomi tidak dapat memberikan solusi yang implementatif, selain menyerahkannya kembali kepada aktor negara untuk memainkan peranan.

Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara-wawancara yang dilakukan sebelumnya, terungkap bahwa orang-orang Madura yang sebelumnya mengungsi saat kerusuhan Februari 2001, sebagian besar telah kembali ke kota Sampit. Gelombang kembali orang Madura-Sampit mulai terasa sejak tahun 2003. Walaupun pada awal tahun 2002 sebetulnya telah ada orang-orang Madura-Sampit yang kembali dalam jumlah yang kecil. Kembalinya orang-orang Madura ke kota Sampit relatif berbeda dengan situasi yang terjadi di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu pelarangan orang Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas hingga hari ini. Padahal kekerasan antar etnis yang terjadi adalah antara orang-orang Melayu dengan Madura yang mempunyai faktor kesamaan sebagai pemeluk agama Islam. Selain itu, kekerasan antar etnis di kota Sampit dianggap tidak mempunyai latar belakang sejarah yang kuat seperti halnya di Kalimantan Barat yang telah terjadi kekerasan antar etnis sejak tahun 1950-an. Kekerasan antar etnis di Sampit pada bulan Februari 2001 dalam pandangan sejarah merupakan suatu “interupsi” dari kesinambungan sejarah hubungan antar etnis Dayak dan Madura di Sampit sejak sekitar tahun 1920-an. Sedangkan pandangan yang bersifat Antropologis akan melihatnya bagaimana struktur hubungan Dayak dan Madura yang telah terbangun sejak lama di kota Sampit terganggu dengan peristiwa tersebut, sehingga relasi tersebut perlu ditata-ulang oleh orang-orang Madura yang baru kembali dari pengungsian.

Disertasi ini terinspirasi oleh situasi pasca kerusuhan Sampit, khususnya kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat etnis Dayak dan Madura melalui ingatan-ingatan mereka tentang relasi-relasi yang pernah, sedang dan yang dibayangkan akan terjadi pada masa depan. Ingatan-ingatan yang terekam dalam benak orang-orang Dayak dan Madura terkait dengan kerusuhan adalah ingatan yang terseleksi, karena dalam keseharian ada ingatan-ingatan yang terus-menerus diingat dan yang dilupakan untuk kepentingannya hidup dalam suatu komunitas.

Terinspirasi oleh pemikiran dari Maurice Halbwach (1992 : 34) yang mengatakan konsepsi tentang masa lalu akan berakibat pada *mental image* yang kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa sekarang. Oleh sebab itu ingatan kolektif secara mendasar adalah sebuah rekonstruksi tentang masa lalu dalam nuansa kekinian. Namun, selalu terdapat proses yang dialektis antara konstruksi-dekonstruksi-rekonstruksi tentang peristiwa masa lalu. Imajinasi relasi Dayak-Madura sebelum kerusuhan telah memberikan konstruksi absennya konflik antara orang-orang Dayak dan Madura sejak mendaratnya orang-orang Madura di tanah Sampit pada tahun 1920-an. Namun kejadian kerusuhan pada bulan Februari 2001 telah mendekonstruksi relasi-relasi tersebut, dan memperlihatkan betapa rawannya relasi antara orang-orang Dayak dengan Madura. Kemudian, pasca kerusuhan adalah suatu proses dimana orang-orang Dayak dan Madura merekonstruksikan kembali relasi-relasinya tersebut.

Oleh sebab itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mencoba memahami relasi antar etnis, khususnya Dayak-Madura di kota Sampit, melalui narasi-narasi ingatan yang dibangun oleh para informan kunci terkait dengan ingatan-ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap penting oleh mereka dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, ingatan atau catatan dari pihak lain yang terkait dengan relasi antar etnis di kota Sampit menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam merekonstruksikan hubungan antar etnis Dayak-Madura di kota Sampit.

Relasi antar etnis yang diteliti hanya fokus pada Dayak dan Madura dalam ruang dan waktu tertentu. Relasi kedua etnis ini tentunya tidak dapat mengasingkan kerangka relasi yang lebih luas dengan berbagai kelompok etnis lainnya, seperti Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Cina dan lainnya. Fokus pada Dayak dan Madura karena dalam peristiwa kekerasan antar etnis tersebut lebih banyak melibatkan kedua etnis tersebut. Selain itu, penelitian ini tentunya mempunyai keterbatasan-keterbatasan waktu untuk melakukan eksplorasi terhadap etnis lainnya di kota Sampit.

Relasi antar etnis Dayak dan Madura berkaitan dengan reposisi kultural orang-orang Madura yang baru kembali dari pengungsian, suatu proses penataan-ulang hubungan kesejarahan yang terinterupsi oleh kejadian kekerasan antar etnis pada Februari 2001. Proses dimana orang-orang Madura melakukan format ulang identitasnya agar dapat diterima kembali dalam ruang publik kota Sampit. Karena kerusuhan telah menenggelamkan berbagai identitas orang-orang Madura, seperti permukiman, organisasi ke-Madura-an, seni pertunjukan, kuliner, nama jalan, nama wilayah, dan sebagainya.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana relasi-relasi antar etnis Dayak dan Madura dalam pandangan kelompok masyarakat biasa (*ordinary peoples*) atau sejarah orang biasa. Penelitian ini hendak mengungkapkan suara-suara yang sementara tersembunyi dari liputan pers maupun studi yang memberikan tekanan kepada permasalahan kelompok elite. Penelitian mencoba merekam narasi-narasi dari masyarakat biasa. Narasi-narasi tentang bagaimana dinamika relasi antar etnis ini terjadi dalam konteks ruang dan waktu tertentu.

Beberapa pertanyaan penelitian yang dapat memberikan fokus terhadap penelitian ini adalah :

- Bagaimana hubungan antar etnis Dayak dan Madura sebelum terjadinya peristiwa kekerasan antar etnis di kota Sampit ?
- Bagaimanakah peristiwa kekerasan antar etnis berakibat pada penghilangan identitas orang-orang Madura di kota Sampit ?
- Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Madura pasca kekerasan antar etnis agar dapat kembali meneruskan kehidupannya di kota Sampit ?

Tujuan penelitian ini dalam kerangka akademis adalah suatu *exercise* penggunaan konsep historisitas, ingatan kolektif, identitas dan etnisitas dalam ranah Antropologi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pandangan-pandangan yang sebelumnya ada terkait dengan studi-studi tentang kekerasan komunal bernuansa etnis, agama maupun kepentingan golongan tertentu. Penelitian ini ini diharapkan dapat memperkaya pandangan tentang hubungan antar etnis yang selama ini lebih banyak didominasi oleh teori-teori gerakan sosial (*social movement*) dan teori politik-ekonomi lainnya. Dengan meminjam pendekatan sejarah dalam Antropologi, diharapkan hasil studi ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang pernah mengalami situasi kekerasan komunal dapat meneruskan kembali hidupnya di wilayah pasca-konflik

Sedangkan untuk tataran yang lebih praktikal, diharapkan studi ini dapat memproduksi pengetahuan yang dapat dijadikan dasar-dasar untuk melakukan *peace building* di kawasan pasca konflik di kota Sampit dan daerah lainnya di Indonesia.

1.4. Kerangka Teoritis :

Kesejarahan, Ingatan Kolektif, Identitas dan Etnisitas

Kesejarahan atau kesadaran sejarah merupakan pembentuk imajinasi mental dari tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Selain itu, kesejarahan melalui ingatan

kolektif dapat menjadi pembentuk identitas, seperti identitas etnis, agama, kesadaran ras dan golongan tertentu. Kesejarahan dapat dibedakan secara konseptual dengan sejarah. Kesejarahan bukanlah berasal dari rangkaian peristiwa yang bersifat kronologis, melainkan bisa saja dua atau tiga kejadian yang secara sejarah berkaitan walaupun dalam tahun-tahun yang berbeda. Hal ini berbeda dengan pendekatan sejarah yang merupakan deskripsi linear tentang peristiwa yang dipahami dalam sebuah skema yang kronologis (Arnet, 2002 : 503)

Kesejarahan, Ingatan Kolektif, Identitas dan Etnisitas merupakan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Keempat konsep tersebut dapat didefinisikan sendiri-sendiri, namun dalam penelitian ini dilihat sebagai hubungan yang bersifat saling menjelaskan. Kesejarahan dan ingatan kolektif dapat menjadi medium untuk melihat bagaimana proses dan struktur pembentukan identitas etnis dapat terjadi.

Karena kesejarahan pada intinya adalah suatu kesadaran sejarah tentang bagaimana seperangkat model-model kebudayaan yang mengatur atau menentukan tindakan sosial (Escobar, 1992 : 404). Model-model kebudayaan tersebut merupakan dinamika dari tradisi dan modernitas, dominasi dan resistensi; sama halnya dengan artikulasi wacana dalam isi kebudayaan, dan pemantapan keteraturan sosial dan budaya.

Walaupun aspek temporal penting untuk memahami bagaimana suatu model-model kebudayaan hidup dalam suatu konteks ruang dan waktu tertentu, namun aspek temporal itu tidak memperbandingkan antara situasi pada masa kini dan masa lalu. Oleh sebab itu, pandangan I Schapera yang mengkontraskan Antropologi dengan Sejarah, dimana Sejarah adalah “the social past” sedangkan Antropologi adalah *the social present* (1962) tampaknya dapat ditolak, mengingat dalam konsep historisitas jarak spasial dan temporal seolah melebur.

Argumentasi konseptual yang ingin ditampilkan dalam disertasi ini adalah bagaimana memahami faktor kesejarahan (*historisitas*) dalam penelitian-penelitian Antropologi, khususnya penelitian yang terkait dengan masyarakat pasca konflik. Faktor kesejarahan yang dimaksud adalah narasi-narasi yang diceritakan oleh orang-orang biasa tentang hal-hal yang terkait dengan dinamika hubungan antar etnis, termasuk pasang-surut hubungan yang menimbulkan situasi konfliktual dan kooperatif yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu. Pada tingkat yang lebih praktikal, narasi-narasi inilah yang diharapkan dapat menjadi jembatan dari upaya-upaya *peace building* pada wilayah pasca konflik, khususnya konflik antar etnis, termasuk menjelaskan siapa yang paling bertanggung-jawab terhadap proses-proses tersebut, serta peran institusi lainnya.

Penelitian ini akan menggunakan konsep kesejarahan, karena aspek temporalitas (waktu) masa lalu penting untuk melihat kaitan suatu kejadian dengan peristiwa-peristiwa lainnya pada suatu waktu tertentu yang membentuk *mental image* yang menjadi referensi dari suatu tindakan. Namun yang dipentingkannya bukanlah kronologi kejadian, melainkan jaringan keterkaitan antar kejadian yang dibentuk oleh kondisi kultural yang terjadi pada suatu konteks waktu dan tempat tertentu. Misalnya, peristiwa perkelahian antara dua orang dari dua etnis yang berbeda tidak akan mempunyai akibat yang lebih kompleks apabila situasi politik lokal diantara kedua kelompok etnik tersebut tidak dalam kondisi konfliktual.

Walaupun secara akademik, pengertian sejarah dan kesejarahan ini dapat dibedakan, namun dalam beberapa bagian penulisan disertasi ini, pengertian sejarah dalam artian penulisan peristiwa penting dalam kronologis waktu tertentu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, khususnya untuk memahami keterkaitan suatu peristiwa dari sisi hubungan sebab akibatnya.

Kesejarahan (historisitas)

Historisitas dalam Antropologi dapat dimanifestasikan dalam sebuah ragam sejarah yang disebut dengan “sejarah sebagaimana yang diingat” atau oleh para ahli antropologi dan sosiologi biasa disebut dengan memori kolektif (Lewis, 2009 : x). Sejarah dalam pengertian memori kolektif, lebih banyak berupa pernyataan tentang masa lalu atas dasar apa yang diingat. Sedangkan ingatan itu sendiri bekerja melalui proses seleksi atas apa yang dianggap bermakna. Bisa juga ditambahkan bahwa makna itu dibangun dari proses identifikasi diri (*self identification*) secara kolektif dalam relasinya dengan siapa yang dianggap sebagai *the other*. Pendeknya ada hubungan mutualis antara memori dan identitas (ibid).

Ingatan Kolektif dalam perspektif Halbwach adalah sebuah rekonstruksi tentang masa lalu dalam nuansa kekinian (Halbwach 1992 : 34). Konstruksi pemikiran versi Halbwach ini menegaskan tentang pentingnya peran individual dalam membentuk suatu ingatan kolektif. Bagi Kansteiner, ingatan kolektif bukanlah sejarah, walaupun terkadang mengambil dari material yang sama. Ia merupakan fenomena kolektif, tetapi hanya nampak dalam tindakan dan pernyataan dari individu (Kansteiner 2002 : 180). Ingatan kolektif merupakan kumulatif dari narasi-narasi personal, kemudian narasi personal yang mempunyai kesamaan itulah yang ditransmisikan menjadi ingatan kolektif.

Dalam penelitian tentang ingatan kolektif ini jumlah individu yang ditampilkan sebagai subyek atau informan dalam penelitian tidak didasarkan pada besaran jumlah informan yang diwawancarai, karena yang dipentingkannya adalah kedalaman kualitas dari ingatan-ingatan tersebut dan bukan jumlah orang yang mengatakannya. Selain itu berdasarkan studi psikologis dan sistem saraf (ibid : 185) tidak terdapat perbedaan mendasar antara ingatan individu dan kolektif, karena dalam penelitian tersebut ditemukan suatu keinginan yang wajar seorang individu itu mengenang atau melupakan suatu peristiwa. Demikian halnya dengan tingkatan kemampuan sistem saraf untuk menyimpan, memanggil ulang dan menggambarkan pengalaman verbal dan non-verbal tidak dapat dipisahkan dari pola-pola dan persepsi dimana kita dari

lingkungan sosial terdekat. Pola-pola bahasa dan narasi yang kita gunakan untuk mengekspresikan ingatan, bahkan auto-biografi tidak dapat dipisahkan standar-standar sosial tentang plausibilitas dan otentisitasnya.

Dalam ranah penelitian Antropologi, tinjauan tentang kekerasan antar etnis yang memberikan penekanan pada aspek kesejarahan dari etnis-etnis yang bertikai relatif belum banyak dilakukan. Namun beberapa penelitian telah mencobanya dengan menitik-beratkan pada konsep ingatan baik kolektif maupun individu. Seperti Lian Gogali untuk Konflik Poso (2009) dan Wahyudi Akmaliah Muhammad untuk peristiwa Tanjung Priok (2009)

Konsep lain yang masih serumpun dengan pendekatan Antropologi yang mempunyai perspektif sejarah (*historical Anthropology*), terlihat dalam penelitian Ann Stoller di perkebunan Sumatra (Stoller, 2005). Bagi Stoller etnografi tidak hanya membicarakan kekinian (*ethnography of the present*. Stoller menuliskan bahwa...

”apabila sekarang saya pikir kembali justru proses sejarah ini yang terkandung dalam proses konstruksi sosial yang mendorong analisa saya menggunakan sumber-sumber sejarah bukan hanya untuk memperkuat argumen-argumen saya tentang masa kini tetapi untuk mempertanyakan langsung jenis-jenis pengetahuan kultural yang menjadi dasar narasi sejarah Sumatera...” (Ibid : xii).

Pandangan ini mirip dengan konsepsi Escobar tentang historisitas. Namun, Stoller tidak secara eksplisit menggunakan konsep historisitas, ia tetap setia dengan konsep histori (sejarah). Mengutip William Rosebery (1988 via Stoller, 2005) ia tampaknya sepakat untuk menggunakan konsepsi “sejarah kultural”. Karya Antropolog Indonesia yang secara eksplisit menggunakan konsep historisitas ini adalah tentang relasi kekuasaan pada kerajaan Buton (Rudyansjah, 2009).

Posisi teoritis saya dalam melihat pendekatan sejarah yang digunakan dalam Antropolog, bukanlah pada pengertian sejarah dalam ranah evolusionisme, makro

dan komparatif seperti yang dibayangkan oleh pemikiran-pemikiran evolusionis, difusionis, maupun fungsional-struktural. Posisi pemikiran saya berada dalam ranah melihat kesejarahan dalam konteks mikro dan cultural. Sehingga kesejarahan yang saya bayangkan adalah bagaimana kondisi kultural yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu akan memproduksi interaksi yang berbeda-beda diantara kelompok-kelompok yang ada pada suatu komunitas. Kondisi kultural ini bisa saja terbentuk melalui berbagai ingatan kolektif yang ditransformasikan melalui medium lisan maupun hadir dalam bentuk berbagai artefak yang berbentuk monument (misalnya bekas-bekas pabrik industri kayu, monument mengenang kekerasan antar etnis dan sebagainya).

Karya-karya Antropologi yang mempunyai nafas sejarah telah banyak dilakukan. Menurut William Roseberry, sedikitnya terdapat tiga varian yang berbeda untuk melihat kajian Antropologi yang menggunakan bingkai sejarah atau "*anthropology's engagement with history*", yaitu Clifford Geertz, Marshall Sahlins dan Eric Wolf (Roseberry, 1989). Dalam pandangan Roseberry, pemikiran Clifford Geertz tentang sejarah tidak dapat dipahami dengan mengacu pada hukum-hukum keberlakuan umum, oleh sebab itu Geertz mengkritik para pemikir positivist yang tidak mampu untuk menangani masalah pemaknaan dan tindakan. Bagi Geertz tugas dari ahli antropologi dan sejarah harus mampu menginterpretasi sistem pemaknaan manusia yang melatar-belakangi tindakannya. Dengan demikian terminologi sejarah dan kebudayaan sedikitnya saling berhubungan. Namun dalam karya-karya Geertz, keduanya agak sinonim. Sebuah masalah atau tindakan praktis adalah bersifat sejarah berarti merupakan situasi yang bersifat kultural, demikian sebaliknya. Konsep kebudayaan dari Geertz, yaitu kebudayaan merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis (Geertz, 1973 via Abdullah 2006 : 1), semakin memperkuat pandangan bahwa pemikiran Geertz tentang kebudayaan bersifat historis. Namun, aspek kesejarahan dari kebudayaan ini merupakan bahan diskusi

yang belum selesai karena dinamika didalam pengertian dan makna belum menjadi wilayah diskusi kebudayaan secara mendalam (ibid).

Menurut Rosebery (Ibid), pandangan Marshal Sahlins tentang kebudayaan dan sejarah tampaknya secara virtual sinonim, namun dalam melihat relasi ini pandangan Sahlins berbeda dengan Geertz. Bagi Sahlins, posisi sejarah adalah *...seen as a processes in which conceptual scheme informs practice and practice transforms the conceptual scheme* (ibid : 8).

Masih menurut Rosebery, Erick Wolf mempunyai perspektif yang berbeda dalam melihat relasi antara sejarah dan kebudayaan dibandingkan Sahlins dan Geertz. Pandangan yang berbeda ini dapat menjadi semacam kritik terhadap pandangan-pandangan dari Sahlins dan Geertz yang lebih struktural dan simbolik. Bagi Wolf, sejarah dipandang sebagai suatu proses-proses material-sosial yang ditandai oleh ekonomi dan ketimpangan politik dan dominasi, dan oleh transformasi yang tidak hanya dalam terminologi kultural tetapi didalam keseluruhan keteraturan sosial. Dalam konteks ini, sejarah tidak sesederhana sebagai penanda perbedaan konteks kebudayaan, walaupun tercakup didalamnya. Sejarah juga harus diperlakukan untuk melacak koneksi diantara berbagai keteraturan kebudayaan didalam konteks global, berkembang tidak merata tetapi suatu proses sosial yang menyatu. Kritik yang ingin diajukan oleh Wolf adalah pandangan ketatnya *boundary* didalam studi Antropologi, yaitu hanya melihat masyarakat dan kebudayaan didalam suatu batas-batas teritorial sebuah “desa”.

Pemikiran lainnya untuk melihat Antropologi dan Sejarah adalah melalui konsep temporalitas. Konsep ini berbeda dengan kronologi maupun periodisasi dalam sejarah. Menurut Johannes Fabian (dalam Saifuddin, 2005 : 38-39) salah satu konsep penting dari temporalitas adalah jarak temporal yang disebut *allochrony*. Konsep ini merujuk pada pengertian cara dimana populasi-populasi yang menurut urutan kronologis eksis pada masa yang sama (artinya mereka sinkron), ditanggapi (dilihat)

dalam periode temporal yang berbeda. Sebagai lawan dari alokronik adalah *coevalness*, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tahap kemajuan kebudayaan, namun hidup pada zaman yang sama.

Salahsatu point penting dari pemikiran Fabian antara lain penggunaan "*past*" dan "*present*" dari waktu sebagai jalan untuk mengkonstruksikan dari obyek disiplin Antropologi yang berbingkai sejarah. Tetapi Fabian mengkritik cara pikir ahli sejarah yang tidak menyadari bahwa fakta-fakta sejarah bukan sesuatu yang obyektif, sebab "kita" itulah yang menyeleksi fakta-fakta sejarah itu sendiri.

Pentingnya jarak temporal dalam studi antropologi diperlihatkan dalam sebuah studi etno-histori tentang koperasi pembuat wine Perancis (Ulin, 1996). Untuk menggambarkan koperasi ini dalam bayang-bayang sejarah perlu diperlihatkan bagaimana masa lalu membentuk stratifikasi kelas dan hierarki yang terjadi pada masa kini. Dalam hal ini perlu dilihat proses-proses mediasi yang terjadi untuk membuka apa yang tersembunyi pada masa lalu. Pertanyaan ini berkaitan dengan isu representasi dan kekuasaan. Menurut Said (via, Ulin 1996 : 16) sarjana barat mempresentasikan ketimuran dalam terminologi yang homogen dan eksotis. Sedangkan bagi Fabian, membawa kita pada jantung pertanyaan antropologis, yaitu bagaimana "*the other*" telah ditolak temporalitasnya, sehingga memungkinkan kita mengakui masyarakat asli sebagai kekitaan yang temporer. Pendekatan Fabian adalah mempertanyakan bagaimana konstruksi Antropologi sebagai ko-subyek dari pengetahuan melalui sebuah survey kesejarahan melalui cara fikir Eropa.

Kesejarahan yang saya maksudkan lebih bertumpu kepada pemahaman dari masyarakat biasa, dan bukan kalangan elite seperti yang dibayangkan oleh van Klinken. Masyarakat biasa adalah mereka yang diperintah dan bukan memerintah; mereka ditentukan dan bukan yang menentukan. Kemudian Marks (1989) seperti dikutip oleh Comarrof and Comarrof (1991), menyatakan tentang berkembangnya perhatian dalam historiografi yang memberikan tekanan pada *the changing*

experience of ordinary people, khususnya dalam studi tentang pengalaman kalangan masyarakat kulit hitam (*black*) yang tidak terepresentasikan dalam kekuatan kolonial dan kontrol-kontrol yang dilakukannya. Kemudian (Comarrof and Comarrof 1991) melihat hal ini sebagai suatu kemungkinan untuk menuliskan sebuah antropologi kesejarahan tentang kolonialisme di Afrika bagian selatan yang melihat pentingnya seluruh pemain dalam sebuah "permainan", motivasi apa yang mengendalikan mereka, kesadaran apa yang memberikan informasi kepada mereka dan kendala-kendala apa yang membatasi mereka

Identitas

Kesejarahan dan identitas adalah dua konsep yang saling mempengaruhi. Tesis *memory is shaping identity* dapat ditemukan pada berbagai kasus-kasus kekerasan yang bernuansa etnis, agama dalam golongan-golongan tertentu. Ingatan-ingatan tentang peristiwa yang traumatis biasanya menebalkan perasaan sebagai bagian atau diluar bagian dari suatu kelompok, karena identitas pada dasarnya membicarakan tentang perasaan seorang tentang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat umum (Benda Beckman dalam Ramstedt dan Thufail, 2010). Identitas itu bersifat majemuk, dan bahwa taraf kepentingan suatu identitas tidak harus meniadakan kepentingan identitas lainnya. Dalam diri seseorang menempel berbagai identitas, seperti identitas etnis, identitas agama, dan identitas kelompok profesi tertentu. Namun, seseorang harus mengambil pilihan--- *secara tegas ataupun tidak* -- mengenai kepentingan relatif manakah yang harus diberikan, sesuai konteksnya, diantara berbagai kesetiaan dan prioritas yang mungkin saling berebut untuk diutamakan (Sen, 2007 : 27). Misalnya seorang warga Madura yang baru kembali dari pengungsian, ia adalah seorang Madura sekaligus warga kota Sampit. Ketika berhadapan dengan pilihan untuk dapat meneruskan hidupnya di kota Sampit, ia harus memilih apakah akan memperkuat identitas etnisnya sebagai orang Madura, atau ia lebih membaurkan dirinya sebagai warga kota Sampit dengan cara lebih menggunakan bahasa pasar yang digunakan di kota itu.

Selain identitas yang bersifat individual, dalam kenyataannya terdapat suatu identitas yang bersifat kolektif (Donahoe, et.al 2009 : 2). Ia adalah sebuah bentuk representasi yang mengandung – *atau tampaknya mengandung* —panggilan normatif pada responden potensial dan memberikan responden itu sebuah cara untuk memahami diri mereka sendiri, atau cara untuk dipahami, sebagai bagian dari pengelompokan yang lebih besar atau sebagai anggota didalam sebuah kelompok dalam perbedaannya dengan kelompok lain.

Kaitan antara identitas dengan kekerasan komunal dalam pandangan Amartya Sen ternyata identitas dapat memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia. Rasa keterikatan yang kuat (dan eksklusif) pada suatu kelompok bisa mengandung didalamnya persepsi tentang jarak dan keterpisahan dari kelompok lain. Kesetiakawanan kelompok bisa memicu tumbuhnya perselisihan antarkelompok (Sen, 2007 : 4)

Dengan mengutip tulisan Elizabeth Cashdan (2001), Amartya Sen mengatakan bahwa kekerasan yang terkait dengan konflik identitas tampaknya terjadi berulang kali di seluruh penjuru dunia dan berkembang terus-menerus. Keterikatan etnis, religious, rasial atau keterikatan-keterikatan selektif lainnya telah dimanfaatkan secara berlebihan untuk mengobarkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok lain.

Etnisitas

Relasi antar etnis merupakan suatu tema yang sangat luas, karena itu definisi operasional yang saya maksudkan disini lebih fokus pada konflik bernuansa etnis. Namun pendekatan terhadap pengertian konflik etnik inipun merentang mulai dari pendekatan budaya, institusi, hingga politik persetujuan (Klinken, 2007). Oleh sebab itu, saya akan memulainya dari beberapa tulisan yang terkait dengan etnis, identitas etnis maupun etnisitas. Relasi antar etnis, termasuk masalah konflik etnis dalam

pengertian-pengertian yang khusus sangat terkait dengan aspek etnisitas. Etnisitas merupakan sentimen primordial (Geertz, 1973), mencakup perbedaan yang askriptif (Horowitz 2000), kategori politik, budaya dan sejarah (Hall, 1991.), bentuk pengorganisasian sosial yang terjadi karena adanya interaksi sosial (Barth, 1988)

Dari beberapa pemikiran yang mencoba melihat persoalan etnisitas (termasuk identitas etnik) ini, saya mencoba untuk melihat dari pemikiran Geertz, Horowitz, Hall, Barth, dan van Klinken (2007). Geertz dan Klinken dapat mewakili pandangan-pandangan tentang studi di Indonesia walaupun dalam kurun waktu yang berbeda. Sementara itu Hall memperlihatkan sisi pemikiran kesejarahan yang kuat. Sedangkan Horowitz melihatnya dalam konteks ciri-ciri askriptif. Geertz melihat etnisitas sebagai persoalan sentimen primordial, dengan demikian etnisitas dibentuk oleh berbagai sentimen primordial seperti kekerabatan, agama dan bahasa. Walaupun Geertz sendiri tidak menekuni studi-studi konflik antar etnik secara mendalam, tetapi dari posisinya melihat bahwa etnisitas dibangun atas sentimen primordial, maka sebetulnya bibit konflik antar etnis dapat terjadi karena adanya dorongan pembentukan identitas etnis akibat berkembangnya parokialisme, komunalisme dan rasialisme. Implikasi metodologis dari posisi teoritis Geertz yang dikenal dengan interpretasi-simbolik ini adalah “unit analysis” yang bersifat komunitas dalam upayanya melihat simbol-simbol yang disepakati bersama sebagai suatu “kebudayaan” oleh masyarakat.

Sedangkan Donald Horowitz yang dikenal dengan bukunya yang menjadi rujukan untuk studi konflik etnik, yaitu *Ethnic Group in Conflict* (2000) melihat faktor-faktor yang bersifat *ascribed*, seperti ras, bahasa, agama, tribalitas, nasionalitas dan kasta menjadi pembentuk etnisitas. Oleh sebab itu, konflik etnis kerap kali muncul karena faktor-faktor tersebut. Sepintas pendapatnya ini mirip dengan Geertz, namun pada dasarnya berbeda, karena dalam pandangan Horowitz konflik terjadi karena adanya pembagian kerja secara budaya, yang menempatkan posisi-posisi politik dan ekonomi dikarenakan posisi-posisi ras, agama dan kasta. Pendekatan ini mirip dengan

Ashutosh Varshney ketika membicarakan Hindu dan Muslim di India (Varshney, 2002)

Sedangkan Stuart Hall (1991) melihat definisi etnisitas sebagai sebuah kategori politik, budaya dan sejarah. Ketika kita mendengar kata "etnis Cina" dalam kasus Indonesia, maupun "black" dalam kasus Amerika, hal ini bukan semata-mata masalah biologis, melainkan terdapat suatu konstruksi politik, budaya dan sejarah yang sangat mendalam, seperti halnya label yang diberikan dalam konsepsi tentang "Dayak", dan berbagai kelompok etnis lainnya di Indonesia. Karena pendekatannya dipengaruhi oleh Gramsci (Milosevic 2004), maka untuk melihat konstruksi-konstruksi tersebut perlu dilakukan pembongkaran (dekonstruksi) mengenai bagaimana konstruksi-konstruksi politik, budaya dan sejarah ini dibangun. Pendekatan Hall ini relatif dekat dengan bayangan saya tentang konstruksi etnisitas yang akan saya teliti, karena saya meyakini bahwa penamaan etnis pun seringkali merupakan hasil pelabelan dari kelas atau kelompok tertentu yang dilekatkan kepada kelompok-kelompok tertentu lainnya. Misalnya, istilah Dayak itu sendiri menjadi kategori politik untuk menyebut etnik asli di Kalimantan yang non-Muslim (Maunati, 2004). Padahal dalam kenyataannya mereka yang dilabel sebagai orang Dayak banyak yang beragama Islam, khususnya untuk kasus Kalimantan Tengah. Sebaliknya, masyarakat tidak menyebut dirinya sebagai Dayak, melainkan berdasarkan sebutan Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Kapuas, Barito, dan Kahayan. Bahkan mengidentifikasi diri berdasarkan nama kampungnya.

Sedangkan pemikiran Frederick Barth (1988) melihat bahwa etnisitas dibentuk melalui interaksi sosial, sehingga disinilah lahir konsep *ethnic boundary*. Barth melihat bahwa konflik antar etnik terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan alat produksi yang mempengaruhi hubungan antar etnik. Pendapat Barth yang melihat bahwa kesadaran etnisitas muncul sebagai akibat dari interaksi sosial sejalan dengan bayangan saya tentang relasi antar etnis di kota Sampit. Karena kesadaran identitas seorang Dayak akan menebal, justru ketika ia berhadapan dengan orang bukan

Dayak. Apalagi apabila terjadi rivalitas antar etnik seperti perebutan jabatan politik di tingkat kabupaten, maupun perebutan proyek-proyek konstruksi di pemerintah daerah.

1.5. Penelitian-penelitian Terdahulu tentang Kekerasan antar Etnis di Sampit

Dalam bagian ini akan digambarkan studi-studi yang pernah dilakukan terkait dengan masalah kekerasan antar etnis yang terjadi di Sampit. Namun, selain mempelajari “teks” dalam bentuk isi tulisan dari penelitian-penelitian tersebut, saya ingin mendalami “konteks” dari penelitian-penelitian tersebut, termasuk untuk apa dilakukan penelitian dan siapa yang melakukan penelitiannya, serta kapan dilakukan penelitian-penelitian tersebut. Saya sempat melakukan wawancara tentang proses penelitian hingga penulisan untuk beberapa penelitian yang akan dibahas dibawah ini. Saya tertarik mendalami bagaimana tantangan-tantangan yang dialami oleh peneliti sebelumnya dalam melakukan studi yang terkait dengan kekerasan antar etnis, yang tentunya melibatkan permasalahan identitas dari yang diteliti, maupun yang melakukan penelitian. Bagi saya, sangat menarik untuk mencermati bagaimana studi mengenai identitas ini dan mempertanyakan penempatan posisi (*positioning*) dari masing orang atau pihak yang melakukan studi ini. Persoalan *self* atau kedirian dari para peneliti (*author*) menjadi determinan dalam melakukan *positioning* itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam bagian ini, selain akan menampilkan karya-karya tulisnya, berbagai latar belakang biografi dari si penulis (*bio note*) menjadi penting untuk diketahui dalam mendudukannya dalam kontekes tertentu tulisan mereka.

1.5.1. Pembentukan Aktor

Sarjana asing yang secara intens mendalam konflik kekerasan di Indonesia dan di Sampit khususnya adalah Garry van Klinken. Tulisan-tulisannya yang secara khusus membahas konflik kekerasan, baik bernuansa etnis maupun agama telah menjadi

referensi dari banyak kalangan⁸. Sebagai seseorang yang mendalami Indonesia dalam hal politik lokal dengan pendekatan sejarah (Ia dilabel dengan sebutan Sosiologi-Sejarah), van Klinken banyak menggunakan arsip-arsip pada masa colonial, arsip-arsip gereja dan kliping-kliping surat kabar yang ekstensif. Selain itu menggunakan teknik wawancara langsung dan mendatangi tempat-tempat dimana kejadian berlangsung. Salahsatu rumor tentang Klinken yang dikaitkan dengan masalah kekerasan antar etnis di kota Sampit adalah kemarahan dari Prof.KMA Usop, ketua presidium LMMDD KT kepada Klinken, karena dalam salah satu artikelnya Klinken menulis bahwa Prof KMA Usop adalah aktor intelektual dari kerusuhan Sampit⁹. Ketika Klinken bertemu dengan saya di Pontianak dalalam suatu kesempatan dia mengatakan tidak pernah mendengar kemarahan itu, dan hubungannya dengan Prof KMA Usop baik-baik saja.

Model penulisan Klinken yang memberikan fokus kepada perilaku aktor dalam politik lokal, membuatnya harus menyebutkan nama seseorang dan organisasinya dengan jelas. Kemudian ia menuliskan berbagai temuan (*evident*) untuk mendukung pernyataannya untuk menunjukkan bahwa sesuatu peristiwa, termasuk kekerasan antar etnis adalah suatu tindakan yang bersifat terorganisasi dan bukanlah peristiwa kebetulan belaka. Namun, Klinken menekankan pentingnya memahami berbagai peristiwa kesejarahan yang mengkaitkan dan membentuk para aktor tersebut. Klinken secara tegas menunjukkan pembelaannya terhadap sebuah pendekatan yang disebutnya *Dynamic od Contention (DoC)* atau terjemahan harfiahnya adalah Dinamika politik seteru. Dalam DoC ini ada lima langkah yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami bagaimana “politik perseteruan” ini dapat dibedah, yaitu

⁸ Lihat, Van Klinken dalam buku *Perang Kota Kecil*, yaitu Bab 8 berjudul “Pembentukan Aktor di Kalimantan Tengah” (halaman 207-229). Serta sebuah artikel yang berjudul *Colonizing Borneo : State-Building and Ethnicity in Central Kalimantan* (halaman 1-24) menjadi referensi dari disertasi ini untuk memahami konteks sejarah pembentukan propinsi Kalimantan Tengah dan peran-peran elite Dayak didalamnya. Kemudian informasi mengenai perusahaan kayu Belanda, NV BHD disarikan secara padat oleh Klinken didalam tulisannya.

⁹ Walaupun teks asli dalam bahasa Inggrisnya berbunyi...”*The Dayak warriors, meanwhile, had a new hero. He was Professor KMA Usop, who declared: ‘We have won the war... If they ever come back they will face the same treatment.*

pembentukan identitas, eskalasi, polarisasi, mobilisasi dan pembentukan aktor. Bukunya yang berjudul “Perang Kota Kecil” ini adalah upayanya untuk menjelaskan kaitan konseptual dengan temuan empiris kekerasan sosial di lima kota, Pontianak, Ambon, Poso, Maluku Utara dan Sampit (Kalimantan Tengah). Khusus untuk Sampit, dengan menggunakan konsep pembentukan aktor kolektif, pada akhirnya Klinken mengambil kesimpulan tentang keterlibatan LMMDD KT, dimana Prof KMA Usop menjadi ketuanya pada saat itu.¹⁰ Sebagai suatu tulisan akademik, karya-karya van Klinken telah menjadi rujukan untuk diskusi tentang peristiwa kerusuhan di kota Sampit dan latar belakang sejarah dan politik lokalnya. Namun, posisi Klinken sebagai “sarjana asing” yang menulis dalam bahasa Inggris membuat karya-karyanya tidak terlalu banyak dibaca oleh kalangan elit Dayak di Kalimantan Tengah, sehingga kecaman terhadap dirinya relatif tidak terlalu hebat.¹¹

1.5.2. Analisis Struktural, Studi Arsitektural, dan Peace Building

Sebelum disertasi ini, telah ada tiga disertasi yang membahas tentang kerusuhan di Sampit dengan berbagai perspektif, yaitu perspektif arsitektur-keruangan dalam proses pembentukan ruang eksklusif (2005)¹², komunikasi pasca konflik (2007)¹³, dan Analisis struktural atas konflik dan kekerasan di Sampit (2009)¹⁴

¹⁰ Dalam sebuah wawancara di Palangkaraya Prof KMA Usop mengatakan... Saat konflik yang lalu, LSM-LSM poskonya di sini dan lembaga ini diminta membantu tampil ke depan. Hubungan antar lembaga sifatnya informal, semua bergerak. Komponen LMMDD KT adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh LSM yang berminat, tokoh kampus, dan tempat mencetak kader. Jadi ini tempat mereka berlatih mendekati diri pada masalah-masalah masyarakat. Ikut berperan dalam penyelesaian konflik. Konflik menimbulkan kebingungan dan ada kekosongan di pemerintahan, tidak tahu masyarakat mau dibawa kemana. Lembaga ini mencari fakta ke Sampit seminggu lebih sehingga tahu permasalahan di lapangan. Berdasarkan itu bisa memberi arahan pada masyarakat. Hasil *fact finding* dirangkum menjadi Buku Merah pertama dan dilaporkan saat ada pertemuan dengan Gus Dur walaupun Gubernur katakan tidak banyak waktu. Wawancara KMA Usop di Palangraya tanggal 18 Juni 2004.

¹¹ Salah seorang sarjana luar Indoensia yang tulisan-tulisannay yang menyinggung identitas Dayak adalah Jamie Davidson tentang kekerasan antar etnis di Kalimantan Barat. Seperti halnya Klinken, Jamie Davidson juga menuliskan tentang peran elite Dayak dalam hal kekerasan antar etnis antara Dayak dan Madura di kalimantan Barat pada tahun 1999. Lihat, Jamie S Davidson, *Budaya dan Hak dalam Kekerasan Etnis* dalam Jamie Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*. Penerbit KITLV – Yayasan Obor, halaman 245-268.

¹² Lihat, R. A Retno Hastijanti, *Proses Pembentukan Ruang Eksklusif Pada Permukiman Masyarakat Plural : Studi Kasus Konflik Etnis di Sampit, Kalimantan Tengah*. Disertasi tidak diterbitkan. Program

Ketiga disertasi tersebut menjadi rujukan bagi disertasi ini, khususnya untuk melihat bagian-bagian mana saja dari permasalahan konflik itu yang sudah dikaji oleh disertasi terdahulu dan bagian mana yang belum terlalu didalami. Selain itu, dalam wawancara dengan dua penulis disertasi, yaitu Dr Retno Jastijanti dan Dr Sidik Usop, saya menemukan hal-hal yang terkait dengan permasalahan identitas yang mempengaruhi kedua penulis tersebut dalam proses penelitian maupun penulisannya.

Analisis Struktural Konflik Sampit

Dr Sidik Usop adalah dosen Universitas Palangkaraya, adik kandung dari Prof. KMA Usop ketua presidium LMMDD KT. Ia juga terlibat aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh LMMDD KT pasca kerusuhan Sampit. Tampaknya ia memosisikan diri sebagai pemikir dibalik layar dari konsep-konsep yang dikeluarkan oleh LMMDD KT. Kegamangan identitas yang dialami oleh Dr Sidik Usop adalah ketika ia melanjutkan studi di Universitas Airlangga Surabaya, dimana komunitas orang-orang Madura cukup banyak. Ia sejak awal memilih untuk mengambil topik penelitian yang lebih bersifat struktural. Dengan demikian tidak terkesan memosisikan dirinya sebagai orang Dayak yang berkonflik dengan orang-orang Madura.

Namun, dalam bab pendahuluan disertasinya (Usop 2009 : 1) kalimat awalnya dimulai dengan...”fenomena konflik dan kekerasan antara orang Dayak dengan orang Madura di Kalimantan Tengah telah berlangsung sejak 1982-2000 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kali. Dari 15 kasus tersebut, terdapat 4 kasus yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Timur...”

Studi Doktor Bidang Keahlian Arsitektur Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, (2005)

¹³ Lihat, Rudi Sukandar, *Negotiating Post-Conflict Communication : A Case of Ethnic Conflict in Indonesia*. School of communication Studies. Ohio University, USA.(2007)

¹⁴ Lihat, Sidik Rahman Usop, *Analisis Struktural Atas Konflik dan Kekerasan Etnis di Sampit*. Program Studi Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

Kemudian Usop mengulangi kembali peristiwa konflik dan kekerasan antara orang Dayak dengan orang Madura (halaman 5-6) mengenai kekerasan yang dialami orang Dayak oleh orang Madura di Sampit (1982), pengeroyokan hingga tewas seorang Dayak oleh 30 orang Madura di Bukit Batu Kasongan (1983), penikaman suami-isteri orang Dayak oleh 3 orang Madura di Tumbang Samba (1999).

Penggambaran yang dilakukan oleh Usop memperlihatkan bahwa berbagai konflik dan kekerasan selalu menghasilkan situasi orang-orang Madura sebagai pembunuh dan orang Dayak yang menjadi korban.

Disertasi Usop adalah sebuah karya tulis yang sangat penting sebagai sumber rujukan dalam memahami kerusuhan Sampit. Namun, saya menangkap kesan pergulatan identitas yang cukup dalam yang dialami oleh Usop, sebagai seorang akademisi pada satu sisi, dan sebagai “orang Dayak” dan terlibat dalam kegiatan LMMDD KT. Kesan ini sangat terlihat dari upayanya untuk menjaga obyektifitas hasil penelitiannya dengan cara memilih topik penelitian dan “jendela” teori untuk memasuki lapangan penelitiannya. Namun dalam pemaparan data-data yang ditampilkan, kesan dirinya sebagai seorang Dayak dan aktivis LMMDD KT masih cukup kental.

Usop memformulasi pertanyaan penelitiannya menjadi dua (Usop, 2009 : 10), yaitu (1) bagaimana proses terjadinya konflik etnis antara Dayak dengan Madura di Sampit dan (2) Sejauh mana faktor struktural dapat menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis antara Dayak dan Madura di Sampit ?.

Landasan teoritik yang digunakannya adalah model teori konflik dari Dahrendorf dan Coser dan gabungan teori konflik dari Dahredorf dan Coser (ibid : 44). Kemudian Usop menulis berdasarkan tujuan penelitiannya, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kuantitatif (sic !) dengan menggunakan paradigma faktas sosial, karena dunia sosial yang ingin dikaji berhubungan dengan struktur sosial dalam skala luas,

institusi serta efeknya terhadap pemikiran-pemikiran dan aksi individu (ibid : 47). Walaupun menyebutkan kata “kuantitatif”, tetapi dalam disertasi itu tidak menggunakan teknik pengumpulan data survey, serta analisis dengan uji statistik.

Pergulatan identitas Usop tampak dalam upayanya untuk memilih informan dalam penelitian. Ia menuliskan...

”sebagai subyek pembanding untuk memberikan keseimbangan informasi serta menghindari agar penelitian ini tidak bias Dayak, maka peneliti juga memasukan beberapa orang Madura sebagai subyek penelitian...” (ibid : 56).

Kemudian pada halaman lain ia juga memperlihatkan pergulatan identitas yang lain,

...”situasi konflik ini telah membenamkan kami dalam dialog terbuka, dengan melibatkan unsur emosional untuk memahami masyarakat Dayak dalam konteks historis maupun kejadian-kejadian yang dialami masyarakat Dayak hingga terjadinya konflik dan kekerasan terhadap etnis Madura (ibid : 59).

Pada dasarnya Usop mencoba untuk menampilkan “obyektifitas” akademisnya dalam melihat masalah konflik dan kekerasan Dayak dan Madura ini melalui pemilihan informan yang seimbang, antara pihak Dayak maupun pihak Madura. Kemudian, pilihannya untuk melihat faktor struktural sebagai akar dari konflik dan kekerasan antara Dayak dan Madura ini juga membawanya untuk tidak terjebak menyalahkan pihak Madura dalam konflik dan kekerasan ini. Ia mencoba melihat faktor struktural ini dalam konteks kesenjangan yang diciptakan oleh kebijakan negara yang memarjinalkan orang-orang Dayak. Bagi Usop...

”penjelasan mengenai marjinalisasi dan isolasi politik terhadap orang Dayak ini menjadi penting untuk memberikan gambaran bahwa orang Dayak dan orang Madura adalah korban dari kekerasan politik (ibid : 2).

Bahkan, dalam bagian lain dari disertasinya, secara simpatik Usop mempertanyakan...”mengapa mereka (orang Dayak) melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok masyarakat Madura dalam merespons faktor-faktor kondisional yang telah memarjinalisasikan kelompok masyarakat Dayak (ibid : 18)

Dilema identitas Usop ini, pada satu sisi obyektifitas akademis sebagai seorang ahli Sosiologi dan pada sisi yang lain “pembelaan” terhadap orang-orang Dayak yang dipersalahkan dalam kematian orang-orang Madura akibat tindakan kekerasan ini nampak dalam beberapa bagian. Misalnya, alinea pembukaan dari disertasinya memaparkan kasus-kasus perkelahian yang terjadi antara orang Dayak dan Madura sejak tahun 1982, dan korbannya selalu orang Dayak (ibid : 1), pengalaman historis antara Dayak dan Madura yang menunjukkan tidak adanya penyesuaian diri dari Orang Madura terhadap nilai budaya masyarakat Dayak sebagai tuan rumah (*host*) (ibid : 5), penggunaan kutipan mengenai jumlah orang Madura di kota Sampit yang terkesan *over estimated* (ibid : 49)¹⁵, stereotype orang Madura yang selalu membawa senjata clurit yang disebutnya dengan carok (ibid : 129)¹⁶. Selain itu, Usop juga menggunakan “buku merah” sebagai salahsatu rujukannya untuk menerangkan masalah kerusuhan Sampit, tanpa melakukan konfirmasi tentang kebenaran dari isi buku merah tersebut diantaranya mengenai kronologi Konflik Etnis di Sampit (ibid :

¹⁵ Usop dan beberapa penulis lainnya (Retno, 2005 dan Rusdi, 2007) mengutip pendapat dari Internatioanl Crisis Group (ICG) yang menyebutkan komposisi penduduk di kota Sampit didominasi oleh kelompok etnis Madura, yaitu Madura 60%, Banjar 20%, Jawa 10% dan Dayak 10%. Sedangkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, yang diolah oleh LIPI dari *raw data* memperlihatkan komposisi penduduk di dua kecamatan di kota Sampit, yaitu Baamang dan Mentawa Baru/Ketapang. Kecamatan Baamang dari 44,750 penduduk, hampir 52% Dayak Sampit, lebih dari 15% Banjar, lebih dari 14% Madura dan lebih dari 12% Jawa. Sedangkan di kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, dari jumlah penduduk sebanyak 76,678 jiwa terdiri dari Dayak Sampit (26%), Banjar (24,6%), Jawa (23,4%) dan Madura (17.1%). Perkiraan 60% adalah orang Madura mempunyai dasar penghitungan yang kurang akurat. Namun angka demografis seperti ini ditonjolkan untuk memperlihatkan jumlah orang Dayak yang jauh lebih sedikit dibandingkan etnis lainnya. Sehingga konsep marjinalisasi kemudian digunakan oleh LMMDD KT.

¹⁶ *Carok* dan clurit adalah dua hal yang berbeda namun berkaitan. Carok adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan pada orang-orang Madura. Sedangkan Clurit adalah alat yang digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga, namun dapat digunakan dalam tradisi Carok melukai lawan hingga membunuhnya. Lihat, A Latief Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Penerbit LkiS, Yogyakarta, 2002. Dalam disertasinya Usop seolah-olah menganggap antara *carok* dan clurit sebagai dua hal yang sama.

115-117), penyebutan adanya pasukan orang-orang Madura yang disebut pasukan *Carok Gencar* yang dianggapnya telah dilatih dan dipersenjatai (ibid : 118-119¹⁷).

Selain itu, dengan model pendekatan untuk mencari penyebab-penyebab struktural dari konflik dan kekerasan antar etnis di Sampit, Usop mengabaikan salah satu hal yang tampaknya menjadi sangat signifikan dari membesar dan meluasnya kerusuhan Sampit itu, yaitu adanya mobilisasi dari kelompok elite Dayak, baik dari pemerintahan daerah, swasta maupun akademisi. Kalau ada keterlibatan kelompok elit, hal ini oleh Usop dipahami sebagai bagian yang tidak terelakkan dari upaya orang-orang Dayak untuk melepaskan diri dari kungkungan ketidak-adilan dan marjinalisasi orang-orang Dayak, sebagai korban dari kebijakan. Kemudian, orang-orang Madura dianggap sebagai bagian dari kebijakan karena orang-orang Madura dianggap mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut, yaitu dalam berbagai sektor pekerjaan, kecuali untuk PNS.

Kontestasi Ruang Kota Sampit

Penelitian tentang kerusuhan Sampit bukan hanya dilakukan dalam parameter ilmu sosial saja, salah satunya dari disiplin ilmu arsitektur. Penelitian tentang bagaimana pembentukan ruang (*space*) untuk menjelaskan tentang kerusuhan Sampit telah memberikan pengetahuan yang penting tentang bagaimana pertarungan (kontestasi) politik dan ekonomi, tetapi perebutan ruang baik secara fisik maupun sosial berakibat pada terjadinya kekerasan antar etnis. Penelitian yang dilakukan oleh R.A Retno Hastijanti (2005) merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu (1) bagaimana kualitas ruang eksklusif berdasarkan etnisitas di kota Sampit ? (2) bagaimana proses pembentukan ruang eksklusif berdasarkan etnisitas pada pemukiman masyarakat

¹⁷ Kelompok LMMDD KT menyebutkan bahwa *Carok Gencar* adalah “Gerakan Carok antar Pulau”, yaitu kelompok sipil orang-orang Madura yang terlatih dan dipersenjatai. Selain itu dalam “buku merah” disebutkan pula anggota-anggota kelompok itu berikut nomor anggotanya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa “Gencar” adalah singkatan dari “*General Cargo*”, yaitu satu bagian kelompok buruh angkut barang di pelabuhan Sampit. Kemudian nomor anggota sebagai identitas buruh angkut di pelabuhan tersebut.

plural di kota Sampit ? dan (3) Apa dampak arsitektural dari pembentukan ruang eksklusif yang berdasarkan etnisitas, pada permukiman masyarakat plural di kota Sampit ?

Penelitian ini telah mampu menjawab tentang proses pembentukan ruang eksklusif dari etnis Dayak dan Madura, khususnya yang terkait dengan pola permukiman tradisional dari masing-masing etnis. Konflik muncul, ketika ruang eksklusif dari etnis Dayak ini terlanggar oleh masuknya migran Madura dalam jumlah yang besar dari waktu ke waktu.

Dr Retno mengakui dilema identitas ini muncul ketika ia melakukan penelitian lapangan pada tahun-tahun 2002-2004, ketika kerusuhan baru saja usai. Dilema identitas ini muncul karena ia mempunyai promotor yang berasal dari etnis Dayak, yaitu Prof.Ir Johan Silas, seorang sarjana arsitektur yang sangat terkenal dalam bidangnya. Walaupun promotornya ini memberikan kebebasan bagi dirinya untuk melakukan penelitian, tetapi ia merasakan bahwa kehati-hatian untuk menuliskan identitas menjadi penting ketika obyek dan subyeknya adalah tentang orang-orang Madura. Kemudian pada sisi lain, Surabaya adalah kota dimana populasi orang Madura cukup besar dan banyak diantaranya yang berasal dari Sampit.

Peace Building di Sampit

Persoalan identitas dalam karya akademik untuk menghasilkan karya disertasi juga dialami oleh Rudi Sukandar, PhD. Ia meng-identifikasi dirinya sebagai seorang yang terlahir dari seorang ayah Dayak-Islam dan ibu dari etnis Jawa, dilahirkan di kota Sampit. Masa kecilnya hidup dalam dunia ketetanggaan yang berbeda etnis antara Dayak, Jawa, Banjar dan Madura yang menyebabkan orangtuanya tidak pernah mengajarkan bahasa Dayak-Ngaju atau Jawa. Ia terbiasa berbahasa Banjar. Kemudian pergaulannya dengan tetangga orang Madura menyebabkan ia dapat menangkap

beberapa frasa Madura yang menyebabkannya dapat berbicara dan memahami bahasa Madura.

Pada awal disertasinya, ia membuka tulisannya untuk memperlihatkan kedekatannya secara sosial dan kultural dengan orang-orang Madura di kota Sampit (Sukandar, 2007 : 1-10). Relasi personalnya dengan konflik Dayak dan Madura yang membawanya untuk melakukan penelitian tentang komunikasi pasca konflik. Ia menulis...*"my research concerning the negotiation of post-conflict communication originated from my guilt over doing nothing when the conflict occurred..."* (ibid : 7). Kemudian keprihatinannya terhadap para korban yang meninggal dunia. Yaitu orang-orang yang cukup dikenalnya ., seperti dalam tulisannya...*"this added to the fact that many Madurese victims were people I knew from childhood, drove me to learn more about the current, post conflict interethnic communication in the region"* (ibid : 8). Sukandar memasuki wilayah Sampit pasca konflik pada bulan Mei 2001, atau sekitar 3 bulan dari kerusuhan Februari 2001, sehingga ia dapat mengamati situasi yang tidak terlalu lama dari konflik itu sendiri, termasuk menyaksikan berbagai kerusakan dari rumah-rumah orang Madura yang ditinggalkan dan dibakar.

Disertasi Sukandar memberikan fokus pada empat pertanyaan kunci, yaitu (1) bagaimana komunikasi pasca konflik terjadi diantara anggota dari kelompok yang bertikai di tingkat hubungan antar-personal maupun antar kelompok ? (2) kontribusi pemimpin dari masing-masing kelompok etnik dalam upayanya untuk mempromosikan perdamaian dan saling pengertian diantara anggota dari masing-masing groupnya ? (3) tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat) untuk mempromosikan perdamaian dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk menggalang kembali komunikasi diantara kelompok yang bertikai ?; dan (4) bagaimana peran organisasi masyarakat sipil, seperti partai politik, LSM dan organisasi berbasis etnis dalam membantu proses-proses perdamaian dan rekonstruksi komunikasi diantara para pihak yang bertikai.

1.6. Metode Penelitian

Pengumpulan data penelitian untuk disertasi ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dan pengumpulan data dokumen. Kunjungan lapangan dilakukan mulai bulan Oktober 2008 hingga Februari 2010. Fokus studi lapangan dilakukan di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian mengunjungi kecamatan-kecamatan lainnya di kabupaten tersebut. Selain itu melakukan kunjungan ke kota Palangka Raya, Pangkalan Bun, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Puruk Cahu. Wilayah lain yang dikunjungi adalah kota Banjarmasin dan Martapura di Kalimantan Selatan, sebagai tempat tinggal orang-orang Madura-Sampit. Kemudian kabupaten Sampang di Pulau Madura, khususnya kecamatan Ketapang dan kecamatan Kedundung tempat tinggal orang-orang Madura-Sampit sebelum kembali ke kota Sampit pasca-kerusuhan.

Subyek penelitian ini kebanyakan orang-orang Madura yang telah kembali ke kota Sampit, beberapa orang Madura yang tidak kembali ke kota Sampit. Selain itu, beberapa informan adalah orang-orang Dayak Sampit, Dayak Ngaju, Dayak Manyan, Bakumpai, Banjar, Bugis, Cina dan orang Indo-Eropa eks-KNIL.

Pengumpulan data wawancara mendalam dilakukan pada hampir semua informan. Kepada semua informan saya mengungkapkan identitas saya sebagai seorang mahasiswa pasca-sarjana yang sedang melakukan penelitian untuk menulis disertasi; namun dalam beberapa kasus, saya tambahkan pekerjaan saya sebagai peneliti pada sebuah lembaga penelitian pemerintah. Pengamatan semi-terlibat dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi keseharian para informan. Kemudian pengamatan pada tempat-tempat yang dianggap penting terkait dengan kerusuhan seperti makam masal, kuburan Kristen, tugu perdamaian, bangunan dan rumah yang hancur dan terbakar. Selain itu, pada tempat-tempat yang menjadi penanda sejarah sebuah tempat maupun

penanda etnis (*ethnic marker*), seperti perumahan tepi sungai, perumahan dengan arsitektur tertentu.

Penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan kekerasan antar-etnis, khususnya dalam perspektif identitas seringkali mempunyai sensitivitas tertentu, seperti upaya-upaya untuk melupakan peristiwa kekerasan agar tidak traumatis baik bagi para pelaku, para korban maupun siapa saja yang ingin melupakannya. Selain itu, etika penelitian Antropologi yang memberikan syarat perlindungan kepada para informan membuat saya mengganti nama-nama para informan maupun nama-nama tempat. Tetapi tidak semua nama informan menggunakan nama lain (*pseudonym*), tergantung dari informasi yang diberikannya. Berbagai informasi yang terkait dengan sejarah suatu lokasi atau informasi umum maka para informannya tidak diganti nama. Demikian halnya untuk nama-nama tempat yang bersifat umum tidak diganti namanya. Namun, sebagai sebuah penelitian yang terkait dengan identitas, walaupun nama-nama disamarkan, namun tetap tidak meninggalkan konteks identitasnya. Seperti penggunaan nama-nama yang lazim bagi orang Madura, orang Banjar, orang Dayak Ngaju, dan sebagainya.

1.7. Struktur Disertasi

Disertasi ini terdiri dari 6 bab. **Bab pertama** adalah bab pendahuluan, yang terdiri dari permasalahan dan latar belakangnya, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dan metode penelitian

Bab 2 secara khusus akan memaparkan pengalaman metodologis dalam penelitian ini, khususnya terkait penelitian yang menyangkut kekerasan antar etnis. Setiap peneliti yang melakukan studi seperti ini selalu dihadapkan pada persoalan subyektifitas dan keberpihakan yang tumbuh dari latar belakang akademis maupun relasi keseharian antara si peneliti (*the author*) dengan subyek yang ditelitinya.

Khususnya ketika subyek penelitian itu adalah “para pelaku” dan “para korban” yang masih hidup dan ingin melupakan ingatan tentang peristiwa kekerasan antar etnis.

Bab 3, tentang dinamika lokasi penelitian. Pengertian setting wilayah penelitian ini merujuk pada aspek-aspek yang bersifat *spatial* (ruang geografis) dan ruang *temporal* (*aspek waktu*). Ruang geografis dari penelitian ini memang fokus di wilayah kota Sampit. Namun, karena ruang gerak dari orang-orang Madura ini terjadi dimana-mana, maka berbagai kunjungan singkat ke kabupaten-kabupaten dan kota di Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Pulau Madura telah memberikan nuansa yang lebih lengkap untuk memahami relasi antar etnis di Sampit dalam ruang geografis maupun ruang waktu tertentu. Berkaitan dengan aspek temporalitas, penanda waktu kehadiran orang-orang Madura di Sampit pada tahun 1920 dianggap sebagai jalan rintisan terhadap munculnya sub-budaya Madura di Sampit. Oleh sebab itu, kurun waktu yang dilihat dalam studi ini antara 1920 hingga 2010, yaitu saat studi lapangan untuk disertasi ini selesai.

Bab 4, tentang kekerasan antar etnis di Kota Sampit yang terjadi pada bulan Februari 2001. Kejadian yang dalam ingatan kolektif masyarakat Sampit disebut dengan kerusuhan ini menjadi salahsatau penanda penting dari dinamika relasi antar etnis antara orang-orang Dayak dengan Madura di Sampit. Peristiwa kerusuhan itu sendiri dapat dianggap sebagai *hints* atau titik intip untuk melihat dinamika hubungan antar etnis Dayak dan Madura. Dalam bab ini, selain memaparkan kronologi yang telah dibukukan oleh kelompok elite Dayak, dan seringkali dianggap sebagai sebuah sumber sejarah yang penting. Namun dalam penelitian ditemukan berbagai informasi lain yang bertentangan dengan sumber “resmi” pihak elit Dayak tersebut.

Bab 5, merupakan narasi tentang lima orang Madura yang menjadi “informan kunci” dalam penelitian ini. Ketika dalam bab 1 dan bab 3 memaparkan “narasi-narasi besar” tentang sejarah Sampit dan kesejarahan hubungan antar etnis yang terjadi. Maka dalam bab 5 ini akan banyak membicarakan tentang “narasi-narasi kecil” tentang

BAB 2 :
REFLEKSI METODE :
PENGALAMAN MELAKUKAN PENELITIAN
DI WILAYAH PASCA KONFLIK

2.1. Pengantar

Disertasi ini merupakan hasil dari suatu kumulatif pengetahuan dan pengalaman penulis, ketika mengikuti berbagai kegiatan penelitian terkait dengan kekerasan komunal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ketika itu peneliti melakukan kajian di Sambas dan Pontianak (Kalimantan Barat) serta Sampit, Pangkalan Bun dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah)¹. Kemudian penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan penelitian dengan tema tersebut dengan fokus pada masalah ketimpangan horisontal di propinsi Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Sampit dan Pangkalan Bun². Selain itu, melalui sebuah *small grant*, penulis berkesempatan pula untuk mengunjungi beberapa daerah lainnya di Kalimantan Tengah, seperti Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan dan Lamandau. Pada akhirnya penulis mengunjungi hampir semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali kabupaten Seruyan dan kabupaten Sukamara.

Sedangkan sebagai sebuah penelitian sistematis untuk keperluan penulisan disertasi ini, kunjungan lapangan dilakukan mulai bulan Oktober 2008 hingga Februari 2010. Pada periode tersebut tidak sepenuhnya tinggal di kota Sampit, melainkan mengunjungi kota Sampit secara berkala, sambil mengunjungi daerah lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹ Lihat, Khoo Khay Jin, Yasmin Sungkar, Herry Yogaswara dan Dave Lumenta (2004), *Borneo Proejct on Ethnicity and Inequality*. Working Paper on Regional Workshop on Southeast Asia. Novotel Bogor, August 2-3, 2004. (maklah kerja tidak diterbitkan)

² Lihat, Khoo Khay Jin et.al. "*Ethnicity, Inequality and Violence in Kalimantan*". Draft.

Kunjungan ke daerah lain, diluar fokus penelitian di kota Sampit ini perlu diungkapkan. Mengingat hubungan antar etnis yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya antara Dayak dengan Madura mempunyai bentuk yang lain pasca kekerasan antar etnis bulan Februari 2001. Selain itu, kunjungan ke berbagai tempat di luar kota Sampit, akan memperkuat anggapan bahwa setiap lokalitas mempunyai pandangan yang berbeda tentang suatu permasalahan, seperti pandangan yang berbeda terhadap keberadaan orang-orang Madura dari satu tempat ke tempat lainnya.

Setting penelitian ini dimulai dari kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah. Karena para informan kuncinya adalah orang-orang yang dianggap telah lama tinggal di kota Sampit, beberapa diantaranya telah tinggal lebih dari 40 tahun. Diantara orang-orang tersebut mempunyai pengalaman mengungsi ke pulau Madura dan atau tempat lainnya di pulau Jawa. Dengan demikian setting penelitian meluas ke beberapa daerah dimana para calon informan kunci pernah tinggal, seperti propinsi Kalimantan Selatan, propinsi Jawa Timur dan khususnya pulau Madura.

Kota Sampit itu sendiri terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Mentawa Baru/Ketapang dan kecamatan Baamang. Dinamika konflik diantara kedua kecamatan tersebut, serta karakter etnisitasnya, menyebabkan perlunya pendalaman secara khusus terhadap dua kecamatan itu sendiri. Dengan kata lain, Sampit bukanlah entitas homogen dari sebuah kota kecil yang pernah mengalami suatu kekerasan antar etnis. Walaupun "locus" penelitiannya ada di kota Sampit, namun dalam alokasi waktu pengumpulan data lebih banyak dilakukan di wilayah kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, khususnya wawancara-wawancara yang lebih intensif terhadap informan-informan terpilih. Situasi konflik Madura-Dayak di Mentawa Baru /Ketapang relatif lebih rendah dibandingkan di kecamatan Baamang.

Pada tahap awal pengumpulan data, informan-informan yang dipilih mewakili gambaran kelompok-kelompok etnis yang ada di kota Sampit, seperti dari kalangan

masyarakat Dayak Ngaju, Dayak “Katingan”, Dayak “Sampit”, Jawa, Madura, Banjar, Cina, Bugis dan lain sebagainya. Kemudian juga tokoh-tokoh politik, seniman, budayawan dan dan wartawan. Selanjutnya, wawancara mendalam fokus pada orang-orang Dayak dan Madura. Kemudian fokus pada lima orang Madura yang dianggap dapat memberikan penjelasan tentang keragaman relasi antar etnis, narasi kerusuhan dan pasca kerusuhan yang Dayak-Madura di kota Sampit.

Pemilihan informan ini bersifat *purposive*, yaitu memilih informan untuk tujuan-tujuan tertentu yaitu melihat keragaman relasi antar etnis dari mereka yang lahir di Madura dan lahir di Sampit; lamanya tinggal di kota Sampit; gender dan usia. Selain itu keragaman mata pencaharian, seperti keluarga petani, Pegawai Negeri Sipil, dan pedagang. Tentu saja kriteria yang digunakan tidak dapat terlampau ketat, mengingat dinamisnya identitas yang menempel pada seseorang.

Penelitian dengan menggunakan konsep ingatan kolektif lebih menitik beratkan pada kedalaman hubungan dan *rapport* yang baik antara peneliti dan subyek yang diteliti. Oleh sebab itu, jumlah informan yang diwawancara tidak bersifat utama, melainkan bagaimana wawancara dilakukan secara berulang, termasuk kunjungan yang berulang dengan seorang informan. Selain itu berdasarkan studi psikologis dan sistem saraf (ibid : 185) tidak terdapat perbedaan mendasar antara ingatan individu dan kolektif, karena dalam penelitian tersebut ditemukan suatu keinginan yang wajar seorang individu itu untuk mengenang atau melupakan suatu peristiwa. Demikian halnya dengan tingkatan kemampuan sistem saraf untuk menyimpan, memanggil ulang dan menggambarkan pengalaman verbal dan non-verbal tidak dapat dipisahkan dari pola-pola dan persepsi dimana kita dari lingkungan sosial terdekat. Oleh sebab itu, jumlah informan bukanlah hal yang mendasar, karena ingatan setiap individu ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Namun ingatan-ingatan individu menjadi penting untuk memperkaya keragaman situasi yang dialami pada suatu komunitas dan tidak dapat dinegasikan.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang memberikan perhatian terhadap ”pengalaman” individual dan kolektif dalam memahami hubungan antar etnis, maka *life history* akan menjadi alat pengumpul data yang utama dari penelitian ini. Life history dapat menjadi salah satu pengumpulan teknik yang pas dengan tradisi etnografi, karena memberikan ruang yang besar pada terjalannya *rapport* yang baik antara peneliti dan informan/partisipan dalam sebuah penelitian (O Reily, 2005). Namun sebuah pengalaman individual yang ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu pengalaman pada suatu lokalitas di lingkungan tempat tinggal kesehariannya, kota Sampit, Kalimantan Tengah, pulau Jawa dan Madura, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap penting oleh para informan kunci mempengaruhi pandangannya tentang hubungan antar etnis. Life history dibangun melalui seperangkat wawancara yang mendalam, pengamatan terhadap tingkah laku, dan studi dokumen mengenai profil informan kunci tersebut.

Pengumpulan data melalui penelusuran dokumen difokuskan mengenai sejarah perkembangan kota Sampit, khususnya mengenai industri kayu dan perkebunan sawit dan pertambangan emas. Perhatian secara khusus diberikan pada sejarah industri kayu di kota Sampit, mengingat munculnya industri ini sangat relevan dengan migrasi masuk (*in migration*) di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian halnya dokumen-dokumen yang terkait dengan kekerasan antar etnis tahun 2001 akan dikaji secara lebih kritis.

Pengamatan dilakukan dimana-mana, mulai dari tempat tinggal para informan, situasi kota Sampit dan sekitarnya, situasi tempat-tempat yang dianggap penting oleh para informan, lokasi-lokasi bekas kekerasan komunal (bangunan yang hancur, tanah kosong dan sebagainya), ”monumen” (makam masal dan tugu peringatan), kebiasaan yang berbeda sebelum dan sesudah kerusuhan bulan Februari 2001.

Dari sisi temporal, pengumpulan data untuk penelitian ini secara intensif dilakukan sejak bulan Oktober 2008 hingga Februari 2010. Penulis tidak menggunakan seluruh

waktunya di kota Sampit, tetapi berkunjung ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan. Penyebutan aspek temporal menjadi penting, karena dalam berbagai kunjungan lapangan ini terdapat beberapa kejadian penting secara politik, misalnya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2005. Kemudian Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wapres tahun 2009. Peristiwa politik lokal dan nasional ini tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan etnisitas. Mengingat dalam masa kampanye isu etnisitas seringkali digunakan oleh para kandidat untuk menaikkan popularitasnya, dan menurunkan popularitas lawannya. Isu Madura tidak terlepas dari masalah ini, termasuk menguatkan berbagai *stereotype* orang Madura.

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu dan tempat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu diberikan suatu gambaran tentang berbagai hal yang dapat menjadi konteks mengenai lokasi penelitian dan berbagai kejadian yang mempengaruhi jalannya proses penelitian dan penulisan penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian yang mempunyai tema identitas, seringkali melibatkan sisi subyektif dari peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut. Khusus mengenai penelitian yang terkait dengan identitas pada masyarakat pasca konflik, apalagi kekerasan antar etnis, sisi subyektifitas dan humanis dari peneliti seringkali terlibat ketika melakukan pengumpulan data lapangan, analisis dan proses penulisan hasil penelitian itu sendiri. Untuk itulah refleksi metodologis ini perlu dituliskan

2.2. Dimensi Waktu dan Multi Situs

Penggunaan dimensi historis dan pentingnya memahami konteks masyarakat yang lebih luas, menyebabkan perlunya sebuah aktivitas penelitian dan penulisan etnografi yang tidak dibatasi oleh ruang-ruang geografis dan waktu yang ketat, melainkan sebuah etnografi yang mencoba mengikuti secara fisik dan ide-ide dari informan-informan kunci yang dipilih.

Dalam beberapa sumber bacaan (Edelman and Haugerud, 2005; Kalocsai, 2004; Fox 1991; Tsing 2004) terdapat kesan bahwa etnografi multi situs (*multi-sited ethnography*)³ ----- seperti yang pertamakali digagas oleh Marcus --- (1998 via Kalocsai, 2004 : 1) merupakan suatu jalan keluar dari upaya para ahli Antropologi untuk dapat memahami fenomena global secara lebih baik lagi. Menurut Marcus (via Kalocsai 2004), sebuah etnografi multi-situs berarti, “*following people, following the thing, following the metaphor, following the plot or story, following the life or biography, and following the conflicts*”, sebagai beberapa contoh dari teknik penelitian dalam etnografi multi situs. Kemudian Appadurai lebih memberikan contoh konkrit yang bertumpu pada subyek (person) tentang lansekap dari orang-orang yang bergerak terus-menerus melintas batas (*ethnoscape*), seperti turis, immigrant, pengungsi, kaum eksil dan pekerja migrant (1991 : 192).

Marcus (2002) yang sering dianggap sebagai penggagas multi-sites ethnography ini sendiri mengatakan bahwa etnografi multi-situs adalah sebuah *exercise* dalam memetakan lapangan kajian, tujuannya bukanlah representasi holistik. Sebuah potret etnografi sistem dunia sebagai sebuah totalitas, lebih tepatnya diklaim sebagai semacam etnografi tentang sebuah formasi kebudayaan dalam sistem dunia, sehingga tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan pendekatan konvensional yang berbasis single-site.

Dalam hal ini, ketika titik intip (*hints*) penelitian ini adalah sebuah kekerasan antar etnis yang menyebabkan terjadinya migrasi terpaksa ke berbagai tempat, sebelum seseorang kembali ke tempat tinggal asalnya, maka etnografi multi situs dapat memberikan penjelasan mengenai dengan siapa saja seorang informan kunci berinteraksi dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk bagaimana situasi di lokasi-lokasi yang berbeda-beda akan memberikan perspektif yang lebih beragam mengenai pandangannya tentang relasi antar etnis.

³ Dengan mengutip Paul Rabinow (1977), Jamie Davidson (2002) dalam studinya tentang kekerasan dan politik di Kalimantan Barat menggunakan istilah *mutit-locale*. Katanya, “everything was fieldwork”

2.3. Sampit Sebagai Jendela Memasuki Permasalahan Penelitian

Pemilihan Sampit sebagai *locus* dari studi ini karena beberapa pertimbangan, yaitu pusat lokasi kekerasan antar etnis sebelum menyebar ke daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Kota Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai jumlah penduduk Madura yang paling signifikan di propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu di kota Sampit terdapat berbagai organisasi berbasis kelompok etnis, seperti LMMDD KT (Dayak), Dusun Manyan Lawangan (Dusmala – Dayak dari Aliran sungai Barito), Uluh Itah (Dayak – Ngaju dari Kapuas dan Kahayan), KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), Kelompok Banjar, Perkumpulan Keluarga Cina, dan sebagainya. Idea awal disertasi ini adalah hubungan antara etnis dalam perspektif kesejarahan kota Sampit, sehingga fokus diarahkan pada daerah dimana relasi antar berbagai etnis terjadi.

Penggunaan konsep historisitas dan etnisitas dalam disertasi ini mensyaratkan adanya suatu lokus dimana faktor-faktor kesejarahan antar etnis, khususnya antara Dayak dan Madura dapat digali dari berbagai sumber, seperti penelusuran dokumen, wawancara dan pengamatan. Penelusuran dokumen menyangkut arsip-arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial maupun arsip-arsip dari pemerintah Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, sumber yang berdasarkan arsip tidak digunakan sebagai sumber primer untuk memahami kesejarahan di tempat penelitian. Penggalian kesejarahan dilakukan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dengan fokus pada pertanyaan tentang kesejarahan maupun pertanyaan lainnya yang jawabannya mengandung jawaban yang dapat merangkai tentang kesejarahan di kota Sampit dan tempat-tempat lainnya yang saling berkaitan. Misalnya cerita tentang proses migrasi awal dari orang-orang Madura dari kabupaten Sampang ke Sampit melalui pelabuhan Bring Koneng di Ketapang pada periode 1920-1960-an, keberadaan pelabuhan tersebut masih dapat disaksikan keberadaannya di Madura maupun tempat pendaratannya di Sampit. Demikian halnya dengan perkampungan Madura-Sampit di

kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang masih merupakan tempat komunitas orang Madura yang juga mempunyai tempat tinggal di Sampit.

Pengamatan terhadap kota Sampit yang terkait dengan kesejarahan kota tersebut, difokuskan pada peninggalan-peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti keberadaan kota Sampit dikaitkan dengan dinamika penting yang ada di kota tersebut. Dinamika terpenting dari kota ini terkait dengan pembalakan (*logging*) hutan yang dimulai oleh perusahaan swasta Belanda *Bruenzyl Dayak Houtbreidieven* (BDH). Perusahaan ini pertama kali mendapat konsesinya pada tahun 1947. Peninggalan BDH yang masih dapat disaksikan hingga hari ini adalah puing-puing pabrik pengolahan kayu yang sekarang dikelola oleh PT Inhutani III. Bangunan pabrik tersebut sudah mengalami renovasi total oleh PT Inhutani III, tetapi yang masih tersisa adalah cerobong asap dari turbin yang menjadi penggerak untuk mendapatkan listrik sekaligus untuk memutar gergajian pada masa lalu. Selain itu, BDH juga menyisakan kompleks perumahan yang sering disebut “kompleks Brengsel”, yang merupakan salahsatu kompleks perumahan “elite” yang ada di jantung kota Sampit, sekaligus menjadi salah satu “area titik panas” pada saat kerusuhan, mengingat di dekat kompleks tersebut merupakan permukiman penduduk Madura yang cukup padat. Keberadaan NV BDH merupakan titik awal dari industri kayu di Kalimantan Tengah, karena setelah itu merupakan wilayah yang paling padat dikuasai oleh perusahaan HPH.

Kehadiran NV BDH di kota Sampit sekitar tahun 1947, dapat pula disaksikan dari adanya “Kuburan Kristen” (*Kerkkoff*) yang ada di tengah kota Sampit, dimana yang dikuburkan disitu selain orang-orang Dayak beragama Kristen, juga kuburan-kuburan dengan nama-nama orang Belanda. Selain itu, dalam dokumen gereja Katolik mengatakan bahwa keberadaan pelayanan di gereja Katolik diawali untuk melayani orang-orang Belanda pegawai NV BDH yang beragama Katolik, untuk itu antara pihak Gereja Katolik dan NV BDH diatur kesepakatan untuk membiayai para pelayan gereja yang datang ke tempat itu dari daerah Banjarmasin.

Melacak keberadaan BDH melalui kajian dokumen dan wawancara juga dilakukan untuk melihat keterkaitan antara keberadaan BDH dengan adanya komunitas etnis tertentu di kota Sampit. Dengan menggunakan tulisan dari Garry Van Klinken (2008) memberikan sebuah catatan kaki tentang keberadaan BDH yang menggunakan para pekerja eks-tentara KNIL. Mereka berasal dari wilayah “Indonesia Timur” dan beragama Kristen, seperti yang berasal dari Minahasa dan Maluku, atau keturunannya. Komunitas ini sering disebut sebagai “orang Indo”, yaitu orang-orang Indonesia yang dianggap mempunyai keturunan dari orang-orang Eropa, dalam konteks pada waktu itu dengan Belanda. Saya pernah mewawancarai dua keluarga keturunan Targanski. Keluarga satu sukses sebagai pengusaha perbaikan mesin kapal. Sedangkan kepala keluarga lainnya bekerja sebagai petugas pengamanan (satpam). Keduanya mempunyai orangtua yang awalnya mempunyai posisi yang cukup baik di BDH. Namun, kelompok “keturunan Indo” ini tampaknya tidak mempunyai relevansi yang signifikan dalam relasi antar etnis di kota ini, khususnya dalam kaitannya konflik kekerasan antara etnis Dayak dengan Madura.

2.4. Saya, Dayak dan Madura⁴

Seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu, disertasi ini merupakan hasil perjalanan panjang dari keterlibatan saya dengan berbagai aktivitas di Kalimantan Tengah. Tentu saja, fokus utamanya adalah sebuah studi akademik yang menggunakan perangkat-perangkat metodologi ilmiah tertentu yang dapat

⁴ Bagian ini terinspirasi oleh dua hal. Pertama penerbitan sebuah berjudul “Kegalauan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca Orde Baru” (2011). Kedua, pada saat-saat saya menulis bagian akhir dari disertasi ini terjadi beberapa peristiwa lainnya yang terkait dengan perlunya kehati-hatian dalam melakukan penelitian maupun menuliskan suatu peristiwa yang terkait dengan kekerasan antar-etnis. Khususnya ketika penelitian dan tulisan tersebut akan terkait dengan identitas suatu etnis atau kumpulan etnis tertentu. Peristiwa penghukuman adat terhadap Prof Dr Tamrin Amal Tomagola, guru besar Sosiologi Universitas Indonesia, oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Palangkaraya, setelah pernyataannya dikutip oleh media massa merupakan salah satu insiden, dimana karya akademik yang dihasilkan oleh suatu proses ilmiah tertutupun sangat rawan untuk diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks kepentingan politik dan dinamika lokal.

dipertanggung-jawabkannya kesahihannya. Namun, pada sisi lain, disertasi ini juga melibatkan bukan hanya seperangkat metode penelitian, melainkan melibatkan persoalan-persoalan obyektifitas dan subyektifitas penelitian, termasuk didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan etika penelitian Antropologi. Penulis tidak hanya terlibat didalam aktivitas penelitian akademik untuk penulisan disertasi sejak tahun 2009. Tetapi berbagai kegiatan penelitian dan non-penelitian yang dilakukan sejak tahun 2005 hingga akhir tahun 2010. Berbagai aktivitas tersebut bersifat memperkaya penelitian akademis untuk kepentingan disertasi tersebut dan mempunyai relevansi. Mengutip pendapat dari Jamie Davidson ketika melakukan studi di Kalimantan Barat, *everything is Ethnography*.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah identitas etnis, apalagi yang menyangkut kekerasan antar etnis yang mengakibatkan ratusan orang tewas, dimana para pihak keluarga yang terbunuh (korban) maupun pelakunya masih hidup mengandung unsur sensitivitas tertentu. Sensitivitas ini bermacam-macam, bagi mereka yang menjadi pelaku dan masuk dalam kategori “*aktor intelektual*”, studi yang dilakukan dikhawatirkan menjadi bahan tuntutan untuk pengadilan HAM berat⁵. Selain itu, banyak penduduk lokal non-Madura yang menduduki asset-asset milik orang Madura terdiri dari tanah, rumah, tanah pertanian, bangunan toko, pom bensin, hotel dan sebagainya. Studi-studi seperti yang saya lakukan dikhawatirkan akan memunculkan opini tentang tindakan mereka menduduki property secara tidak sah. Padahal orang-

⁵ Almarhum Munir, seorang pembela HAM, adalah orang yang gigih untuk membawa masalah ini ke pengadilan HAM, mengingat jumlah korban yang ditimbulkan sangat banyak. Namun pendekatan yang dilakukan oleh Munir adalah melihat kemungkinan terjadinya pembiaran oleh aktor-aktor Negara, seperti TNI dan Polri yang dianggapnya kurang tegas dalam menangani tindakan preventif kerusuhan. Kemudian Presiden yang dianggapnya melakukan pembiaran. Sebetulnya polisi telah menangkap “aktor intelektual” dari kerusuhan ini yaitu Fedlik Asser dan kawan-kawannya. Fedlik adalah tokoh muda Dayak dari Seruyan. Ia adalah sekretaris LMMDD KT Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga birokrat di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur dan Seruyan. Ia juga tokoh Gereja Kalimantan Evangelis (dalam sebuah warta jemaat GKE diberitakan ia sakit parah tahun 2009). Kemudian ia meninggal dunia tahun 2010. Penangkapan Fedlik Asser dan kawan-kawan mendapatkan reaksi keras dari kalangan Dayak dan menuntut polisi untuk membebaskannya. Menurut keterangan seorang informan Dayak, polisi punya 2 BAP, satu untuk “tim perencana” pembunuhan orang-orang Madura dan kedua “tim eksekutor”. Fedlik masuk sebagai tim perencana.

orang Madura yang ingin mengambil kembali miliknya harus membayar uang jumlah tertentu yang dianggap sebagai “uang keamanan” atau “uang tunggu”.

Sedangkan dari pihak korban, baik yang merupakan orangtua, saudara, kerabat, tetangga berusaha untuk menguburkan ingatan mereka tentang peristiwa kerusuhan Sampit pada bulan Februari 2001. Kebanyakan orang Madura di Sampit tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kerusuhan, karena kebanyakan mendapatkan perintah untuk masuk ke barak pengungsian di Kantor bupati Kotawaringin Timur dan kemudian dibawa dengan kapal ke pulau Jawa dan Madura.

Refleksi metode ini lahir dari pengalaman subyektif saya berhadapan dengan para korban kerusuhan, baik dari kalangan Dayak maupun Madura. Dalam derajat yang berbeda, bagi saya warga dari kedua etnis tersebut adalah korban. Khususnya bagi warga masyarakat biasa. Mendengarkan kisah-kisah pembunuhan pada saat kerusuhan, disuguhkan foto-foto dan film dokumenter tentang kerusuhan tersebut, sangat sulit diterima oleh sisi kemanusiaan saya. Namun, pada sisi lain, saya harus menembus rintangan-rintangan subyektifitas tersebut untuk dapat bertemu dengan para informan dan menggali kisah-kisah dari mereka.

Keterlibatan saya sejak tahun 2005 diberbagai tempat di Kalimantan Tengah, semakin memperjelas mengenai relasi etnisitas yang lebih luas antara orang-orang Dayak dengan Madura, terutama bagaimana memori kolektif tentang kerusuhan itu dibentuk. Melalui berbagai kegiatan, saya berkesempatan untuk mengunjungi Kota Palangkaraya (terutama pusat kota), Kabupaten Katingan (untuk wilayah tengah dan hulu-pemekaran dari kabupaten kotawaringin Timur), Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau (pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat), Pulang Pisau (pemekaran dari kabupaten Kapuas), Kabupaten Gunung Mas (pemekaran dari kabupaten Kapuas), Kapuas, Barito Timur (pemekaran dari kabupaten Barito Selatan), Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya (pemekaran kabupaten barito Utara).

Pada setiap daerah yang saya kunjungi, sering menanyakan tentang keberadaan dan relasi orang-orang Madura sebelum dan sesudah kerusuhan. Kesan umumnya adalah, pertama, konsentrasi orang-orang Madura ada di Kotawaringin Timur (ibu kotanya di Sampit), Kotawaringin Barat (ibu kotanya di Pangkalan Bun), Kota Palangkaraya, dan Kapuas. Sedangkan dalam jumlah yang kecil dapat ditemui di semua kabupaten di Kalimantan Tengah. Kemudian identitas ke-Madura-an relatif hilang sejak terjadinya kerusuhan, misalnya tidak ada lagi penamaan kuliner dengan kata Madura, nama-nama jalan yang berasosiasi Madura telah diganti. Misalnya di kota Palangkaraya, nama jalan Madura diganti dengan jalan Pulau Batam. Hanya di Kotawaringin Barat, nama kelurahan Madurejo sebagai tempat tinggal kebanyakan orang Madura di Pangkalan Bun tetap dipertahankan namanya. Selain itu, dalam pawai/karnaval hari kemerdekaan RI, identitas ke-Madura-an, seperti karapan sapi, ronggeng dan orang yang berpakaian kaos *ke lesap* (motif garis merah tebal) sudah tidak terlihat lagi. Munculnya sate dan soto Madura baru saya temukan kembali pada tahun 2009. Pemiliknya adalah seorang anak muda Madura yang berasal dari kalangan terdidik. Orangtua anak muda itu pernah dianggap sebagai sekretaris IKAMA. Namun posisi ini dibantah, dan yang benar adalah posisinya sebagai seorang guru.⁶

2.4.1. Proses Memasuki Sampit

Sebelum masuk ke sampit pada tahun 2005, sebelumnya saya sempat melakukan penelitian mengenai kekerasan antar etnis di Kalimantan Barat pada tahun 2004, khususnya di Sambas, kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak. Berbeda dengan Kalimantan Tengah, kekerasan antar etnis telah terjadi berkali-kali, bahkan mulai dari

⁶ Lihat, Sukandar (200 : 7)... "one of victims of this conflict was Mr Wakir Saleh , my Madurese physics teacher/boy scouts instructor/pengajian supervisor. He was reported in a national newspaper to cry and exclaim, "I have never killed any Dayaks. I even ttaught their children to be scholars. Now why did they have to kill my family ? Why I was forced to leave the city ? What did I wrong (based on quotation in Pengungsi sampit, 2001)

tahun 1950. Namun, apabila di Kalimantan Tengah kekerasan melibatkan Dayak melawan Madura. Sedangkan di Kalimantan Barat antara orang Dayak dan Madura, kemudian antara orang Madura melawan Melayu di kabupaten Sambas. Perbedaan lainnya, hingga kini di Sambas masih menolak kembalinya orang-orang Madura, sementara itu di Kalimantan Tengah pengembalian orang Madura dapat dilakukan, namun bersifat alamiah dan tidak disponsori oleh pemerintah maupun elemen masyarakat sipil

Pengalaman melakukan penelitian di Kalimantan Barat sangat kental dengan nuansa identitasnya. Masuk ke kelompok Dayak, saya menggunakan jalur pertemanan organisasi non pemerintah (ornop atau LSM). Saya mulai masuk melalui jejaring ornop LBBT (*Lembaga Bina Banua Talino*), sebuah ornop yang memberikan fokus pada aspek hukum adat dari masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat. Kemudian mereka mengenalkan saya kepada kelompok SEGERAK (Serikat Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dayak). Memasuki jejaring ornop inipun lebih mengandalkan pada hubungan pertemanan dan orientasi ideologis saya yang tidak jauh berbeda dengan kelompok mereka. Selain itu, karena aktivitas saya dalam membantu organisasi LSM masyarakat adat relatif memudahkan saya untuk masuk kedalam jejaring mereka. Selain itu, posisi saya sebagai peneliti di LIPI sebagai organisasi penelitian pemerintah dianggap masih netral. Walaupun pada akhirnya relasi kelembagaan ini sempat terganggu dengan adanya publikasi hasil penelitian LIPI tentang agama Kaharingan di Kalimantan Tengah (lihat bagian lain di bab ini).

Melalui ornop Dayak ini pula mengenalkan saya kepada kelompok ornop berbasis etnis Melayu di Pontianak. Mereka inilah yang mengantarkan saya untuk dapat masuk kedalam berbagai kelompok etnik Melayu, mulai dari kelompok moderat yang memahami keinginan kelompok Madura untuk kembali, hingga kelompok yang paling radikal yang menolak kehadiran orang Madura kembali. Bahkan kelompok ini mengatakan bahwa etnis Cina-lah yang menyebabkan pertikaian antar kelompok etnis lainnya. Kelompok etnis lainnya, terutama Madura dianggap sebagai korban saja dari

kerakusan etnis Cina dalam berusaha di Kalbar. Kemudian karena perbedaan agama, kelompok ini menganggap bahwa selama ada orang-orang Dayak yang non-Islam (Melayu)⁷ ada di Kalbar, maka daerah tersebut tidak bisa tenteram. Bahkan sejak awal penelitian mereka mempertanyakan orientasi agama saya dan tidak bersedia diwawancarai oleh orang yang berbeda agama, atau yang bukan Islam.⁸

Kemudian ornop Melayu ini pula yang mengenalkan saya dengan komunitas pengungsi Madura di wilayah Tebang Kacang, sehingga saya mempunyai akses untuk melakukan pengamatan dan wawancara terhadap komunitas Madura di Kalimantan Barat.

Belajar dari pengalaman di Kalimantan Barat, penelitian lapangan di Kalimantan Tengah relatif didukung oleh beberapa hal. Pertama, keluarga dari pihak isteri saya adalah etnis Dayak yang berasal dari DAS Kapuas dan DAS Barito, atau yang sering disebut dengan Dayak Ngaju (untuk DAS Kapuas) dan Dayak Manyaan (DAS Barito), sehingga jaringan kekerabatan saya gunakan untuk masuk kedalam jaringan orang-orang Dayak. Kedua, orientasi etnis saya adalah Sunda, dimana terdapat *stereotype* orang Sunda beragama Islam, sehingga lebih mudah masuk pada jaringan orang-orang Madura. Walaupun dalam kenyataannya orang-orang Madura yang menjadi informan saya tidak pernah mempertanyakan orientasi keagamaan, kecuali pertanyaan dari seorang pengusaha-intelektual muda Madura

Melalui jaringan kekerabatan dan pertemanan memudahkan saya untuk masuk kedalam berbagai komunitas di kota Sampit. Saya belum pernah mengalami suatu kondisi penolakan untuk melakukan wawancara. Namun, saya merasakan bahwa

⁷ Perbedaan antara Kalbar dengan Kalteng dalam soal identitas etnis, di Kalbar etnis mempunyai asosiasi yang sangat kuat dengan agama. Dayak adalah non-Islam dan Melayu adalah Islam. Berbeda dengan Kalimantan Tengah, dimana etnisitas tidak dilekatkan pada agama. Seorang Dayak bisa saja pemeluk agama Kaharingan, Islam atau Kristianitas. Hal ini memperkuat tesis bahwa etnisitas bersifat konstruktif, yaitu tergantung bagaimana label dilekatkan oleh pihak luar dan respons dari masyarakat yang diberi label tersebut.

⁸ Kelompok ini menamakan dirinya sebagai Panglima Laskar Melayu. Mereka seringkali terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi di Pontianak, dan tidak dekat dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat Sipil Melayu lainnya yang terlibat dalam resolusi konflik pasca kerusuhan.

membicarakan hubungan antar etnis pasca kerusuhan bagi dua kelompok etnis yang terlibat dalam suatu peristiwa kekerasan antar etnis bukanlah hal yang mudah. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, keduanya ingin melupakan peristiwa tersebut dengan motif yang berbeda. Tentunya hal ini mengandung implikasi terhadap seberapa jauh seorang peneliti merasa yakin terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh seorang informan. Khususnya bagi informan-informan yang interaksinya dengan peneliti sangat terbatas, dikarenakan kesibukan informan maupun jarak antara informan dengan peneliti. Oleh sebab itu, saya menggunakan dua cara untuk meyakinkan diri saya sendiri terhadap jawaban-jawaban para informan. Cara pertama adalah “triangulasi” dengan membandingkan pernyataan-pernyataan para informan dengan pernyataan informan yang lain, membandingkannya dengan klipings surat kabar dan berbagai dokumen lainnya yang terkait. Cara kedua adalah dengan berulang kali mendatangi informan tersebut kemudian menanyakan hal-hal yang sama dengan cara dan konteks yang berbeda-beda.

2.4.2. *Memasuki Komunitas Madura*

Desain awal dari disertasi saya ini adalah mencoba memahami relasi antar etnis di kota Sampit dengan memberi tekanan kepada suara orang-orang Madura sebagai “suara orang kalah” dalam kerusuhan Februari 2001. Ide awal disertasi inipun justru karena ketertarikan saya terhadap berbagai dialog dengan orang-orang Madura sekitar tahun 2005. Representasi orang-orang Dayak di ruang publik Kalimantan Tengah sudah sangat terwakili melalui Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT), tulisan dan berita di media massa, maupun pembicaraan di ruang publik yang seolah-olah memberikan pernyataan bahwa kerusuhan terjadi karena ulah orang Madura yang tidak mau beradaptasi dengan situasi lokal. Oleh elite Dayak sering disebut *belum dia bahadat* atau tidak mau mengikuti pepatah “*dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*”. Selain itu, walaupun ada suara-suara dari kalangan Madura, maka yang terdengar adalah suara dari kalangan elite yang disebut dengan IKAMA (Ikatan Keluarga Madura). Saya tertarik untuk mendengar suara-suara dari kalangan

masyarakat biasa mengenai relasi antar etnis ini. Karena sesungguhnya suara dari kalangan rakyat biasa inilah yang mencerminkan denyut keseharian masyarakat di kota Sampit (*everyday life's of people*).

Orang Madura pertama yang saya temui adalah seorang petani di wilayah desa Parebok, Samuda, sekitar 40 kilometer dari kota Sampit pada tahun 2005. Pada saat itu, ia baru sekitar 6 bulan kembali ke rumahnya. Sebuah rumah sementara karena rumah asli dibakar. Ketika saya mengamati rumah-rumah lain disekitarnya, terlihat ada rumah yang mempunyai tulisan “Rumah Banjar”. Tulisan tersebut dibuat agar pada saat kerusuhan rumah itu tidak diganggu, karena dianggap dimiliki orang Banjar. Namun ternyata rumah tersebut dirusak juga. Namun orang Madura ini tidak menjadi informan kunci dalam disertasi ini, karena waktu pertemuan yang terbatas dan kemudian ketika saya kembali ke kampungnya tidak dapat bertemu lagi. Namun, inilah pertemuan pertama dengan orang Madura pasca kerusuhan Februari 2001 yang memberikan kesan kepada saya tentang bagaimana situasi kekhawatiran masih terasa. Orang Madura kedua yang saya temui ada di daerah kabupaten Pulang Pisau, berjarak sekitar 300 kilometer dari kota Sampit. Ia adalah seorang ketua RT pada satu-satunya kampung Madura di kabupaten Pulang Pisau. Seperti halnya orang Madura di Parebok Samuda, iapun baru sekitar 6 bulan kembali dari pulau Madura dan sedang menata kembali kebunnya. Orang Madura inilah yang memberikan inspirasi mengenai pemahaman etnisitas orang Madura terhadap orang Dayak, sekaligus membawanya menjadi sebuah disertasi ini. Namun orang Madura ini tidak dapat menjadi informan kunci, karena ia tinggal di kabupaten Pulang pisau dan tidak dapat saya wawancarai secara intensif.

Selanjutnya banyak orang-orang Madura-Sampit yang saya temui di Pangkalan Bun, Palangka Raya, Jember, Surabaya dan kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan pada berbagai kesempatan. Ada wawancara yang dapat dilakukan dalam durasi yang lama, tetapi ada pula yang dilakukan singkat-singkat. Namun telah memberikan

pengetahuan tentang beragamnya kisah-kisah orang Madura-Sampit pasca kerusuhan.

Para informan kunci saya, Pak Sadi, pak Tosan, pak Masarah, Ramli dan Bibi Nurani, dapat saya jumpai melalui cara-cara perkenalan yang berbeda-beda. Dalam bab 5 akan dibahas bagaimana perkenalan dengan informan kunci tersebut. Namun, pemilihan lima orang tersebut mempunyai makna tertentu yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian dari disertasi ini, yaitu untuk mengetahui relasi antar etnis dari berbagai perspektif.

Pak Sadi mewakili “tokoh Madura” yang bukan berasal dari kalangan “elite Madura”, yaitu dengan cara menolak menjadi anggota IKAMA. Ia juga dianggap sebagai orang Madura yang tingkat ekonominya sebelum kerusuhan cukup mapan. Ia juga mewakili orang Madura yang menggunakan jaringan pertemanan dengan orang Dayak agar dapat kembali ke Sampit pasca kerusuhan. Pak Tosan adalah “tokoh Madura” dalam artian satu-satunya orang Madura yang pernah menjabat sebagai lurah di kota Sampit. Kemudian pak Masarah, adalah contoh seorang PNS Madura yang benar-benar memulai karirnya dari bawah. Ramli mewakili kelompok anak muda Madura yang bekerja sebagai petani, kemudian mengalami perlakuan diskriminatif karena ke-Madura-an nya. Sedangkan Bibi Nurani mewakili kisah perempuan Madura dalam menghadapi situasi pasca konflik kekerasan, termasuk penolakan dalam berusaha dan juga pelecehan seksual dalam posisinya sebagai orang Madura.

Selain itu, tentunya masih banyak orang-orang Madura lainnya yang sempat diwawancarai oleh saya dalam berbagai pertemuan singkat dan dicatat dalam catatan lapangan saya. Beberapa belas anak muda Madura yang bertemu di “Makam Massal”, kakak-beradik anak dari Bapak Wakir Saleh yang bergerak dalam bidang bisnis perumahan dan rumah makan, tamu-tamu yang datang ke rumah Ramli, para pembeli *pencok* di warung Bibi Nurani.

Selain itu saya juga sempat mengunjungi Surabaya, Jember dan Pulau Madura. Ketiga tempat tersebut merupakan lokasi-lokasi dimana populasi orang Madura cukup banyak, termasuk orang-orang Madura yang berasal dari Sampit. Namun intensitas pertemuan saya dengan orang-orang Madura terjadi di Jember dan pulau Madura. Pertemuan dengan Dr Latief Wiyata, Antropolog yang menulis disertasi tentang “*Carok*” sangat membantu saya untuk dapat memasuki komunitas akademik dan aktivis Madura di Jember dan pulau Madura, termasuk Pusat Kajian Madura Universitas Jember⁹.

Kunjungan juga dilakukan ke kabupaten Sampang di Pulau Madura, khususnya di kecamatan Ketapang, Kecamatan Kedundung dan Kecamatan Sampang kota. Saya banyak bertemu dengan orang-orang Madura eks-Sampit. Bahkan ada sebuah desa yang seluruh penduduknya berasal dari Sampit. Semua orang-orang Madura yang berasal dari Sampit ini sangat terbuka dalam berbicara dengan saya. Walaupun ada juga seseorang yang berkali-kali menelepon saya dan mengatakan mempunyai informasi yang akurat mengenai penyebab kerusuhan. Namun, saya tidak pernah bertemu muka dengan orang ini.

Kunjungan ke pulau Madura, khususnya ke tempat-tempat yang mempunyai keterkaitan dengan Sampit juga telah memberikan konteks mengenai migrasi orang-orang Madura keluar dari pulau Madura, khususnya migrasi ke wilayah pulau Kalimantan sejak masa kolonial (sekitar tahun 1920-an) hingga saat ini.

2.4.3. Komunitas Dayak dan Etnis Lainnya

Para informan saya yang berasal dari etnis Dayak di Sampit dan beberapa daerah lainnya di Kalimantan Tengah berasal dari berbagai kalangan. Khusus untuk para

⁹ Pusat Kajian Madura Universitas Jember, kemudian berubah nama menjadi Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pariwisata Universitas Jember. Perubahan nama lembaga ini banyak disesalkan oleh kalangan yang melihat bahwa Puslit Kebudayaan dan pariwisata ini lebih berorientasi “pasar” daripada menekuni kajian Madura yang tadinya hanya satu-satunya lembaga yang secara khusus meneliti masyarakat dan kebudayaan Madura.

informan yang ada di Sampit, saya menangkap ada kesan yang hati-hati ketika membicarakan masalah kerusuhan ini. Khususnya ketika saya datang pertama kali ke Sampit sekitar tahun 2005. Wawancara dengan tokoh-tokoh LMMDD KT antara lain dengan KMA Usop di Palangka Raya, Esra Pahan di Sampit dan Gatin Rangkai di Kasongan (Katingan). KMA Usop adalah seorang Profesor Universitas Palangara Raya, beragama Islam. Sedangkan Esra Pahan. adalah pensiunan PT Sampit Dajak dan kemudian PT Inhutani III. Gatin Rangkai adalah mantan Sekertaris Daerah Katingan. Esra Pahan dan Gatin Rangkai adalah Dayak Kristen. Selain itu saya juga mewawancarai Dewin Marang, tokoh Kaharingan Kotawaringin Timur. Tokoh-tokoh ini terkesan menghindar untuk berbicara secara lebih mendalam peristiwa kerusuhan dan mengatakan lebih baik melupakan saja peristiwa itu, karena hal tersebut merupakan musibah bagi semua orang. Kecuali Gatin Rangkai, karena ada hubungan personal antara saya dengannya, ia lebih terbuka untuk menceritakan peran orang-perorang dalam kasus kerusuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Jamie Davidosn, *everything is ethnography*, keseharian saya dalam penelitian di Sampit dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah menjadikan saya banyak berhubungan dengan orang-orang dari etnis Dayak dari berbagai tempat dan profesi. Beberapa nama yang ada di Sampit dan sekitarnya antara lain Najmi Fuadi seorang PNS yang aktif di KNPI; Tinggang Sofyan, aktivis muda Dayak, penulis buku tentang kerusuhan; kepala desa Luwuk Bunter di kecamatan Cempaga; Andien, pegawai BPS yang bangga menyebut dirinya keturunan Dayak-Sampit dan sangat mengetahui peranan orang-orang Dayak dalam berbagai pembunuhan. Kemudian berbagai diskusi yang saya lakukan di Sampit, Pangkalan Bun, Kasongan, Palangka Raya, Pulang Pisau, Tamiyan Layang (Barito Timur), Ampah (Barito Timur), Buntok (Barito Selatan), Muara Teweh (Barito Utara), dan Puruk Cahu.

Informan lainnya dari etnis Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, dan Cina. Selain itu juga keluarga-keluarga eks tentara KNIL yang sering disebut “orang Indo”. Saya juga

sempat mewawancarai anak-anak dari berbagai etnis untuk mengetahui ingatan mereka terhadap peristiwa kerusuhan. Misalnya ada kakak-beradik yang membolehkan saya untuk memfoto copy sebuah buku tentang kerusuhan, asal tidak diketahui oleh orang lain.

2.5. Gugatan Identitas dari Kalangan Dayak

Politik identitas menguat di Indonesia setelah reformasi tahun 1998. Hal ini terjadi juga di pulau Kalimantan. Berbagai konflik yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, isu “putra daerah”, konflik pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Namun, beberapa kasus di Kalimantan tentang politik identitas ini juga merambah pada masalah lainnya, misalnya gugatan tentang hasil publikasi sensus penduduk; gugatan hasil penelitian hingga gugatan tentang pernyataan yang dianggap merendahkan martabat suatu etnis¹⁰

2.5.1. Gugatan Terhadap Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000

Dinamika politik lokal yang terkait dengan identitas etnisitas juga terjadi di propinsi Kalimantan Barat, tetangga propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berkaitan dengan publikasi hasil sensus penduduk tahun 2000¹¹, dimana untuk pertama kalinya sejak jaman kemerdekaan sensus penduduk Indonesia menggunakan variabel etnisitas dengan pendekatan pengakuan dari penduduk yang dicacah. Sebelumnya, sensus dan

¹⁰ Misalnya tentang Peristiwa penghukuman adat terhadap Prof Dr Tamrin Amal Tomagola, guru besar Sosiologi Universitas Indonesia, oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Palangkaraya, setelah pernyataannya dikutip oleh media massa merupakan salah satu insiden, dimana karya akademik yang dihasilkan oleh suatu proses ilmiah tertentupun sangat rawan untuk diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks kepentingan politik dan dinamika lokal (Lihat, Pontianak Post, Edisi 10 Februari 2011, “*Thamrin Tomagola Bakal Digugat Pidana dan Perdata*”)

¹¹ Sensus Penduduk yang terakhir menggunakan variabel etnis adalah Sensus Penduduk tahun 1930 pada masa kolonial. Untuk wilayah Kalimantan lihat, *Department van Economische Zaken : Volkstelling 1930, Deel V Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Moluken* (Sensus 1930 di Hindia Belanda : Volume V, Penduduk Asli di Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau sunda kecil dan Maluku).

survey-survey lainnya menggunakan *proxy* variabel bahasa yang digunakan sehari-hari. Sebagai sebuah sensus yang baru pertama kalinya menggunakan variabel etnisitas tentu saja banyak mengandung kelemahan. Kelemahan utamanya adalah mengenai apa yang dimaksudkan dengan etnisitas sendiri tidak terdefiniskan dengan baik, sehingga seorang responden bisa saja menjawab latar belakang asal-usul suku bangsa, nama tempat tinggalnya, nama Daerah Aliran Sungai-nya, dan berbagai jawaban yang bersifat arbitrer dari informan. Selain itu, *database* nama-nama etnis itu sendiri belum dimiliki oleh BPS, sehingga jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden tidak dapat dikelompokkan kedalam nama-nama besaran etnis tertentu. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang mengelompokkan etnis dengan orientasi ras, seperti Melayu, India, China, Dayak, Dusun/Kadazan dan Orang Ulu.

Ketika publikasi hasil sensus penduduk 2000 diumumkan pada tahun 2001, awalnya timbul keberatan dari sejumlah intelektual Dayak Kalimantan Barat yang tidak menemukan kata “Dayak” dalam hasil sensus penduduk tersebut. Publikasi sebuah hasil sensus atau survey biasanya dilakukan dengan hanya mencantumkan nama-nama kelompok etnis yang jumlahnya signifikan. Sedangkan kelompok-kelompok etnik yang jumlahnya tidak terlalu besar dikelompokkan kedalam kelompok “lain-lain”. Oleh sebab itu, dalam hasil sensus penduduk Kalimantan Barat tahun 2000, jumlah penduduk “lain-lain” mencapai 31,2% dari seluruh jumlah penduduk.

Awalnya yang dilakukan oleh para intelektual Dayak di Kalimantan Barat adalah melakukan kritik melalui majalah bulanan yang mereka terbitkan, yaitu “*Kalimantan Review*”. Dalam edisi no 94 yang diulangi kembali dalam edisi khusus No III tahun 2003. Semua publikasi tersebut memberikan perhatian pada hasil sensus penduduk tahun 2000. Judul-judul dalam majalah tersebut juga sangat provokatif, diantaranya “Menghilangkan Dayak Melalui Statistik”, “Gubernur Melarang publikasi tentang informasi etnik di Kalimantan Barat”, “BPS diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat Dayak dan Melayu” dan “BPS memisahkan orang-orang Melayu”. Selain kritik dari kalangan intelektual Dayak, kemudian kelompok elite Melayu

mempertanyakan mengapa hanya dituliskan etnik “Sambas” dan “Melayu Pontianak”, padahal banyak sub-sub etnis Melayu ditempat lain yang tidak terwakili dengan adanya sebutan Melayu “Sambas dan “Pontianak”.

Kritik dari kaum intelektual Dayak dan Melayu ini menghasilkan dua hal , pertama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat dikenai hukuman adat yang disebut dengan *capa molot* (salah ucap). Kemudian BPS diminta untuk melakukan revisi terhadap publikasi hasil sensus penduduk tersebut. Hasil revisi diantaranya adalah kategori etnisitas untuk Dayak dan Melayu tidak dibagi-bagi lagi kedalam kelompok etnis yang lebih kecil dan hanya mencantumkan “Dayak” dan “Melayu”. (lihat tabel 2.1). Kemudian hasil revisi menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk Dayak dan Melayu sama, yaitu 33,75%, dengan perbedaan jumlah angka absolut hanya 80 orang. Hasil revisi ini, secara statistik dapat dipertanyakan validitasnya, mengingat komposisi antara Dayak dengan Melayu yang mempunyai persentase sama.¹². Kalangan intelektual Dayak meragukan hasil penghitungan ulang ini, dan mereka meyakini kalau populasi orang Dayak jauh lebih besar dari Melayu. Indikator yang mereka gunakan pada saat itu adalah dari 4 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Barat, 2 orang Dayak, 1 Melayu dan 1 non Dayak-Melayu.

Tabel 2.1. Komposisi Etnis di Propinsi Kalimantan Barat sebelum dan sesudah revisi

Nama etnis	Kelompok	SP 2000 sebelum revisi		SP 2000 sesudah revisi		Data Susenas 2002
		Jumlah	%	Jumlah	%	%
Lain-lain		1,362,424	31,2	69,194	1,85	0,34
Sambas**)		444,929	11,92	Lihat Melayu Kalbar		-
Cina		352,937	9,46	373,69	10,01	10,16
Jawa		341,173	9,14	351,152	9,41	9,63
Kendayan*)		292,39	7,83	Lihat Dayak		

¹² Dalam sebuah wawancara dengan seorang staff BPS Kalimantan Barat ia mengatakan, “Saya harap penghitungan ini salah, karena publik akan curiga bahwa kami melakukan rekayasa data untuk membuat kelompok Dayak dan Melayu saling mendinginkan diri. Namun kami telah berulang kali melakukan cek ulang, ternyata hasilnya sama yaitu Dayak dan Melayu adalah sama dari segi persentase jumlah penduduk. (Wawancara dengan staff BPS Kalimantan Barat, April 2004)

Melayu (Pontianak **)	280,107	7,5	Lihat Melayu Kalbar		37,96
Darat*)	275,914	7,39	Lihat Dayak		
Madura	203,612	5,46	205,55	5,51	3,67
Pesaguan*)	178,933	4,79	Lihat Dayak		
Bugis	120,846	3,24	123	3,29	3,81
Sunda	45,064	1,21	45,092	1,21	1,41
Banjar	24,117	0,65	24,756	0,66	0,58
Minangkabau	7,493	0,2	N/A		0,26
Betawi	1,849	0,05	N/A		N/A
Banten	1,454	0,04	N/A		N/A
Dayak	N/A	N/A	1,259,802	33,75	31,11
Melayu Kalbar	N/A	N/A	1,259,890	33,75	N/A
Total	3,732,419		3,732,950	100	100

Sumber : (a) Raw data BPS (b) BPS Kalimantan Barat via Kalimantan Review , Special edition III/2003, p.28

Note : *) Termasuk sub etnis Dayak; **) Termasuk sub etnis Melayu

2.5.2. Gugatan Identitas Agama Lokal

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI (PMB LIPI) mempunyai seri penelitian tentang agama lokal yang memilih beberapa agama lokal sebagai fokus kajiannya, diantaranya adalah sunda wiwitan pada masyarakat Baduy di Banten Selatan dan agama lokal Kaharingan di Kalimantan Tengah¹³. Tujuan dari penelitian adalah upaya inventarisasi terhadap keberadaan agama lokal yang keberadaannya terancam. Selain itu, para peneliti tampak mempunyai kepedulian dan keberpihakan untuk membela keberadaan agama lokal yang semakin terancam keberadaannya.

Namun, dalam penelitian tim tersebut mengenai agama Kaharingan di Kalimantan Tengah hasil penelitian tersebut mendapatkan kritikan dari organisasi keagamaan Kaharingan, para intelektual dan kelompok masyarakat sipil. Pihak organisasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan akan menuntut LIPI secara adat Dayak dan agama Kaharingan. Kemudian NGO yang ada di Kalimantan Tengah membuat somasi agar LIPI meminta maaf kepada orang Dayak secara keseluruhan dan para penganut agama Kaharingan secara keseluruhan¹⁴

¹³ Judul buku itu adalah, Ibnu Qoyim (ed) "Agama dan Pandangan Hidup : Studi tentang Local Religion di Beberapa Wilayah Indonesia (Studi Tentang Kaharingan di Masyarakat Dayak Kalimantan dan Sunda Wiwitan di Masyarakat Badui Banten)". 2003.

¹⁴ Lihat Notulensi Diskusi Buku Terbitan LIPI, Palangka Raya 15 Februari 2005,

Masalah yang dipersoalkan oleh kalangan penganut agama Kaharingan, para intelektual dan kelompok masyarakat sipil adalah pernyataan yang terdapat dalam laporan tersebut, yang mengatakan bahwa...”Nampaknya pengaruh agama Kaharingan tidak dapat membendung dan mengatasi persoalan tersebut diatas. Upacara Tiwah justru dimohonkan agar arwah leluhur turut datang dan berperan serta dalam mengenali suku Madura dengan cara merasuk diri kelompok Dayak yang sedang marah (amuk). Etnik Dayak yang kesurupan (dimasuki roh nenek moyangnya benar-benar mencari satu persatu orang madura dimana saja mereka berada).

Pernyataan dalam laporan tersebut dianggap tidak mempunyai pijakan fakta di lapangan dan ditafsirkan secara keliru. Pertama, upacara Tiwah adalah upacara yang spesifik, yaitu ritual untuk mengantarkan kerangka jenazah yang meninggal sesuai dengan ajaran Kaharingan dan tidak ada kaitannya dengan pemanggilan roh nenek moyang agar orang-orang Dayak yang terlibat dalam kerusuhan di Sampit mengalami kesurupan (*trance*). Pada saat kesurupan itulah akan mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang orang Madura dan bukan Madura¹⁵

2.6. Kesimpulan Bab 2

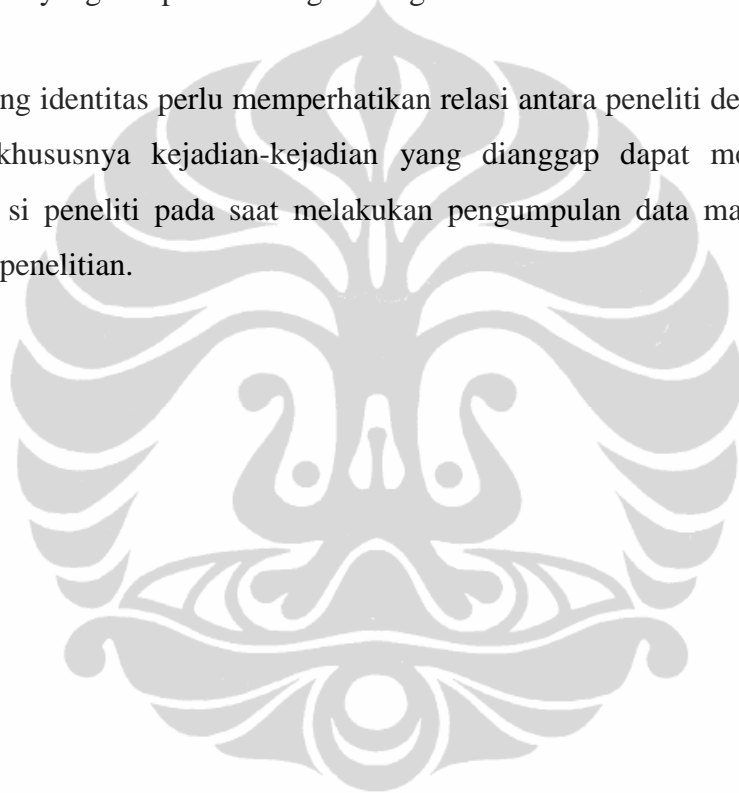
Bab ini merupakan suatu refleksi metodologis untuk memahami bagaimana teknik pengumpulan data dilakukan, cara-cara memasuki komunitas yang diteliti dan berbagai masalah yang ada di lapangan terkait dengan penelitian identitas. Dalam bab ini diperlihatkan bagaimana “suasana bathin” dari peneliti ketika melakukan

¹⁵ Pada saat kerusuhan beredar rumor bahwa orang-orang Dayak diberi kemampuan supra natural untuk mengidentifikasi orang-orang Madura, sehingga ketika melakukan pembunuhan selalu tepat sasaran dan hanya orang Madura saja yang akan dibunuh. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *sweeping* terhadap orang Madura dilakukan dengan cara menyuruh mereka untuk menyebutkan warna-warna, karena orang Madura kan sulit menyebut warna kuning dengan pengucapan “kuning”, mereka akan mengucapkan kata “koneng”. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Dayak yang berasal dari wilayah pedalaman mampu mengenali orang-orang Madura karena diberi petunjuk oleh orang-orang Dayak maupun etnis lainnya yang menjadi tetangga dari orang madura tersebut yang tidak menyukai keberadaan orang Madura tersebut, sehingga dengan mudah orang-orang Dayak yang tidak mengenal orang madura itupun dapat membunuhnya.

penelitian tentang identitas etnis, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan antar etnis.

Penelitian seperti ini mengharuskan peneliti untuk terus-menerus melihat kaitan antara satu tempat dengan tempat lainnya (*multi sited*). Karena pada setiap tempat mempunyai kesejarahannya masing-masing. Kesejarahan itu yang membentuk tindakan-tindakan yang ada pada masing-masing komunitas.

Penelitian tentang identitas perlu memperhatikan relasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti, khususnya kejadian-kejadian yang dianggap dapat mempengaruhi suasana bathin si peneliti pada saat melakukan pengumpulan data maupun proses penulisan hasil penelitian.



BAB 3

KOTA SAMPIT : LANSEKAP WILAYAH, PENDUDUK, ETNISITAS DAN KESEJARAHAN

Bab ini akan mendeskripsikan Kota Sampit dalam dimensi keruangan dan kesejarahan. Dalam dimensi keruangan, diperlihatkan posisi kota Sampit dalam konteks ruang propinsi dan ruang nasional, termasuk aksesibilitasnya dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Tengah, maupun kota-kota lainnya di pulau Kalimantan maupun pulau Jawa. Kemudahan akses transportasi darat, sungai, laut dan udara menjadikan interaksi antara kota Sampit dengan kota lainnya terjalin. Sedangkan dari lintasan kesejarahan kota Sampit, terekam dalam dokumentasi sejarah, maupun yang didapatkan dari penuturan lisan. Aspek keruangan dan kesejarahan ini, pada intinya akan memfokuskan pada dinamika etnisitas yang terjadi, termasuk mengenai sejarah dan dinamika dari orang-orang Madura yang ada di kota Sampit, termasuk ruang-ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya dari waktu ke waktu.

3.1. Letak dan Demografi

Sampit adalah ibu kota kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, ada tiga kecamatan yang ada di wilayah kota Sampit, yaitu kecamatan Baamang, kecamatan Mentawa Baru/Ketapang dan kecamatan Seranau (pemekaran). Dari ibu kota propinsi, yaitu Palangkaraya, kota Sampit berjarak sekitar 220 km, dapat dicapai melalui jalan darat. Sehingga semua jenis kendaraan angkutan darat dapat dengan mudah mencapai kota Sampit (**lihat peta 3.1.**)

Selain itu jaringan sungai, khususnya Sungai Mentaya sepanjang 400 kilometer dari wilayah hulu hingga hilir menjadikan transportasi sungai penting. Transportasi sungai ini penting untuk diketengahkan, mengingat pada masa kekerasan komunal terjadi menjadi jalan masuk bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam

pertikaian. Jalan sungai inilah yang justru dilupakan peranannya oleh aparat keamanan yang berasal dari luar Kalimantan, mengingat pasukan tersebut lebih terbiasa dengan tradisi jalan darat yang ada di pulau Jawa.

Peta 3.1. Kalimantan Tengah



Selain itu, Sampit juga mempunyai akses langsung dengan kota-kota di pulau Jawa (**Peta aksesibilitas pelabuhan**), mengingat adanya pelabuhan sungai yang dapat dimasuki oleh kapal-kapal penumpang maupun barang dari pulau Jawa. Hubungan langsung melalui jalan laut inilah yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar pulau telah terjalin sejak lama, khususnya migran dari pulau Jawa dan Madura. Keberadaan industri kayu sejak akhir tahun 1940-an, ditambah dengan maraknya pemberian ijin HPH sejak akhir tahun 1960-an menjadikan Sampit sebagai kota yang penting untuk kantor-kantor perusahaan yang menimbulkan efek munculnya berbagai

Peta 3.2. Aksesibilitas pelabuhan

usaha lain. Munculnya peluang-peluang baru inilah yang menjadikan Sampit menjadi daerah tujuan dari para migran spontan, baik dari wilayah Kalimantan Selatan dan pulau Jawa, khususnya orang-orang Jawa dan Madura. Migran spontan ini jumlahnya jauh lebih besar daripada para transmigran di daerah tersebut yang programnya tidak sukses di wilayah Kabupaten Kapuas.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) adalah daerah otonom yang wilayahnya diperkecil dengan adanya pemekaran kabupaten Seruyan dan kabupaten Katingan pada tahun 2002. Sebagaimana pada umumnya wilayah di propinsi Kalimantan Tengah, kabupaten Kotim mempunyai dua andalan sumber daya alam, yaitu hasil kayu dan perkebunan Sawit.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk di Propinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Etnis tahun 2000 (dalam %)

Etnis	Kobar	Kotim	Kapuas	Barsel	Barut	Palangkaraya	Total
Banjar	28,46	17,05	34,66	25,53	6,13	27,79	24,29
Bugis	0,44	0,34	0,06	0,14	0,14	0,29	0,23
Cina	0,57	0,38	0,03	0,02	0,04	0,23	0,22
Dayak	18,01	53,18	45,52	64,30	80,54	38,42	48,79
Jawa	37,30	18,07	15,01	7,02	8,71	23,27	18,23
Madura	5,81	7,00	1,05	0,15	0,14	3,75	3,48
Lain-lain	6,24	2,69	2,37	2,39	3,58	5,29	3,37
Sunda	3,19	1,29	1,30	0,45	0,72	0,95	1,38
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.1. memperlihatkan komposisi penduduk berdasarkan etnis di propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya dengan menggunakan persepsi negara melalui Sensus Penduduk tahun 2000.

Data-data yang disajikan diatas merupakan hasil pengolahan dari data mentah (*raw data*) hasil sensus penduduk tahun 2000. Data mentah ini didapatkan dari pengumpulan data oleh para pencacah, dimana para pencacah sendiri mempunyai interpretasi yang berbeda-beda ketika mendapatkan jawaban dari para responden.

Data-data hasil sensus penduduk ini perlu dibaca dengan hati-hati, khususnya bagaimana konstruksi negara terhadap kelompok etnis yang disebut dengan Dayak. Walaupun dalam sensus penduduk itu sendiri telah dibekali dengan koding (kode penyebutan) untuk menyebut nama-nama kelompok etnis di Kalimantan Tengah. Tetapi koding itu sendiri merupakan konstruksi kesepakatan dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga memunculkan nama-nama seperti Ot Danum, Tomun, Katingan, Sampit, Ngaju, Bakumpai, Dusun, Manyan, Lawangan dan sebagainya.

Berbeda dengan konstruksi etnisitas di Kalimantan Barat, yang memberi garis tegas antara etnis Dayak dengan Melayu berdasarkan agama yang dianut. Etnis Dayak merujuk pada konstruksi masyarakat asli yang tidak beragama Islam. Maka pada masyarakat Kalimantan Tengah antara ke-Dayak-an dan ke-agama-an relatif tidak dapat ditarik garis yang tegas. Misalnya Dayak Ot-Danum terbelah menjadi dua kelompok besar berdasarkan agama, yaitu Protestan (48%) dan Kaharingan (42%), sisanya terbagi antara Islam dan Katolik dalam jumlah yang tidak signifikan. Sementara “Dayak Ngaju” terbagi antara penganut Islam, Protestan dan Kaharingan. Persentase dari masing-masing penganut sangat mungkin tidak akurat, tetapi angka-angka ini memberikan suatu kecenderungan tertentu saja yang perlu dikaji secara lebih mendalam pada tataran empiris atau yang lokal-spesifik, mengingat identitas itu sendiri berubah secara dinamik mengikuti kepentingan-kepentingan tertentu dari para pendukungnya.

Dengan konstruksi seperti dalam tabel 3.1 tersebut, tampak bahwa etnis “Dayak” di Kalimantan Tengah hampir 50% dari jumlah penduduk, diikuti oleh etnis Banjar yang mencapai lebih dari 24%, kemudian Jawa sekitar 18% dan Madura hampir 3,5%. Pola yang hampir sama dapat dilihat pada komposisi penduduk berdasarkan etnis di kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Dayak, Jawa, Banjar dan Madura. Namun kalau lebih mendalami menilik pada kota Sampit, maka komposisinya agak berbeda, yaitu persentase penduduk pada tahun 2000 terlihat etnis Banjar lebih dari 28%, Dayak Sampit 21%, Jawa hampir 23% dan Madura lebih dari 19%. Dari data-data tersebut tampak bahwa ruang geografis kota Sampit ini terbagi kedalam empat kelompok etnis terbesar yang dapat dilihat pula representasinya dalam ekspresi-ekspresi politik dan ekonomi di Kotim.

Dalam hal penguasaan akses politik, misalnya pada tahun 1999-2004, pada saat sistem pemilihan umum masih belum pemilihan langsung dari sekitar 31 jumlah anggota DPRD Kotim 7 orang etnis Dayak yang beragama Islam, 3 orang Dayak Kristen dan 1 Kaharingan, 17 orang Banjar, 2 orang Jawa, 2 orang Madura. Sedangkan hasil Pemilu untuk anggota DPRD tahun 2004 menunjukkan adanya perbedaan komposisi, yaitu 16 orang etnis Dayak yang beragama Islam, 4 orang Dayak yang beragama Kristen dan Kaharingan, 7 orang Banjar dan 3 orang dari masing –masing Bugis, Padang dan Cina. Sedangkan dalam jabatan eksekutif setingkat eselon 2 , pada periode 1994-1999 ketika Bupatianya dipimpin oleh seorang Kolonel dari etnis Jawa, terdapat 3 orang Dayak beragama Islam, 14 etnis Dayak beragama Kristen, 4 orang Banjar, 8 orang Jawa dan 1 orang Batak. Kemudian pada tahun 1999-2004, ketika bupatianya adalah seorang dari etnis campuran Banjar dan Madura, jumlah kepala dinas di kabupaten tersebut terdiri dari 4 orang Dayak Islam, 9 Dayak Kristen, 12 orang Banjar, 4 orang Jawa dan 1 orang Batak. Posisi jabatan kepala dinas dalam struktur birokrasi kabupaten sangat tergantung keinginan dari bupati, mengingat para kepala dinas ini adalah para pembantu utama bupati dalam stuktur birokrasi kabupaten.

Dalam hal penguasaan asset-asset ekonomi di tingkat kabupaten Kotim, beberapa posisi yang seringkali dianggap penting dari segi perputaran uang adalah pada posisi perusahaan jasa konstruksi. Hingga awal tahun 2001, sekitar 27% pengusaha konstruksi adalah orang Madura dan sekitar 49% adalah yang disebut “Dayak Sampit”. Pasca kerusuhan tidak ada lagi pengusaha jasa konstruksi berasal dari etnis Madura, namun bisnis ini dikuasai oleh para pengusaha dari etnis Dayak sekitar 80%, sisanya pengusaha Jawa dan Banjar. Sedangkan sektor informal di pasar yang sebelumnya dikuasai oleh kalangan pedagang Madura, kemudian pasca kerusuhan dikuasai oleh Banjar dan Jawa. Demikian halnya di wilayah pelabuhan yang sebelumnya dikuasai oleh buruh yang berasal dari Madura, karena ketua buruh angkutnya berasal dari Madura dan bahkan sempat menjadi anggota DPRD dan ketua IKAMA Kabupaten Kotawaringin Timur, maka setelah kerusuhan wilayah pelabuhan dikuasai oleh orang-orang setempat yang sering disebut sebagai Dayak Sampit.

3.2. Dimensi Sejarah

Sumber-sumber tertulis mengenai kota Sampit dalam bahasa Indonesia relatif belum terlalu banyak. Sejauh ini belum ada sejarah kota Sampit yang ditulis untuk kepentingan pemerintah daerah, maupun untuk kepentingan lainnya. Kota Sampit, mulai banyak ditulis setelah terjadi kekerasan antar etnis pada bulan Februari 2001. Kemudian banyak tulisan-tulisan yang bersifat parsial, seperti laporan jurnalistik, laporan-laporan tentang HAM dan laporan resmi pemerintah tentang situasi kerusuhan.

Bagian-bagian tulisan dari almarhum Masdipura, mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber tertulis dari sejarah Kotawaringin Timur. Hingga kini, saya sendiri belum mendapatkan naskah buku asli tersebut. Namun tulisan inilah yang dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menetapkan hari jadi kota Sampit oleh pemerintah. Hingga

kini, belum ada pihak yang memberikan sanggahan terhadap hari jadi kota Sampit tersebut. Oleh sebab itu, untuk sementara dapat dikatakan bahwa interpretasi yang diberikan oleh Madipura menjadi pegangan dalam memahami salah satu bagian dari berdirinya kota Sampit.

Ketiadaan sumber tertulis mengenai sejarah Sampit ini, mengakibatkan sumber-sumber yang bersifat lisan dapat menjadi salah satu pegangan untuk melihat perkembangan kota Sampit. Sumber-sumber lisan ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa orang yang secara umumnya berusia diatas 70 tahun. Lazimnya sumber lisan, maka terdapat berbagai variasi

3.2.1. Sejarah kedatangan orang Madura di Sampit dan persebaran permukiman

Sampit, awal mulanya adalah kota yang sebagian besar dihuni oleh etnis Dayak. Etnis Madura adalah etnis pendatang. Dibawa oleh orang-orang Belanda pada tahun 1920an sebagai buruh-buruh diperkebunan kelapa dan karet di Sampit. Setelah itu, baru menyusul etnis – etnis dari daerah lain utamanya Jawa, yang juga dibawa oleh Belanda sebagai buruh perkebunan, Banjar, kemudian Cina yang mulai ada saat Sampit mulai tumbuh menjadi kota kecil.

Sampit adalah salah satu tujuan bagi penduduk yang melakukan migrasi (migrant), yang berasal dari hampir seluruh Indonesia. Para migrant, yang berbeda-beda etnis tersebut menganggap Sampit adalah kota yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada saat datang, mereka membawa adat kebudayaan masing – masing. Karenanya sangat beralasan untuk menyebut Sampit sebagai kota bagi masyarakat plural, berdasarkan banyaknya etnis yang ada di kota tersebut. Proses asimilasi antara mereka yang berbeda etnis di Sampit, telah berlangsung lebih dari 80 tahun. Tetapi ternyata tidak mampu mencegah terjadinya konflik etnis. Jurang pemisah pada komunitas antar etnis yang ada, berkembang semakin lama semakin dalam.

Memisahkan antar kelompok etnis yang satu dengan yang lain. Pembangunan permukiman baru bagi para migrant, ternyata juga membuat mereka mengakuisisi lahan milik penduduk asli. Berdasarkan data-data terakhir sebelum konflik etnis meletus (2001), terdapat perkembangan yang tidak terencana pada perkampungan – perkampungan Madura di Sampit. Kelompok etnis Madura yang ada, cenderung membawa masuk keluarga atau sanak saudara mereka dalam jumlah yang cukup besar ke Sampit. Sehingga permukiman Madura yang ada, menjadi makin sesak. Mereka juga banyak membangun pesantren baru di bagian pusat kota Sampit, yang sebetulnya direncanakan untuk pengembangan pusat perdagangan.

Dari data yang telah dikumpulkan, didapat adanya periode-periode tertentu yang terkait dengan kedatangan orang-orang Madura ke Sampit. Menurut orang-orang Dayak-Sampit, mereka mulai mengenal adanya permukiman orang Madura di sekitar tahun 1920an – 1930an. Saat itu, kelompok permukiman Madura yang dikenal adalah beberapa lokasi di Mentaya Seberang dan 1 (satu) lokasi di area perusahaan perkebunan Belanda yang biasa disebut *brengsel* oleh penduduk sekitarnya. Selanjutnya pada tahun 1940an. Permukiman Madura mulai berkembang dan tersebar di sekitar daerah Sawahan dan sekitar Jalan S.Parman saat ini. Karena adanya perkembangan permukiman etnis lain dan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh kolonial Belanda serta misionaris yang mulai berdatangan, maka kelompok etnis Madura yang berikutnya datang di tahun 1950an mulai membuka lahan baru di bagian Utara, yang kini dikenal sebagai daerah Baamang . Disana mereka lebih leluasa untuk membuka lahan pertanian baru.

Perkembangan berikutnya, tahun 1960an adalah persebaran permukiman Madura di sekitar anak sungai Mentaya, yaitu sepanjang sungai Pamuatan. Permukiman ini menyebar memanjang hingga ke Brengsel. Pada dasa warsa berikutnya, 1970an persebaran mulai mengarah ke selatan kota Sampit, serta mulai memadat di area tengah kota pada periode 1980an. Selain itu, periode 1970an dan periode 1980an, tampaknya merupakan awal kejayaan etnis Madura di Sampit. Lahan permukiman

yang mulai mendominasi kota dan jenis –jenis pekerjaan tertentu yang terkait dengan dominasi etnis Madura, mulai berkembang pada 2 periode ini. Dari sini, kemudian permukiman Madura mulai memadat di bagian tengah kota hingga sesaat sebelum konflik 2001. Saat itu, diperkirakan kondisi permukiman Madura sudah sedemikian padat dan anggota kelompok etnisnya yang mengisi ruang-ruang kosong pada fasilitas umum, seperti pasar dan area pedagang kali lima.

3.2.2. Industri Kayu di Sampit dan Peran Bruenzyl ¹

Kesejarahan kota Sampit sangat erat kaitannya dengan dinamika industri kayu yang ada di daerah itu sejak akhir dekade 1940-an hingga waktu sekarang. Usaha kayu sebagai industri dimulai dengan kehadiran PT *Bruenzyl Dajak Houdbrijven* (BDH), sebuah usaha kayu kepunyaan swasta Belanda yang memfokuskan industri pengolahan kayunya di kota Sampit, namun wilayah konsesi hutannya sangat luas dan ada di luar kota Sampit. PT BDH diberi monopoli konsesi hutan oleh Dewan Dayak Besar mulai tahun 1947. Namun, masa hidup perusahaan ini tidak terlalu lama. Semangat nasionalisasi yang dikumandangkan oleh pemerintah pusat di Jakarta pada waktu itu menjadikan BDH menjadi salah satu perusahaan yang harus dinasionalisasi.

Kemudian pergolakan politik yang menentang keberadaan perusahaan Belanda dan orang-orang Belanda sejak tahun 1956. Selain itu aksi-aksi yang dilakukan oleh elemen Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menentang perusahaan-perusahaan bergaya kapitalis di kota Sampit membuat industri ini tidak berlangsung lama. Dapat dikatakan dari dekade 1940-an hingga awal 1970-an industri kayu di kota Sampit bersifat monopoli, baik yang diberikan oleh Dewan Dayak Besar kepada PT BDH maupun oleh pemerintah Indonesia kepada penerus BDH, yaitu PT Dayak Sampit dan Perhutani. Namun dengan adanya Undang-Undang Pokok Kehutanan no 5 tahun

¹ Bagian ini merupakan sintesis dari hasil wawancara dengan Esra Pahan (tokoh Dayak, mantan pegawai PT Inhutani III);

1967 monopoli industri kehutanan ini bergeser pada pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada kartel-kartel yang dekat dengan penguasa Orde Baru, termasuk dari kalangan militer.

Kemudian industri kayu mengalami masa-masa puncak sejak tahun 1970 hingga 1990, dimana merubah dinamika kota Sampit, termasuk derasnya arus migran masuk ke kota Sampit, utamanya berasal dari tiga titik, yaitu Pulau Madura, Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan. Kemudian titik balik kehancuran industri kayu di kota Sampit berjalan sejak pertengahan dekade 1995 dan puncak kehancurannya sejak tahun 2000 yang ditandai dengan penutupan berbagai industri kayu dan pengurangan jumlah pegawai di lingkungan PT Inhutani III.

Keberadaan NV BDH sangat penting dalam mengubah keberadaan kota Sampit, termasuk dinamika-dinamika yang menyertainya. Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan digambarkan narasi perkembangan PT BDH dalam ingatan kolektif dalam beberapa orang yang mengalami langsung keberadaan PT BDH. Terdapat tiga orang yang memberikan narasi berdasarkan pengalaman kesehariannya dengan PT BDH, yaitu Bapak Esra Pahan, Bapak Anang dan Bapak Adenan. Ketiganya pernah bekerja di PT BDH dalam kapasitasnya yang berbeda.

Tahun 1949 BDH membuka operasinya pada saat penyerahan kedaulatan Belanda ke Indonesia. Penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Pada waktu itu Wapres Mohamad Hatta datang ke Sampit untuk pembukaan perusahaan. Keberadaan perusahaan BDH tidak terlepas dari konsesi yang diberikan oleh Dewan Dayak Besar². Konsesi diberikan meliputi tiga daerah aliran sungai yaitu, Katingan, Mentaya dan Seruyan.

² Dewan Dayak Besar eksis sesuai dengan konteks dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa 1945-1949.

Orangtua Esra Pahan adalah salah seorang Dayak yang berasal dari Desa Kandan yang merupakan pusat missionaris Gereja Kristen Protestan untuk sungai Mentaya. Orangtua Esra Pahan termasuk yang mempunyai kedudukan tinggi dalam perusahaan BDH. Ayahnya yang bernama Salmon Pahan, menduduki salahsatu jabatan di bagian tata-usaha. Sebagai seseorang yang menduduki jabatan *employee*, maka orangtuanya mempunyai beberapa hak istimewa, salah satunya adalah mempunyai hak untuk tinggal di permukiman khusus yang disediakan dengan berbagai fasilitas. Kedudukan *employee* ini kebanyakan dijabat oleh orang-orang Belanda.

Sebagai *employee*, keluarga ini berhak untuk tinggal di daerah yang sekarang disebut dengan jalan S Parman kota Sampit. Esra Pahan menggambarkan situais tempat tinggalnya dan hak-hak istimewa yang diterima keluarganya dalam tuturan sebagai berikut :

“Dulu ada istilah *employee* yang mempunyai hak istimewa. Jarang untuk orang pribumi, kebanyakan Belanda. *Employee* adalah tingkat karyawan yang mungkin sekarang adalah staff, yaitu seseorang yang mempunyai bawahan. Kalau pribumi masuk kesitu adalah keistimewaan karena masuk menjadi kelompok elite. Kelompok itu dapat fasilitas untuk membeli barang murah. Pada akhirnya ayah saya jadi *employee* dan dapat fasilitas istimewa. Kayak orang Belanda, kalau pagi dikasih roti dari *oven*. Ayah saya masuk kedalam kelompok itu dan dapat rumah dalam kompleks *employee*. Kompleks pada saat itu seperti perkampungan orang-orang Belanda. Penataan kompleks seperti itu seperti kita ada diluar wilayah Sampit. Mereka senang bunga-bunga, jadi kelihatan rapih. Kompleks itu ada di jalan Gatot Subroto sekarang, termasuk rumah saya sekarang. Kompleks PT Inhutani 3 sekarang ini adalah bangunan baru. Dari jalan Gatot Subroto sampai simpang 3. Istimewanya adalah, saya kalau libur bisa ikut kerja sebagai *part timer*. Sebagai anak *employee* dapat kerja dan digaji. Kerjanya adalah menghitung papan. Gaji tersebut bisa untuk ongkos sekolah”

Tuturan lisan dari Esra ini memberikan gambaran tentang adanya suatu kelas sosial tersendiri pada sekitar tahun 1947-1955, yaitu kelas *employee* yang mempunyai hak-hak istimewa sebagai pegawai di PT BDH. Esra Pahan adalah bagian dari kelompok elite Dayak yang telah tumbuh pada masa itu. Namun orangtuanya tidak terlibat dalam gerakan-gerakan elite Dayak untuk mendapatkan propinsi tersendiri yang lepas

dari Kalimantan Selatan pada tahun 1957. Kelas *employee* ini kebanyakan orang-orang Belanda, orang-orang Indo³, dan orang Dayak. Tidak ada keterangan yang mengatakan orang Banjar, Cina dan Madura menjadi bagian dari *employee*.

Dalam bagian lainnya, Esra juga menceritakan tentang adanya kelas sosial lainnya yang ada dalam jumlah yang jauh lebih besar dari kelompok *employee* ini. Ia mengatakan bahwa ada sejumlah besar karyawan kasar yang tinggalnya di barak-barak di daerah wilayah Pasar Kramat Sekarang. Pada saat itu ada sekitar 3-4 barak besar yang menjadi tempat tinggal para buruh. Perkampungan di pasar Kramat ini mempunyai historisitas tersendiri dalam relasinya dengan perusahaan kayu BDH, karena rumah-rumah yang dibangun di kampung Kramat berbahan dasar kayu yang berasal dari sisa-sisa pengolahan kayu di pabrik Bruenzyl. Dari situ juga dapat dilihat teknologi pemotongan kayu yang masih sangat kasar dan tidak efisien, yaitu masih menyisakan banyak limbah yang sebetulnya masih dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Namun karena pada masa itu kayu masih melimpah dan permintaan pasar kayu internasional hanyalah berupa papan, maka terbuangnya limbah tersebut belum menjadi isu yang penting seperti sekarang ini.

3.3. Gelombang Migrasi Orang Madura di Kota Sampit

Disertasi ini mencoba untuk melihat “tahapan-tahapan” kesejarahan di kota Sampit dengan melihatnya dari “lima gelombang migrasi” yang terjadi di kota Sampit yang mempengaruhi dinamika relasi antar etnis Dayak dan Madura. Lima gelombang itu adalah apa yang saya sebut sebagai gelombang para perintis (1920-1950), gelombang Brengsel (1950-1970), gelombang industri kayu (1970-2000), gelombang kembali terpaksa ke tanah Madura (Februari 2001) dan pulang ke Sampit (mulai tahun 2003

³ Tampaknya keterangan yang ada dalam tulisan Klinken (2008) tentang PT BHD yang mempunyai pekerja yang berasal dari tentara eks-KNIL yang kebanyakan berasal dari etnis Minahasa dan Maluku mendapatkan pembenaran disini. Selain itu, hingga kini masih ada beberapa “keluarga Indo”, yaitu mereka yang berasal dari etnis di Indonesia Timur yang mempunyai keturunan dengan orang-orang Eropa seperti Belanda dan Portugis, seperti keluarga Paul Targanski, keluarga Indo ini kebanyakan beragama Katolik.

hingga sekarang). Penggunaan metafora “gelombang” untuk memperlihatkan bahwa masuk dan keluarnya orang-orang Madura ke Sampit— *dalam realitasnya*-- tidak dapat dibagi kedalam suatu kronologi waktu yang ketat. Seperti halnya gelombang dilaut, tidak ada keterputusan dari satu gelombang ke gelombang lain, yang ada adalah menguat dan menyurut, tetapi merupakan satu rangkaian yang tidak terputus. Namun, dalam suatu penjelasan yang akademis, penggunaan peristiwa penting (*events*) diperlukan sebagai cara untuk melihat keterkaitan antara satu narasi dengan narasi lainnya. Penggunaan kata “tahapan” (dengan tanda kutip !) untuk menunjukkan bahwa penggunaan periodisasi bukanlah suatu kemutlakan yang penting, namun hanya memberikan konteks tertentu saja. Tahapan bukan berarti satu periode mempunyai tingkat kepentingan yang lebih tinggi daripada periode yang lain.

3.3.1. Gelombang Perintis : Migrasi Madura 1920-an

Rekonstruksi narasi tentang orang-orang Madura yang datang pada tahun 1920-an relatif agak sulit dijumpai dalam berbagai wawancara dengan para informan. Ingatan informan orang-orang Madura, ketika menceritakan tentang dirinya maupun tentang kedatangan orang-orang Madura ke Sampit, sejauh ini pada periode 1940-an, termasuk pada masa pendudukan Jepang. Namun, rekonstruksi tentang kedatangan orang-orang Madura di Sampit ini dapat dilihat dari tulisan dari Retno (2005) yang mengutip laporan kontrolir Belanda tentang adanya orang-orang Madura yang dipekerjakan di perkebunan gambir milik orang Jerman bernama Hilkie. Sedangkan nama Hilkie dan perkebunan gambir ini sendiri masih dapat dilacak dari wawancara dengan informan Dayak maupun Madura. Dari keterangan informan Dayak, khususnya Esra Pahan yang merupakan pensiunan PT Sampit Dajak, ia mengetahui nama Hilkie sebagai orang Jerman yang mempunyai usaha perkebunan gambir di Sampit, bahkan lokasi perkebunannya dapat dikenali dengan pasti. Sedangkan dari informan Madura, mereka tidak mengetahui nama pemilik perkebunan gambir tersebut, namun mereka tahu dengan pasti dimana lokasi perkebunan gambir tersebut. Informasi yang didapat dari mereka, bukan hanya pohon gambir yang ditanam,

melainkan juga pohon kelapa sawit, sehingga daerah itu, bagi kalangan orang berusia lanjut di Sampit disebut dengan daerah Kelapa Sawit.

Retno (2005: 92-100) dengan mengutip laporan yang ditulis oleh H.J Koerts dalam *Memorie van Over Gave, Kontrolir Sampit, Afdeeling Zuid en Oost Borneo, 1936* memberikan beberapa catatan penting tentang perkembangan kota Sampit dan keberadaan orang-orang Madura sebelum tahun 1930. Pertama, adanya permukiman penduduk di Sampit sejak tahun 1600-an. Kedua, penguasaan kolonial Belanda di daerah pedalaman Borneo, khususnya penunjukan penguasaan sipil pada tahun 1849 yang menempatkan Sampit (Teluk Telaga) sebagai pusat kedudukannya. Ketiga, terbukanya hubungan perdagangan antara Sampit dengan Singapura sekitar tahun 1895 dengan adanya perkebunan karet, serta adanya tokoh Belanda bernama Hilcken yang meninggal tahun 1935 yang mempunyai usaha perdagangan dan perkapalan Banjar serta produk kehutanan Hindia Belanda di Sampit. Usaha perkebunan dimulai sejak tahun 1911 dengan penanaman karet, gambir dan minyak kelapa sawit. Keempat, adanya penolakan dari orang-orang Dayak untuk tinggal dalam sebuah perkampungan yang didesain Belanda. Pihak Belanda tidak menyukai cara hidup orang Dayak yang menyebar dan tinggal di daerah hulu. Pemerintah Belanda telah berusaha keras untuk mendorong orang-orang Dayak di daerah hulu agar mau tinggal di daerah hilir dan dibawah pengawasan Belanda, tetapi usaha itu sia-sia. Kelima, orang-orang Madura yang dibawa oleh orang-orang Belanda pada tahun 1920-an sebagai pekerja di perkebunan kelapa, karet dan gambir di Sampit adalah kelompok etnis “pendatang” pertama yang tinggal dan bekerja di kota Sampit. Permukiman Madura yang ada pada tahun 1920-1930 terdapat di beberapa lokasi di Mentaya Seberang (sekarang kecamatan Seranau) dan lokasi *Brengsel*, yaitu bekas pabrik NV BDH, di sekitar jalan S Parman.

Selain arsip Belanda tersebut, untuk membuktikan adanya orang Madura di Sampit sekitar tahun 1920-an, saya menggunakan hasil sensus penduduk (*volkstelling*) tahun 1930 yang mengidentifikasi adanya 317 orang Madura di wilayah Kotawaringin

dan 261 orang Madura di Sampit. Hasil *volkstelling* tahun 1930 dapat menyanggah tentang pendapat bahwa Madura sebagai etnis pendatang pertama di kota Sampit dan wilayah Kotawaringin. Karena didalam daftar tersebut, selain etnis Dayak, juga terdapat etnis Banjar dan Jawa.

Bagi orang Madura, sejak lama mereka menganggap pulau Kalimantan adalah tujuan migrasi yang disebutnya dengan *Jaba Daja*⁴ (Jawa Utara), khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sebagai “lawan” dari *Jaba Daja* adalah *Jaba Lao* (Jawa Selatan), sebutan ini untuk menunjukkan wilayah Jawa yang menjadi daerah migrasi orang-orang Madura, khususnya daerah “tapal kuda” Jawa Timur, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan Jember.

Sudagung (2001 : 76-83) dalam studinya tentang migrasi swakarsa (*spontaneous migration*) di Kalimantan Barat memberikan argumen tentang adanya tiga tahap perpindahan orang Madura ke Kalimantan Barat, yaitu periode perintisan (1902-1942), periode surut (1942-1950) dan periode keberhasilan yaitu setelah tahun 1950. Salahsatu temuan Sudagung di Kalimantan Barat ---yang juga saya temukan di Sampit --- adalah mengenai orang-orang Madura yang datang pada periode perintisan itu terkait dengan “perdagangan budak” terselubung (ibid : 77). Perdagangan garam, sapi dan kambing, disertai dengan kemampuan perahu layar Madura dalam mengarungi lautan menjadikan migrasi orang-orang Madura ke wilayah Kalimantan menjadi lebih lancar lagi. Pada saat membawa barang-barang dagangan ini, para juragan kapal juga membawa orang-orang Madura yang akan di “jual” kepada orang-orang di tempat tujuan. Pada saat itu, sistem seperti ini dianggap sebagai uang tebusan yang diberikan oleh si majikan untuk mendapatkan buruh yang berasal Madura. Berdasarkan beberapa cerita, buruh-buruh orang Madura ini kemudian bekerja pada orang-orang di Sampit, tetapi kemudian mereka mampu untuk mempunyai tanah sendiri, dan kemudian mengolahnya sendiri dan terlepas dengan majikan lamanya.

⁴ Dialek lainnya menyebutnya ‘Cebe Deje

Generasi pertama orang-orang Madura yang ada di kota Sampit adalah mereka yang memang didatangkan untuk bekerja di perkebunan karet, kelapa sawit dan gambir. Kemudian setelah itu, diduga perahu-perahu layar Madura sedikit demi sedikit datang ke Sampit dengan membawa orang-orang Madura yang hendak bekerja pada orang-orang yang membayar tebusannya. Mereka adalah generasi perintis yang pada akhirnya mempunyai peranan memberikan “landasan” dari terbangunnya sub-kultur Madura di Sampit.

Generasi orang-orang Madura yang datang pada tahun 1920 hingga awal tahun 1940 memang sulit terlacak keberadaannya. Orang Madura terlama yang datang ke Sampit dan sempat diwawancarai adalah yang datang pada tahun 1942, pada saat jaman Jepang. Ingatannya memberikan konfirmasi bahwa pada saat ia datang di “jaman Jepang” orang-orang Madura sudah cukup banyak di daerah Sampit, selain adanya orang-orang Dayak dan orang Banjar. Iapun memberikan informasi kalau pada masa-masa itu tidak pernah terjadi konflik antara orang-orang yang berbeda etnisnya tersebut. Selain itu, masing-masing kelompok etnis sudah mempunyai jenis pekerjaan masing-masing, dimana orang-orang Madura pada saat itu sudah banyak yang bertani. Kemudian perdagangan dikuasai oleh orang-orang Cina. Orang-orang Dayak kebanyakan tinggal di wilayah hulu.

Sedangkan orang-orang Dayak yang ada di kota Sampit pada waktu itu, kebanyakan adalah dari orang-orang Dayak yang beragama Islam. Terdapat dua keluarga yang dianggap keluarga terpandang (*prominent family*) di kota Sampit. Yaitu keluarga besar Yosef yang pernah menjadi *pembekal* (semacam lurah) yang mempunyai usaha perdagangan karet, rotan dan hasil hutan lainnya. Kemudian ada keluarga Jungkir yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang kemudian dibeli oleh *Bruynzeel*.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang anak Yosef, terkesan orang tersebut sangat tidak menyukai orang-orang Madura di daerah tempat

tinggalnya. Menurutnya, orang Madura sering membuat *onar* dan mengambil tanah-tanah milik penduduk lokal. Walaupun ia sendiri tidak dapat membuktikan tanah mana yang diambil oleh orang-orang Madura itu. Oleh sebab itu, hingga kini kampung dimana keluarga Yosef tinggal masih menolak kembalinya orang-orang Madura dari pengungsian.

Sebagai keluarga besar yang dulunya dianggap sebagai keluarga terpandang baik secara sosial-ekonomi maupun pemegang kekuasaan lokal di Sampit, salah seorang anggota keluarga ini, yaitu keluarga H Asan telah berperanan untuk menyediakan tanahnya untuk dijadikan lapangan terbang Sampit. Namun karena adanya ketidakjelasan mengenai perjanjian penggunaan tanah tersebut maka hingga kini tanah lapangan terbang tersebut masih dalam sengketa dan seringkali ahli waris keluarga ini mengancam untuk menutup kegiatan di lapangan terbang.

Sedangkan ahli waris keluarga Jungkir pernah mengatakan kepada saya, bahwa orangtua mereka sebetulnya tidak setuju tanahnya digunakan oleh *Bruynzeel*, namun pada saat itu orangtua mereka tidak berani melawan pemerintah pada saat itu. Sehingga ahli warisnya berencana untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk mendapatkan ganti-rugi yang layak terhadap tanah yang sudah digunakan oleh *Bruynzeel*. Suatu hal yang dikenang oleh warga Sampit yang sempat mengetahui permasalahan ini adalah tuntutan dari keluarga Jungkir agar *Bruynzeel* membangun rumah pengganti yang sama dan sebangun dengan rumah yang dihancurkan di kompleks *Bruynzeel*.

3.3.2. Gelombang Migrasi 1950-1970 : Masa Brengsel

Penanda dari gelombang migrasi 1950-1970 adalah keberadaan perusahaan kayu *NV Bruynzeel Dayak Houtbedrijven* yang mengolah kayu gelondongan menjadi papan-papan untuk diekspor. Perusahaan ini milik perusahaan swasta Belanda, dan mempunyai usaha sejenis di Amerika Selatan. Perusahaan ini telah memulai

persiapan operasionalnya sejak tahun 1947. Oleh sebab itu, arus migrasi yang terjadi pada saat pembangunan pabrik dan fasilitas perusahaan sekitar tahun 1945-1947 juga dimasukkan kedalam bagian ini. Masa hidup perusahaan *Bruynzeel* sangat singkat (1949-1955), kemudian dinasionalisasi menjadi PT Sampit Dajak (1955-1962), kemudian mengalami reorganisasi menjadi PT Perhutani (1962-1977) dan terakhir menjadi PT Inhutani III (1977- sekarang). Walaupun masa hidup Brengsel yang demikian pendek, PT Sampit Dajak dan PT Perhutani masih merupakan bagian dari rejim monopoli pengusahaan hutan, yaitu pemberian konsesi hutan di DAS Katingan, Seruyan dan Mentaya kepada *Bruynzeel*. Keberadaan perusahaan-perusahaan kayu lainnya baru masuk ke Sampit setelah difasilitasi oleh UU Pokok Kehutanan No 5 tahun 1967.

Brengsel⁵ adalah sebuah sebutan dari masyarakat di Sampit terhadap perusahaan kayu swasta Belanda yang mempunyai nama lengkapnya *NV Bruynzeel Dayak Houtbedrijven* atau NV BDH. Karena kesulitan untuk mengucapkan secara benar “Bruynzeel”, maka penduduk lokal Sampit menyebutnya sebagai Brengsel. Selain itu adapula yang menyebutnya sebagai Brengseng. Dalam bab sebelumnya telah dihintarkan bahwa perusahaan milik swasta Belanda ini mempunyai umur yang tidak terlalu panjang. Namun, karena konsesi yang diberikan oleh Dewan Dayak Besar⁶ pada saat itu mencakup seluruh kawasan hutan yang ada di tiga DAS, Katingan, Seruyan dan Mentaya. Kemudian, pabrik yang merupakan pembuat papan kayu yang paling moderen pada jamannya, maka pengaruh nama Brengsel tetap saja paling digunakan, walaupun perusahaan itu berganti-ganti nama hingga akhirnya menjadi PT Inhutani III.

⁵ Saya menggunakan istilah Bruynzeel, Brensel, Brengsel dan bahkan Brengseng secara bergantian, karena memang masyarakat dari berbagai etnis dan kelas sosial menyebutnya secara berbeda. Esra Pahan, tokoh Dayak, mantan pekerja PT Sampit Dajak, ayahnya sempat bekerja di Bruynzeel, menggunakan istilah Belanda dengan benar, karena ia dapat menggunakan bahasa Belanda. Tetapi masyarakat kebanyakan, khususnya orang-orang Madura menyebutkan sesuai dengan yang pernah mereka dengar, yaitu Brensel dan Brengseng. Bahkan dalam suatu wawancara dengan seorang Madura yang pernah bekerja di Bruynzeel, ia mengatakan bahwa direktur Bruynzeel adalah Mr Pendek, ternyata berasal dari kata Van Deck.

⁶ Salahsatu hasil pembentukan negara serikat menjadikan wilayah Kalimantan Tengah pada masa lalu sebagai bagian dari “Dayak Besar”

Kehadiran Brengsel ini menjadi daya tarik dari para migran dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Sampit. Diperkirakan jumlah pekerja di pabrik (tahun 1950) sekitar 2000 orang. Seperti yang telah disebutkan dalam bagian 3.2. sistem produksi yang diterapkan di Brengsel telah melahirkan berbagai kelas sosial. Kelas sosial *employee*, merupakan kelas sosial dengan strata paling atas. Pada saat itu yang duduk kelas itu adalah orang-orang Belanda dalam posisi administratur; beberapa tentara eks-KNIL dan orang Dayak. Salah seorang anak dari orang Dayak yang pernah bekerja sebagai *employee* ini kemudian menjadi salah seorang tokoh LMMDD KT di Sampit.

Kelas sosial kedua adalah buruh-buruh yang bekerja mulai dari menarik kayu dari wilayah tebaran yang dilakukan oleh masyarakat ke *log pond*. Kemudian dari *log pond* kayu-kayu tersebut dialirkan melalui sungai kearah pabrik pengolahan kayu di kota Sampit. Kayu-kayu tersebut kemudian dikumpulkan lagi di *log pond* yang mempunyai kanal dari pabrik ke sungai, sehingga daerah tersebut disebut dengan Sungai Pemuatan, karena digunakan untuk memuat kayu dari sungai ke pabrik. Selain itu, untuk membawa kayu gelondongan yang berasal dari hutan-hutan disekitar kota Sampit digunakan *lori*, yang didaerah itu disebut dengan kereta api. Seorang warga Sampit yang pernah melihat langsung kejayaan Brengsel menuturkan,

...”Gelondong-gelondong kayu diangkut dari hutan di kawasan barat Sampit dengan menggunakan kereta api. Sebutannya dulu adalah lokomotif, besi rel yang membentang hingga belasan kilometer itu diangkut dengan menggunakan kapal dari negara Belanda. Hitam legam lokomotif itu menyeruak di sela kompleks perumahan Holland yang terletak tidak jauh dari rel kereta. Lokomotif itu besar sekali, sekali angkut ribuan gelondong kayu bisa dibawa, Kepulan asap mesin turbin penggerak lokomotif membentuk cendawan-cendawan hitam dari cerobong kereta api yang relnya terbentang dari kilang Bruynzeel hingga ke kilometer 7 (Pasir Putih sekarang). Sepanjang jalan yang dilalui lokomotif akan menunggu gelondongan kayu yang telah ditebang dan digelindingkan turun dari hutan. Berbahan bakar batubara, lokomotif berwarna legam sepanjang 50 meter itu menjadi pemandangan khas di sore hari. Hingga saat ini disebut disebut Jalan Rel.

Buruh-buruh yang merupakan bagian terbanyak dari pekerja di Brengsel ini berasal dari berbagai etnis. Termasuk didalamnya adalah tentara eks-KNIL, orang-orang Madura, Banjar dan Jawa. Sedangkan posisi orang-orang Dayak dalam rantai produksi Brengsel ini adalah sebagai penebang pohon yang mendapatkan upah berdasarkan jumlah pohon yang ditebangnya.

Buruh-buruh inilah yang kemudian mengisi ruang kehidupan kota Sampit dan membuat berbagai perkampungan, baik yang pemukimannya mayoritas didominasi oleh satu etnis, maupun yang sangat heterogen. Hasil penelitian Retno (2005 : 116-122), pada saat sebelum kerusuhan Februari 2001 terdapat lokasi-lokasi tempat tinggal yang mencerminkan permukiman etnis tertentu. Misalnya ada “permukiman Dayak” yang sejak ditulis oleh kontrolir Belanda pada tahun 1936 hingga saat penelitian berlangsung (2001) masih ditinggali, yaitu permukiman sepanjang 6-7,5 kilometer yang ada di sepanjang sungai Mentaya. Permukiman yang ada di tepi sungai tersebut benar-benar mencirikan suatu “kebudayaan sungai”, yaitu adanya *tambatan* (dermaga), *lanting* (bangunan di atas sungai yang difungsikan untuk berbagai keperluan) dan perahu. Selain itu permukiman orang-orang Dayak yang bersifat mengelompok juga terdapat di jalan Sari Gading dan kawasan jalan Putra Borneo. Kedua nama jalan itu sendiri menandai etnisitas dari kelompok ini.

Berbeda dengan kelompok permukiman orang-orang Dayak yang relatif tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menyebar dan hanya terdapat di pinggir Sungai Mentaya dan dua kompleks permukiman lainnya di tengah perkotaan. Permukiman orang-orang Madura ini jauh lebih banyak, menyebar dan memadat. Apabila dalam migrasi gelombang pertama (sekitar tahun 1920-1930), sesuai yang ditemukan oleh Retno (2005) terdapat empat perkampungan, yaitu tiga di Mentaya Seberang dan 1 di dekat pabrik brengsel. Hal ini semakin menguatkan pendapat bahwa migrasi gelombang pertama orang-orang Madura adalah mereka yang dibawa oleh untuk bekerja di perkebunan, karena permukimannya ditempatkan didekat perkebunan.

Migrasi gelombang kedua, yaitu kira-kira antara tahun 1950'an hingga tahun 1970, atau bisa saja sebelum tahun 1950 memperlihatkan peran Brengsel sebagai perusahaan yang menarik mereka sebagai tenaga kerja. Walaupun perusahaan ini baru beroperasi pada akhir tahun 1949, namun persiapan pembangunan perusahaan, termasuk pembangunan pabrik, jalan rel hingga pelabuhan pemuatan telah berlangsung sejak tahun 1947. Perkampungan orang-orang Madura pada periode akhir tahun 1940-1950 ini mulai tersebar di sekitar wilayah Sawahan dan sekitar jalan S Parman saat ini. Hingga saat ini, kedua jalan tersebut masih merupakan kawasan perkampungan orang-orang Madura, walaupun terlihat sebagai sebuah wilayah yang sedang dibangun kembali sehabis kerusuhan.

Dalam berbagai wawancara dengan orang-orang Madura di Sampit, apabila ditelusuri hubungan kekerabatan yang bersifat vertikal, nampak bahwa hampir semua informan (*ego*) mempunyai orangtua atau kakek yang bekerja di Brengsel sebagai butuh kasar. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan Brengsel mempunyai peranan yang signifikan

Perkampungan orang-orang Madura kemudian berkembang ke wilayah yang sekarang disebut dengan kecamatan Baamang. Lokasi kecamatan ini memang ada disekitar wilayah perusahaan *Bruynzeel*. Selain menjadi buruh di *Bruynzeel*, banyak orang-orang Madura yang kemudian membuka lahan pertanian di kecamatan Baamang ini. Pembukaan lahan pertanian ini dimungkinkan karena pohon-pohon *agathis* yang menjadi ciri tanamkan di hutan Sampit telah ditebang untuk diproses di pabrik *Bruynzeel*. Namun, apabila diamati lebih mendalam, wilayah Baamang juga mempunyai akses langsung ke sungai Mentaya, sehingga memudahkan orang-orang Madura yang datang dengan kapal layar untuk langsung mencari sanak-saudara atau teman satu kampung setelah mendarat di Sampit.

Kehadiran *Bruenzyl* di kota Sampit dapat dikatakan sebagai awal dari munculnya pluralitas etnis di kota Sampit. Karena dengan adanya Bruenzyl munculnya beberapa

insitusi baru seperti gereja Katolik untuk melayani para pegawai Bruenzyl yang berasal dari Belanda dan tentara eks-KNIL yang berasal dari Indonesia bagian Timur. Selain itu, latar belakang etnis penduduk kota Sampit menjadi lebih beragam, yaitu berbagai etnis tentara eks-KNIL, orang-orang Madura, Banjar dan Jawa. Kemudian perkampungan Bugis yang ada diantara jalan Sampit dan Samuda semakin memperlihatkan keragaman etnis di kota Sampit pada saat itu.

Pada awal keberadaan Bruenzyl pembagian kerja berdasarkan etnisitas terjadi, demikian halnya dengan munculnya perkampungan yang bersifat etnisitas. Penyebutan kampung Jawa, kampung Bugis, dan kampung Arab mulai terjadi. Demikian halnya dengan munculnya *kertak* (Jalan) Madura semakin memperlihatkan adanya pengelompokan-pengelompokan berdasarkan tempat tinggal. Demikian halnya dengan etnis Cina yang tinggal mengelompok. Penanda-penanda etnisitas (*ethnic marker*) terjadi sesuai dengan pengelompokan tersebut. Misalnya hingga kini ada dua buah vihara di kota Sampit untuk menandai etnis Cina; mesjid Kampung Arab untuk menandai komunitas; kumpulan surau dan pesantren sebagai peninggalan orang-orang Madura; *Kerkoff* sebagai kuburan orang Kristen, sebagai penanda Dayak Kristen dan orang-orang Belanda.

Pembagian kerja berdasarkan etnis dalam kaitannya dengan proses produksi Bruenzyl masih sangat terpola, yaitu masyarakat Dayak di perkampungan dekat hutan menjadi penebang pohon; orang-orang Madura sebagai buruh kasar yang mendorong lori, buruh angkut kayu dan sebagainya. Kemudian, dengan adanya jumlah penduduk yang cukup banyak di kota Sampit, maka timbulah berbagai usaha untuk memasok kebutuhan penduduk. Kebutuhan hasil pertanian kebanyakan dipasok oleh orang-orang Madura yang telah berhasil membersihkan hutan untuk menjadi ladang-ladang yang ditanami sayuran. Kemudian orang-orang Banjar menguasai perdagangan sembako, walaupun untuk distributor dikuasai oleh orang-orang Cina. Orang-orang Madura juga banyak yang masuk menjadi pedagang, tetapi umumnya pedagang kecil dipinggiran pasar, khususnya menjual sayur-sayuran.

Pada periode Bruenzyl ini, walaupun pluralitas etnik sudah terjadi, namun para informan Madura mengatakan bahwa tidak pernah terjadi peristiwa perkelahian yang bersifat kelompok, apalagi dengan menggunakan lambang-lambang yang bersifat etnisitas. Namun, menarik untuk mendalami catatan seorang dokter yang ditugaskan ke Sampit pada tahun 1959.

The city had no water purification plant, and water for bathing had to come from the river, for which the Madurese, who were a significant part of the population of Sampit, were available to carry it to your bathroom for a fee. There was a neighborhood called Kampung Madura, where most of them lived, and got their livelihood as the main coolies to carry and transport the rubber slabs, rattan, and others to the ships arriving. They were also the principal cultivators and sellers of vegetables, and with their sailing boats coming from Madura and Java, also brought mangoes and other fruits not grown locally, which was always a treat for the town's population. The men, however, liked to fight with knives, usually amongst each other about women, ending up in the hospital with horrendous cuts, lacerations, stab wounds and the occasional dead one.⁷

Dari catatan dokter tersebut beberapa hal yang menggambarkan orang Madura di Sampit pada tahun 1950-an, antara lain mereka (1) sebagai penduduk dengan jumlah signifikan di Sampit, (2) pekerjaan serabutan untuk mau mengerjakan apapun, (3) adanya suatu kampung Madura dekat rumah sakit, (4) orang-orang Madura banyak yang bekerja sebagai kuli untuk membawa dan mengangkut karet, rotan dan barang lainnya ketika kapal-kapal tiba. Orang-orang Madura pada masa itu adalah petani penggarap dan menjual sayur-sayuran. Selain itu mereka juga menjual mangga dan buah-buah lainnya yang tidak ditanam di daerah tersebut. Dokter itu juga memberikan gambaran tentang laki-laki Madura yang senang berkelahi dengan menggunakan pisau (maksudnya *clurit*-pen.) utamanya disebabkan oleh masalah perempuan. Perkelahian tersebut menyebabkan berbagai jenis luka, bahkan menyebabkan kematian.

⁷ Alfred W Tan, "Authobiographical Highlights". 2000

Catatan dari dokter tersebut tidak memberikan indikasi bahwa perkeltahan yang terjadi adalah antara orang-orang Madura dengan orang di luar Madura. Dalam hal ini, apa yang digambarkan oleh dokter tadi mungkin apa yang dalam tradisi Madura disebut dengan *Carok*⁸. Apa yang digambarkan oleh catatan dokter tersebut, tampaknya mengkonfirmasi hasil hasil wawancara “*life history*” dengan orang-orang Madura seperti yang ada dalam bab 5 disertasi ini, yaitu jenis-jenis pekerjaan orang Madura di pertanian dan sektor informal.

Dalam periode 1950-1970 ini, terdapat dinamika politik yang hampir memicu tindakan kekerasan horisontal di Sampit, yaitu terjadinya konflik antara pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan anggota partai-partai lainnya, terutama Masyumi. Selain itu, orang-orang yang kemudian bergabung dengan PKI adalah kelompok yang sangat anti orang-orang asing, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan milik asing. Tentu saja Bruynzeel merupakan perusahaan yang mendapatkan kecaman dari kelompok tersebut. Dinamika politik nasional, khususnya semangat anti asing dan ekonomi nasionalis, ditambah dengan masalah Irian Barat telah mempercepat penutupan perusahaan seperti Bruynzeel ini. Seperti yang digambarkan dalam bagian 3.2., berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Dayak, Esra Pahan, sangat tampak adanya perang ideologi di kota Sampit, dimana PKI merupakan kelompok yang paling agresif untuk melawan kelompok yang berbeda ideologi. Penelitian maupun tulisan-tulisan tentang PKI di Kalimantan Tengah relatif belum banyak, padahal dalam beberapa wawancara saya menemukan berbagai cerita tentang peristiwa tahun 1965, termasuk didalamnya keterkaitan tokoh-tokoh yang ikut berjuang dalam mendirikan propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957.

Dalam periode 1950-1970, salahsatu peristiwa penting di Kalimantan Tengah adalah pembentukan propinsi Kalimantan Tengah yang terlepas dari Kalimantan Selatan.

⁸ Untuk lebih memahami tradisi *Carok* pada orang-orang Madura dan tidak terjebak pada penilaian stereotypes dapat dibaca Latief Wiyata (2000), “Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta : Lkis.

Pembentukan propinsi ini sendiri merupakan suatu gerakan sosial yang tidak terlepas dari sentimen etnisitas, yaitu keinginan dari kalangan elite Dayak untuk mempunyai suatu propinsi tersendiri yang terlepas dari propinsi Kalimantan Selatan yang dianggap sebagai “provinsi orang Banjar”. Berdasarkan UU No 25 tahun 1956 yang berlaku sejak 1 Januari 1957 dibentuk tiga propinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat (Pontianak), Kalimantan Timur (Balikpapan) dan Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Kemudian dalam UU tersebut terdapat klausul bahwa tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin akan menjadi propinsi tersendiri pada tahun 1960. Tetapi waktu tiga tahun tersebut oleh kalangan elite Dayak pada saat itu dianggap terlalu lama. Kemudian memungkinkan adanya kegagalan pembentukan propinsi, khususnya adanya kelompok-kelompok non-Dayak yang tidak setuju pembentukan propinsi baru tersebut. Oleh sebab itu, selain upaya-upaya “diplomasi” kepada pemerintah pusat, beberapa elemen masyarakat Dayak membentuk “Gerakan Mandau Talawang Pancasila” atau GMPTS. Kemudian kelompok ini menggunakan cara-cara militer untuk mendapatkan pengakuan sebagai propinsi tersendiri, yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap pos-pos polisi pemerintah Republik Indonesia, termasuk yang ada di Sampit. Gerakan ini dipimpin oleh Christian Simbar⁹.

⁹ Lihat, F Sion Ibat dan Chornain Lambung, *Sejarah Perjuangan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah 1953-1957*, APP GMPTS Palangkaraya (2005). Christian Simbar sendiri adalah tokoh yang sangat misterius. Ketika melakukan penelitian untuk disertasi ini, saya mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui riwayat pemimpin GMPTS ini. Karena setelah mendapatkan status propinsi Kalimantan Tengah tahun 1957, kemudian nama Christian Simbar teggelam dan berbagai rumor dan spekulasi muncul. Cerita yang paling populer adalah ia ditangkap, kemudian dipenjara, keluar dari penjara ia ditembak di Kalimantan Timur. Selain itu ditambahkan lagi rumor tentang rivalitas antara Cilik Riwut (mantan gubernur Kalimantan Tengah) dan Christian Simbar. Cilik Riwut mewakili sub-etnis Dayak Ngaju, diplomatis, dekat dengan kekuasaan pusat. Sedangkan Christian Simbar adalah tokoh mewakili sub-Dayak Manyaan (Barito) pejuang bawah tanah dan anti-pusat. Namun, pada akhirnya keluarga besar Simbar mengumumkan bahwa mereka telah menemukan kerangka Christian Simbar di pekuburan muslim di Kupang Timor pada tahun 2009. Kemudian kerangka jenazah tersebut di bawa ke desa Kalahien, tempat kelahiran Simbar dan dikuburkan secara Muslim. Namun diatas kuburan tersebut terdapat semacam peti yang biasa dilakukan untuk jenazah orang beragama Kaharingan. Christian Simbar, sesuai dengan namanya terlahir sebagai seorang Protestan. Pada saat meninggal, ia meninggalkan 4 isteri di Kalimantan Tengah dan 3 isteri di Kupang Nusa Tenggara Timur. Dalam diri Simbar inilah pluralitas Dayak bersemayam.

Upaya untuk mempunyai propinsi sendiri terlepas dari Kalimantan Selatan yang dianggap dikuasai oleh etnis Banjar merupakan suatu kejadian penting dalam melihat gerakan sosial bernuansa etnis di kalangan orang-orang Dayak. Walaupun hingga saat ini, Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang kebanyakan anggota jemaat dan gerejanya ada di “wilayah Dayak”, khususnya di Kalimantan Tengah, namun kantor pusatnya tetap saja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

3.3.3. Gelombang Ketiga: Industri Kayu dan Benih-Benih Konflik Antar Etnis (1970-2000)

Penanda gelombang migrasi disini adalah tumbuhnya industri kayu yang demikian masif di Kotawaringin Timur, sebagai dampak dari UU 5/1967 tentang pokok-pokok kehutanan. Namun industri kayu di Kotawaringin Timur ini mengalami kolaps sejak tahun 1997 adanya krisis ekonomi. Kemudian dengan adanya kerusuhan bulan Februari 2001, benar-benar telah menghancurkan industri perkayuan di Kotawaringin Timur. Penanda lainnya yang penting dari periode ini adalah tumbangnya rejim Soeharto (1966-1998) yang memberikan angin baru bagi demokratisasi hingga pelosok-pelosok daerah. Pada tingkat daerah, demokratisasi ini memberikan kemungkinan munculnya berbagai organisasi berbasis etnis dan agama yang selama 32 tahun terpasung oleh kebijakan orde Soeharto yang menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Kemudian, dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah telah memicu penggunaan identitas dalam memperebutkan posisi politik maupun jabatan-jabatan birokrasi.

Berkaitan dengan UU 5/1967, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mendapatkan konsesi hutan yang disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Kebijakan ini tentu saja bersifat kontroversial, karena semangat Pasal 33 UUD 1945 adalah memproteksi kekayaan negara yang mempunyai dampak terhadap hajat hidup orang banyak seharusnya tetap dipegang

oleh negara. Misalnya, minyak bumi dan gas hanya diperkenankan melalui monopoli oleh perusahaan negara, Pertamina.

Terlibatnya perusahaan swasta dalam pengelolaan hutan dan ternyata pemberian HPH hanya bersifat kroni inilah yang menyebabkan tidak terkendalinya kegiatan penebangan hutan di Kotawaringin Timur. Sebagai seorang Dayak yang juga bekerja di perusahaan kayu, Esra Paham memberikan komentarnya,

HPH yang belakangan masuk ke Kotim tidak ada kaitan dengan Bruynzel. Setelah Soeharto berkuasa (1966 – pen.), dia yang membagi-bagi HPH. Banyak *konco* pak harto, terutama para Jenderal. Seperti membagi kue yang ada dalam *ceper*. Betul kalau hutan di Kalteng ternyata untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII- yang merupakan proyek ibu Tien Soeharto (pen-) Semua HPH dapat bagian pada masa itu.

Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas hutan produksi 8,86 juta hektar dibebani oleh 56 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan luas 7,587 juta hektar. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Tengah dibebani oleh 20 perusahaan pemegang HPH dengan luasan 3,17 juta hektar. Membayangkan tentang banyaknya HPH di Kotim ini dengan pada saat Bruynzeel yang hanya satu perusahaan dengan 2000 tenaga kerja, maka kehadiran 20 pemegang HPH beserta efek berantainya akan semakin memperlihatkan Sampit sebuah kota yang sesak pada beberapa bagian kota.

Selain itu, pada periode 1970-2001 ini mulailah bermunculan organisasi berbasis etnis yang sebelumnya dilarang pada masa Soeharto dengan alasan membangkitkan sentimen SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Awalnya kegiatan organisasi etnis hanya bergerak dalam bidang sosial dan kekeluargaan. Karena kebanyakan adalah organisasi etnis dari para migran. Sehingga organisasi ini digunakan sebagai wahana untuk silaturahmi dan melepas rindu dengan kampung halaman, melalui acara berkumpul, arisan dan makan bersama makanan khas daerahnya masing-masing.

Organisasi seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Kumpulan Keluarga Jawi, Kumpulan Keluarga Pasundan (Sunda), Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), Dasmala (Dusun Manyan Lawangan) hingga *uluh Itah* (kekeluargaan Dayak Ngaju) bermunculan.

Kemudian munculnya Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD KT) pada tahun 1994, yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi 1894¹⁰ merupakan warna baru dari gerakan berbasis etnis di Kalimantan Tengah. Menjadi pertanyaan, mengapa organisasi berbasis etnis yang pada mulanya adalah “paguyuban” untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat perantauan, --- *dalam kasus LMMDD KT*—menjadi tidak biasa, karena anggotanya adalah masyarakat Dayak, yang *notabene* Kalimantan Tengah adalah wilayah aslinya. Tentu saja, kenyataan ini tidak terlepas dari motivasi kepentingan politik lokal “putra daerah” yang prihatin dengan ketidak-adilan dalam penempatan jabatan-jabatan pemerintahan dengan sistem *dropping* dari pusat. Mereka menginginkan jabatan-jabatan pemerintahan di Kalimantan Tengah diberikan kepada orang-orang Kalimantan Tengah (khususnya etnis Dayak).

Kemudian LMMDD KT ini menjadi organisasi penting di Kalimantan Tengah, mereka ada di tingkat Popinsi, Kabupaten hingga kecamatan. LMMDD KT telah berubah menjadi kekuatan sosial sekaligus politik untuk penyadaran orang-orang Dayak. Kemudian, ketika pemerintahan Soeharto tumbang pada tahun 1998, organisasi etnis lainnyapun mulai mengalihkan kepentingan kulturalnya menjadi kepentingan politik, khususnya menjadi alat-alat kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan legislatif dan Presiden. Pada titik inilah,

¹⁰ Rapat Damai di Tumbang Anoi, suatu daerah di hulu Sungai Kahayan pada tahun 1894, seringkali dianggap sebagai kejadian penting bagi elite Dayak. Karena pada saat itu berkumpul ratusan kepala-kepala suku dari berbagai DAS di Kalimantan. Keputusan-keputusan pentingnya adalah penghentian perang suku, pelarangan pemenggalan kepala dan penyelesaian masalah melalui hukum adat. Kejadian ini sering dianggap sebagai *Pakat Dayak I* (Kebangkitan Dayak I). Walaupun skenario acara ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang direpotkan dengan kejadian perang antar suku, maupun motivasi pemerintahan kolonial untuk mengatur orang-orang Dayak dalam hegemoni kolonial Belanda.

persaingan antar organisasi berbasis etnis, khususnya Dayak melawan Madura mulai terjadi, kemudian mengeras dan pecah paada bulan Februari 2001.

3.4. Kesimpulan Bab 3

Bagian ini menjelaskan tentang lansekap wilayah, penduduk, etnisitas dan kesejarahan di kota Sampit. Dari sisi aksesibilitas terlihat bahwa posisi kota Sampit bersifat sangat strategis. Perkembangan industry kehutanan sejak akhir tahun 1940-an tampak terkait dengan posisi geografis yang dimiliki oleh kota Sampit. Keberadaan pelabuhan yang dapat menghubungkan Sampit dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya di pulau Kalimantan dan pulau Jawa menambah strategis kota ini.

Dari sisi kesejarahan, khususnya berkaitan dengan migran Madura, terlihat bahwa posisi Sampit yang berhadapan dengan pulau Madura telah menjadi sasaran bagi orang-orang Madura untuk datang ke tempat itu sejak lama. Gelombang migrasi sejak tahun 1920 hingga 1970-an tidak terlepas dari daya tarik kota Sampit sebagai pusat industri kayu di wilayah Kalimantan. Gelombang migrasi orang-orang Madura ini terkait satu sama lain, sehingga membentuk sub kultur Madura di kota Sampit. Namun karakter migrant yang datang pasca tahun 1970 membuat benih-benih konflik mulai subur di kota Sampit.

BAB 4

KEKERASAN ANTAR ETNIS DI KOTA SAMPIT

4.1. Pengantar

Bab ini akan mendeskripsikan peristiwa kekerasan antar etnis di kota Sampit yang terjadi pada bulan Februari 2001. Peristiwa ini dikenal dengan nama “Kerusuhan Sampit”. Walaupun secara etimologis terdapat perbedaan antara kerusuhan (*riot*) dengan kekerasan antar etnis (*ethnic violence*). Namun, dalam konteks ingatan kolektif masyarakat, kata kerusuhanlah yang dikenal dan menjadi suatu peristiwa penting yang dikenang hampir seluruh warga masyarakat ketika ditanyakan peristiwa apa yang terjadi antara orang-orang Dayak dan Madura di kota Sampit. Kebanyakan warga masyarakat lebih mengingat tempat peristiwa dan subyek yang berkonflik, dibandingkan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Tempat peristiwanya adalah kota Sampit, namun bagian mana dari kota Sampit tidak semua orang mengetahuinya. Sedangkan subyek yang bertikai adalah orang-orang Dayak dan Madura, tetapi orang Dayak dari mana dan kelompok mana; juga orang-orang Madura dari kelompok mana yang bertikai tidak banyak yang mengetahuinya.

Bagian ini adalah “rekonstruksi” dari kejadian kekerasan antar etnik dari berbagai versi kronologi yang tertulis maupun yang bersifat lisan. Sebagai sebuah rekonstruksi kejadian akan dijelaskan tentang subyek konflik (siapa melawan siapa), obyek atau perkara yang dipertikaikan, apa yang melatar-belakangi perkara tersebut muncul, apa yang terjadi, kemudian implikasi seperti apa dan kepada siapa berimplikasi.

Walaupun hampir semua dokumen resmi menyatakan peristiwa itu dimulai pada tanggal 18 Februari 2001, namun sangat sedikit dari kalangan masyarakat yang mengingat secara tegas kapan kejadian tersebut berlangsung. Beberapa tahun belakangan ini setiap mendekati tanggal 18 Februari beredar pesan singkat melalui telepon seluler bahwa orang-orang Madura akan melakukan pembalasan terhadap

peristiwa kerusuhan Sampit pada tahun 2001. SMS ini telah berhasil membuat kegelisahan di kalangan orang-orang Dayak dan Madura, bahkan pada tahun 2010 menyebabkan banyak orang Madura yang pulang ke Pulau Madura untuk sekedar menentramkan perasaan.

Selain itu, sebuah Surat Kabar lokal yang berbasis di kota Sampit, setiap mendekati tanggal 18 Februari selalu membuat “tulisan khas” (*feature*) tentang orang-orang Madura di kota Sampit. Tujuan penulisan itu menurut Pemimpin Redaksi harian tersebut justru untuk meningkatkan hubungan saling memahami antara orang-orang Dayak dengan orang Madura¹

Rangkaian peristiwa kekerasan antar etnis yang disebut dengan “kerusuhan” ini dapat dianggap sebagai peristiwa bermakna yang menjadi salahsatu ingatan kolektif dari warga masyarakat Sampit, khususnya warga Dayak dan Madura. Ingatan kolektif menjadi sangat penting karena (1) rangkaian kejadian ini sangat berpengaruh terhadap relasi hubungan antar etnis di kota Sampit, khususnya antara etnis Madura dengan Dayak, (2) rangkaian kejadian ini mempengaruhi persepsi terhadap identitas etnis Dayak dan Madura Kalimantan Tengah khususnya, dan (3) narasi yang dibangun mengenai kerusuhan ini masih banyak dipengaruhi oleh dominasi informasi versi masyarakat Dayak, melalui tulisan-tulisan maupun media komunikasi lainnya. Narasi kerusuhan versi kalangan elite Dayak maupun masyarakat Dayak umumnya yang penting untuk diperhatikan adalah beredarnya “buku merah” pada bulan-bulan kerusuhan. Kemudian informasi yang diperoleh secara lisan dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa kerusuhan, ataupun cerita-cerita yang disambungkan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang kronologi kerusuhan berdasarkan beberapa sumber. Sumber pertama adalah kronologi yang disusun oleh kalangan LMMDD KT dalam “buku merah”. Selain itu, sebetulnya ada versi lain yang dibuat oleh

¹ Wawancara dengan Ajid, Pemred “Radar Sampit”, Februari 2010, di Sampit.

sekelompok muda Dayak yang tidak tergabung dalam LMMDD KT yang membuat “buku putih”. Namun versi buku putih ini telah dimusnahkan oleh elemen LMMDD KT yang menganggap bahwa apa yang ditulis dalam buku putih tersebut tidak mengandung kebenaran dan pemutar-balikan fakta. Sedangkan versi ketiga adalah kronologi yang saya dapatkan dari berbagai sumber tertulis maupun hasil wawancara dengan masyarakat di kota Sampit dan beberapa daerah lainnya di Kalimantan Tengah.

Kronologi versi LMMDD KT merupakan catatan yang relatif lengkap dan terdokumentasi dengan baik, oleh sebab itu saya lampirkan secara lengkap (**lihat lampiran 1**). Namun perlu dicatat bahwa setiap kronologi, termasuk yang dibuat oleh LMMDD KT tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak akan merugikan LMMDD KT.

Selain itu terdapat versi “buku putih” yang ditulis oleh kelompok muda Dayak di Sampit. Buku ini pada awalnya untuk kepentingan “ke-humas-an” untuk para wartawan dan pihak lain yang ingin mengetahui kronologi kejadian. Namun, karena ketertarikan yang mendalam mengenai peristiwa ini, ketiga penulis tersebut ternyata melakukan pendalaman melalui wawancara-wawancara dan dokumen-dokumen lainnya, termasuk mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian untuk orang-orang Dayak yang dianggap sebagai provokator kejadian.

4.2. Kronologi Kerusuhan : Klaim Pembenaran Para Pihak

Kronologi Versi LMDD KT

Kronologi yang dibuat oleh LMMDD KT pada intinya ingin menggambarkan bahwa kerusuhan yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2001 di kota Sampit, kemudian melebar menjadi pembunuhan dalam jumlah banyak terhadap orang-orang Madura tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-

orang Madura terhadap orang Dayak sebelumnya. Pembalasan yang dilakukan oleh orang Dayak merupakan cara untuk mempertahankan tanah air (*petak pahaga danum*) orang-orang Dayak dari perlakuan kasar yang dilakukan oleh orang-orang Madura dalam kurun waktu yang lama.

Kronologi yang dibuat oleh LMMDD KT tentang kerusuhan Sampit terdiri dari 23 butir uraian peristiwa. Dari jumlah tersebut, mulai dari point (1) sampai point (12) menjelaskan tentang rentetan kejadian mulai tanggal 16 Desember 2000 hingga malam menjelang tanggal 18 Februari 2001. Tanggal 16 Desember 2000 dianggap mempunyai kejadian penting karena tanggal terbunuhnya Sendong, seorang Dayak Manyan oleh 3 orang Madura di Kereng Pangi, sekitar 100 kilometer dari Sampit. Para pembunuh Sendong tidak tertangkap. Kemudian laporan ini juga menyebutkan bahwa bukan hanya pembunuh Sendong, berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh orang Madura terhadap orang Dayak sejak tahun 1992 tidak pernah tertangkap. Kemudian laporan ini menyatakan bahwa orang-orang Madura sudah menyimpan bom di Palangka Raya dan Sampit

Laporan LMMDD KT juga menyebutkan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan laporan kepada Bupati dan Kapolres Kotawaringin Timur tentang sikap orang-orang Madura yang terlampau arogan dan mengancam, khususnya bebas berkeliaran dengan membawa senjata tajam. Selain itu berbagai laporan tentang diketemukannya bom yang disimpan pada beberapa rumah orang Madura. Bahkan, ketika ada bom meledak, kepolisian hanya mengumumkan sebagai petasan dengan daya ledak kuat. Pihak LMMDD KT sangat kecewa dengan kinerja kepolisian yang tidak merespons kekhawatiran masyarakat. Selain itu, laporan ini juga melansir upaya orang-orang Madura untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang Dayak pada tanggal 26 Februari 2001. Kemudian, laporan juga menyitir laporan lain tentang upaya yang akan dilakukan oleh orang-orang Madura untuk membuat kekacauan pada malam takbiran tanggal 26 Desember 2000, agar terdapat kesan keributan bernuansa SARA.

Selanjutnya laporan tersebut mengungkapkan tentang berbagai tindakan kriminalitas berupa hilangnya kendaraan bermotor yang tidak diusut dengan baik. Akibatnya timbul kegelisahan dan saling curiga di kalangan masyarakat. Kemudian laporan juga memuat tentang laporan adanya bom disebelas tempat, yaitu di kota Sampit, Kecamatan Samuda, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Kuala Kuayan, Kecamatan Seruyan Hulu, kecamatan Kasongan dan Palangka Raya.

Setelah 12 butir kronologi peristiwa diungkapkan oleh laporan LMMDDKT, barulah pada point ke 13 disebutkan tentang adanya pembunuhan etnis Madura sebanyak 5 orang, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Menurut laporan ini, inilah yang menjadi pemicu penyerangan terhadap orang-orang Dayak, karena orang Dayaklah yang dianggap bertanggung jawab terhadap pembunuhan lima orang Madura. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa mengapa orang Madura dapat demikian cepat mengadakan pembalasan dari terbunuhnya lima orang tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya upaya terencana dari orang-orang Madura untuk mengacaukan kota Sampit.

Sesudah menjelaskan tentang peristiwa tanggal 18 Februari 2001, selanjutnya laporan kronologi menceritakan tentang penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Madura terhadap orang-orang Dayak dengan cara yang brutal, seperti menyerang dan membakar hidup-hidup orang-orang Dayak di beberapa rumah yang mengakibatkan tewasnya 24 orang Dayak. Kemudian beberapa rumah lainnya dibakar, namun jiwa dapat selamat. Selain itu perusakan hotel milik tokoh Dayak; penembakan dengan menggunakan senjata api

Laporan ini juga menjelaskan tentang lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang diduga melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Madura terhadap orang Dayak. Bahkan ditengarai

ada oknum-oknum kepolisian yang berdarah Madura berkolusi untuk membebaskan atau meringankan hukuman dari orang-orang Madura yang melakukan tindakan kriminal berat.

Kemudian laporan juga menjelaskan tentang ditemukannya spanduk bertuliskan “Kota Sampit Sampang Kedua”, “Selamat Datang di Kota Madura”, dan “Sampit Serambi Mekah. Spanduk inilah yang sangat dipercayai oleh orang-orang Dayak tentang rencana penguasaan kota Sampit oleh orang-orang Madura. Kata-kata dalam spanduk inilah yang menyebabkan kemarahan orang-orang Dayak, sekaligus alasan bagi orang-orang Dayak untuk mempertahankan kota Sampit dengan cara apapun, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan dengan melakukan pembunuhan terhadap orang Madura yang dianggap terlibat dalam upaya merebut kota Sampit.

Dalam kronologi versi LMMDD KT ini juga diceritakan tentang kesiapan masyarakat Dayak dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik antar etnis antara Dayak dan Madura.

Dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa penyerangan, laporan tersebut lebih banyak menggambarkan berbagai penyerangan yang dilakukan oleh pihak Madura terhadap orang-orang Dayak, baik yang menimbulkan korban, maupun hanya melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah orang Dayak.

Membaca Ulang Kronologi Versi LMMDD KT

Laporan versi LMMDD KT ini dilaporkan oleh 23 orang dan diserahkan kepada ketua presidium yaitu Prof.H.KMA M Usop, MA dan sekretaris pelaksana tugas harian yaitu Bapak Bahing Jimat² pada tanggal 3 Maret 2001 di Palangka Raya.

² Prof Usop pada pemilu 2004 terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun dalam pemilihan gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah kalah. Sedangkan Pak Bahing Jimat pasca kerusuhan ikut pemilihan anggota DPRD Kotim mengalami

Laporan kronologi inilah kemudian menjadi sumber dari berbagai laporan tentang kejadian kerusuhan di kota Sampit yang dikutip oleh berbagai media massa, laporan-laporan penelitian, penelitian akademis maupun kepentingan pemerintah. Berkaitan dengan posisi LMMDD KT pada saat itu sebagai sebuah organisasi Dayak yang berpengaruh, terutama dipimpin oleh seorang akademisi yang bergelar guru besar, maka laporan tersebut dianggap mempunyai akurasi data yang memadai.

Mencari makna dibalik penulisan kronologi tersebut penting untuk dilakukan, khususnya untuk mengetahui bagaimana relasi antara orang-orang Dayak dan Madura dipersepsikan dalam kronologi tersebut. Secara umum dari kronologi tersebut mempersepsikan bahwa orang-orang Madura telah mempersiapkan suatu serangan terhadap orang-orang Dayak, namun kejadian kerusuhan pada tanggal 18 Februari 2001 dianggap terlalu dini. Selain itu, kronologi tersebut ingin memberikan pesan bahwa tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Madura di kota Sampit sejak lama tidak pernah diselesaikan oleh pihak keamanan. Bahkan ada kecenderungan pihak keamanan melakukan pembiaran terhadap tindak kriminal orang Madura dan pemihakan pada posisi orang Madura. Selain itu, kerusuhan yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2001 dengan terbunuhnya lima orang Madura di kota Sampit, dianggap tidak terlepas dari peristiwa tanggal 16 Desember 2000, yaitu saat seorang Dayak bernama Sendong dibunuh oleh 3 orang Madura. Namun, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap 5 orang Madura pada tanggal 18 Februari 2001 tersebut tidak pernah disebutkan dalam kronologi.

Namun, beberapa fakta yang ditemukan di lapangan membuat kronologi tersebut tampaknya perlu dikritisi lebih jauh lagi, khususnya ketika membicarakan peran orang-orang Madura; siapa orang Madura yang dimaksud, dari latar belakang apa, mengapa motivasinya melakukan tindakan untuk menyulut kerusuhan? Tentang siapa orang Madura yang terlibat dalam kerusuhan menjadi hal penting untuk diketahui,

kegagalan, demikian juga bisnis-bisnis yang dijalannya tidak sukses. Dalam sebuah wawancara Pak Bahing menyatakan keluhannya, seperti ditinggalkan oleh kawan-kawannya di LMMDD KT

mengingat korban-korban orang Madura yang dibunuh setelah tanggal 19 Februari 2001 kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kelompok yang terlibat dalam penyerangan terhadap orang-orang Dayak.

Memang kejadian yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2001 merupakan puncak dari akumulasi kemarahan orang-orang Dayak menghadapi sikap orang-orang Madura ini. Namun tidak pernah dijelaskan, kepada siapa atau kelompok mana seharusnya kemarahan ini ditujukan. Walaupun pemantik kejadian (*trigger*) pada tanggal 18 Februari 2001 adalah terbunuhnya lima orang Madura, namun narasi yang dibangun oleh kelompok Dayak terhadap peristiwa malam itu, dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang jauh lebih lama dari kejadian tanggal 18 Februari 2001 itu. Dalam hal ini perlu dibedakan antara akar (*roots*), sumber (*sources*) dan pemantik (*trigger*) dari kejadian kerusuhan tersebut. Saya tidak akan menguraikan akar permasalahan pada bagian ini, karena sesungguhnya akar permasalahannya ada pada berbagai hal yang diuraikan pada bagian terdahulu maupun bagian lainnya.

Pihak LMMDD KT mengkaitkan peristiwa pembunuhan lima orang Madura itu dengan perkelahian yang terjadi di Kereng Pangi (sekitar 100 km dari Sampit) Kereng Pangi adalah nama sebuah desa yang ada di pinggir jalan propinsi antara Kasongan (ibu kota kabupaten Katingan) dengan Sampit (ibu kota Kotawaringin Timur). Pada bulan Desember 2000, di kawasan yang merupakan tempat karaoke, tempat minum-minuman keras dan praktek prostitusi ilegal tersebut terjadi perkelahian yang melibatkan seorang pemuda dari etnis Manyan, Dayak dengan beberapa pemuda dari kalangan etnis Madura. Beberapa pendapat menyatakan bahwa orang-orang yang berkelahi tersebut dapat dikatakan sebagai “preman”. Perkelahian yang tidak seimbang tersebut menyebabkan pemuda Dayak yang bernama Sendong itu tewas dengan luka tusukan. Selain itu beberapa rumor berkembang, bahwa hal tersebut bukan hanya terbunuhnya seorang Sendong, melainkan adanya tindakan dari para pembunuh yang memotong kemaluan dari Sendong dan memasukkannya

kedalam mulut Sendong. Tindakan itulah yang dianggap memicu sentimen etnisitas, yaitu adanya pelecehan terhadap seorang Dayak oleh sekelompok Madura. Selain itu rumor beredar bahwa para pembunuh Sendong ini dilindungi oleh kalangan elite Madura yang tergabung dalam IKAMA, yaitu dengan cara membebaskan mereka dari tahanan kepolisian dan memulangkannya ke pulau Madura untuk menghindari proses hukum.

Siapakah Sendong, sehingga kematiannya dapat memacu sentiment anti-Madura yang demikian kuat ? Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris sinode Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang pernah bertugas di wilayah Kereng Pangi sebelum tahun 2000, terungkap tentang sedikit latar belakang kehidupoan Sendong. Sekertaris sionde tersebut mengaku sebagai pendeta yang memberikan pemberkatan nikah untuk Sendong. Ia memang mendengar cerita tentang Sendong yang dianggap sebagai salah satu “jagoan” di daerah tersebut. Namun ia merasa bahwa munculnya jagoan-jagoan di daerah tersebut merupakan hal yang biasa, mengingat hampir semua penduduk di daerah itu adalah penambang emas. Mereka adalah migran yang berasal dari kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah, migran dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan migran dari Madura. Dengan demikian terungkap bahwa Sendong adalah orang Dayak Manyan yang berasal daeri Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Sangat jauh dari Kereng Pangi yang merupakan bagian dari DAS Katingan. Sendong adalah seorang migran antar kabupaten dan bukan penduduk asli Kereng Pangi, apalagi penduduk kota Sampit.

Kisah Sendong sebagai penambang emas biasa tampaknya tidak mempunyai keistimewaan. Namun berdasarkan wawancara dengan Ririn Binti, seorang Dayak, koresponden sebuah TV swasta nasional, menceritakan kaitan antara Sendong dengan tokoh Dayak berpengaruh di wilayah Kereng Pangi. Berikut tuturan cerita Ririn Binti....

Sendong adalah seseorang yang bekerja pada Emil Tiades . Pak Emil adalah seorang pensiunan TNI yang kemudian mempunyai bisnis karaoke dan prostitusi di kawasan Kereng Pangi. Ada yang

mengatakan bahwa dia bukan seorang pensiunan, melainkan *desertir*. Bahkan setelah kerusuhan, kini Emil mempunyai bisnis serupa di kawasan lokalisasi KM 12 Palangkaraya. Relasi antara Sendong dengan Emil ini menjadi penting untuk dipahami, mengingat dalam peristiwa kerusuhan, Emil dianggap sebagai seseorang yang menjadi pemimpin warga Dayak untuk melawan orang-orang Madura di kota Sampit. Pengalaman Emil sebagai seorang terlatih pada satu sisi dan kedekatan etnisitas dengan Sendong dapat menjadi pembuka tabir mengapa Emil terlibat dalam kelompok Dayak yang melawan orang-orang Madura. Walaupun Emil tidak masuk kedalam LMMDD KT

Sebetulnya peristiwa kematian Sendong dalam perkelahian di kawasan Kereng Pangi pada awalnya adalah kejadian yang sering terjadi di kawasan tersebut. Sebagai kawasan yang sering disebut “*male dominated area*” karena merupakan tempat hiburan dari para penambang emas di wilayah hulunya, perkelahian antar penambang emas kerap kali terjadi. Namun eskalasi perkelahian diantara seorang Dayak dan sekelompok pemuda Madura menjadi pemicu kekerasan antar etnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih bersifat etnisitas situasional, yaitu relasi elit Dayak dan Madura yang semakin memburuk pada saat itu. Sehubungan dengan adanya konflik dan kekerasan yang melibatkan etnis Madura dengan etnis Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut membawa suasana psikologis dikalangan etnis Dayak dan Madura di kota Sampit untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan pecahnya kekerasan antar etnis

Sesudah kejadian Kereng Pangi Desember 2000, secara umum hubungan antar etnis Dayak dengan Madura menjadi menegang. Seorang pendeta GKE yang dulunya bertugas di Sampit, dalam suatu wawancara pada tahun 2005 di kota Palangka Raya menuturkan bahwa pasca pembunuhan Sendong, hubungan dirinya dengan orang-orang Madura yang dikenalnya pun mengalami kekakuan. Karena memang setelah kejadian itu rumor akan adanya pembalasan dari orang-orang Dayak sudah merebak dimana-mana. Pada sisi lain, perang pernyataan di media massa lokal antara elite Dayak dan Madura terjadi. Kondisi ini menjadikan konflik kekerasan tinggal menunggu waktu.

Kejadian di Kereng Pangi pada akhir bulan Desember 2000, memang cukup dekat waktunya dengan waktu pertengahan bulan Februari 2001. Selain itu, kondisi eksternal di luar kota Sampit maupun konteks Kalimantan secara keseluruhan juga perlu dipahami. Sebelumnya pada tahun 1997-2000 kekerasan yang melibatkan etnis Madura dengan Dayak di Sanggau Ledo dan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat dan Madura melawan Melayu di Sambas Kalimantan Barat memberikan sinyal kepada masyarakat Dayak untuk ber"siap-siap" menghadapi kemungkinan konflik dengan orang-orang Madura.

Narasi yang dibangun oleh elite Dayak melalui "buku merah" tentang penyebab kerusuhan di kota Sampit adalah tindakan orang-orang Madura yang melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga dengan cara mengunci orang-orang Dayak yang ada dalam rumah tersebut, kemudian membakarnya, sehingga hampir seluruh penghuni rumah yang berjumlah delapan orang tewas, hanya seorang menjadi *survivor* yang berhasil menyelamatkan diri dan menjadi saksi dari kejadian tersebut. Jenasah kedelapan orang tersebut dimakamkan pada satu liang lahat dengan nisan yang memuat nama-nama yang meninggal di kuburan Kristen di kilometer 3 Sampit-Pangkalan Bun.

Satu keluarga yang meninggal tersebut mempunyai pertalian kekerabatan yang erat dengan masyarakat Dayak di Kabupaten Katingan (pada tahun 2001 masih wilayah kabupaten Kotawaringin Timur). Dalam suatu kunjungan pada bulan Agustus 2010 ke desa Kuluk Leleng, di kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan. Di desa tersebut saya berkunjung ke rumah orang Dayak yang menjadi korban pembunuhan di Sampit. Kemudian saya sempat mengetahui kalau beberapa orang sempat turun ke kota Sampit untuk membunuh dan melakukan pengusiran terhadap orang-orang Madura. Orang yang sebetulnya ikut turun ke Sampit tersebut tidak mengakui kalau dirinya ikut terlibat ke Sampit. Namun ia membenarkan kalau orang-orang datang ke Sampit karena marah ada saudara mereka yang terbunuh.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Madura dengan cara membakar hidup-hidup keluarga orang Dayak ini dibenarkan oleh banyak kalangan, termasuk dari kalangan orang Madura yang pernah mendengar cerita ini. Tindakan membakar satu keluarga ini menimbulkan amarah yang luar biasa di kalangan orang-orang Dayak, khususnya bagi kerabat atau teman satu kampung dari orang-orang yang mati dibakar. Namun, mengapa kelompok orang Madura membakar rumah tersebut masih merupakan pertanyaan yang belum ada jawabannya. Selain memang rumah tersebut ada di wilayah *hot spot* perkelahian antara orang-orang Dayak dan Madura di wilayah kecamatan Baamang. Kemungkinan lainnya adalah terkait dengan balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang Madura terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal terhadap lima orang Madura.

Kronologi Versi Penulis “Buku Putih”

Namun ada versi lain dalam narasi penyebab kerusuhan Sampit. Versi ini justru diceritakan oleh seorang intelektual muda Dayak yang bernama Sofyan Tinggang. Sofyan saat ini berprofesi sebagai pengusaha penyalur barang-barang untuk pemerintah dan juga konsultan lepas. Sofyan pernah menulis sebuah buku yang dikenal dengan “buku putih”³, yang seringkali dianggap sebagai buku yang berbeda versi dengan “buku merah”-nya LMMDD-KT. Bahkan, karena bukunya ini Sofyan mendapatkan intimidasi dan perlakuan kekerasan dari kelompok yang menulis “buku merah”. Namun, buku yang ditulis Sofyan ini tidak pernah beredar luas karena dimusnahkan oleh kelompok pembuat buku merah. Buku itu dibuat bersama

³ Sejak tahun 2009 saya telah bertemu dengan Sofyan yang berjanji untuk memberikan salinan dari buku tersebut. Namun salinan tersebut hingga kini tidak pernah diberikan kepada saya. Menurut Sofyan, buku maupun *soft copy*-nya tercerai-berai dan ia membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Namun dua orang peneliti terdahulu tentang Sampit, yaitu Gary van Klinken dan Sukandar telah menyimpan salinan buku tersebut. Menurut Sofyan, buku yang disusun bersama teman-temannya, pada awalnya merupakan laporan yang ia buat untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang situasi kerusuhan Sampit. Dengan adanya buku tersebut, maka ia tidak perlu mengulang-ulang cerita tentang situasi kerusuhan kepada pihak-pihak luar yang membutuhkannya. Namun pada akhirnya Sofyan dan kawan-kawannya tertarik untuk lebih mendalami apa yang sebetulnya terjadi dengan peristiwa Sanmpit, namun sudut pandanganya dianggap berbeda dengan *mainstream* tokoh-tokoh Dayak di Kalimantan Tengah pada waktu itu.

rekannya bernama Rajali dan diterbitkan pada tahun 2001. Judul buku itu adalah *“Tragedi Sampit Berdarah (Tasara) : Sejarah, Fakta dan Solusi”*

Menurut Sofyan, eskalasi kerusuhan meningkat, sebetulnya dimulai dari perintah Fedlik Asser kepada sekelompok orang yang berasal dari kampungnya untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Madura yang diduga terlibat dalam pembunuhan Sendong di Kereng Pangi. Kelompok yang dibayar ini berasal dari wilayah Seruyan, kampung asal dari Fedlik Asser. Fedlik Asser adalah seorang birokrat muda yang mengenyam pendidikan S-2 dari UGM⁴. Pada saat kejadian, Fedlik Asser adalah pegawai di kantor Bappeda Kotawaringin Timur. Selain itu, Fedlik Asser juga sekretaris LMMDD-KT Kabupaten Kotawaringin Timur. Fedlik Asser juga adalah orang yang terlibat dalam perang pernyataan pendapat antara tokoh-tokoh Dayak dengan Madura di media massa. Motif Fedlik Asser adalah karena rasa sakit hatinya terhadap rencana serah terima jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu kehendak Bupati untuk menggantikan posisi Fedlik Asser dengan orang lain. Selain Fedlik Asser, birokrat lainnya yang akan diganti adalah Gatin Rangkai, yang berasal dari Buntut Bali, Katingan.

Pergantian pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur akan dilaksanakan tanggal 19 Februari 2001. Para aktivis LMMDD KT yang beragama Kristen termasuk yang paling banyak digeser jabatannya. Keadaan ini

⁴ Fedlik Asser sempat ditahan oleh pihak Kepolisian dan kemudian kalangan tokoh masyarakat Dayak meminta Kepolisian untuk membebaskan Fedlik. Setelah itu Fedlik berkiprah menjadi birokrat di kabupaten Seruyan setelah “pemekaran” kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan. Sebagai seorang kelahiran desa Rantau Pulut Seruyan, maka Fedlik Asser lebih mudah untuk mendapatkan posisi di jajaran birokrasi pemerintah kabupaten Seruyan. Ia menduduki posisi penting di Dinas Kesbang Linmas (sebelum otonomi daerah dikenal dengan Bagian Sosial Politik). Kesbang Linmas mempunyai kewenangan untuk mengawasi orang atau kelompok tertentu yang dianggap perlu diwaspadai di suatu daerah, termasuk mengawasi keberadaan orang-orang Madura. Namun karir birokrasi dan politik Fedlik Asser tidak terlalu bagus, pada akhirnya ia bertolak belakang dengan bupati Darwan Ali yang menjadikannya tidak mempunyai posisi di kabupaten Seruyan. Fedlik Asser meninggal tahun 2010, setelah menderita penyakit diabetes yang parah.

menimbulkan ketidak-puasan bagi beberapa orang. Kemudian bertiup rumor kalau Bupati Kotawaringin Timur pada saat itu adalah Wahyudin Kasyful Anwar, masih keturunan Madura. Tujuan penggantian para pejabat yang berasal dari LMMDD KT adalah untuk mengurangi kekuatan mereka di pemerintahan. Walaupun belum jelas, siapa dan dari kalangan etnis mana para pengganti pejabat kabupaten yang berasal dari LMMDD KT. Seorang tokoh pemuda Dayak Muslim di Sampit menyatakan, bahwa kelompok “Dayak Kristen” yang juga para aktivis LMMDD-KT inilah yang sebetulnya berperan dalam hal menyulut kerusuhan di kota Sampit.⁵

Kelompok orang Seruyan yang berasal dari daerah Rantau Pulut, yang dibayar oleh Fedlik Asser pada malam tanggal 18 Februari 2001 pada awalnya menangkap kebingungan yang ada pada diri Fedlik Asser. Bahkan kelompok orang ini memberikan pilihan kepada Fedlik, apakah jadi melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Madura, atau mereka yang akan melakukan pembunuhan terhadap Fedlik Asser. Akhirnya eksekusi dilakukan oleh kelompok ini dengan cara membunuh orang-orang Madura yang dianggap sebagai pembunuh Sendong. Walaupun versi lainnya yang dikemukakan oleh LMMDD-KT sendiri menyatakan bahwa para pembunuh tersebut telah disembunyikan oleh aktivis IKAMA dan dipulangkan secara diam-diam ke Madura.

Setelah terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang Madura, maka terjadi pembalasan dari orang-orang Madura terhadap orang-orang Dayak, khususnya terhadap satu keluarga yang dibakar. Kemudian terjadilah saling serang antara kelompok Madura dan kelompok Dayak. Narasi kejadian baik yang diberikan oleh buku merah maupun dari pihak lainnya adalah orang-orang Madura melalui mobilisasi IKAMA menguasai kota Sampit dengan cara konvoi keliling kota dan mengejek orang-orang Dayak. Kelompok orang-orang Madura ini juga melakukan *sweeping* kepada orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari LMMDD-KT,

⁵ Wawancara dengan Najmi Fuadi, tokoh pemuda Sampit dan juga PNS di Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Juni 2008

namun tidak sedikit kesalahan *sweeping* terjadi, yaitu kepada siapa saja yang ada di kota Sampit, tanpa memandang orang Dayak atau bukan. Tindakan *sweeping* ini menyebabkan sikap dari orang-orang non-Madura kepada kelompok-kelompok Madura di kota Sampit menjadi lebih buruk lagi. Hal tersebut dapat dibaca dari pernyataan sikap dari kalangan berbagai etnis terhadap tindakan orang-orang Madura.

Peran Fedlik Asser sebagai orang yang menyulut kerusuhan di kota Sampit tampaknya sudah bukan menjadi rahasia lagi, karena media massa secara terang-terangan menayangkan berita tentang penangkapan Fedlik Asser dan saudara sepupunya ini. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Gatin Rangkai⁶, salah satu tokoh LMMDD KT Sampit, dan juga kawan dekat dengan Fedlik Asser memang menyatakan bahwa Fedlik terlibat dalam provokasi tersebut, tetapi yang dilakukannya adalah diluar jalur kebijakan LMMDD KT Sampit. Gatin bercerita bahwa sore hari tanggal 17 Februari 2001, ia sempat bertemu dengan Fedlik untuk bertegur sapa. Tetapi ia tidak mengetahui adanya rencana Fedlik terhadap orang-orang Madura itu, baru setelah kejadian ia mengetahui apa yang dilakukan oleh Fedlik.

Tanggal 18-19 Februari 2001 dalam narasi yang dibangun oleh kelompok Dayak, dianggap sebagai suatu situasi penguasaan kota Sampit oleh orang-orang Madura ditandai dengan konvoi keliling kota, situasi ketakutan yang melanda orang-orang bukan Madura. Pada saat itu terjadi arus pergerakan orang-orang non-Madura menuju kota Palangkaraya. Tanggal-tanggal tersebut adalah suatu situasi dimana elemen-elemen orang-orang Madura yang terkait dengan IKAMA benar-benar

⁶ Setelah kerusuhan, Gatin Rangkai diangkat menjadi sekertaris daerah Kabupaten Katingan. Sebelum kerusuhan ia adalah aktivis LMDD KT Kotawaringin Timur dan bekerja di Dinas Perkebunan. Ia juga termasuk birokrat Dayak-Kristen yang disingkirkan oleh Bupati Kotawaringin Timur. Ia termasuk *survivor* dari ancaman pembunuhan dari tokoh-tokoh Madura karena kapasitasnya sebagai aktivis LMDD KT. Ia selamat dari *sweeping* orang-orang Madura yang menanyakannya apakah ia orang Dayak atau bukan. Kemudian ia menjawab bahwa ia orang Palangka Raya; selain itu wajahnya yang mirip orang Cina membuat orang Madura yang melakukan *sweeping* hanya menganggapnya sebagai orang *Cino*, sehingga ia dilepaskan. Padahal ia adalah orang yang paling dicari oleh tokoh-tokoh Madura. Menurut Gatin, disitula pula memperlihatkan ketidak-tahuan orang Madura tentang siapa orang Dayak yang sebenarnya.

menguasai kota Sampit dan menebar teror ketakutan bagi orang-orang non-Madura, khususnya bagi orang-orang Dayak. Kemudian beredar rumor bahwa orang-orang Madura membentangkan spanduk yang bertuliskan “Selamat datang di Sampit, Sampang Kedua”. Spanduk tersebut disimpan oleh Wakil Gubernur Kalteng pada waktu itu sebagai bukti penguasaan orang-orang Madura terhadap kota Sampit. Spanduk itu pulalah yang dituding menjadi penyulut kemarahan orang-orang Dayak terhadap orang Madura.

Keberadaan spanduk itu tentu saja tidak dipercayai oleh kalangan orang-orang Madura. Mereka mengatakan bahwa bisa saja spanduk tersebut dibuat oleh kelompok-kelompok orang Dayak yang tidak menyukai keberadaan orang-orang Madura. Penggunaan sebutan “Sampang kedua” sepertinya menuduh bahwa elite-elite Madura yang ada di kota Sampit berasal dari kabupaten Sampang. Padahal orang-orang Madura di kota Sampit tidak seluruhnya berasal dari kabupaten Sampang. Selain itu, kalangan muda Madura yang kini berdomisili di Sampit mengatakan bahwa pembuatan spanduk dengan menyebut “Sampit kota Sampang kedua” bukanlah karakter elite Madura dalam melakukan penguasaannya di kota Sampit. Para elite Madura di Sampit tidak mengenal cara-cara perjuangan dengan menggunakan Spanduk seperti itu. Dalam bab V akan dibahas mengenai perspektif dari kalangan Madura sendiri mengenai penggunaan istilah “Sampang kedua” yang mempunyai makna yang berbeda dengan apa yang dituduhkan selama ini kepada orang-orang Madura.

Sebaliknya, “buku merah” sebagai corong dari kelompok Dayak dalam membangun narasi tentang siapa yang paling perlu disalahkan dalam kerusuhan tersebut menayangkan foto yang menyatakan bahwa spanduk bertuliskan “Sampit Sampang kedua” itu benar adanya. Kemudian spanduk tersebut disimpan oleh wakil gubernur sebagai bukti bahwa memang orang-orang madura merencanakan untuk menguasai kota Sampit. Selain pernyataan “Sampit Sampang Kedua”. Kelompok Dayak juga menunjukkan sebuah papan pembangunan Sekolah yang secara sengaja

mencantumkan nama desa tersebut menjadi nama salah satu tempat di Madura. Hal ini tampaknya perlu ditampilkan oleh pihak Dayak untuk menunjukkan berbagai rencana jahat dari orang-orang Madura yang ingin merebut kota Sampit.

Selain itu, hingga kini banyak orang-orang Dayak yang percaya bahwa kelompok-kelompok Madura telah merencanakan untuk meledakkan bom di Sampit dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa meledaknya sebuah rumah yang diduga tokoh IKAMA. Peristiwa meledaknya rumah tersebut dalam versi orang-orang Dayak adalah bom yang meledak. Bahkan, bagi orang-orang Dayak Kristen yang relijius, peristiwa meledaknya rumah orang Madura yang menyimpan bahan peledak itu sebagai “Kuasa Tuhan Yesus Kristus” untuk menyelamatkan tanah orang Dayak dari penguasaan orang-orang Madura⁷. Sementara itu, pihak kepolisian menganggapnya sebagai sebuah ledakan yang bersumber dari petasan.

Namun, dalam suatu wawancara dengan Sofyan, foto-foto yang ada dalam ”buku merah” itu perlu dikritisi. Misalnya narasi tentang “Gerakan Carok Antar Pulau” yang disingkat dengan “Gencar” itu merupakan rekayasa terhadap istilah Gencar yang seharusnya berarti *General Cargo*, yaitu suatu sub-kelompok buruh angkut di pelabuhan Sampit yang ada di bagian pengangkutan antar pulau. Demikian halnya dengan foto-foto yang dimuat dalam buku tersebut beberapa berasal dari acara tujuh-belas agustusan, dimana masyarakat Madura menggunakan baju kaos *ke lesap*. Suatu hal yang juga dilakukan dalam peringatan hari kemerdekaan RI oleh etnik lainnya yang menggunakan baju daerahnya untuk karnaval. Demikian halnya dengan foto foto dengan nomor tertentu, sebetulnya nomor nomor itu adalah nomor induk dari para buruh angkut di pelabuhan Sampit.

Tinggang Sofjan adalah seorang muda Dayak yang mengenyam berbagai pendidikan tinggi, seperti ilmu manajemen dan ilmu pertanian, tetapi tidak semua jenjang

⁷ Wawancara dengan ibu Mai di Palangkaraya, Agustus 2009

pendidikan ini diselesaikannya. Saya pernah tiga kali mewawancarainya dan berusaha mendapatkan “buku putih”. Buku itu dianggap oleh sebagian kalangan Dayak sebagai upaya untuk memutar-balikkan fakta mengenai kejadian kerusuhan. Padahal ketika Tinggang Sofyan dan kawan-kawannya menuliskan buku itu tidak dalam rangka untuk menjawab “buku merah”, melainkan diminta oleh bagian Humas pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur untuk menuliskan kronologi dan berbagai kejadian kerusuha. Namun yang dilakukan oleh Tinggang Sofyan dan kawan-kawan tidak hanya melakukan penulisan untuk keperluan informasi ke-humas-an, tetapi mereka tertarik untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam.

Latar belakang Tinggang Sofyan sebagai orang Dayak yang dilahirkan di wilayah DAS Kahayan, dan ia bangga dengan ke-Dayak-annya, sangat sulit dipahami kalau karya tulisnya dimaksudkan untuk menyalahkan orang-orang Dayak. Atas usahanya menulis tersebut, ia hampir saja dibunuh oleh elemen-element Dayak yang tidak menyukai tulisannya. Elemen itu menurutnya mengaku sebagai orang suruhan dari Prof.KMA Usop, tokoh LMMDD KT. Tetapi Tinggang Sofyan tidak percaya dengan pengakuan kelompok tersebut, karena Prof KMA Usop adalah gurunya dan bahkan ia membiarkannya menulis. Tinggang Sofyan sendiri pernah menemui Prof KMA Usop dan ia tidak percaya kalau gurunya ini memerintahkan penganiayaan terhadap dirinya. Namun, dalam sebuah wawancara dengan salah seorang kerabat Prof.KMA Usop, memang terdapat kesan bahwa kerabat KMA Usop itu sendiri tidak menyukai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tinggang Sofyan.

Narasi yang dibangun oleh kedua belah pihak, orang-orang Dayak dan Madura, bukan mengenai benar salahnya, juga bukan strategi manipulatif yang dilakukan oleh kedua pihak. Namun, mengapa narasi-narasi tersebut dipilih dan ditonjolkan oleh kelompok Dayak maupun Madura. Pilihan untuk menonjolkan situasi di pelabuhan Sampit adalah suatu kesengajaan yang mempunyai latar belakang tertentu. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sampit sebelum terjadinya kerusuhan, pelabuhan Sampit identik dengan Madura. Hampir semua jenis pekerjaan dikuasai oleh orang-orang

Madura, mulai dari pedagang informal, buruh angkut hingga serikat pekerjanya. Pelabuhan Sampit juga identik dengan H Marlinggi, tokoh IKAMA yang juga anggota legislative dari Partai Golkar. H Marlinggi diidentikan dengan segala macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura dan dia adalah pelindung utama dari orang-orang Madura agar tidak terkena jeratan hukuman. H Marlinggi adalah desertir dari Brimob, yang kemudian merambah kepada aktivitas politik melalui Partai Golkar, sesuatu yang diluar *mainstream* pilihan politik orang Madura yang biasanya memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

4.3. Monumen Kerusuhan dan Pembunuhan orang-orang Madura

Kerusuhan yang diakhiri dengan pembunuhan orang-orang Madura dan pengungsian ke luar kota Sampit, kemudian menghasilkan berbagai “monumen kerusuhan” . Berbagai monument itu menjadi saksi kejadian kekerasan antar etnis di bulan Februari 2001. Pertama, Makam Masal yang ada di Kilometer 14 jalan Sampit-Pangkalan Bun. Kedua, “tugu perdamaian” yang terletak di bundaran poros jalan Sampit-Pangkalan Bun. Ketiga, makam di kuburan Kristen Sampit. Keempat, ratusan sisa-sisa bangunan rumah yang ada di seantero kota Sampit. Kebanyakan adalah rumah-rumah orang Madura yang ditinggalkan, kemudian dibakar. Namun dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2004 dengan situasi pada 2010 telah banyak berubah, sisa bangunan kebanyakan hilang karena telah berdiri bangunan baru atau berpindah tangan kepemilikan

Makam Masal

Lokasi Makam Massal di kilometer 14 jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Pangkalan Bun terletak agak menjorok kedalam. Dari pinggir jalan lokasinya tidak terlihat. Pada tahun 2004 masih terlihat papan anak panah yang bertuliskan lokasi makam masal. Tetapi pada tahun 2010 petunjuk arah tersebut

sudah tidak terlihat lagi. Makam masal itu sendiri berukuran 400 m². Terdapat sebuah bangunan kecil untuk beristirahat. Didalam kompleks makam masal terdapat beberapa makam dalam ukuran besar dan nisan-nisan tanpa nama. Pada bagian depan, terdapat papan besar dengan tulisan “Makam Masal korban Tragedi Februari 2001” dan tulisan Arab bertuliskan *Innalilahi Wainnalillahi Rojiun*. Tidak terdapat jumlah pasti berapa jasad yang dikuburkan dalam makam masal ini. Dipastikan jasad terbanyak berasal dari etnis Madura. Namun terdapat juga jasad orang-orang non-Madura yang dikuburkan di tempat tersebut. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa situasi kerusuhan bersifat *chaos*, sehingga tidak jelas lagi siapa yang menjadi sasaran pembunuhan, termasuk orang-orang yang bukan orang Madura. Makam massal yang lokasinya relatif tersembunyi, seperti sebuah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat di kota Sampit yang ingin menguburkan peristiwa Februari 2001 dalam ruang publik Sampit dan Kalimantan Tengah. Namun, ingatan kolektif tersebut tidak akan mudah dihapuskan, karena monumen-monumen yang mengingatkan akan kekerasan tersebut justru dibangun.

Foto 5.1. Makam Masal di Kota Sampit



Tugu Perdamaian

Lokasi “tugu perdamaian” dibangun di bundaran sebuah jalan poros yang strategis, menghubungkan kota Sampit dengan Pangkalan Bun. Tugu yang terbuat dari Kayu Ulin ini digagas oleh Fedlik Asser, tokoh muda LMMDD-KT yang sering dianggap provokator kerusuhan Februari 2001. Walaupun elit Dayak mengatakannya sebagai tugu peringatan agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti Februari 2001.

“Tugu Perdamaian” itu sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah lapangan berbentuk lingkaran yang menjadi bundaran dari jalan poros Sampit-Pangkalan Bun. Kemudian ditengah bundaran tersebut terdapat sebatang kayu ulin yang telah diukir. Batang kayu ulin itulah yang menjadi tugu peringatan. Ukiran batang kayu tersebut pada puncaknya melambangkan seekor burung. Kemudian dibawahnya terdapat ukiran yang melambangkan *Mandau* (senjata khas Dayak Kalteng) dan *telawang* (*perisai*). Kemudian dibawahnya lagi terdapat tulisan 18 Februari 2001, untuk mengingatkan peristiwa kerusuhan dimulai pada tanggal 18 Februari 2001.

Foto 5.2. Tugu Perdamaian di Kota Sampit



Terlihat bahwa batang kayu ulin tersebut tidak tegak lurus, sehingga secara artistik, dari kejauhan tampak bahwa tugu tersebut kurang bagus untuk dilihat. Selain itu, sebelumnya ada rencana untuk membuat ukiran clurit sebagai lambang dari senjata orang Madura. Bagi saya, hal yang menarik untuk diperhatikan dari tugu tersebut adalah penulisan tanggal 18 Februari 2001 sebagai awal dari kerusuhan. Penulisan tanggal 18 Februari 2001 sebetulnya lebih ditujukan pada tanggal dimana orang-orang Madura mulai melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang Dayak, yaitu pembakaran rumah dan pembunuhan terhadap orang-orang Dayak yang ada di dalam rumah itu sendiri. Apabila kita kembali pada makna tugu tersebut untuk mengenang orang-orang yang mati karena kerusuhan, seharusnya bukan tanggal 18 Februari, melainkan setelah tanggal 20 Februari 2001 terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Madura. Sebagian terbesar yang dibunuh adalah mereka yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan banyak yang mati terbunuh, karena merasa tidak pernah menyakiti orang-orang Dayak. Banyak yang mati karena berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, yaitu pada saat orang-orang Dayak melakukan *sweeping* untuk mencari orang-orang Madura yang dianggap terlibat dalam kerusuhan. Tetapi situasi *chaos* menyebabkan orang-orang Dayak ini melakukan pembunuhan tanpa mengenali latar-belakang sasarannya.

Selain itu, pembangunan “tugu perdamaian” itu sendiri menyulut kontroversi di kalangan orang-orang Dayak. Menurut salah seorang anggota DPRD Kotawaringin Timur --- *seorang pensiunan TNI dan berasal dari etnis Jawa* --- biaya pembangunannya menghabiskan uang negara sebesar Rp 500 juta. Pembangunan tugu perdamaian dari sisi anggaran sebetulnya tidak efisien. Tetapi sebagai seorang anggota DPRD yang bukan berasal dari etnis Dayak, ia juga tidak berani untuk menyatakan ketidak-setujuannya.

Ketidak-setujuan dari kalangan Dayak lainnya juga sempat muncul. Elemen “Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMPTS)”, --- *suatu kelompok yang mewarisi sentimen perjuangan Christian Simbar dari Barito*---, menganggap pembangunan

tugu tersebut hanya akan membangkitkan kenangan buruk terhadap kerusuhan itu sendiri, dan bukan simbol perdamaian. Namun tugu tersebut akhirnya dapat berdiri, mengingat *ephoria* kemenangan masih sangat kuat pada tahun 2001-2002.

Kuburan Kristen

“Monumen” lainnya dapat dilihat pada kompleks pekuburan Kristen di kilometer 3 Sampit-Pangkalan Bun. Bagi yang tidak memahami konteks terjadinya kerusuhan, maka sebuah nisan yang terdiri dari tujuh nama jasad yang dikuburkan di tempat tersebut mungkin tidak mempunyai makna. Namun bagi yang pernah mendengar dan mengalami kerusuhan Februari 2001, maka sebuah nisan dengan tujuh nama dan tanggal kematian yang sama akan mempunyai makna. Disitulah tujuh jasad dari sebuah keluarga besar Dayak yang tewas karena rumahnya dibakar oleh kelompok Madura dikuburkan. Makam tersebut juga tidak mempunyai keistimewaan dari sisi bentuk maupun arsitektural kuburan, seperti kuburan kristen lainnya. Namun, berbeda dengan “Makam Massal” yang relatif lebih dikenal oleh masyarakat kebanyakan. Makam di kuburan Kristen tersebut kurang dikenal oleh masyarakat Sampit, kecuali oleh kalangan Dayak yang mempunyai pertalian kekerabatan dengan jasad yang dikuburkan disitu.

Foto 5.3. Makam Orang Dayak di Kuburan Kristen Kota Sampit



Pembunuhan Massal dalam Kerusuhan Sampit

Seringkali jatuhnya korban ini bukan karena terjadinya perkelahian massal antara orang-orang Dayak dengan orang-orang Madura. Meninggalnya sebuah keluarga besar orang-orang Dayak dengan cara dibakar meningkatkan eskalasi kemarahan orang-orang Dayak terhadap orang Madura. Namun, sesudah itu yang terjadi adalah ladang pembantaian (*killling fields*) terhadap orang-orang Madura dan bukannya konteks perkelahian antara dua orang Ramli, seorang anak muda yang kakak kandungnya meninggal pada saat kerusuhan menceritakan seperti ini :

“Lihatlah kubah mesjid itu, sudah terpenggal, seperti kepala kakak sayapun terpenggal pada saat kerusuhan. Saya tahu kalau kepala kakak saya dipenggal dari cerita paman saya yang kebetulan melihat kakak pada saat-saat menjelang kematiannya. Paman saya sendiri selamat dan hingga kini tinggal di kampung di Madura. Walaupun paman saya terluka pada bagian kepala. Menurut paman saya, kakak meninggal dengan cara dipenggal. Kakak saya belum menikah, dan ia mendirikan mesjid untuk mengajar mengaji kepada anak-anak di sini. Mengapa kakak saya jadi korban, karena ia merasa tidak mempunyai musuh ataupun tidak punya salah apapun terhadap orang-orang Dayak disini. Seharusnya ia pergi ke pengungsian dan pergi ke Madura, tetapi ia menolak, ia menganggap tidak perlu takut, karena merasa tidak memiliki musuh. Memang banyak yang mati karena merasa tidak mempunyai musuh.”

Saya mempunyai hubungan pertemanan yang cukup akrab dengan Ramli, dan pernah mengunjungi paman Ramli di kampungnya di Kedundung Sampang Madura. Memang di kepala sang paman terlihat bekas luka bacokan. Namun ketika dikonfirmasi mengenai cara meninggalnya kakak dari Ramli ia mengatakan kalau ia tidak melihat terlalu jelas, karena ia sendiri terluka sedangkan sang keponakan ada dalam kerumunan orang-orang yang menggunakan senjata tajam yang mengerubutinya. Ia sendiri tidak menyaksikan bagaimana kepala sang keponakan terpenggal. Entah darimana Ramli mempunyai imajinasi mengenai terpenggalnya kepala kakaknya, tetapi yang penting, imajinasi tentang pemenggalan kepala telah menjadi ingatan kolektif dari mereka yang mendengar dan mengalami peristiwa kerusuhan tersebut.

Narasi kekerasan yang dialami oleh orang-orang Madura yang paling diliput media massa adalah pembunuhan massal di wilayah Parenggean, jauh di luar kota Sampit. Parenggean adalah sebuah wilayah transmigrasi yang penduduknya bukan hanya berasal dari penduduk setempat melainkan transmigran dari Jawa dan migrant spontan dari Madura. Pada minggu-minggu kerusuhan terdapat beberapa truk yang mengangkut sekitar 168 orang Madura yang akan dibawa ke wilayah aman di pengungsian kota Sampit. Namun di tengah jalan rombongan ini dihentikan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai polisi yang akan menyelamatkan orang-orang Madura. Padahal orang-orang yang mengaku polisi tersebut adalah orang-orang yang akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Madura tersebut. Kemudian pengungsi Madura dalam satu truk tersebut dihabisi. Dalam narasi orang-orang Madura-Sampit yang sekarang tinggal di Sampit mengatakan bahwa yang menjadi sasaran dari pembunuhan adalah kaum perempuan Madura yang dikenal menyukai penggunaan perhiasan gelang di tangannya. Oleh sebab itu, pembunuhan massal itu lebih dikarenakan faktor untuk mendapatkan harta, dan bukan soal kebencian etnis semata-mata. Narasi yang dibangun dari kalangan elite Dayak tentang “etik” pembunuhan pada intinya adalah penghindaran untuk melakukan pembunuhan bagi perempuan dan anak-anak, namun kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. Pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi *amok*, tampaknya tidak memilih siapa korbannya.

Narasi Pengendalian Kerusuhan di Pangkalan Bun

Peristiwa kerusuhan Februari 2001 memberikan suatu perspektif lain mengenai “locus” kekerasan yang terjadi secara spesifik di kota Sampit, walaupun persebaran orang-orang Madura di Kalimantan Tengah sebetulnya terdapat di tiga kota utama, yaitu Sampit, Pangkalan Bun dan Palangkaraya. Namun, dalam jumlah yang lebih kecil, orang-orang Madura tersebar hampir diseluruh kabupaten Kalimantan Tengah. Organisasi IKAMA ada di tiga kota tersebut. Namun relasi orang-orang Madura dan

IKAMA di dua kota lainnya, yaitu Pangkalan Bun dan Palangka Raya dengan Sampit ternyata berbeda. Di Palangka Raya memang terjadi pembakaran rumah-rumah orang Madura dan adanya korban tewas, namun dalam jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di Sampit. Kejadian di Palangka Raya merupakan efek (*spill over*) dari kejadian di Sampit. Sedangkan di Pangkalan Bun, dimana jumlah orang Madura menempati jumlah kedua setelah Sampit dan organisasi IKAMA sangat kuat, kerusuhan dapat dicegah oleh aparat keamanan. Selain itu, naratif tidak terjadinya kerusuhan di kota Pangkalan Bun karena masih adanya pengaruh dari keberadaan kesultanan Kotawaringin yang mempunyai istana dan kerabat di kota tersebut.

Kota Pangkalan Bun, ibu kota Kotawaringin Barat memang masih memiliki “keraton” yang disebut dengan istana Kuning. Keraton itu menjadi simbol pemersatu dari kelompok-kelompok etnis yang ada di wilayah Pangkalan Bun. Strategi yang dilakukan oleh Sultan di Pangkalan Bun adalah menempatkan kelompok-kelompok etnis dalam suatu *enclave* tertentu. Misalnya orang-orang Madura ditempatkan di wilayah yang sekarang disebut dengan Madurejo. Kemudian masyarakat Melayu di Kotawaringin Lama, sedangkan orang-orang Dayak di Pasir Panjang. Penempatan masyarakat berdasarkan etnis tersebut menempatkan sultan sebagai pihak yang penting dan ditaati oleh semua kelompok etnik yang ada di kota Pangkalan Bun. Narasi pentingnya peran sultan ini diceritakan oleh kalangan dekat dengan sultan dengan memberikan contoh pengalaman supra-natural mereka terhadap kelompok kelompok Dayak yang mencoba memasuki kota Pangkalan Bun. Dikatakan bahwa para *pangkalima* Dayak yang mencoba memasuki wilayah Pangkalan Bun secara supra-natural dengan cara terbang, ternyata berjatuhan sebelum memasuki wilayah Pangkalan Bun. Namun, keterangan lain menyatakan bahwa penjagaan oleh kelompok militer dan polisi sangat ketat di perbatasan Sampit-Pangkalan Bun, setelah mereka belajar dari kegagalan mengamankan kota Sampit.

Kondisi ini berbeda dengan situasi di kota Sampit, dimana pengelompokan etnis berdasarkan tempat tinggal dilakukan secara alamiah dan mengikuti konsep *chain migration*, yaitu proses migrasi berantai dimana migran yang baru datang cenderung tinggal didekat kerabat atau komunitas di tempat tinggal asalnya. Walaupun pengelompokan tempat tinggal berdasarkan etnis juga terjadi, seperti pernah ada nama daerah yang disebut *kertak Madura* yang sekarang menjadi jalan MT Haryono. Kemudian beberapa daerah seperti S Parman, merupakan daerah yang dikenal sebagai kawasan tempat tinggal orang-orang Madura.

4.4. Kerusuhan Sampit dan Penghilangan Identitas Madura

Kekerasan antar etnik sebagai suatu bagian dari pertarungan identitas melahirkan kelompok yang menang dan yang kalah (*winner and loser*). Walaupun persepsi tentang siapa yang menang dan kalah tentu saja menjadi relatif. Pihak yang “menang”, bisa saja dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang mendapatkan stereotype baru sebagai kelompok yang mendapatkan sesuatu melalui jalan kekerasan. Sementara pihak yang “kalah” mendapatkan simpatik sebagai korban dari kekerasan. Permasalahan “menang dan kalah” juga menjadi relatif yaitu berkaitan dengan “ruang dan waktu” (*space and time*) yang dalam kajian-kajian mutakhir dalam Antropologi mulai mendapatkan perhatian. Karena “menang” dalam suatu ruang publik tertentu perlu dilihat dalam konteks waktunya, karena mungkin dalam konteks waktu lainnya, bisa saja kelompok pemenang itu menjadi pihak yang kalah. Permasalahan “menang dan kalah” selalu mempunyai konteks kesejarahan tertentu.

Permasalahan menang-kalah disini adalah apa yang dirasakan oleh orang-orang Dayak dan Madura pasca kerusuhan Sampit, khususnya representasi dalam ruang publik. Oleh sebab itu, saya akan menampilkan berbagai narasi mengenai para pemenang dan yang kalah ini dalam ruang publik di kota Sampit dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah dalam periode 10 tahun, yaitu Februari 2001 hingga awal

tahun 2011. Fokusnya adalah representasi ke-Madura-an dalam birokrasi pemerintah dan aktivitas politik, sektor informal, seni dan interaksi keseharian.

Birokrasi Pemerintah dan Aktivitas Politik

Kerusuhan telah membekukan identitas orang Madura, sekaligus melakukan homogenisasi latar belakang orang-orang Madura. Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, orang-orang Madura yang ada di kota Sampit dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu mereka yang lahir di Sampit dan menjadi generasi kedua hingga keempat dari pendahulunya yang tiba di Sampit dalam periode 1920, 1930 dan 1940-an. Kemudian migran spontan yang datang dari Madura dalam periode 1970-2000. Namun dalam situasi *chaos* kerusuhan, semua yang dilabel sebagai orang Madura melakukan pengungsian⁸ keluar dari Sampit khususnya, dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Kecuali untuk wilayah kabupaten Kotawaringin Barat, dimana komunitas-komunitas Madura lokal disana tidak melakukan pengungsian ke luar Kotawaring Barat. Namun wilayah inipun tidak menjadi area pengungsian dari orang-orang Madura yang berasal dari Sampit dan Palangka Raya karena masih merasa terancam keselamatannya.

Orang-orang Madura Sampit yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan instansi vertikal lainnya, seperti dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka relatif masih mempunyai kesempatan untuk bekerja di tempat lainnya di luar Sampit. Para PNS eks-Sampit ini diberikan kemudahan untuk ditempatkan di daerah lain. Memang orang-orang Madura yang bekerja sebagai PNS bukanlah kelompok yang terlalu dominan.

⁸ Istilah pengungsi (*refugee*) dalam ranah kajian migrasi terpaksa (*forced migration*) mempunyai arti tersendiri sebagai orang-orang yang karena alasan politik, peperangan, kekerasan horisontal dan bencana alam pindah lokasi tempat tinggalnya dengan melintas batas teritorial negaranya. Istilah yang digunakan bagi “pengungsi” yang tidak melintas batas teritorial negara disebut dengan *internally displaced persons* (IDP) atau secara harafiah disebut dengan pengungsi lokal. Penggunaan istilah pengungsi, IDP ataupun pengungsi lokal digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama.

Demikian halnya posisinya di instansi pemerintahpun tidak dalam posisi sebagai pejabat yang menduduki eselon 2 atau 3 (Kepala Dinas, Kepala Badan atau Kepala Kantor). Namun, beberapa kisah tentang orang-orang Madura yang kembali ke Sampit dan ingin melanjutkan karirnya sebagai birokrat tampaknya sulit untuk mencapai jabatan tinggi. Penempatan tokoh-tokoh Dayak dalam jabatan-jabatan yang memungkinkan terjadinya penyaringan terhadap orang-orang Madura yang kembali sehingga menyulitkan orang-orang Madura untuk kembali dalam posisi PNS. Walaupun Undang-undang dan Peraturan pegawai negeri sipil tidak pernah membuat aturan yang terkait etnisitas, namun dalam prakteknya penyaringan terhadap orang Madura yang mempunyai latar belakang PNS dilakukan. Orang Madura PNS yang dianggap terlibat dengan IKAMA atau mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan tokoh IKAMA kehilangan kesempatan untuk dapat bekerja kembali menjadi PNS. Salah seorang contohnya adalah menantu dari Almarhum Haji Satiman yang merupakan salah seorang ketua IKAMA tidak diterima kembali.

Pelabuhan Sampit Minus Buruh Angkut Madura

Pelabuhan Sampit yang ada di Sungai Mentaya ini adalah pelabuhan paling sibuk di Kalimantan Tengah. Frekuensi kapal yang datang pergi, termasuk kapal penumpang dan kapal barang adalah yang paling tinggi di Kalimantan Tengah. Buruh angkut pelabuhan adalah komponen yang penting dari arus barang dan manusia di pelabuhan tersebut. Tanpa kehadiran buruh angkut, maka bongkar muat barang akan terganggu. Demikian halnya dengan penumpang yang membawa barang untuk naik atau turun dari kapal sangat membutuhkan buruh angkut.

Sebelum kerusuhan buruh angkut dikuasai oleh orang-orang Madura. Pada saat itu, Ketua Kelompok Buruh angkut pelabuhan Sampit adalah Haji Marlinggi. Ia adalah tokoh IKAMA dan pernah menjadi anggota DPRD Kotawaringin Timur dari Partai Golongan Karya. Haji Marlinggi merupakan tokoh IKAMA yang paling dicari oleh

orang-orang Dayak maupun aparat kepolisian pada saat kerusuhan. Namun ia berhasil melarikan diri ke Surabaya dan meninggal disana, tanpa mengalami proses hukum.

Pada saat sebelum kerusuhan, hampir semua buruh angkut adalah orang-orang Madura. Namun ada beberapa orang buruh yang bukan Madura, mereka adalah orang-orang Jawa, Banjar dan orang Dayak. Pada saat kepemimpinan Haji Marlinggi inilah digambarkan stereotype buruh-buruh angkut Madura yang seringkali berbuat semauanya kepada konsumennya. Buruh-buruh ini dianggap lebih berkuasa daripada para konsumennya.

Pada saat setelah kerusuhan keadaan menjadi berbalik. Ketua buruh angkut adalah orang Banjar, sementara anggota buruhnya adalah orang-orang Banjar, Jawa dan “Dayak Sampit”. Orang-orang Madura yang kembali pada saat itu belum ada yang kembali bekerja sebagai buruh angkut.

Identitas Kuliner Madura

Kerusuhan Sampit telah menghilangkan berbagai kesempatan dan identitas orang-orang Madura. Salah satunya adalah kuliner Madura yang sangat terkenal, yaitu sate dan soto Madura. Namun, kedua kuliner tersebut muncul kembali dalam ruang publik kota Sampit dan menjadi awal kata “Madura” hadir di kota Sampit pasca kerusuhan Februari 2001.

Pertama adalah sebuah warung makan yang relatif menetap yang disebut dengan “Soto Madura Cak Suber” yang ada di perempatan Jalan Pelita Kota Sampit. Saya menemukan warung tersebut pada bulan Juni 2009. Pemiliknya adalah Idhan. Ia mengaku sebagai orang yang hidup di lingkungan Madura, ia berusia sekitar 36 tahun lulusan dari Universitas 17 Agustus di Surabaya jurusan manajemen. Ayahnya adalah orang Madura, yang kemudian diketahui bernama Wakir Saleh, seorang guru yang kemudian dianggap sebagai sekretaris IKAMA, sedangkan ibunya adalah orang

Banjar. Ia mengaku cukup mengenal tokoh-tokoh IKAMA, seperti H Satiman dan H Ismail, bahkan ia mengatakan pernah ke rumah H Ismail di Banjar. Ketika membicarakan tentang IKAMA, ia heran dengan konstruksi yang diberikan kepada IKAMA sebagai organisasi besar dan formal bagi orang-orang Madura. Menurutnya IKAMA hanya organisasi kekeluargaan saja, bahkan ia sendiri tidak menyangka kalau ayahnya dianggap sebagai sekretaris IKAMA. Padahal label seseorang dikaitkan dengan IKAMA akan tidak menguntungkan, sebab salah satu ketentuan yang dikeluarkan oleh Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) adalah melarang aktivis IKAMA untuk kembali ke kota Sampit.

Pembicaraan dengan Idhan memang tidak terlalu banyak membicarakan tentang kerusuhan dan IKAMA, karena bagi saya kurang terlalu baik untuk membuat *rapport* pada orang yang baru dikenal dan langsung masuk pada wilayah pembicaraan tentang kerusuhan. Namun Idhan sendiri yang menceritakan bahwa dirinya pernah diundang di Radar Sampit untuk memberikan pandangan mengenai kerusuhan tersebut dari perspektif Madura.

Berkaitan dengan usaha Soto Madura (juga sate Madura), ia sama sekali tidak mempunyai pemikiran soal membawa identitas Madura dalam usahanya. Namun ia melihat bahwa “Soto Madura” sudah mempunyai *brand image* tersendiri. Ia tidak memikirkan merek dagangannya akan mempunyai dampak tertentu dengan penggunaan kata Madura. Bahkan selain tulisan “Soto Madura” dan “Sate Madura”, didepan warungnya dipamerkan simbol soto Madura berupa tempat berjualan soto yang dapat ditanggung diatas pundak pedagangnya.

Kedua adalah pedagang Sate Madura keliling yang saya temui di perempatan Jalan Pelita Barat. Ketika pedagang sate tersebut melewati saya, awalnya saya tidak tertarik untuk makan sate. Namun, ketika pandangan saya tertuju pada gerobak yang dibawa oleh pedagang tersebut bertuliskan “Sate Madura H Syaiful”, saya menjadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi. Karena ini adalah untuk kedua kalinya saya

melihat kata “Madura” muncul di kota Sampit, bahkan Kalimantan Tengah pasca kerusuhan Februari 2001. Pemilik gerobak sate itu, H Syaiful telah diperingatkan oleh kawan-kawannya untuk hati-hati dengan penggunaan kata Madura. Menurut H Syaiful, teman-temannya khawatir ada orang mabuk yang membaca, dan akan mengancamnya. Menurut H Syaiful, ia tidak takut, karena yang dilakukannya adalah pekerjaan halal. Kalau ada orang mabuk dan minta sate, akan diberikannya sate. Kemudian H Syaiful menceritakan bahwa beberapa orang memang berjualan sate Madura secara berkeliling, tetapi mereka tidak mau memunculkan kata Madura di gerobak dagangannya.

H Syaiful sebetulnya ingin mempunyai tempat berdagang tetap, tidak berkeliling. Apalagi gerobak (*rombong*) yang dibawanya terlalu besar untuk ukuran pedagang sate keliling. Ia mengatakan, sebenarnya sudah diajak oleh pedagang mie Jawa untuk membuka warung disebelahnya. Pedagang Jawa tersebut juga menyediakan minuman yang dapat dibeli oleh pembeli sate. Menurut H Syaiful, ...

“Saya merasa kurang enak bersebelahan dengan pedagang yang orang Jawa itu, coba kalau suatu saat dagangan dia tidak laku, pasti perasaan jadi tidak enak. Tapi kalau pedagang disebelah kita sama-sama orang orang Madura, apalagi sekampung, maka enak-enak saja perasaan ini !”

Bagi saya kemunculan pedagang makanan, entah itu soto ataupun sate dengan mengusung kata Madura merupakan fenomena yang cukup menarik. Mereka muncul pada tahun 2009, sekitar 8 tahun setelah kerusuhan terjadi. Suatu waktu dimana mereka menganggap perasaan terhadap orang Madura sudah berbeda dan mungkin orang-orang sudah melupakan peristiwa kerusuhan tersebut.

Munculnya kata Madura dalam ruang publik kota Sampit, merupakan kemunculan kembali dari sub-kultur Madura yang sempat tenggelam pasca kekerasan antar etnis 2001. Kata Madura seolah hilang dari ruang publik, termasuk soto, sate, jamu dan nama jalan. Walaupun orang-orang Madura sebagai pendukung kebudayaan tersebut

telah kembali ke sampit, tetapi ekspresi-ekspresi dalam ruang publik masih sangat terbatas. Seni seperti *ronggeng* masih belum berani ditampilkan, selain para pemain dari group tersebut mungkin sudah menyimpan segala peralatannya dalam kotak. Saya sempat hadir dalam suatu perkawinan pasangan Madura, tidak ada suatu ekspresi yang khas Madura dalam perkawinan tersebut, selain logat-logat pengundang dan tamu yang diundang. Hiburannyapun cukup dari DVD yang menampilkan dangdut.

Kehadiran Soto dan sate Madura merupakan suatu *test case* tentang persespi publik Sampit terhadap munculnya kembali identitas Madura kedalam ruang publik kota Sampit. Melalui kuliner, publik Sampit sedang diuji kebesaran hatinya untuk menerima kembali identitas yang sewindu ini hilang.

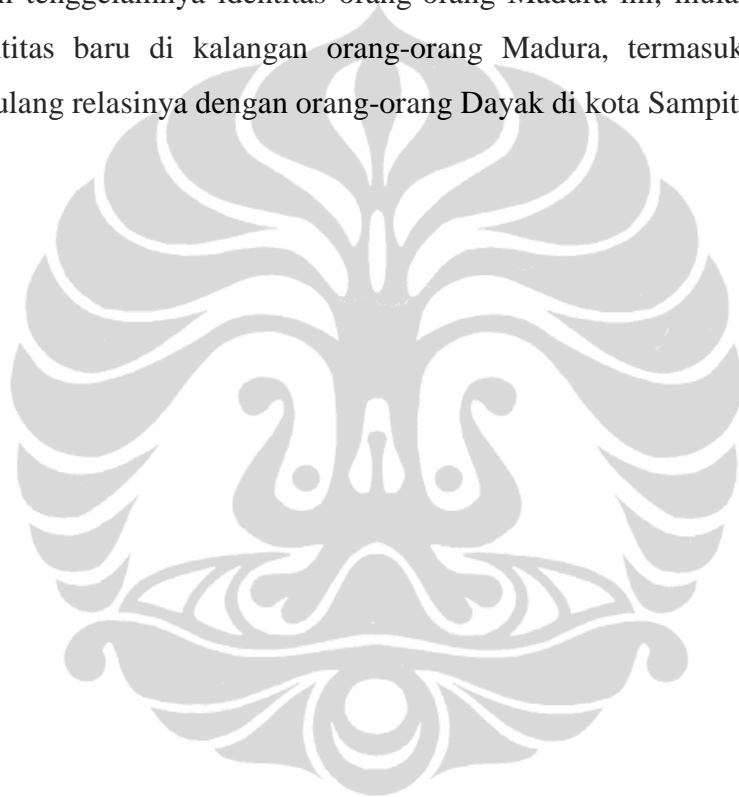
4.5.Kesimpulan Bab 4

Bab ini mendiskusikan tentang peristiwa kekerasan antar etnis dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Narasi tentang peristiwa kekerasan antar etnis itu sendiri diceritakan dengan berbagai versi dan disuarakan menurut kepentingan dari pembuat cerita itu sendiri.

Peristiwa kekerasan antar etnis ini kemudian memasuki wilayah identitas dengan pendirian berbagai “monumen” yang meneguhkan tentang siapa yang menjadi “pemenang” dan siapa yang “kalah” dalam konflik tersebut. Kelompok yang “menang” mempunyai klaim untuk membuat “monument peringatan” yang dianggap dapat mengisahkan tentang apa yang menjadi penyebab dari sebuah kerusuhan dan bagaimana akibat dari sebuah kekerasan antar etnis. Selain itu, kelompok “pemenang” mempunyai klaim untuk mengatur kehidupan yang “kalah”, melalui instrument hukum (seperti Peraturan Daerah), penelusuran rekam jejak dan bahkan penghilangan identitas.

Identitas orang-orang Madura, termasuk hak-hak politik, ekspresi budaya, dan memori kolektif dihilangkan di ruang publik kota Sampit. Berlakunya Perda tentang Penanggulangan Dampak Kerusuhan Etnis, ditambah dengan kesepakatan-kesepakatan dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) semakin mempersempit ruang ekspresi orang-orang Madura di Sampit.

Ditengah-tengah tenggelamnya identitas orang-orang Madura ini, mulai munculnya kesadaran identitas baru di kalangan orang-orang Madura, termasuk bagaimana proses menata-ulang relasinya dengan orang-orang Dayak di kota Sampit.



BAB 5

ORANG-ORANG MADURA PASCA KERUSUHAN DI KOTA SAMPIT

5.1. Pengantar

Bab ini akan berisi narasi-narasi pasca kerusuhan Februari 2001, yaitu saat orang-orang Madura kembali ke kota Sampit dan beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Kembalinya orang-orang Madura ke Kalimantan Tengah disebut dengan “pengembalian alamiah”, maksudnya kembalinya orang-orang Madura tanpa suatu program dari pemerintah, melainkan melalui jalur-jalur kekerabatan dan rekan satu daerah. Pengembalian secara alamiah sebetulnya suatu konsep yang dibuat oleh kalangan elite Dayak yang digemakan dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2001. KRKT ini sendiri bersifat sangat strategis karena rekomendasi dari hasil kongres tersebut menegaskan posisi yang diambil oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, walaupun nama yang diambilnya adalah “Rakyat Kalimantan Tengah”, namun pada kenyataannya menegaskan *positioning* masyarakat Dayak terhadap aspek ekonomi, politik, posisi budaya dan yang terpenting adalah sikap terhadap pengembalian orang-orang Madura ke wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam bab ini akan lebih banyak mendeskripsikan pandangan-pandangan dari masyarakat Madura yang telah kembali dari Madura, atau daerah lainnya di luar Kalimantan Tengah. Selain pandangan-pandangannya, akan diperlihatkan pula cara-cara mereka untuk masuk kembali kedalam ruang publik kota Sampit dengan berbagai cara. Dari narasi-narasi mereka, akan diperlihatkan bagaimana mereka masuk kedalam ruang publik kota Sampit, situasi-situasi awal merintis kehidupan di kota Sampit, meraih sukses, jatuh miskin karena kerusuhan dan upaya-upayanya untuk bangkit dari keterpurukan

5.2. Masalah : Merintis jalan baru

Masarah adalah seorang laki-laki, ayah dari 18 anak, ia kini tengah membangun kembali rumahnya, setelah hancur dan dibakar pada saat kerusuhan. Perkenalan saya dengan Masarah melalui isterinya. Pada saat itu saya berkunjung ke kecamatan Ketapang, di Kabupaten Sampang, Madura. Pertemuan dengan isteri Masarahpun tidak sengaja, karena pada saat itu saya sedang mencari seorang tokoh Madura Sampit yang dikabarkan tinggal di Ketapang

Ketika menanyakan tentang dimana rumah tokoh tersebut kepada seorang ibu, ternyata ibu tersebut berasal dari Sampit. Beruntung ibu tersebut masih mempunyai kerabat, tanah dan rumah di kecamatan Ketapang, Kabupateh Sampang, Madura, sehingga ketika terjadi kerusuhan ia kembali ke kampungnya. Dari penampilan fisiknya, ibu dan keluarga ini relatif mampu. Mereka tinggal di rumah permanen yang mempunyai halaman yang luas. Hal ini dimungkinkan, karena menantu dari si ibu ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sampang.

Dalam perbincangan dengan ibu tersebut, ia menceritakan secara singkat bagaimana posisi sosial dan ekonomi keluarga mereka sebelum kerusuhan. Suaminya adalah pegawai karir di Depot Logistik (Dolog) di Sampit. Sedangkan si ibu mengurus toko yang menjual kebutuhan sembako. Dari cerita yang diungkapkan oleh ibu tersebut tampaknya ukuran tokonya cukup besar dan sangat dikenal di wilayah jalan Kamar Dua Puluh¹. Beberapa waktu setelah pembicaraan dengan ibu tersebut, saya bertemu dengan suaminya, yaitu Pak Masarah di kota Sampit. Kemudian pak Masarah menuturkan pengalaman hidupnya, mulai saat pertama ke Kalimantan, mempunyai usaha yang mapan, hingga hancur pada saat kerusuhan.

¹ Jalan Kamar Dua Puluh dikenal sebagai daerah permukiman orang-orang Madura dan juga dikenal mempunyai tempat prostitusi. Kamar Dua Puluh itu sendiri menggambarkan barak-barak yang terdiri dari banyak pintu. Lokasinya berdekatan dengan pabrik PT Bruenzyl pada masa lalu. Wilayah Jalan Kamar Dua Puluh ini merupakan tempat para pekerja kasar. Lokasi jalan Kamar Dua Puluh ini tidak jauh dengan wilayah jalan S Parman yang merupakan tempat kalangan petinggi PT Bruenzyl

Berbeda dengan kebanyakan migran Madura lainnya di Sampit yang mendarat langsung di Sampit atau di Samuda, Pak Masarah masuk ke Kalimantan Tengah melalui pelabuhan Kumai di Kotawaringin Barat sekitar tahun 1955. Pada saat itu ia masih anak-anak. Ia mendeskripsikan dirinya sebagai “anak bodoh” yang tidak tahu harus melakukan apa. Ia bahkan sudah dianggap sebagai anak hilang oleh ibunya. Ia diajak oleh tetangganya yang bernama Toyon. Pada saat itu ia masih bersekolah di Sekolah Rakyat. Ketika ada yang mengajaknya ke *cebe deje* atau wilayah Kalimantan, ia ikut saja. Pada saat itu ia bertanya, kapan berangkat ke *cebe deje*. Kemudian dijawab dua hari lagi. Tanpa pikir panjang ia ikut ke pelabuhan Bring Koneng di Ketapang. Kemudian ibunya mencari dirinya, ketika ia sudah ada di perahu.

Tahun 1955 Masarah tiba di pelabuhan Kumai, selanjutnya tinggal di Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat sekarang). Lamanya perjalanan perahu layar dari Bring Koneng Ketapang Madura ke Kumai sekitar tiga hari tiga malam. Setelah tiba di Pangkalan Bun ia tidak bekerja selama sebulan, kerjanya hanya mengaji di langgar. Kemudian paman Masarah mempunyai kedudukan sebagai *pembekal*² di daerah Madurejo, suatu kawasan yang memang dikhususkan bagi orang-orang Madura. Dalam kedudukannya sebagai *pembekal*, pamannya ini mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan dari instansi pemerintah. Pekerjaan pamannya pada waktu itu adalah mandor pembangunan jalan untuk proyek Pekerjaan Umum.

Ketika Masarah berangkat, tiba dan kemudian menetap di Pangkalan Bun merupakan ciri umum migrasi berantai (*chain migration*) dari orang-orang Madura untuk bisa *survive* di wilayah barunya. Migrasi berantai merupakan pola umum migrasi yang ada dipelbagai daerah di Indonesia.

² *Pembekal* adalah kepala wilayah dari suatu kesatuan komunitas. Kedudukan pembekal didapatkan karena posisinya sebagai perintis yang masuk kedalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat yang ingin membuka suatu kawasan hutan atau mendiami suatu tempat harus minta ijin pembekal.

Suatu hari pamannya menanyakan kepada para pekerja jalan tersebut, apakah ada yang bisa membaca dan menulis. Kemudian Masarah mengangkat tangannya dan menyatakan mampu untuk membaca dan menulis. Setelah itu ia harus pergi ke kantor Pekerjaan Umum (PU). Instruksi untuk datang ke kantor PU membuat Masarah gelisah, ia khawatir membuat suatu kesalahan yang membuatnya harus menghadap seseorang di kantor. Semalaman Masarah sulit tidur dan membayangkan hal-hal buruk karena harus datang ke kantor PU. Kira-kira pukul setengah tujuh pagi ia sudah ada di kantor PU dan menunggu mandor Karino yang menyuruhnya datang ke kantor. Kemudian mandor Karino datang dan menanyakan nama dan menanyakan kebenaran kemampuan baca-tulisnya, sambil melakukan test membaca. Akhirnya Masarah diterima di kantor tersebut dengan tugas mengantar surat-surat ke kantor-kantor instansi pemerintah lainnya dan melakukan pekerjaan membersihkan kantor. Masarah sangat bahagia dengan posisinya sebagai pekerja kantor, dibandingkan pekerja kasar sebagai kuli pembangunan jalan. Ia mengungkapkan seperti ini,.... “Besarnya telinga saya mendengarnya, karena tadinya saya ketakutan disuruh kerja apa di kantor ini !”.

Mulailah pekerjaan baru Masarah, yaitu memasak air panas dan menyediakan minum bagi para pegawai kantor, mengantar surat-surat termasuk ke pengadilan. Setelah bekerja beberapa lama disitu, seorang mandor lain bernama Pak Ibrohim yang asli orang Pangkalan Bun menanyakan tempat tinggalnya. Kemudian Masarah memberitahukan ia tinggal bersama pamannya di Pal (kilometer) 2. Mendengar hal tersebut, Ibrohim menawarkan kepada Masarah untuk tinggal di rumah jabatan bupati yang kebetulan hanya ditinggali sendiri. Bupati pada saat itu adalah Christopher Mihing (C Mihing) asal Sampit.

C Mihing dikenal pula sebagai salah seorang tokoh Dayak yang terlibat dalam upaya untuk mendirikan propinsi Kalimantan Tengah terlepas dari Kalimantan Selatan pada tahun 1957. Perjumpaan diantara Masarah yang orang Madura dan C Mihing yang orang Dayak Sampit, merupakan perjumpaan biasa antara dua orang yang saling

membutuhkan, dan keduanya tidak diikat oleh sentimen etnisitas, hanya perjumpaan dua manusia biasa.

Kemudian Masarah tinggal di rumah bupati C Mihing, sekaligus melayani kebutuhan bupati apabila diperlukan. Masarah sangat menikmati kehidupan di rumah bupati. Karena rumahnya sangat dekat dengan kantor tempatnya bekerja. Pendapatan Masarahpun bertambah, karena gajinya sama sekali tidak digunakan untuk berbelanja, karena seringkali ia disuruh membelikan sesuatu oleh orang-orang kantoran dan uang kembaliannya sering diberikan kepada Masarah. Hubungan dengan bupatipun cukup baik, dan Masarah sempat satu setengah tahun tinggal di tempat tersebut. Pada suatu hari Bupati mengeluh kalau ia tidak betah untuk tinggal di Pangkalan Bun. Masarah menggambarkan keluhan bupati saat itu, “Saya mau pulang ke Sampit, disini tidak ada apa-apanya, tidak begitu enak!”. Menurut Masarah, memang kehidupan di Pangkalan Bun sekitar tahun 1955-1956 itu tidak ada apa-apanya. Setelah C Mihing pergi, rumah itu benar-benar kosong yang menyebabkan orang-orang seenaknya keluar masuk ke rumah tersebut. Masarah sendiri diberi barang-barang yang tidak digunakan lagi.

Masarah merasa bahwa uangnya sudah cukup banyak dan ia berniat untuk pulang ke Madura. Ia minta cuti ke kantor PU untuk pulang ke Madura dan diberi ijin cuti yang tidak lebih dari sebulan. Ia diberi surat pengantar untuk pulang. Kemudian setelah mendapatkan informasi ada “perahu bugis” yang akan ke pulau Madura iapun ikut perahu itu. Namun perjalanan perahu tersebut sangat lambat. Ia mengaku terkatungkatung selama selama satu bulan. Ia merasa mau mati dengan kondisi tersebut. Ia juga mengagumi para pelaut Bugis yang dikatakannya sangat ulung mengarungi lautan selama itu. Hingga akhirnya bahan makanan habis dan perahu yang ditumpanginya mendarat di Semarang dan bukan di Madura. Kemudian dari Semarang ia menaiki bus ke Surabaya bersama temannya, kemudian menyeberang ke Madura.

Ketika tiba di rumahnya ia bertemu dengan ibunya dan juga Kyai yang pernah mengajarnya mengaji. Kedua orang tersebut sangat senang bertemu dengan Masarah, apalagi Masarah kini jadi anak tunggal ibunya setelah kakak satu satunya meninggal. Selain itu, di rumah ibunya itu ia bertemu dengan salahsatu kerabatnya yang baru pulang dari Sampit dan mengajak untuk pergi ke Sampit yang disanggupi oleh Masarah. Walaupun ia baru tinggal selama 3 hari di rumah ibunya, kemudian pada hari kelima ia telah siap-siap berangkat ke Sampit. Ia tidak ingat pasti waktunya kapan, tetapi kira-kira bulan Februari tahun 1956. Ia pikir dari Sampit bisa menumpang kapal untuk berangkat kembali ke Pangkana Bun.

Perjalanan laut ke Sampit ditempuhnya selama seminggu. Kemudian ketika tinggal di Sampit ia mulai mencari kemungkinan untuk bisa kembali ke Pangkalan Bun dengan menggunakan jalan laut, karena memang pada saat itu jalan darat ke Pangkalan Bun belum ada. Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Pangkalan Bun baru dibangun pada dekade 1980-an. Pada saat itu tidak ada jalan sungai yang menghubungkan Sampit dan Pangkalan Bun, satu satunya jalan adalah menggunakan perahu menyusuri sungai Mentaya kearah laut Jawa, kemudian mengarungi laut Jawa untuk tiba di pelabuhan Kumai. Kemudian dari Kumai menggunakan jalan sungai menuju Pangkalan Bun.

Namun perahu yang berangkat ke pelabuhan Kumai tidak ada untuk waktu yang lama. Pada saat itu ia jalan-jalan kearah “Bioskop Sentosa” di kota Sampit. Bioskop itu sendiri dekat dengan perusahaan kayu PT Dayak Sampit. Pada saat jalan ke bioskop itulah ia bertemu dengan kepala kantor Pekerjaan Umum yang dulunya melakukan pemeriksaan di Pangkalan Bun. Rupanya kepala PU ini masih ingat dengan wajah Masarah dan menanyakan mengapa Masarah ada di Sampit. Kemudian Masarah mengatakan bahwa ia akan kembali ke Pangkalan Bun. Namun bapak kepala PU itu mengatakan tidak perlu ke Pangkalan Bun, tetapi menyuruh Masarah bekerja saja di Sampit. Kemudian Masarah menyanggupi kerja di Sampit, tetapi ia tidak mau

kerja di kantor sebagai pesuruh atau pengantar surat. Kemudian Masarah diberi pekerjaan bangunan sebagai pemotong atap sirap.

Pekerjaan sebagai pemotong kayu sirap memberinya upah sekitar Rp 10 saja. Sehingga Masarah berfikir untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Pada tahun 1956 itu, pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak adalah bekerja memotong kayu untuk diolah di PT Bruenzyl yang pada saat itu telah berubah menjadi PT Sampit Dayak. Tetapi Masarah mengatakan bahwa perusahaan kayu itu adalah “perusahaan Belanda”, karena ia mendengar bahwa perusahaan kayu tersebut didirikan oleh orang-orang Belanda dan masih ada orang Belanda yang bekerja di perusahaan tersebut. Memang PT Bruenzyl didirikan oleh pengusaha swasta Belanda, namun dengan adanya pergolakan politik pasca penentuan pendapat rakyat (PEPERA) di Papua tahun 1963 maka orang-orang Belanda di Bruenzyl pun meninggalkan Sampit.

Masarah bekerja untuk seorang Jawa yang menjadi pemasok kayu ke perusahaan PT Sampit Dayak tersebut selama dua tahun antara tahun 1956-1958. Lokasi kerjanya ada di wilayah hulu Samuda, sekitar 45 kilometer dari Sampit. Namun dapat dicapai dengan menggunakan perahu dengan menyusuri Sungai Mentaya. Pekerjaan tersebut memberinya uang sangat banyak, apalagi ia bekerja sangat keras.

Masarah belum puas dengan pekerjaannya sebagai pemotong kayu di hutan, kemudian ia mencari pekerjaan baru yang memberinya uang lebih banyak lagi, tetapi ia dapat mengatur jadwal kerjanya dengan lebih mudah. Kemudian ia membeli becak. Becak mulai masuk di kota Sampit pada tahun 1957 dan yang memperkenalkannya adalah orang-orang Cina. Kemudian Masarah membeli becak seharga Rp 75,000. Menurutnya harga itu masih murah. Minat orang untuk naik becak pada masa itu sangat tinggi. Masarah menguraikan bagaimana antusiasnya orang-orang naik becak, Katanya, “Orang disini masih kuno, orang-orang dari pelosok, orang-orang ingin sekali naik becak, siang malam orang mengantri ingin naik becak. Waktu itu hanya

ada 7 buah becak dan semua pengemudinya orang Madura. Ongkos sekali naik Rp 1,000. Masarah menggambarkan situasi dirinya yang mempunyai banyak uang dari hasil mengemudikan becak. “Saya banyak duit, hingga bergempol duit saya”. Selain itu, dari cerita ini dapat diketahui bahwa Masarah termasuk salah seorang perintis dari adanya transportasi becak di kota Sampit. Becak identik dengan orang-orang Madura di kota Sampit, karena hampir semua pengemudi becak adalah orang-orang Madura.

Pada suatu hari di tahun 1958, ketika Masarah memarkir becaknya di pelabuhan ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan. Namun Masarah harus mempunyai teman-teman lainnya untuk melakukan pekerjaan itu. Orang itu memintanya untuk datang ke kantor NV Dayak. Hingga kini perusahaan NV Dayak masih eksis dan bernama PT Dayak Sampit yang menjadi perusahaan pengumpul karet dan rotan. Ketika keesokan harinya dia datang ke kantor NV Dayak itu ia sempat bingung tentang apa yang harus dikerjakannya. Kemudian Masarah bertemu dengan orang dari NV Dayak itu. Orang itu mengatakan bahwa ia mempunyai barang seberat 50 ton yang berasal dari Banjarmasin. Barang-barang tersebut harus dikeluarkan dari kapal dan dikirimkan ke gudang di dekat pelabuhan. Oleh sebab itu, orang itu meminta Masarah untuk mencari teman-temannya. Kata orang itu dengan logat Banjar, “Kamu bisa *nyari kawanlah cong*, aku punya barang barang satu kapal beratnya 50 ton *kada ada yang ngangkut*. Aku perlu orang-orang untuk mengangkut barang-barang itu, *ikam* (kamu) cari orang, aku serahkan kerjaan ke *ikam*, aku taunya *ikam* aja, *ikam* yang mengaturnya. Kalo sanggup cari orang ini bawa 10 kartu dan bagikan ke teman-teman. Siapa yang mau kerja kukasih 1 kartu, kemudian angkut pakai gerobak”. Ada teman-teman yang percaya dengan tawaran pekerjaan tersebut, tetapi banyak pula yang tidak percaya.

Rupanya perusahaan tersebut merupakan pemasok untuk kebutuhan Depot Logistik (Dolog). Karena dipercayai untuk mengkoordinasi para pengangkut barang-barang tersebut, pada akhirnya Masarah menjadi pekerja di Dolog selama 33 tahun, sampai

akhirnya ia pensiun tahun 1996. Ia mengatakan hanya sebagai *kerani* saja, karena tidak mempunyai satupun ijazah yang menguatkan dirinya pernah bersekolah.

Pak Masarah bekerja di Dolog lebih dari 33 tahun. Dolog adalah sebuah lembaga pemerintah yang sangat strategis dalam hal distribusi berbagai kebutuhan pokoknya, khususnya beras, garam, gula dan minyak goreng. Selain bekerja di Dolog, hubungan baiknya dengan distributor dan pemasok bahan-bahan pokok di pulau Jawa dimanaftkannya untuk membuka toko yang berjualan bahan-bahan pokok tersebut. Toko yang dijalankan lebih dari 30 tahun tersebut mempunyai langganan pembeli yang sangat banyak, dari berbagai etnis dan latar-belakang ekonomi. Apalagi toko yang merangkap rumahnya tersebut berlokasi di Jalan Kamar Dua Puluh. Jalan tersebut tersebut sangat strategis dan bersejarah di kota Sampit sejak terbentuknya industri perkayuan milik swasta Belanda tahun 1947-an. Kemudian dilanjutkan dengan “banjir kayu” mulai tahun 1970-1990, yang menjadikan pelabuhan Sampit menjadi sangat sibuk oleh arus lalu-lintas barang dan manusia. Sedangkan kota Sampit menjadi kota multi-etnis yang padat. Kemudian, krisis ekonomi pada akhir dasawarsa 1990-an, menjadikan perekonomian Sampit lesu, yang ditandai dengan penutupan berbagai perusahaan dan PHK buruh. Akhirnya, ditutup dengan kerusuhan bulan Februari 2001 yang ditandai dengan eksodus hampir seluruh orang-orang Madura dari kota Sampit ke Pulau Jawa dan daerah lainnya di di Pulau Kalimantan.

Toko Pak Masarah termasuk korban kerusuhan. Barang-barang yang ada didalam tokonya telah dijajah, entah oleh siapa. Kemudian toko dan rumahnya dibakar. Pak Masarah tidak tahu siapa atau kelompok mana yang membakar rumah dan tokonya. Tetapi ia tidak percaya kalau para tetangganya, yang merupakan konsumen dari tokonya menjadi pelaku pembakaran. Pak Masarah sulit membayangkan kalau orang-orang yang terbiasa membeli barang-barang kebutuhan pokoknya menjadi pelaku. Ia percaya kalau yang melakukan pembakaran adalah orang-orang dari tempat jauh yang tidak mengenal pak Masarah secara pribadi. Ia tidak percaya apabila pembakar

rumahnya adalah orang-orang Dayak yang menjadi konsumen tokonya. Ia tidak pernah merasa mempunyai musuh dengan salah seorang dari ribuan orang yang pernah menjadi pembeli di tokonya.

Hal yang menyakitkan bagi Pak Masarah adalah berbagai usaha yang pernah dirintisnya sejak tiga puluh tahun lalu; ditambah dengan berbagai upaya bertahan hidup sejak akhir tahun 1950-an di kota Sampit ternyata hancur hanya dalam hitungan hari. Kemudian ia harus kembali ke kecamatan Ketapang, kabupaten Sampang untuk menjadi “pengungsi” pada bulan Februari 2001. Namun, posisi ekonomi serta hubungan keluarganya di Sampang Madura relatif baik dibandingkan kebanyakan orang Madura lainnya. Ia menempati rumah yang layak bagi orang-orang Madura di Sampang. Anak-anak dan menantunya mempunyai posisi politik lokal dan pekerjaan yang baik.

Ketika tinggal sementara di Ketapang, Sampang Madura, Pak Masarah terus-menerus mengikuti perkembangan tentang Sampit, khususnya tentang situasi keamanan di kota tersebut. Informasi tentang situasi di Sampit ia dapatkan dari teman dan tetangganya, orang-orang Dayak, orang-orang Madura yang telah kembali dan tetangga lainnya. Kemudian ia kembali ke Sampit dan tinggal di rumah seorang anaknya di kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Suatu daerah yang relatif lebih aman dibandingkan dengan kecamatan Baamang tempat tinggalnya dulu. Pak Masarah membuka sebuah bengkel kecil untuk memperbaiki sepeda. Usaha yang dijalankannya sekarang ini tidak akan memenuhi kebutuhan hidupnya, namun untuk sekedar pengisi waktu.

Pak Masarah mengatakan tidak pernah mendendam terhadap orang-orang Dayak, karena ia sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada bulan Februari 2001. Pada saat itu semuanya berjalan begitu cepat, ia hanya diperintahkan oleh polisi untuk bersiap-siap pergi ke pengungsian. Tinggal beberapa hari di pengungsian, kemudian dibawa ke Surabaya, seterusnya diangkut ke Madura.

5.3. Pak Tosan : Lurah yang Kehilangan Jabatannya

Bapak Tosan adalah orang Madura yang relatif agak berbeda dengan profil-profil orang Madura lainnya yang pernah saya temui di Sampit. Ia adalah mantan Lurah di sebuah kelurahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Karena kerusuhan itu ia kehilangan jabatannya sebagai Lurah. Mengingat jabatan lurah di perkotaan adalah jabatan yang ditunjuk dan bukan dipilih serta berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pembicaraan dengan pak Tosan, terdengar logat Maduranya tidak terlampau kental, ia lebih menggunakan logat-logat Banjar dibandingkan Madura. Kentalnya logat Banjar yang digunakan dalam berbahasa, dikarenakan Pak Tosan lahir di kota Sampit, walaupun ayah dan ibunya adalah orang Madura yang berasal dari pulau Madura. Ibunda pak Tosan berasal dari Kabupaten Sampang sedangkan ayahandanya berasal dari kabupaten Bangkalan. Menurut pak Tosan kedua orangtuanya merupakan migran yang dibawa oleh orangtuanya masing-masing pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Pak Tosan tidak ingat pada usia berapa kedua orangtuanya tiba di kota Sampit. Namun ketika kami berbicara ada seorang anak kelas 2 SD melintas kami dan ia mengatakan mungkin seumuran anak itu.

Keluarga besar Pak Tosan dari garis ayah adalah adalah pekerja kasar di perusahaan Bruenzyl hingga berubah nama menjadi PT Inhutani III (sekitar tahun 1975). Pak Tosan memberikan deksripsi tentang perusahaan kayu tersebut sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara pada waku itu. Kebesaran dan kejayaan Brensel tersebut tampaknya didengar oleh Pak Tosan dari kedua orangtuanya. Karena kakek yang bekerja di Brensel itu telah meninggal sewaktu Pak Tosan belum lahir.

Berbeda dengan ayah pak Tosan yang datang pada jaman Jepang, ibundanya berasal dari Sampang dan dibawa ke Sampit pada jaman Belanda, ketika kira-kira berusia 5 tahun. Kakeknya yang berasal dari garis ibu ini merupakan suatu contoh masuknya migran Madura ke kota Sampit dengan cara “pembelian anak buah perahu”. Pada

masa itu (jaman Belanda) sangat lazim perahu-perahu Madura yang merapat di kota Sampit membawa sapi-sapi, juga orang-orang yang menumpang dan berfungsi sebagai anak buah kapal, kemudian “ditebus” untuk diperkerjakan di Sampit, utamanya sebagai buruh di kebun karet. Pada saat itu, kakek Pak Tosan adalah Anak Buah Kapal yang kemudian ditebus oleh seorang kepala desa di daerah Plangsian. Daerah Plangsian memang dikenal sebagai salahsatu daerah dimana orang-orang Madura awal tinggal. Lokasi Plangsian yang ada dipinggir sungai Mentaya dan ada diantara wilayah Samuda dan Sampit membuat daerah tersebut menjadi wilayah penting persinggahan orang-orang Madura. Hingga kini daerah Plangsian menjadi tempat tinggal orang-orang Madura, walaupun wilayahnya sempat kosong karena ditinggalkan penghuninya pasca kerusuhan. Kakek dari pak Tosan sendiri ditebus untuk dijadikan pekerja di kebun karet milik kepala desa di tempat tersebut.

Pak Tosan tidak tahu apa nama desa itu pada masa lalunya, tetapi kini daerah itu dikenal sebagai daerah Plangsian. Kini daerah Plangsian menjadi daerah yang mempunyai luasan kebun karet dan kebun rotan dan tanah-tanah luas yang dikuasai oleh orang-orang Madura. Setelah menjadi “budak” dari kepala desa di wilayah tersebut, kemudian kakeknya berhasil menguasai tanah-tanah di daerah Plangsian.

Menurut Pak Tosan, tanah pada saat itu demikian luas dan tinggal mengambil saja secara bebas asal mau mengerjakannya. Daerah tersebut dianggap belum bertuan. Sedangkan orang-orang Madura yang pada saat itu datang ke daerah Plangsian adalah orang-orang Madura yang tidak mempunyai keahlian, tidak mempunyai modal , nekad dan hanya dengan pakaian seadanya. Mereka datang ke daerah tersebut kemudian membuka hutan. Penuturan dari Pak Tosan memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang Madura, termasuk kakeknya menetap disitu

“...disitu banyak orang Madura termasuk kakek saya dulu tinggal disana, *sampe* saat ini masih banyak diantara mereka yang mempunyai kebun karet dan kebun rotan. Karena pada waktu dulu tanah disini tinggal mengambil saja, masih bebas belum bertuan. Kakek saya sudah generasi

ke berapanya begitu, yang tinggal disana. Tapi umumnya orang Madura yang datang kesini tidak memiliki keahlian, hanya modal nekad dengan pakaian seadanya. Sampai disini umumnya bekerja di kebun karet dan rotan. Orang disini menyebutnya *berhuma*, sedangkan orang Jawa menyebutnya tanaman padi lahan kering. Orang Madura ini kalau menebas di udara panas tahan, makanya banyak yang mempunyai lahan luas, termasuk milik kakek saya. Umumnya orang disini tanahnya banyak, semau-maunya mengambil sesuai kemampuan. Orang-orang pendatang dulu tanahnya tidak membeli, bekerja dikebun-kebun dan di tanah-tanah orang-orang ini. Misalnya mengerjakan 5 hektar dapat upah 2 hektar. Mendengar dapat upah tanah, orang-orang di pulau Madura mendengar kehidupan disini enak/bagus. Lalu di kampung disana mendengar disini bagus banyak yg ikut datang kesini sampai kerusuhan”.

Pak Tosan adalah salah seorang Madura yang kehilangan jabatan yang cukup prestisius untuk tingkat kelurahan, yaitu sebagai lurah. Jabatan sebagai Lurahpun ditempuh melalui pencapaian karir yang wajar di kelurahannya, walaupun ada lompatan karir, karena lurah sebelumnya meninggal dunia. Pak Tosan mengaku tamat SMEA tahun 1990, seharusnya tahun 1989, tetapi karena ada penyesuaian tahun ajaran pada waktu itu, ia harus menunda selama setengah tahun.

Pertama kali Pak Tosan bekerja di kelurahan menangani urusan Iuran Pendapatan Daerah (Ipeda) yang sekarang ini berubah menjadi urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Posisi itu dirasakan cocok oleh Pak Tosan karena latar belakang keilmuannya yang berasal dari SMEA tadi. Setelah bekerja sebagai Kepala Urusan di kelurahan. Kemudian pada tahun 1986 terjadi penggantian lurah yang menempatkan Pak Tosan sebagai Sekertaris Kelurahan. Kemudian tahun 1989, lurah pada saat itu sakit cukup parah dan meninggal di Banjarmasin pada tanggal 5 Oktober 1989. Sehubungan dengan meninggalnya lurah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjuk Pak Tosan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) kelurahan hingga bulan Februari 1991. Sejak bulan Februari 1991 itulah ia menjadi Lurah hingga terjadinya kerusuhan Februari 2001. Ia kehilangan jabatannya.

Pak Tosan tidak tahu pasti apakah hilangnya jabatan itu karena ia orang Madura atau ada sebab lainnya. Sebetulnya ia juga merasa sudah terlalu lama menjadi lurah. Terhitung sebagai pelaksana tugas ia sudah 12 tahun menjadi lurah. Tadinya ia ingin mengabdikan di kecamatan saja, tetapi tokoh-tokoh Madura ingin Pak Tosan tetap menjadi lurah, kebetulan Pak Tosan adalah satu-satunya lurah yang berasal dari etnis Madura yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur.

Pak Tosan mengakui kalau posisi-posisi PNS semakin sulit dimasuki kembali oleh orang-orang Madura. Banyak orang-orang Madura yang mengenyam pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana dan mempunyai pekerjaan di dinas-dinas di Kotawaringin Timur. Tetapi setelah kerusuhan Februari 2001 hanya sebagian kecil saja yang kembali ke Sampit. Sebagian diantara mereka meniti karir di tempat lain, seperti seorang PNS yang pasca kerusuhan menjadi kepala PU di Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.

Menurut Pak Tosan, kehidupan orang Madura sebelum kerusuhan dapat dianggap baik. Ia memberikan ilustrasi kalau sebelum kerusuhan itu orang-orang Madura termasuk “kelas 2 atau kelas 3”. Karena mereka yang termasuk kedalam “kelas 1” adalah orang-orang Cina. Namun untuk pekerjaan pemborong diakuinya penguasaan dilakukan oleh orang-orang Madura. Mengapa orang Madura seringkali menang tender untuk pekerjaan borongan, karena kontraktor Madura itu rata-rata berani mengambil resiko melakukan pekerjaan terlebih dahulu, baru dibayar untuk tahun anggaran berikutnya. Misalnya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tahun 2011, akan dikerjakan tahun sebelumnya tanpa dibayar terlebih dahulu. Dalam pandangan Pak Tosan, melakukan pekerjaan seperti ini mengandung resiko yang besar apabila ternyata proyek tidak jadi dibiayai oleh pemerintah.

Pak Tosan masih merasakan adanya semacam diskriminasi bagi orang-orang Madura untuk dapat hidup setara dengan etnis lainnya di kota Sampit. Ia memberikan contoh

kalau anak dari Bapak Wakir³ (Guru agama yang disangka sebagai sekretaris IKAMA) belum dapat bekerja sebagai kontraktor sepenuhnya, karena masih dibatasi. Walaupun ketika penulis bertemu dengan salah seorang anak Pak Wakir, sebetulnya ia sendiri sudah mempunyai usaha pembangunan perumahan di kota Sampit. Namun Pak Tosan masih mempunyai perasaan bahwa hak-hak orang Madura dibatasi di kota Sampit. Pak Tosan mengakui, tidak ada suatu peraturan tertulis yang membatasi hak-hak orang Madura untuk menjadi PNS di kota Sampit. Namun orang-orang yang mengambil keputusan “diatas” mungkin melakukan penyeleksian yang menyulitkan bagi orang-orang Madura. Terutama penetapan kriteria bagi orang-orang yang mempunyai kaitan dengan kerusuhan tidak boleh kembali ke Sampit. Hal ini telah memakan korban untuk orang-orang Madura yang mempunyai kaitan kekerabatan dengan tokoh-tokoh IKAMA yang terkena getahnya untuk tidak boleh kembali ke Sampit.

Walaupun kesempatan kerja di Sampit terasa sempit, namun bukan berarti orang-orang Madura tidak mencari celah untuk dapat mengambil kesempatan menjadi PNS. Misalnya ikut seleksi CPNS di Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan) dan bisa lulus. Demikian halnya orang-orang yang pada saat kerusuhan tidak ikut mengungsi ke Madura masih sempat menyelamatkan statusnya sebagai PNS. Walaupun untuk beberapa waktu tidak bekerja di Sampit.

Narasi penyebab kerusuhan yang dikembangkan oleh kalangan elite Dayak adalah peranan organisasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) yang ada dibalik peristiwa kerusuhan, mulai dari tahap penyiapan, provokasi hingga penyerbuan kepada orang-orang Dayak. Elite Dayak juga percaya bahwa anggota IKAMA Kotawaringin

³ Pak Wakir adalah orang Madura yang menjadi guru di kecamatan Baamang. Dalam “buku merah” yang dikeluarkan oleh LMMDD KT, khususnya pada bagian yang menerangkan tentang organisasi IKAMA, disebutkan bahwa Wakir Saleh adalah sekretaris IKAMA. Pak Wakir telah meninggal dunia di Surabaya, setelah kerusuhan. Dua orang anak Pak Wakir telah kembali ke Madura. Satu orang mempunyai usaha pembangunan rumah. Satu orang lainnya usaha kuliner Soto dan sate Madura (lihat bagian tentang “Kembalinya Sate dan Soto Madura”). Dalam disertasi Sukandar (2007) dikutip tentang pernyataan Pak Wakir mengenai kejadian kerusuhan tersebut.

Timur, baik sebagai organisasi maupun sebagai perseorangan terlibat provokasi dengan cara pembuatan spanduk tentang “Sampit sebagai Kota Sampang Kedua” dan juga penyiapan bom-bom yang akan diledakkan di rumah-rumah orang Dayak. Bahkan, kaum elite Dayak mengatakan bahwa IKAMA selalu ada dibelakang perlindungan orang-orang Madura yang melakukan tindakan kriminal. Seringkali para kriminal ini dibebaskan dengan jaminan oleh Marlinggi

Pak Tosan mempunyai pandangan yang sama dengan Pak Sadi dalam melihat keberadaan IKAMA. Walaupun organisasi ini mengklaim sebagai sebuah “Ikatan Keluarga” Madura, namun mereka sebagai orang Madura merasa tidak terwakili. Ia tidak ingin mengakui keberadaan IKAMA⁴. Pak Tosan sama sekali tidak tahu sejak kapan organisasi itu berdiri. Ia hanya mengatakan bahwa sejak jaman Soeharto (sebelum tahun 1998) organisasi itu sudah ada.

Pak Tosan mengaku beberapa kali diundang oleh Haji Marlinggi (ketua IKAMA) untuk datang, tetapi Pak Tosan tidak hadir dengan alasan organisasi itu tidak ada kegiatan sosialnya, yang ada hanya para *bajingan-bajingan* itu. IKAMA dianggap sebagai organisasi yang hanya mengurus *ronggeng* dan *sandur* saja. Keduanya adalah bentuk kesenian khas Madura yang mengandung unsur hiburan yang kuat. Bahkan pak Tosan menganggap bahwa *Ronggeng* dan *Sandur* itu biasanya satu paket dengan permainan judi. Menurut pak Tosan, kalau ia hadir dalam pertemuan IKAMA pasti akan didudukan menjadi pengurus IKAMA, sesuatu yang sangat tidak diinginkannya mengingat kegiatannya bertentangan dengan keyakinannya

Berulangkali pak Tosan menyebut kata “*bajingan*”. Perkataan ini sama dengan yang diungkapkan oleh pak Sadi tentang keberadaan “*bajingan*” dan “*orang sugih*” yang

⁴ IKAMA hanyalah salah satu organisasi di kalangan orang-orang Madura perantauan di Indonesia. Organisasi lainnya adalah IKAMRA dan RKM dan masih banyak lagi. Walaupun awalnya organisasi ini merupakan “paguyuban” orang-orang Madura di perantauan, tetapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik lokal seperti IKAMA di Jakarta dan Surabaya.

ada dalam organisasi IKAMA. Kedua kelompok ini saling membutuhkan dan menjadi elemen kuat dari keberadaan IKAMA.

Pak Tosan mengakui kalau konsep keberadaan IKAMA sebagai “organisasi keluarga” itu bagus, apalagi awalnya ia mendengar kegiatan organisasi ini adalah melakukan arisan, pengajian dan mempererat silaturahmi. Kegiatan-kegiatan yang berbau agama itu sendiri pada akhirnya tidak pernah dilaksanakan. Baginya IKAMA menjadi identik dengan organisasi yang mempunyai kegiatan-kegiatan *ronggeng* dan judi, khususnya judi *sabung ayam* dan *permainan kartu*. Seringkali judi dilakukan di wilayah Mentaya Seberang, yang lokasinya diseberang kota Sampit dan harus menggunakan perahu ke tempat tersebut. Memang di wilayah Mentaya Seberang terdapat *enclave* orang-orang Madura yang jauh dari permukiman orang-orang Dayak dan Banjar. Namun, aparat penegak hukum ditengarai terlibat dalam disitu, sehingga ketika ada penangkapan oleh satu kelompok penegak hukum, maka polisi yang bekerjasama dengan IKAMA inipun akan melindunginya. Pak Tosan juga tidak mengetahui apakah IKAMA adalah organisasi berbadan hukum atau tidak, sebab Pak Haji Marlinggi yang menjadi ketuanya pun seringkali hanya “*meneken*” (menandatangani surat) tanpa menanyakan maksud dan tujuan dari surat tersebut.

Konsepsi “kaum sugih” dan “bajingan” yang dilontarkan oleh beberapa orang Madura yang anti-IKAMA seperti Pak Tosan menarik untuk digali lebih jauh lagi. Dalam tingkatan yang berbeda, dalam budaya orang Madura berlaku dualisme kekuatan antara *Kyai* dan *Blater*⁵. Konsepsi yang pertama, *Kyai* merujuk kepada orang-orang yang dihormati dan disegani karena kapasitas keturunan keluarga dan kadar keagamanya. Sedangkan *Blater* merujuk kepada orang-orang yang disegani karena budaya kekerasannya. Dalam konteks IKAMA memang tidak merujuk kepada *Kyai*, melainkan *orang-orang sugih* (kaya) yang menjadi aktivis IKAMA.

⁵ Lihat, Abdul Rozaki : *Kyai dan Balter Dalam Masyarakat Madura*. Yogyakarta, LKIS.2007

Beberapa nama *kaum sugih* yang disebutkan oleh Pak Tosan adalah H Ismail pengusaha pom bensin, Haji Musbin bergerak dalam bidang kontraktor dan berdomisili di Samuda, Haji Nur kontaktor jalan, Haji Satiman yang memiliki Hotel Borneo. *Kaum Sugih* yang menjadi pengurus IKAMA ini sebagian besar menjalani karir dari yang paling bawah, hingga menguasai jaringan usahanya ke berbagai bidang.

H Ismail merupakan teman sekolah Pak Tosan sempat bekerja di *kelotok* (perahu pengangkut penumpang/barang), kemudian menjual minyak tanah dengan menggunakan gerobak keliling. Sempat ikut kerja dengan Haji Marlinggi, namun akhirnya memilih untuk membuka pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di *lanting* (bangunan yang mengapung di sungai). Keberuntungan H Ismail datang ketika salah seorang distributor minyak di Sampit tidak mampu menyetorkan uang kepada Pertamina, sehingga Pertamina mencari distributor baru. Kemudian H Ismail ditunjuk untuk mengelola hingga ia mempunyai beberapa pom bensin di kota Sampit. Tetapi ketika kerusakan terjadi, semua pom bensinnya harus dia tinggalkan dan dijual kepada pihak lain. H Ismail sekarang tinggal di kota Martapura Kalimantan Selatan dan melanjutkan usahanya membuka pom bensin disana.

Kaum Sugih yang bekerja sebagai kontraktor dikenal mempunyai keberanian mengambil resiko usaha yang sangat besar. Para kontraktor ini biasanya cukup diyakinkan akan ada proyek konstruksi dari pemerintah untuk tahun depannya, maka mereka berani untuk melakukan pekerjaan tersebut walaupun lelang yang resmi belum dilakukan. Keberanian para kontraktor dari Madura ini karena dua hal. Pertama mereka mempunyai armada kapal sendiri sehingga dapat mengambil barang-barang dan material bangunan dari pulau Jawa dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan nilai harga di kota Sampit. Selain itu para kontraktor Madura ini mempunyai peralatan pembangunan yang cukup lengkap. Namun, cara kerja seperti ini mengandung resiko yang besar. Misalnya ketika Haji Satiman mendapat proyek

untuk membangun pelabuhan Bagendang⁶, ia sanggup untuk mengerjakan proyek dalam waktu yang singkat. Namun ketika pekerjaannya baru berjalan sebesar 70% terjadi kerusuhan yang menyebabkan pembangunan pelabuhan terhenti dan Haji Satiman harus menyingkir dari Sampit. Haji Satiman meninggal dunia pada tahun 2002 di Surabaya.

Tafsir tentang Kerusuhan

Persepsi Pak Tosan tentang kejadian kerusuhan yang terjadi pada bulan Februari 2001 agak berbeda dengan pandangan-pandangan dari orang-orang Madura lainnya. Pak Tosan mengatakan adanya dua hal yang menjadi penyebab kerusuhan. Penyebab pertama adalah masalah agama dan penyebab kedua adalah masalah kecemburuan sosial. Berkaitan dengan pendapatnya tentang masalah agama yang menjadi penyebab kerusuhan. Ia memberikan deskripsinya seperti ini :

“Kalo masalah agama, kebetulan adik saya kerja di asuransi. Waktu itu kebetulan punya Kijang di-taksi-kan orang Jawa. Pada saat kerusuhan oleh orang Jawa itu bisa diselamatkan. Lalu kami mengungsi ke Banjar. Sampai di Banjar sekian bulan mobil itu dikembalikan orang Jawa itu. Lalu adik saya sering *naksi* ke Palangka Raya. Tapi orang itu tidak tahu kalau dia orang Madura karena pintar bahasa Jawa. Pada suatu saat mobilnya dicarter oleh seseorang. Pada saat perjalanan Lalu ada orang carter, di jalan “Bapak dari mana ?” Dijawabnya “*Sebujurnya* (sebenarnya) kami habis jalan-jalan ke Jawa sampai ke Madura sampai nginap-nginap disana. “Kerja apakah pak, *batangkah* (Kerja kayu). “Kami jadi *spionase* (mata-mata), kalau-kalau ada orang Madura yang mempersiapkan pasukan, ternyata *ngga ada*, hanya *issue* aja. “Siapa yang biayai perjalanan bapak termasuk menginap di hotel selama perjalanan ?”. “Ada dananya dari luar negeri, dari Amerika Serikat, bahkan rumah saya di Sampit dibakar, tapi diganti !”

Narasi tentang perbedaan agama sebagai penyebab kerusuhan di Sampit sejak awal ditolak oleh elite Dayak. Argumentasi tentang digunakannya agama sebagai asal-

⁶ Bagendang adalah nama sebuah desa yang ada diantara Sampit dan Samuda. Pembangunan pelabuhan ini difokuskan untuk pengangkut *Crude Palm Oil* (CPO) dari berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

muasal kerusuhan dianggap sangat lemah. Hal ini dikarenakan karakter etnisitas Dayak di Kalimantan Tengah yang tidak terkait dengan agama. Hal ini berbeda dengan pengertian Dayak di Kalimantan Barat yang mempunyai makna penduduk asli non-Muslim sebagai lawan dari arti Melayu yang berkonotasi sebagai Muslim. Para elite Dayak di Kalimantan Tengah, seperti KMA Usop adalah seorang Muslim. Demikian halnya dengan tokoh-tokoh LMMDD-KT di Sampit juga Muslim.

Namun, narasi tentang adanya unsur agama dalam kerusuhan tersebut bukannya monopoli pendapat orang-orang Madura. Dalam perbincangan yang tidak dikondisikan sebagai wawancara yang bersifat formal, seorang tokoh pemuda Sampit yang juga pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten menyatakan bahwa kerusuhan Sampit didalangi oleh tokoh-tokoh “Dayak Kristen” yang tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Kotawaringin Timur saat itu, Wahyudi K Anwar. Demikian pula seorang pengajar di Universitas Palangkaraya yang mempunyai gelar Doktor ilmu Sosiologi, terlibat dalam berbagai aktivitas pasca kerusuhan dan pernah meneliti kerusuhan secara intensif, mengatakan bahwa adanya unsur agama dalam kerusuhan ini sebetulnya dapat dibuktikan. Walaupun dalam arena yang lainnya, ia selalu mengatakan dan menuliskan bahwa kerusuhan tersebut bukan masalah agama.

Pak Tosan mengetahui kalau orang-orang Dayak itu tidak bersifat homogen. Hal ini agak berbeda dengan pandangan orang Madura kebanyakan yang sering melabeli Orang Dayak sebagai Kristen dan Kaharingan. Namun, beberapa pandangan dari Pak Tosan masih terasa *stereotype*-nya. Ia mengatakan :

“Menurut saya orang Dayak agamanya macam-macam, tapi paling banyak agama Kristen. Sedangkan Kaharingan ini semacam animisme. Kalau di Sampit, khususnya di kecamatan Ketapang persentasinya kecil, lebih banyak di Baamang, di kota juga sedikit. Kalau di kota Sampit itu sedikit lagi. Sebabnya, kalo dulunya, kalo kita beli tanah dekat mereka, paling lama 1 tahun mereka pindah, mungkin mereka minder, karena mereka umumnya mereka memelihara anjing dan babi.”

Pemikiran Pak Tosan tentang penyebab kerusuhan yang bernuansa agama ini juga hadir dalam pendapat beberapa pemuda Madura, baik yang ada di pulau Madura atau di Sampit. Misalnya seorang pengusaha pengembang di Sampit yang juga anak dari

sekertaris IKAMA sangat percaya bahwa kerusuhan ini akibat dari kegiatan *missionaris* Kristen yang sebelum kerusuhan banyak terlihat beredar di Kota Sampit, mereka kebanyakan adalah orang Barat. Selain itu, sebelum kerusuhan banyak tumbuh gereja-gereja baru yang sebelumnya tidak ada di kota Sampit. Hal ini memberikan petunjuk adanya pertumbuhan orang Kristen yang cukup besar di Kota Sampit.

Penyebab kedua dari kerusuhan itu adalah masalah kecemburuan sosial. Pak Tosan sering menjumpai adanya orang-orang Dayak dari pedalaman yang bekerja menjadi pembantu dari pendatang. Tingkat perekonomian orang-orang “sini” jauh dibandingkan dengan kehidupan orang-orang Madura. Bahkan pak Tosan pernah mendengar perkataan orang-orang Dayak, “Kalau orang Madura *ngga ada* disini kami bisa berhasil!”. Tapi kenyataannya orang-orang dari pedalaman datang ke kota tidak bisa melakukan usaha

Keberadaan Orang-orang Madura di Kota Sampit

Menurut tutur lisan yang didapatkan Pak Tosan, ia mendengar pada jaman Belanda telah ada masyarakat yang mempunyai kerjasama dalam usaha perkebunan. Menurut informasi yang ia dengar, orang Madura pertama yang datang ke Sampit sekitar tahun 1920 sebagai buruh pabrik gambir. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai “pembantu orang Belanda” di Brenzel. Kakek pak Tosan bekerja sebagai “pembuang *sibitan*” (sisa potongan kayu) untuk didorong oleh *lori* dari pabrik hingga ke pinggir jalan. Kemudian Pak Tosan memberikan gambaran mengenai melimpahnya kayu pada masa itu dengan mengatakan orangtuanya membangun rumah dengan membawa kayu setiap pulang kerjanya 1 lembar papan sampai bisa membangun rumah. Namun, ketika manajemen perusahaan dipegang oleh orang-orang Indonesia, *kayu sibitan* itu digunakan untuk bahan bakar industri dan tidak boleh dibawa keluar pabrik.

Bagi Pak Tosan, Brenzel memang penarik orang-orang Madura ke Sampit, migran spontan Madura ini masuk ke Sampit melalui wilayah Pelangsian, khususnya di kampung yang bernama Bapanggang. Orang-orang Madura yang tinggal di wilayah Parebok (dekat Samuda) adalah kelompok kedua migran spontan Madura tersebut. Migran Madura di Parebok karena pada jaman Belanda mereka relatif masih bebas untuk mengambil tanah. Selain itu, banyak orang Madura yang bekerja menjadi buruh pembuatan kapal (*galangan kapal*) dan mereka juga menanam pohon kelapa (*nyiur*). Saat ini, pasca kerusuhan masih banyak orang tinggal di Parebok. Orang-orang Madura di Parebok memang dikenal sebagai petani dan pekebun-kelapa yang peranannya sangat penting dalam mensuplai hasil pertanian ke kota Sampit. Oleh karena itu kepergian mereka untuk mengungsi sangat signifikan dalam mengurangi hal pasokan hasil pertanian ke kota Sampit. Demikian pentingnya peranan orang-orang Madura, bahkan ketika kepala desa Parebok yang orang Madura kembali ke tempat itu dijemput di Pelabuhan Sampit.

Pak Tosan menganggap bahwa mudahnya orang Madura untuk kembali ke kota Sampit, karena kedatangan orang-orang Madura ke Sampit bukan untuk perang tetapi untuk berusaha. Apalagi untuk pohon kelapa, apabila terlalu banyak alang-alang maka hasil buahnya akan sangat sedikit. Oleh sebab itu tidak boleh ditinggalkan terlalu lama.

Pak Tosan sendiri pada akhirnya harus mengungsi, padahal ia seorang pejabat pemerintah kabupaten yang mengemban tugas sebagai Lurah di kecamatan Ketapang. Pada saat kerusuhan ia mengungsi ke Telaga Biru di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia mengungsi selama 8 hari. Kebetulan Pak Tosan mempunyai anak yang sudah kuliah dan mengontrak rumah di Martapura. Walaupun Pak Tosan merasa bahwa rakyatnya akan melindungi, tetapi ia memutuskan untuk mengungsi. Pada saat itu ia bertemu dengan orang-orang yang membawa clurit dan tombak, tetapi orang-orang yang bukan berasal dari tempatnya itu tidak tahu kalau Pak Tosan adalah orang Madura. Berkaitan dengan *rumor* adanya kemampuan orang-orang Dayak untuk

mengidentifikasi orang Madura melalui indera penciuman, pak Tosan menganggap mungkin saja dari 1000 orang Dayak, hanya 2-3 orang saja yang mempunyai kemampuan tersebut. Pak Tosan percaya kalau ada sebagian kecil orang-orang Dayak yang mempunyai kekuatan supra-natural seperti itu. Namun jumlahnya amat sedikit dan mereka tidak akan menonjolkan diri. Selebihnya adalah orang-orang yang datang untuk melakukan penjarahan. Pak Tosan mendengar bahwa orang-orang Dayak yang berasal dari wilayah Katingan dan Kapuas mendengar berita yang berbeda. Orang-orang Dayak mendengar orang-orang Madura melakukan pembantaian terhadap orang Dayak. Sehingga orang-orang turun dengan mempersiapkan ilmu hitam. Mereka masuk ke Sampit tanpa pikir panjang dan langsung mengamuk.

Pak Tosan mengakui bahwa orang-orang Madura memang melakukan upaya untuk menguasai kota Sampit, khususnya selama tiga hari, antara tanggal 18-20 Februari 2001. Padahal sudah ada upaya untuk melarang orang-orang Madura untuk tidak melakukan provokasi terhadap orang-orang Dayak. Namun sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan anak-anak muda dan remaja melakukan pembakaran rumah-rumah orang Dayak. Anak-anak remaja ini membakari rumah-rumah orang Dayak, kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melakukan *konvoi*.

Berkaitan dengan adanya spanduk “Sampit sebagai Sampang Kedua”, sebetulnya konteks yang ada dalam isi spanduk tersebut berbeda dengan apa yang dimaksudkan orang selama ini, yaitu adanya keinginan orang-orang Madura untuk menguasai kota Sampit dan menganggapnya sebagai Sampang kedua. Pada saat itu orang-orang Madura sedang menentang polisi yang menangkap orang Madura yang bekerja sebagai buruh pelabuhan di Sampit dan sebelum kejadian tersebut, di kabupaten Sampang terjadi demonstrasi besar-besaran dimana kantor bupati diduduki oleh masyarakat. Kemudian orang-orang Madura di Sampit yang mengadakan demonstrasi ke kantor polisi itu mengatakan, kalau kepolisian tidak mampu menangani masalah

buruh yang ditahan tersebut, maka kejadiannya akan seperti di Sampang, yaitu mereka akan menduduki kota Sampit agar kepolisian melepaskan buruh tersebut.

Dalam pandangan pak Tosan, “Sampit sebagai Sampang Kedua” adalah dalam konteks internal orang-orang Madura, dan bukan untuk menduduki kota Sampit. Hal ini perlu diperjelas, mengingat salah satu pembenaran bagi orang-orang Dayak untuk mengusir orang Madura adalah rumor adanya spanduk yang isinya tentang rencana penguasaan orang-orang Madura atas kota Sampit. Sedangkan buruh Madura yang ditahan polisi itu sudah dibebaskan oleh Haji Marlinggi, tokoh IKAMA yang juga ketua pengurus Buruh Angkut Pelabuhan Sampit.

Haji Marlinggi merupakan tokoh Madura yang paling dikenal di kota Sampit, bahkan namanya dikenal di kalangan orang-orang Dayak dalam konotasi yang negatif, khususnya dalam kapasitasnya sebagai “ketua IKAMA” dan sering membebaskan orang-orang Madura yang melakukan tindakan kriminal. Namun, walaupun Pak Tosan juga memberikan beberapa hal negatif tentang keberadaan IKAMA dan H Marlinggi, dalam kasus penyebab kerusuhan Dayak dan Madura di bulan Februari 2001, peranan Haji Marlinggi tidak sebesar yang dipersangkakan orang lain kepadanya. Menjelang kejadian kerusuhan Haji Marlinggi baru kembali ke Sampit sehabis menjalani operasi. Haji Marlinggi memang tahu hubungan Dayak dan Madura yang memanas setelah pembunuhan Sendong di Kereng Pangi. Ia meminta kawan-kawannya di IKAMA untuk tidak meneruskan konflik tersebut karena sudah ada kesepakatan damai. Namun elemen lainnya di IKAMA tidak puas dengan pernyataan Haji Marlinggi. Perjanjian damai antara orang-orang Dayak dan Madura sebetulnya telah dilakukan berkali-kali, termasuk melibatkan Haji Marlinggi sebagai perwakilan orang Madura dan Bapak Esra Pahan sebagai perwakilan orang-orang Dayak. Namun, menurut pak Tosan, orang yang ingin meneruskan konflik tersebut adalah Haji Pulangi atau H Sakri (Pak Tosan tidak terlalu yakin) yang sudah meninggal di Madura. Pak Tosan menirukan ucapan H Pulangi, “Kalau Pak Haji tidak sanggup karena sakit, biar kami yang bergerak!”. Pernyataan Pak Tosan ini

menandakan adanya berbagai pandangan di kalangan orang-orang Madura itu sendiri terhadap rencana kerusuhan. Kemudian pada tingkatan yang lain, ketika kerusuhan itu terjadi, banyak elemen di Madura yang ingin membantu kondisi orang-orang Madura di Sampit dengan datang ke Sampit, tetapi dicegah oleh H Moh Noor, mantan gubernur Jawa Timur yang juga tokoh panutan orang Madura, ia mengatakan dengan cara membantu seperti itu permasalahan konflik dan kekerasan tidak akan selesai.

Selain tentang peran Haji Marlinggi dan adanya rumor tentang “Sampang kedua” ini, Pak Tosan juga memberikan pandangannya terhadap adanya tulisan-tulisan dan selebaran mengenai tokoh-tokoh Dayak yang akan dibunuh. Selebaran itu diketik rapih dan ditempelkan di pos-pos. Menurut pendapat pak Tosan, kalau memang merencanakan membunuh untuk apa membikin daftar tersebut dan menyebar luaskannya.

Pak Tosan sebetulnya agak sulit untuk dapat menerima kenyataan permusuhan yang mendalam antara orang-orang Dayak dengan Madura, karena ia juga mengetahui adanya mitos-mitos yang menyatakan adanya hubungan kekeluargaan imajinatif antara orang-orang Dayak dan Madura. Salahsatu mitosnya adalah ada orang Dayak yang mencari ikan di sungai Katingan, kemudian ia terseret arus hingga ke daerah Madura, karena memang muara sungai Katingan ada di daerah laut Jawa yang dapat terhubung ke pulau Madura. Orang Dayak yang terseret arus tersebut hingga wilayah Nipah di Sampang Madura, kemudian berketurunan di daerah tersebut. Hingga kini makam orang Dayak tersebut dianggap sebagai makam keramat di daerah Nipah. Pak Tosan pernah ke makam tersebut pada tahun 1970-an dan orang-orang mengatakannya sebagai kuburan nenek moyang mereka. Walaupun ada mitos lain mengatakan bahwa orang Dayak yang terdampar ke wilayah Madura tersebut sempat berkelahi dengan salah seorang tokoh lokal di pulau Madura. Kedua orang tersebut berkelahi dengan menggunakan senjata khas daerahnya masing-masing. Orang Dayak menggunakan *mandau* dan orang Madura menggunakan *clurit*. Tokoh Dayak

tersebut dikisahkan memenangkan perkelahian tersebut, selain karena kesaktiannya, cara menyimpan *mandau* yang ada disimpan di didepan perut lebih memudahkan untuk digunakan daripada *clurit* yang disimpan pada bagian belakang. Orang Dayak yang menang perkelahian tersebut kemudian tinggal di Madura.

5.4. Ramli : Anak Muda Madura

Ramli adalah anak muda Madura yang saya kenal dalam waktu yang cukup lama. Pertemuan pertama kali dengannya terjadi di kompleks makam massal Sampit pada hari Raya Idul Fitri tahun 2008. Saya datang ke makam tersebut untuk membuat foto dan merekam melalui *handy cam* tentang situasi makam masal pada hari Raya Idul Fitri. Saya mengetahui adanya tradisi *nyekar* di kalangan orang-orang Madura, kemudian saya ingin tahu apa yang dilakukan di makam massal, mengingat tidak adanya kumpulan makam secara individu. Didalam kompleks makam masal itu hanya ada sekitar 6 nisan tanpa nama. Padahal ratusan orang dikebumikan di tempat itu.

Pada hari itu saya bertemu dengan tiga kelompok orang yang datang ke makam. Kelompok pertama terdiri dari sembilan orang anak muda laki-laki dan perempuan yang menempati salahsatu pojok makam dan mengaji dipimpin salah seorang diantara mereka. Pemimpinannya anak muda yang tampaknya paling tua diantara anak-anak muda lainnya. Kelompok ini relatif *khusyuk* dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak terganggu dengan kerja saya yang melakukan perekaman melalui video maupun mengambil gambar fotografi. Kelompok ini membacakan ayat ayat suci Al Qur'an sekitar 20 menit dan setelah itu menuju tempat saya duduk, yaitu sebuah tempat naungan kecil yang disediakan oleh pembuat makam masal itu untuk tempat istirahat dan menahan teriknya matahari. Kelompok ini adalah anak-anak muda Madura yang bertempat tinggal di dekat Bandara Sampit. Kebanyakan dari orang-orang Madura di tempat ini mempunyai usaha menanam nanas dan menjualnya didekat kebunnya. Anak-anak muda dari kelompok ini mengaku semuanya mengungsi ke Madura di daerah kabupaten Sampang. Karena orang tua mereka

berasal dari kabupaten tersebut. Mereka datang ke makam massal tersebut untuk mendoakan keluarga mereka, ada yang kehilangan orangtua, kehilangan kakak mereka dan kerabat lainnya. Mereka mengatakan tidak tahu pasti apakah orang yang didoakan mereka dimakamkan disitu atau tidak. Tetapi pada saat kerusuhan anggota keluarga mereka hilang, mereka menganggap bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal. Karena tidak tahu dimana kuburannya mereka menganggap bahwa orang-orang yang meninggal saat kerusuhan itu pasti dimakamkan disitu.

Kelompok kedua adalah sepasang anak muda, laki-laki dan perempuan. Kedua anak muda ini menarik perhatian saya karena mereka berpindah-pindah dari satu nisan ke nisan lainnya sebelum pada akhirnya mereka berdoa di salah satu nisan. Dari sisi penampilan, kedua anak muda ini relatif berbeda dengan kelompok lainnya. Anak muda yang perempuan berkaos ketat dengan celana *jeans*, menggunakan kerudung tetapi tidak menggunakan jilbab. Berbeda dengan para perempuan di lainnya yang semuanya berjilbab. Anak muda yang lelakinya bersifat amat kritis terhadap kehadiran saya disitu, ia menanyakan maksud dan tujuan saya ada di tempat itu; apa maksud dan tujuan melakukan penelitian seperti itu. Kemudian ia juga mengatakan mengapa mereka kebingungan di nisan tersebut, karena mereka belum yakin dimana makam dari kerabat yang akan mereka doakan.

Sedangkan kelompok ketiga terdiri dari 12 anak muda, terdiri dari sebelas laki-laki dan seorang perempuan. Berbeda dengan penampilan sepasang anak muda yang relatif penampilannya tenang dan kalau bicara tidak bersuara keras. Kelompok dua belas orang ini relatif lebih gaduh dan terus-menerus berbicara dalam bahasa Madura yang diselingi dengan tertawa keras. Namun, dibandingkan dengan kedua kelompok sebelumnya, kelompok ini relatif lebih dekat dengan saya. Bahkan salah seorang diantaranya tidak segan-segan untuk meminjam kamera milik saya untuk digunakannya memotret. Selain itu, ketika ia akan difoto ia bergaya, berbeda dengan anak-anak muda lainnya. Diantara kedua belas orang tersebut, saya tertarik mengamati dua orang. Pertama anak muda yang meminjam kamera saya, bernama

Ramli. Kedua, anak usia belasan tahun yang berdoa secara khusuk di salah satu nisan, namanya Sidik. Kemudian saya mengetahui relasi kekerabatan diantara keduanya, Sidik adalah sepupu Ramli. Ayah Ramli adalah kakak kandung ibu Sidik. Ketertarikan saya terhadap Sidik, ia adalah yang paling pendiam diantara semua anggota kelompoknya, juga tampaknya paling muda. Ia juga tampaknya menyendiri berdoa di dekat nisan dan tidak bergabung dengan anggota kelompok lainnya.

Berdasarkan cerita Ramli, ayah Sidik tewas dibunuh oleh orang-orang Dayak pada saat kerusuhan. Menurut Ramli, sebetulnya ayah Sidik dapat saja selamat pada saat itu, karena ia sudah ada di tempat pengungsian di kantor Bupati. Tempat tersebut merupakan zona aman pada saat itu. Ayah Sidik bekerja di Kabupaten Katingan. Ketika terjadi kerusuhan ia bergegas kembali ke Sampit untuk menemui isteri dan anaknya. Pada saat itu Ayah Sidik tidak mengetahui keberadaan isteri dan anaknya. Kemudian Ayah Sidik mendatangi tempat pengungsian untuk mencari isteri dan anaknya. Padahal mereka sudah ada di kapal pengangkut pengungsi, artinya sudah ada di wilayah aman. Setelah itu ia mendapat informasi kalau isteri dan anaknya sudah tidak ada di tempat pengungsian. Kemudian ia mencari ke tempat lain, pada saat mencari itulah ia ditemukan oleh kelompok yang mencari orang-orang Madura. Karena tidak tahu apa yang terjadi dan selama itu ayah Sidik tidak mempunyai musuh orang Dayak, maka ia mengira aman-aman saja bertemu dengan kelompok ini. Menurut keterangan Sidik, kepala ayahnya dipenggal oleh kelompok tadi.

Berkaitan dengan Ramli, awalnya ia tidak bercerita untuk siapa ia datang ke makam tersebut. Sayapun mengira ia datang sekedar beramai-ramai dengan temannya atau mengantar Sidik. Karena ayah Sidik adalah pamannya juga. Namun, pada akhirnya Ramli bercerita bahwa kakak kandungnya juga termasuk salah seorang korban kerusuhan. Kebetulan ketika itu saya mengunjungi tempat Ramli, di daerah jalan Padat Karya, di pinggir jalan poros antara Sampit dan Samuda. Ia menunjuk sebuah *mushalla* yang sudah tidak mempunyai kubah. Dengan masih bercanda ia mengatakan, “Her, lihat mushalla itu sudah tidak mempunyai kepala (kubah), seperti

kepala kakak saya yang hilang pada saat kerusuhan tersebut !”. Setelah bercerita itu, saya mempunyai kedekatan yang khusus dengan Ramli. Kami sering bertemu dengannya, dan saya sering tinggal di rumah Ramli. Ramli jugalah yang memberikan banyak petunjuk kepada saya ketika berkunjung ke Madura.

Keseharian saya bersama Ramli memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati beberapa kejadian yang memperlihatkan situasi diskrimasi yang dialami oleh orang-orang Madura pasca kerusuhan. Salah satunya adalah peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Sakeri, adik Ramli. Sakeri pada saat itu memarkir sepeda motornya di salahsatu toko di kecamatan Ketapang, Sampit. Ketika ia memarkir motornya, sekelompok anak muda datang dan menuduh Sakeri telah mencuri helm milik salah seorang anggota kelompok itu. Ramli tidak tahu apakah mereka itu orang-orang Dayak atau bukan, hanya dikatakannya “Anak-anak Ketapang”. Karena Sakeri merasa tidak mencuri helm tersebut, ia menolak untuk memberikan helm tersebut. Kemudian kelompok tersebut memukili Sakeri hingga ia tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Menurut Ramli, adiknya menderita gegar otak ringan dan perlu dirawat dengan biaya yang cukup mahal. Ramli harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1,2 juta untuk biaya perawatan adiknya.

Ramli melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, kemudian polisi mengusutnya dan membawa para pelaku pemukulan tersebut untuk diproses. Belakangan diketahui bahwa memang terjadi kesalah-pahaman, bukan Sakeri yang mencuri helm tersebut. Apalagi jenis dan bentuk helm seperti itu cukup umum di kota Sampit. Masalah muncul ketika keluarga yang melakukan penganiayaan menginginkan proses perdamaian dan kasusnya tidak perlu dilanjutkan. Ramli tidak mau dan ia *ngotot* agar kasus tersebut diteruskan. Ia merasa masalahnya bukan sekedar penganiayaan terhadap adiknya, tetapi karena ia merasa adiknya diperlakukan demikian karena mereka adalah orang Madura. Ternyata keluarga penganiaya ini mempunyai cara lain untuk membujuk Ramli. Mereka menghubungi Pak Sabriansah, orang Banjar yang kebetulan pemilik tanah dan rumah yang ditinggali oleh Ramli. Awalnya Pak

Sabriansyah mendukung upaya Ramli untuk meneruskan kasus ini ke pengadilan. Tetapi pendapatnya berubah dan meminta Ramli agar berdamai saja, tanpa suatu paksaan apapun. Ramli tetap menolak. Namun, akhirnya Pak Sabriansah mengatakan kalau Ramli menolak berdamai maka ia harus meninggalkan rumah dan tanahnya. Ramli tetap berpegang pada pendiriannya dan melanjutkan kasusnya. Walaupun ia sendiri tidak menyukai proses pemeriksaan hingga peradilan yang dirasakannya membuang-buang waktu. Akhirnya para pelaku tersebut dihukum dan Ramli harus meninggalkan rumah dan tanah yang selama ini ditinggalinya. Ramli kembali tinggal di tanah orang tuanya yang berdekatan dengan mushalla kakaknya yang telah hancur. Ramli kini tinggal bersama-sama dengan isterinya di rumah milik ayahnya. Suatu hari Ramli mengatakan kepada saya, “Semua orang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran, termasuk kami orang-orang Madura !”

Selain itu, pada satu waktu saya diajak Ramli untuk menghadiri pesta pernikahan teman isterinya di daerah Plangsian. Sebelum ke tempat pernikahan tersebut Ramli mengajak saya untuk mampir di sebuah toko milik orang Banjar. Ia mengaku ingin membeli rokok dan membeli amplop untuk diisi uang yang akan diserahkan kepada pengantin. Ketika di toko tersebut saya merasakan ada perbedaan cara melayani dari pemilik toko terhadap saya dan Ramli. Pemilik toko tampak ramah dan siap melayani keperluan saya, sedangkan ia bersikap tidak ramah kepada Ramli. Cara bicaranya ketus terhadap Ramli dan cara ia memandang Ramli pun terkesan tidak menyukainya. Saya merasa Ramli tahu juga sikap itu, tetapi ia tetap saja dengan gayanya yang acuh tak acuh meminta keperluannya. Ketika ditanyakan kepada Ramli, apakah sikap-sikap seperti itu ia pernah alami. Ia mengatakan hal seperti itu biasa ia alami, dan ia tahu karena *logat* Maduranya mudah dikenali oleh orang-orang di Sampit.

Ramli adalah anak muda Madura yang kembali ke Sampit karena kondisi kehidupannya di kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang amatlah berat. Saya sendiri pernah mengunjungi rumah dan kampung Ramli di Kedundung, dimana nenek dan pamannya tetap tinggal di disitu. Rumah-rumah di Kedundung rata-rata

dindingnya terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya sudah menggunakan genting, namun lantainya masih berupa lantai tanah. Wilayah kecamatan Kedundung memang memang merupakan salah satu wilayah yang paling miskin di Kabupaten Sampang. Ramli hingga kini bekerja sangat keras dalam mengelola tanah pertanian milik bapaknya. Ia menanam *konjoy* (singkong) dan merawat pohon jeruk nipis milik bapaknya. Hasil pertaniannya dijual baik olehnya sendiri maupun oleh isterinya.

Ramli, seperti kebanyakan anak-anak muda Madura miskin lainnya di kota Sampit, lebih memilih untuk mengerjakan tanah pertanian daripada bergerombol di Taman Kota Sampit. Taman Kota adalah simbol dari kehidupan urban kota Sampit, hampir setiap malamnya, terlebih pada malam minggu, suasana di Taman Kota sangat ramai oleh orang-orang yang datang untuk makan malam di warung-warung tenda. Demikian juga dengan para pedagang pakaian, mainan, *cafe-cafe* tenda, bahkan kegiatan prostitusi yang sebelumnya ada di kilometer 12 telah pindah ke Taman Kota.

5.5. Bibi Nurani : Penjual *pencok* yang membangun kembali usahanya

Bibi Nurani adalah seorang perempuan Madura yang paling sering saya kunjungi dalam penelitian ini. Usianya kira-kira pada awal usia 40 tahunan. Ia adalah isteri kedua dari Pak Sakira, seorang tukang becak Madura berusia sekitar 70 tahun. Saya berkenalan dengan Pak Sakira terlebih dahulu, barulah dengan isterinya. Pak Sakira lahir di Kabupaten Kapuas, sedangkan orangtua pak Sakira lahir di Madura. Sedangkan Bibi Nurani lahir dan besar di kota Sampit. Ayah Bibi Nurani melakukan menikah lagi, namun menelantarkan ibunya bibi Nurani. Ayah dan ibu bibi Nurani masih hidup, tetapi pada akhirnya mereka bercerai dan keduanya tinggal di kota Sampit.

Pertemuan dengan pak Sakirapun tidak disengaja, yaitu pada saat saya makan di warung makan di depan Rumah Sakit Umum Dr Murjani Sampit, kebetulan pak

Sakira sedang makan disitu. Kemudian paman saya yang kebetulan mengenal pak Sakira menyapanya. Mereka saling kenal karena dulunya pak Sakira yang menjemput anak-anak SD dengan menggunakan becaknya. Paman saya ini sudah lama tidak bertemu dengan Pak Sakira, karena memang Pak Sakira mengungsi ke pulau Madura. Sejak pembicaraan awal dengan pak Sakira saya telah tertarik. Khususnya mengenai pekerjaan tukang becak di kota Sampit. Melalui cerita maupun tulisan-tulisan di media massa dikisahkan tentang penguasaan pekerjaan tukang becak oleh orang-orang Madura di Sampit. Cerita itu ditambahi pula dengan *stereotype* para tukang becak Madura yang dikenal berperangai kasar, tidak boleh menawar ongkos yang dimintakan oleh tukang becak, dan perebutan penumpang dengan cara kekerasan. Tetapi citra seperti itu tidak saya temukan dari Pak Sakira. Tutar katanya lembut, selalu menyapa orang yang dikenalnya, citra kepasrahan dibandingkan laku agresif. Karakter pak Sakira, menurut paman saya, memang berbeda dengan orang Madura kebanyakan. Selain itu, pak Sakira mempunyai banyak pelanggan, karena selain menarik becak, ia juga mau mengerjakan apapun yang dimintakan orang kepadanya.

Kemudian pak Sakira mengundang saya untuk main ke rumahnya. Ketika pertama kali saya berkunjung ke rumahnya, ia tinggal di suatu kawasan yang hampir semuanya adalah orang-orang Madura yang baru kembali dari pengungsian. Mereka tinggal di kecamatan Ketapang, di daerah Jalan Jeruk yang merupakan permukiman yang cukup dekat dengan pusat kota Sampit.

Salah satu ciri yang hampir sama dari rumah-rumah tersebut adalah kesan sebagai rumah sementara atau rumah yang baru dibangun ulang. Kebanyakan rumah-rumah orang Madura di tempat itu dibangun di tempat reruntuhan bangunan yang lama, sehingga tembok dan lantai relatif masih menggunakan struktur peninggalan rumah yang lama, sedangkan dinding dan atap kebanyakan dibangun ulang dengan material-material bekas. Tempat tinggal pak Sakira sekarang memang merupakan tempat tinggalnya sebelum kerusuhan. Namun bangunan utama rumahnya sudah dihancurkan pada saat kerusuhan terjadi.

Kemudian saya diperkenalkan dengan isteri pak Sakira, yang saya sebut saja Bibi Nurani. Ia seorang perempuan yang kira-kira sebaya dengan saya, berusia sekitar 40 tahunan. Mereka sudah mempunyai 3 orang anak laki-laki dan seorang cucu. Bibi Nurani bekerja sebagai penjual *pencok* (gado-gado). Jenis makanan itu terbuat dari macam-macam sayuran yang telah direbus, dicampur dengan saus kacang tanah dan diberi *kikil*. Sejak awal perkenalan dengan saya, Bibi Nurani tampaknya orang yang senang mengobrol dan mudah akrab. Mungkin karena pekerjaannya sebagai pedagang *pencok* yang harus melayani para pembelinya, sikap keramahan menjadi sangat penting. Relasi saya dengan keluarga pak Sakira dan Bibi Nurani menjadi lebih dekat dari waktu ke waktu. Hal yang bagi saya sangat menarik dari keluarga ini adalah bagaimana proses pemulihan sosial-ekonomi keluarga ini setelah kerusuhan, terutama peranan dari bibi Nurani yang bekerja keras. Selain itu juga kisah-kisah bibi Nurani sebagai perempuan Madura pasca kerusuhan, yang memperlihatkan situasi-situasi sulitnya, termasuk pelecehan-pelecehan yang diterimanya sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan Madura sebagai pihak yang kalah dalam kerusuhan.

Bibi Nurani mengundang saya ke warung *pencoknya* yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari rumahnya. Warungnya sangat sederhana, dengan material-material bekas. Salah satu tiang penyangga warungnya adalah sisa tiang rumahnya yang telah hancur karena kerusuhan. Ia sengaja menggunakannya sebagai kenang-kenangan peristiwa yang pernah terjadi. Bibi Nurani mendirikan warungnya diatas tanah kosong milik salah seorang warga Sampit yang beragama *kresten* (Protestan) yang bersimpati pada kehidupan bibi Nurani. Warung *pencoknya* ada di pinggir jalan Pelita Barat, suatu jalan yang sangat strategis yang menghubungkan Sampit dengan wilayah Samuda. Jalan tersebut sering dilewati oleh truk-truk pengangkut kayu ilegal dan juga tangki-tangki minyak ilegal, sehingga warungnya sering dijadikan tempat *nongkrong* kelompok-kelompok LSM maupun wartawan lokal yang memeras truk kayu ilegal dan penyelundup minyak subsidi. Kelompok-kelompok ini sebetulnya terlibat dengan

kerusuhan pada bulan Februari 2001 dan awalnya sangat anti-Madura. Tetapi bibi Nurani tidak segan dengan mereka, bahkan berkawan karib dengan mereka.

Bibi Nurani mengaku berjualan *pencok* setelah kerusuhan, karena ia tidak mempunyai keahlian lain selain berjualan. Sebelum kerusuhan, bibi Nurani mempunyai warung makan didalam sebuah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Usaha dagangannya cukup baik, dan menyebabkan keluarga itu mampu menabung untuk membeli tanah di wilayah Sampit. Namun setelah kerusuhan, ia tidak diterima berdagang di tempat tersebut. Setelah kembali dari Madura tahun 2003, ia datang kembali ke MAN tempatnya berjualan dan meminta kepada kepala sekolah (ia menyebutnya kepala guru) agar dapat berdagang kembali di tempat tersebut. Awalnya kepala sekolah tidak memberikan ijin untuk berdagang kembali karena sudah ada orang lain yang berdagang di tempat itu dan dari kalangan guru. Kemudian Bibi Nurani meminta diperbolehkan untuk berdagang di luar sekolahan yaitu dibagian luar pagar sekolah sehingga siswa masih bisa membeli dagangannya. Tetapi tetap ditolak. Kemudian Bibi Nurani menghadap kepala sekolah dan mendapatkan jawaban mengapa ia tidak boleh dagang disitu, karena bibi Nurani adalah orang Madura, dan mereka masih khawatir dengan sikap orang Madura pada masa lalu yang sering membuat keributan. Tentu saja bibi Nurani sangat menyesalkan tindakan kepala sekolah tersebut. Namun bibi Nurani tidak mengetahui latar belakang mengapa Pak Kepala sekolah demikian keras terhadapnya. Pak kepala sekolah sendiri bukanlah orang Dayak, ia adalah orang Banjar yang tempat tinggalnya di kecamatan Baamang. Kecamatan Baamang itu adalah lokasi dimana kerusuhan antar etnis bermula pada bulan Februari 2001. Namun, bagi Bibi Nurani, tindakan kepala sekolah sebagai sesama muslim sulit diterimanya. Baginya pak kepala sekolah tidak menjalankan ajaran agama Islam.

Kegagalan Bibi Nurani untuk kembali berdagang di sekolah tersebut tidak menjadikannya putus asa. Ia mulai menjual sayur-sayuran dari rumah ke rumah. Setiap ikat sayuran yang dijualnya ia mendapat keuntungan sekitar Rp 500. Berjualan

sayuran menjadikannya harus bangun dan pergi ke pasar induk sekitar pukul 03.00, kemudian ia harus memilah-milah sayurannya, dan kemudian mengikatnya satu per satu. Kemudian ia berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Ia bekerja sangat keras, karena ia tahu kalau suaminya yang jauh lebih tua darinya itu tidak mempunyai bakat dan modal dalam berdagang, sementara mereka sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Hasil jerih payahnya tersebut kemudian mampu untuk membelikan becak untuk suaminya dan sepeda untuk anaknya ke sekolah. Suaminya dapat kembali mencari uang dengan mengayuh becak, seperti sebelum kerusuhan, dan anaknya dipermudah untuk pergi ke sekolah.

Bibi Nurani masih mempunyai sebidang lahan yang ditinggalkannya pada saat kerusuhan. Kemudian ia menjual lahannya tersebut, dan membeli kembali lahan yang lebih sempit, tetapi lokasinya lebih dekat dengan kota Sampit. Sekitar tahun 2006, hanya sekitar dua tahun setelah kembali dari pengungsian kehidupannya relatif lebih baik, yaitu ia telah mampu membangun kembali rumahnya, mempunyai becak untuk suaminya bekerja dan sepeda untuk anak-anaknya. Ia juga tampak menggunakan gelang perhiasan di lengannya. Suatu simbol status untuk menunjukkan keberhasilan seseorang dalam bekerja.

Mengenang kerusuhan, saat mengungsi di Madura dan awal-awal kembali ke Sampit adalah saat-saat yang pahit bagi Bibi Nurani. Hingga kini Bibi Nurani tidak pernah mengerti apa yang menyebabkan peristiwa bulan Februari 2001 itu. Sesuatu yang paling diingatnya adalah instruksi untuk segera berangkat ke tempat pengungsian di kantor bupati, karena ada perkelahian antara orang Dayak dan Madura. Ia sendiri tidak tahu persisnya perkelahian tersebut, termasuk tidak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi. Hanya perintahnya ia sekeluarga harus berangkat ke tempat pengungsian untuk sementara saja. Kemudian dengan bekal seadanya ia dan suami serta anak-anaknya pergi ke tempat pengungsian. Pada saat itu tempat pengungsian sudah sangat penuh, dan ia sangat tidak nyaman.

Kemudian diumumkan bahwa orang-orang Madura yang berstatus pengungsi akan dibawa dengan kapal laut ke pulau Jawa. Kemudian berangkatlah kapal tersebut ke Surabaya. Selanjutnya mereka dibawa ke kecamatan Ketapang di Kabupaten Sampang, pulau Madura. Mereka tinggal di barak pengungsian di Ketapang. Bibi Nurani merasa sebagai orang Madura yang lahir di Sampit merasa terasing di pulau Madura, tanah kelahiran ayah dan ibunya. Selain itu sikap orang-orang Madura di dekat tempat pengungsian tidak ramah. Menurut Bibi Nurani, orang-orang di Madura tidak suka dengan para pengungsi Sampit yang dianggapnya sebagai pembuat keributan, sehingga menyusahkan orang-orang Madura yang ada di pulau Madura.

Hidup di tempat pengungsianpun sangat tidak nyaman. Barak-barak yang ukurannya sangat kecil, kurangnya air bersih, tempat yang sangat panas di siang hari membuat Bibi Nurani sangat tidak betah. Apalagi anak-anaknya masih usia Sekolah Dasar. Tetapi bibi Nurani merasa tidak mempunyai saudara dekat di Ketapang. Apalagi suaminya juga bukan kelahiran pulau itu. Ia menjalani hari-hari panjang dan melelahkan itu selama hampir 3 tahun. Kemudian keluarga ini memutuskan untuk kembali ke Sampit dengan segala resikonya.

Dalam pandangan Bibi Nurani, orang-orang Dayak itu berbeda-beda, ada orang-orang dan kelompok yang tidak disukainya, karena sering mengganggu dan melecehkan. Tetapi ada juga orang-orang dan kelompok yang membantu, walaupun dengan motivasi yang berbeda. Saat kembali ke Sampit, ia mendapati rumahnya sudah hancur dan tidak layak ditempati lagi. Kemudian keluarga ini diijinkan untuk tinggal di *mushalla* dekat dengan puing-puing rumahnya. Tetapi, ketika ia tinggal di *mushalla* tersebut hampir setiap malam ia diganggu oleh kelompok orang, seringkali dalam keadaan mabuk, dan mengeluarkan kata-kata kasar tentang orang Madura. Selain itu, kelompok-kelompok ini seringkali meminta uang kepada suaminya, padahal mereka sendiri kekurangan uang.

Selain meminta uang, laki-laki dalam kelompok-kelompok itu seringkali mengintip kedalam rumah dengan sangat tidak sopan. Awalnya Bibi Nurani dan suaminya berusaha untuk memberikan apa yang dimintakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Pada suatu ketika Bibi Nurani tidak menuruti permintaan kelompok itu, bahkan ia tidak merespons apapun kata-kata mereka. Kelompok ini tampaknya marah dan dari luar mereka kembali mengeluarkan kata-kata yang menyinggung tentang orang Madura. Bibi Nurani dan suaminya tetap membiarkan. Kemudian kelompok ini mulai melempari genting mushalla dan menggedor-gedor dinding tripleks dan seng mushallah tersebut. Kemudian mereka mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi keluarga Bibi Nurani. Pada akhirnya bibi Nurani tidak tahan dengan situasi ini, kemudian ia keluar dan berkata kepada mereka, “Apa yang kalian mau, apakah kalian tidak cukup menakut-nakuti kami, kami orang-orang Madura sudah ada dibawah telapak kaki kalian, kami sudah tidak mampu berbuat apapun, mengapa kalian terus mengganggu kami ?”

Bibi Nurani sangat frustrasi menghadapi kelompok-kelompok ini. Frasa “kami orang Madura dibawah telapak kaki kalian” adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa orang-orang Madura sudah tidak dapat melawan kembali. Kelompok seperti ini, pasca kerusuhan Sampit sukar diidentifikasi dari mana asalnya. Ada yang menyebut mereka sebagai sisa-sisa “Pasus” (*pasukan khusus*). Pasus ini awalnya mempunyai konotasi yang positif, yaitu orang-orang Dayak (dari pedalaman) yang datang ke Sampit untuk membela orang-orang Dayak yang diserang oleh Madura. Sehingga kedatangan *pasus* ini disambut dan difasilitasi oleh orang-orang Sampit. Mereka diberi makan dan tempat tinggal. Namun setelah orang-orang Madura mengungsi ke berbagai tempat, citra *pasus* ini menjadi tidak baik, karena mereka menduduki tanah-tanah, bangunan dan properti orang-orang Madura, meminta uang di pasar, memeras pengusaha. Semuanya dilakukan oleh mereka dengan alasan bahwa mereka telah membela orang-orang di Sampit dari orang-orang Madura dan telah mengembalikan “tanah air” (*petak pahaga danum*) kembali ke tangan orang-orang Dayak.

Ketika terjadi perselisihan antara Bibi Nurani dengan orang-orang yang mengganggunya ini, khususnya pada saat mereka memukul-mukul dinding rumah dan menggedor pintu, Bibi Nurani telah siap untuk menghadapi mereka. Bagi bibi Nurani, tindakan mereka sudah sangat tidak sopan dan mengintimidasi. Apalagi mereka seringkali datang dalam keadaan mabuk, karena bau alkohol tercium kalau mereka datang. Namun, pada saat situasi genting tersebut ia dibantu oleh seorang laki-laki tua Dayak yang bernama Pak Bunyamin. Bibi Nurani mengatakan bahwa laki-laki tersebut berasal dari sebuah “ES EL EM” (maksudnya LSM, atau organisasi non pemerintah) yang membantu orang-orang Madura yang baru kembali dari pengungsian. Menurut bibi Nurani, lelaki penolong tersebut berasal dari wilayah Buntok.

Berbeda dengan orang-orang Dayak lainnya, Bibi Nurani menganggap bahwa Pak Bunyamin mempunyai maksud untuk menolong orang-orang Madura. Pak Bunyamin mengusir dan mengancam orang-orang yang mengganggu bibi Nurani. Setelah ancaman dari Pak Bunyamin tersebut, orang-orang ini tidak pernah datang lagi. Ketika saya mencoba bertemu dengan Pak Bunyamin dan kawan-kawannya, mereka adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam kegiatan LSM untuk resolusi konflik dengan orang-orang Madura. Mereka pernah bekerja sama dengan beberapa ornop internasional yang bekerja untuk resolusi konflik. Pak Bunyamin sendiri tinggal di kecamatan lain di luar kota Sampit. Ia memang berasal dari wilayah Buntok, kabupaten Barito Utara, Daerah Aliran Sungai Barito. Ia datang ke Sampit sejak tahun 1970-an, bekerja di berbagai perusahaan kayu, hingga akhirnya pensiun⁷

⁷ Keberadaan Pak Bunyamin tetaplah misteri bagi saya. Karena salah seorang aktivis LSM lainnya yang sangat dekat dengan Pak Bunyamin --- bahkan masih mempunyai hubungan kekerabatan mengatakan kepada saya bahwa Pak Bunyamin sebetulnya terlibat dalam kerusuhan tersebut. Pak Bunyamin tahu siapa-siapa saja orang Dayak yang memimpin pengusiran dan pembantaian terhadap orang-orang Madura. Pak Bunyamin tahu gerakan orang-orang Dayak ini dipimpin oleh tiga orang *desertir* tentara, termasuk Emil, bos dari Sendong. Dugaan saya keterlibatan Pak Bunyamin dalam kerusuhan ini karena terbunuhnya Sendong, orang sederah dengan Pak Bunyamin. Pada sisi lain, ketika Pak Bunyamin dianggap sebagai “pahlawan” oleh orang-orang Madura, Ia justru menguasai

Pak Sakira, suami Bibi Nurani berbeda sikap terhadap Pak Bunyamin. Pak Sakira berterima kasih kepada pak Bunyamin, tetapi ia menganggap Pak Bunyamin tidak tulus. Pak Bunyamin pernah mengumpulkan *foto copy* KTP dari orang-orang Madura yang baru kembali dari pengungsian. KTP tersebut dikumpulkannya sebagai tanda bukti ikut serta dalam program bagi orang Madura yang kembali ke kota Sampit. Tetapi program itu tidak pernah direalisasikan. Pak Sakira menganggap mungkin proyek ini untuk keuntungan pak Bunyamin saja.

Pendapat Bibi Nurani tentang hubungan antar etnis dan agama yang ada di Sampit beragam. Ia mengakui sangat membenci orang-orang (Dayak) yang sering mengganggunya, termasuk memintanya sejumlah uang. Tetapi ia juga mengakui beberapa orang Dayak membantu keluarganya. Ia juga kecewa dengan kepala sekolah madrasah yang jelas-jelas sebagai sesama muslim seharusnya saling menolong bagi yang sedang dilanda kesulitan. Pertolongan justru didapatkannya dari orang yang beragama Kristen yang memberikannya tempat untuk berdagang hingga saat ini.

Warung pencok bibi Nurani terletak di jalan yang strategis, yang menghubungkan Sampit dengan Pangkalan Bun. Berbagai jenis kendaraan, termasuk berbagai truk pengangkut kayu, truk tangki bahan bakar, dan berbagai kendaraan pengangkut lainnya. Letak warung yang strategis ini dimanfaatkan oleh beberapa orang yang mengaku dirinya wartawan dan LSM⁸ untuk mengamati kegiatan pengangkutan kayu

tanah milik orang Madura yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Tanah-tanah tersebut kini dikuasai oleh orang-orang Dayak tanpa membayar kepada pemiliknya yang orang Madura.

⁸ Wartawan dan LSM lokal dalam konteks di Sampit (dan wilayah lainnya di Kalimantan Tengah) telah mengalami penyempitan arti yang negative. Oknum-oknum dari kedua jenis profesi ini seringkali mendatangi lembaga-lembaga pemerintah dan pengusaha untuk melakukan pemerasan. Lembaga pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan propinsi dan kabupaten/kota yang seringkali diancam oleh oknum wartawan dan LSM terkait dengan *mark up* proyek pemerintah. Sedangkan pihak swasta adalah rekanan dari proyek pemerintah, perusahaan yang membeli bahan bakar bersubsidi secara illegal dan kayu illegal. Setelah kerusuhan, oknum dari kedua organisasi ini semakin banyak dan seringkali menggunakan identitas lokal ke-Dayak-an.

illegal dan penjualan BBM illegal kepada industry. Orang-orang ini biasanya membawa kamera atau *handy cam* untuk memotret atau mengambil gambar angkutan yang memuat barang-barang illegal tersebut. Hasil foto atau video tersebut kemudian dipakai untuk memeras pengusaha tersebut. Wartawan dan LSM yang seringkali mengusung identitas kedaerah ini menjadikan warung Pencok bibi Nurani sebagai markasnya. Padahal, pada tahun 2001, orang-orang Madura seperti ini yang diusir keluar dari Sampit.

Pergaulan keseharian antara bibi Nurani dengan para wartawan dan LSM ini terlihat sangat dekat. Bahkan beberapa kali terlihat beberapa orang wartawan dan LSM ini berbisik-bisik dengan Bibi Nurani, kemudian tertawa-tawa. Suatu kali saya melihat seorang dari antara mereka masuk ke bagian belakang warung yang agak tertutup dan membicarakan sesuatu dengan berbisik-bisik, kemudian tertawa-tawa dengan bibi Nurani. Kejadian-kejadian keseharian seperti ini menjadi kontras apabila dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan tahun 2001, yaitu suatu kondisi dimana relasi Dayak dan Madura mengeras menjadi konflik dan kemudian kekerasan antar etnis.

5.6. Pak Sadi : Tokoh Informal di Kalangan Masyarakat Madura

Pak Sadi adalah seorang tokoh kelompok orang-orang Madura yang kembali ke Sampit. Saya mendapatkan nama beliau dari paman saya yang pernah membeli lahan milik pak Sadi. Paman saya sendiri orang Jawa yang bekerja di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Berdasarkan informasi awal, pak Sadi adalah orang Madura yang cukup sukses yaitu mempunyai banyak tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain. Namun setelah kerusuhan, banyak tanahnya yang harus ia jual, termasuk tanah-tanah yang dikuasai oleh orang-orang lokal di Sampit

Sejak pertemuan pertama dengan pak Sadi saya merasakan adanya figur tokoh yang melekat padanya. Cara ia bertutur, kemudian dari cerita-cerita yang disampaikannya tampak bahwa ia adalah orang Madura yang tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut,

bahkan ia menganggap bahwa elemen-elemen tertentu dari orang Madura seperti IKAMA memang mempunyai andil yang besar terjadinya kerusuhan. Namun, ia juga bersikap kritis terhadap elemen tertentu dari orang Dayak yang juga mempunyai kontribusi dalam kerusuhan tersebut. Salah satu sisi cerita dari pak Sadi adalah, bagaimana pertemanannya dengan orang Dayak justru membantunya dalam proses kembali ke kota Sampit.

Rumah Pak Sadi terletak di wilayah jalan Pelita Barat, berdekatan dengan pompa bensin yang dimiliki oleh H Ismail, salah seorang tokoh Madura yang sekarang menetap di Banjarmasin setelah peristiwa kerusuhan. Rumah yang pak Sadi tempati sekarang ini, baru ia masuki lagi pada tahun 2004. Setelah ia mengungsi ke Madura antara tahun 2001-2004. Rumah yang ditempatinya masih terkesan rumah sementara, berdinding tripleks dan beratapkan seng. Tembok dan lantai yang tersisa terletak pada bagian dalam dan beranda rumah. Daerah tempat tinggalnya merupakan perkampungan orang-orang Madura di Sampit.

Ketika bertemu pada tahun 2008, usia pak Sadi 62 tahun. Ia kelahiran kabupaten Sampang. Pada tahun 1968 ia mendarat di kota Sampit, setelah sekitar 4 hari dan 4 malam berlayar dari pelabuhan Bring Koneng Sampang. Pada saat itu ia berangkat dengan 3 orang kawannya yang berasal dari satu desa, tetapi ketiga kawannya tersebut akhirnya kembali lagi ke Sampang dengan alasan keluarga. Pak Sadi sendiri pada saat meninggalkan Sampang sudah mempunyai isteri. Pada awalnya rencana Sadi adalah merantau ke Kalimantan Barat, tetapi tidak diperbolehkan oleh "mamaknya". Keterangan pak Sadi mengenai keinginannya untuk pergi Kalimantan Barat semakin memperkuat bukti daerah tujuan migran Madura ke wilayah Kalimantan fokus pada dua daerah, yaitu Kalimantan Barat (Pontianak dan Sambas) serta Kalimantan Tengah (Sampit dan Pangkalan Bun). Kalimantan adalah suatu *cebe deje* atau pulau di utara pulau Jawa bagi orang-orang Madura dalam kurun waktu yang sangat lama.

Motivasinya datang ke kota Sampit pada saat itu, karena mendengar dari kawan-kawan sekampungnya mengenai kota Sampit yang pada saat itu telah menjadi kota padat penduduk. Memang pada tahun-tahun tersebut, industri kayu nasional baru saja mulai, apalagi keberadaan Bruynzeel yang kemudian dinasionalisasi menjadi PT Perhutani telah ada di daerah tersebut sejak tahun 1947. Sehingga aktivitas penebangan dan industri kayu masih sangat ramai.

Tahun 1968 Pak Sadi pernah mendengar tentang Sampit, sebagai kota yang menjanjikan banyak pekerjaan. Awal kedatangannya ke Sampit dimulai dengan bekerja sangat keras. Sekitar tahun 1968-1969 ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya buruh serabutan. Walaupun pak Sadi mengaku mempunyai keahlian sebagai tukang tukang kayu.

Tahun 1968 kota Sampit masih sepi, masih berupa hutan. Bupati saat itu adalah Rahmat orang Jawa. Orang Madura sudah banyak pada saat itu. Orang Madura banyak yang bertani tanaman *Konjoi* (ubi kayu). Pucuk daunnya dijual kepada orang Banjar. Pak Sadi mengungkapkan situasi pada saat itu "enak cari makan". Hasilnya kemudian dijual ke kedai makan orang Banjar.

Menurut pak Sadi, tahun 1968 Bruynzeel masih beroperasi. Lokasi pabrik pengolahannya di Taman Bunga yang sekarang menjadi Inhutani. Pada saat itu banyak pekerjanya adalah Orang Madura, karena Orang Madura ini tahan cape dan tahan kerja berat. Orang Madura tidak malas. Manajer Bruynzell kebanyakan dari luar (Korea), memang ada perwakilan orang Jakarta. Pak Sadi tidak mengetahui kalau Bruynzeel sebagai sebuah perusahaan yang mengendalikan perusahaan kayu tersebut telah dinasionalisasi sejak tahun 1955 menjadi PT Sampit Dajak. Tahun 1968 perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi PT Perhutani.

Pada saat datang tahun 1968, Orang Dayak banyak yang tinggal di pinggir sungai, seperti di daerah Baamang. Orang Dayak di wilayah hulu saja yang masih tinggal di

rumah panjang (*rumah betang*). Orang Dayak pada saat itu tinggal di gubuk-gubuk. Pada awal kedatangannya Sudi tidak bisa bahasa Dayak (*bahasa ewen*), hanya bisa Banjar. Perbedaan Dayak dengan Banjar, Orang Dayak kebanyakan *Kresten* (Kristen) dan Kaharingan, sedangkan Banjar kebanyakan Islam. Pandangannya terhadap etnisitas Dayak disitu terlihat bahwa orang-orang Dayak adalah Kristen dan Kaharingan. Padahal, secara statistik memperlihatkan bahwa penduduk Sampit sebagian besar adalah orang-orang Dayak yang beragama Islam. Pada akhirnya Pak Sadi bisa berbahasa Dayak karena ia banyak berhubungan dengan orang Dayak untuk usaha kayunya.

Peluang usaha yang lebih besar terbuka, ketika itu awal tahun 1970-an terjadi apa yang disebut dengan *banjir kap*, yaitu penebangan kayu yang dilakukan oleh penduduk lokal yang dibeli oleh industri kayu dan usaha penggergajian kecil. Menurut pak Sadi, usaha kayu ini merupakan cara mencari uang yang paling mudah. Jumlah kayu masih sangat berlimpah di hutan-hutan. Caranya hanya tinggal meminta orang-orang lokal untuk menebang kayu, kemudian membayarnya, sesudah itu kayu di *milir* (dikirim melalui aliran sungai) ke wilayah hilir. Kemudian para pembeli di wilayah hilir sudah menunggu. Disebut *banjir kap*, karena proses membawa ke hilir tersebut dilakukan pada saat air di sungai banjir atau deras. Pada saat itu para pengumpul kayu dan pembeli sangat mudah didapat, karena industri penggergajian kayu sedang tumbuh pesat di kota Sampit. Kayu-kayu tersebut mengisi pasar kayu non-jati untuk pulau Jawa.

Narasi Kerusuhan

Dalam pandangan Pak Sadi, komplotan bajingan orang Madura di wilayah kecamatan Baamang menjadi pemicu kerusuhan. Kejadian keributan pertama kali terjadi di Baamang, yaitu orang Madura dibunuh lebih dulu oleh orang Dayak, kemudian orang Madura balas dendam dengan membabi buta. Orang-orang Madura yang terlibat dalam kerusuhan itu adalah bagian dari kelompok *bajingan* yang setiap bulan

mengadakan kesenian *ronggeng*. Bajingan ini mendukung orang yang *sugih*, kemudian mereka jadi merajarela. Bajingan dengan orang *sugih* bekerjasama. Orang Madura yang *sugih* mengumpulkan dana untuk perkumpulan. Pak Sadi diundang sebanyak 3 kali oleh IKAMA dan ia selalu menolaknya. Alasannya Pak Sadi tidak menyukai orang *sugih* yang sombong.

IKAMA di Sampit berdiri tahun 1998, anggotanya adalah *kaum sugih* dan *bajingan* di kota itu. Pak Sadi mengetahui bahwa IKAMA mempunyai rencana untuk membeli senjata untuk menguasai Sampit. Menurut Pak Sadi, gerakan orang-orang Madura ini kemungkinan melibatkan oknum kepolisian, seperti Polres Kotawaringin Timur yang dikuasai oleh Madura. Demikian berkuasanya orang-orang IKAMA, sampai-sampai ia mendengar informasi tidak boleh menahan orang-orang Madura tanpa seijin ketua IKAMA

Sedangkan dari pihak orang-orang Dayak, menurut Pak Sadi, politik orang Dayak kuat dan kompak. Pada hari Senin (*maksudnya tanggal 19 Februari 2001*). Ia mendengar telah ada kompromi antara orang Dayak dan Madura sehingga situasi dianggap aman. Pada sore hari orang Dayak minta para ketua Madura di Baamang untuk bertemu di hotel Rama⁹. Namun, belum sampai ke hotel Rama para tokoh Madura tersebut di kejar-kejar hingga terbunuh 3 orang. Padahal orang-orang Madura tidak membawa senjata apapun. Menurut Pak Sadi, orang Dayak yang terlibat dalam pembunuhan orang Madura di Sampit berasal dari pedalaman Kalimantan Barat, kota Buntok (Barito Utara), dan Kumai (Kotawaringin Barat)

Pada saat kerusuhan, Pak Sadi tidak melihat mayat ataupun orang yang berkelahi. Ia memang mendengar banyak orang Madura mati di pelabuhan, tetapi tidak pernah melihat mayatnya. Dulu tidak terpikir ada kerusuhan, paling hanya berkelahi, hingga

⁹ Pemilik Hotel Rama adalah Esra Pahan, tokoh Dayak di Sampit dan pengurus LMMDD KT di kota itu. Hotel Rama banyak dikenang pada masa kerusuhan karena dianggap sebagai markas dari para pejuang Dayak. Kisah lain yang sering dikaitkan hotel Rama adalah penemuan ratusan kepala manusia yang dipenggal pada saat kelompok “pasus” melakukan pencarian terhadap orang-orang Madura. Lihat, Gerry van Klinken, *Ethnic Fascism in Borneo*. Inside Indonesia no 68. www.insideindonesia.org/edition-68.

tidak terpikir akan dibuang ke Madura. Ketika polisi yang menyuruh Pak Sadi pergi dari rumahnya, ia menyangka paling lama 3 hari saja. Tetapi ternyata dibuang ke Madura. Perjalanan ke Madura dari pelabuhan Sampit dengan menumpang kapal perang ke pelabuhan Surabaya. Lama perjalanan sehari semalam. Kemudian Pak Sadi di karantina di Surabaya dan dipulangkan ke Madura. Pak Sadi masih mempunyai bidang tanah di kecamatan Banyuasin, kabupaten Sampang, kesana ia mengungsi untuk sementara.

Bagi pak Sadi, kerusuhan adalah masalah politik. Sebelumnya ada isu ibu kota Palangkaraya akan dipindahkan ke kota Sampit. Kemudian berembus rumor proses perpindahan dan pembangunan sarana fisik kota akan ditangani oleh orang-orang Madura yang *sugih-sugih*¹⁰ yang sudah menjalin kesepakatan dengan Bupati, Danres dan sebagainya. Tetapi “orang atasan” di Palangka Raya tidak menerima hal tersebut. Kalau dipindahkan, nantinya di Palangka Raya mau bikin apa. Karena lokasi Palangkaraya pegunungan dan akan ditinggalkan status ibu kotanya.

Pada saat rumor pemindahan ibu kota ini memanas, terjadi peristiwa di Kereng Pangi Katingan yang kemudian menjadi salahsatu pemicu kerusuhan Sampit. Pada saat itu bajingan Madura main judi sabung ayam dan minum-minuman keras. Lalu anak dari “ketua pengatur” ditempat itu, orang Dayak namanya Sindung yang berasal dari wilayah kecamatan Pundu dibunuh oleh orang Madura. Para pembunuh itu oleh ”ketua Madura” dikirim ke Madura. Apabila sudah dikirim ke Madura tidak bisa diambil lagi. Kemudian, ada keributan di Tanggar (sebelah Ilir Kuala Kuayan), antara orang Madura melawan Dayak, mati 2 orang Madura¹¹. Tuter pak Sadi,...”Setelah

¹⁰ Hingga sebelum kerusuhan, sektor jasa konstruksi skala besar di kabupaten Kotawaringin Timur dikuasai oleh pengusaha Madura. Mereka dikenal sebagai pengusaha konstruksi yang sangat berani berspekulasi. Mereka mau melakukan pekerjaan proyek pemerintah tanpa diberi uang muka terlebih dahulu. Para pengusaha konstruksi ini kebanyakan menjadi anggota IKAMA.

¹¹ Dalam berbagai kronologi yang dikeluarkan oleh kalangan elite Dayak. tentang peristiwa-peristiwa perkelahian antara orang-orangDayak dan Madura selalu diceritakan bahwa yang menjadi korbannya adalah orang-orang Dayak. Cerita ini tampaknya pekecualian.

rangkaian kejadian-kejadian itu, awalnya aman-aman saja. *Tau tau* pada *nyimpan* bom. Kemudian bupati datang minta tolong agar anak Madura jangan simpan bom !”

Menurut pak Sadi, anak Pak Ismail (tokoh IKAMA) bisa membeli bom sebanyak-banyaknya dari Kalbar untuk memanaskan situasi. Tetapi terjadi ledakan di dekat kuburan muslim yang mengakibatkan rumah hancur dan 3 orang perakit bom meninggal. Cerita yang beredar, pada saat itu ada yang akan merakit si bom, ketika anaknya datang dan menabrak si pemegang bom, kemudian meledak. Kejadiannya terjadi sebelum kerusuhan. Oleh sebab itu, menurut pak Sadi, kalau dugaan penyimpanan bahan peledak oleh orang-orang Madura, memang betul adanya

Oleh sebab itu ada keterkaitan antara peristiwa di Kereng Pangi dengan kerusuhan tanggal 18 Februari 2001 itu. Karena pembunuhan dimulai oleh orang Dayak di Baamang terhadap 3 bajingan Madura yang ahli judi sabung, yang diduga terlibat pembunuhan Sindung di Kereng Pangi. Sesudah itu diselidiki oleh orang-orang Madura dan diketahui bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang-orang Dayak. Kemudian mereka membalasnya.

Pak Sadi mengetahui, ada tugu kenangan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang Dayak terkait kerusuhan, yaitu adanya tugu di bunderan burung yang menghubungkan kota Sampit ke Pangkalan Bun. Tugunya terbuat dari kayu ulin. Tadinya mau digambarkan *arit* dan *mandau*, sebagai lambang senjata orang-orang Madura (*clurit*) dan Dayak (*mandau*). Tetapi tidak diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten. Selain itu ada kuburan massal yang dibagi dua untuk orang Dayak dan Madura. Kemudian pak Sadi ingat adanya pembantaian di Parenggean, yaitu ada 4 truk penumpangnya habis dibunuh. Mereka kena tipu, awalnya disangka aparat, padahal orang Dayak yang sedang melakukan *sweeping*.

Pasca kerusuhan, ketika Pak Sadi melihat rumah-rumah yang hancur, perasaannya biasa-biasa saja. Padahal ada beberapa orang Madura yang *stroke* melihat rumah

yang hancur. Beberapa orang Madura-Sampit banyak yang sakit jiwa di Madura. Pak Sudi sendiri kehilangan 2 rumahnya. Selain itu sepeda motor baru dibeli Rp 8 juta hanya laku Rp 3 juta saja

Pak Sadi Tidak menaruh dendam terhadap orang-orang Dayak. Karena ia menganggap bahwa orang Dayak tidak memusuhi dia, orang Dayak masih tetap baik, termasuk cara menegurnya ketika bertemu di jalanan.

Pak Sadi tinggal di Madura selama 3 tahun, ia kembali ke Sampit pada tahun 2004. Alasannya menunggu situasi di Sampit aman. Anaknya sudah lebih dulu ke Sampit, dan mengatakan masih ada keributan disana-sini. Tetapi setelah ada jaminan dari Pak Peledoi ia kembali. Kata Pak Sadi kepada Pak Peledoi¹², *“Saya itu ngga bisa mengikuti urusan kayak gini, karena saya Madura, sampeyan orang Dayak, sampeyan ditengah-tengah masyarakat sampeyan yang mengurus !*. Lalu mereka mengadakan kumpulan yang dihadiri oleh ketua RT yang berasal dari Banjar. Mereka membicarakan “ongkos menunggu”. Istilah “ganti rugi” tidak disukai oleh orang-orang Dayak yang menguasai rumah-rumah tersebut. Ongkos menunggu ini berkisar antara Rp 2,5 juta, Rp 3 juta dan Rp 8 juta (tergantung jenis penggantian seperti penyambungan listrik dan air bersih).

5.7. Pergi ke Madura, Pulang Ke Sampit

Rangkaian kekerasan antar etnis yang terjadi di Sampit berlangsung cukup lama. Setelah orang-orang Madura menguasai kota Sampit selama dua hari pada tanggal 18-19 Februari 2001, kemudian terjadi serangan balik yang dilakukan oleh orang-

¹² Pak Peledoi adalah orang Dayak yang berasal dari wilayah Kuala Kuayan, wilayah hulu kota Sampit. Ketika Pak Sadi mempunyai usaha jual-beli kayu, ia bertemu dengan Pak Peledoi di kampungnya. Hubungan mereka sangat akrab, bahkan Pak Peledoi menyebut Pak Sadi sebagai kakaknya. Seperti halnya Pak Bunyamin dalam kisah bibi Nurani, Pak Peledoi juga menguasai beberapa rumah orang Madura di kota Sampit. Alasannya apabila rumah-rumah tersebut tidak dijaga, pada saat kerusuhan akan dibakar atau dijajah oleh orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang Madura yang ingin mengambil kembali rumahnya, mereka harus membayar “uang menunggu”.

orang Dayak dari berbagai penjuru kota. Serangan balik dari orang-orang Dayak ini terjadi mulai tanggal 19 Februari 2001, dan berlangsung dalam waktu cukup lama hingga pertengahan bulan Maret 2001. Hasil dari serangan balik ini adalah terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang Madura di berbagai tempat, pengusiran dan pembakaran rumah-rumah orang Madura dan pengungsian masal orang Madura keluar kota Sampit.

Pada saat itu orang-orang Madura tidak mengetahui bahwa jumlah orang-orang Dayak di kabupaten Kotawaringin Timur sangat besar. Selain itu, solidaritas etnis Dayak pada saat itu sangat menguat karena menganggap bahwa terdapat ancaman yang besar dilakukan oleh orang-orang Madura. Cerita-cerita tentang meninggalnya keluarga Dayak yang dibakar hidup-hidup; cerita tentang “Sampit Sampang Kedua”; cerita tentang Gerakan Carok antar Pulau; serta berbagai kekejaman orang Madura menyebar kemana-mana dan membakar amarah orang-orang Dayak. Kisah-kisah perkelahian individual antara orang-orang Madura dan Dayak pada masa lalu, tiba-tiba dikisah-ulang sebagai cerita tentang kekejaman orang-orang Madura terhadap orang Dayak.

Serangan balik orang-orang Dayak ini ternyata salah sasaran, karena orang-orang Madura yang diindikasikan terlibat IKAMA atau ikut dalam kerusuhan kebanyakan sudah meninggalkan Sampit menuju Banjarmasin atau Pulau Jawa. Tokoh-tokoh yang sering disebut dengan “*kaum sugih*”, telah terlebih dahulu meninggalkan kota Sampit, setelah tahu akan adanya bantuan dari orang-orang Dayak dari luar kota Sampit. Tentu saja sangat mudah bagi *kaum sugih* ini, karena mereka mempunyai kendaraan dan uang yang memudahkan untuk bepergian kemana saja dengan cepat. Selain itu, mereka juga mempunyai rumah dan harta dimana-mana, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga *kaum sugih* ini banyak yang tinggal sementara di daerah Banjarmasin dan kabupaten Banjar, sebelum pergi ke Surabaya atau Madura.

Pengungsian besar-besaran orang Madura keluar dari Kalimantan Tengah mencapai jumlah yang sangat besar. Data yang tercatat oleh Satkorlak PBP Jawa Timur tercatat 22,171 KK yang terdiri dari 93,023 jiwa. Jumlah terbesar berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (66,901 jiwa dan 15,261 KK), Kota Palangkaraya (23,078 jiwa dan 6,218 KK), Kabupaten Kapuas (2,633 jiwa dan 585 KK), Kabupaten Kotawaringin Barat (328 jiwa dan 86 KK), Kabupaten Barito Utara (55 jiwa dan 12 KK) dan Kabupaten Barito Selatan (28 jiwa dan 9 KK) (LIPI, 2008 : 194)

Jumlah yang sangat besar ini tentunya merupakan gelombang migrasi terpaksa (*forced migration*) yang akan mempunyai permasalahan tersendiri di tempat tujuan, seperti ketersediaan permukiman yang layak; sekolah bagi anak-anak usia sekolah; pasokan kebutuhan sehari-hari; persoalan kejiwaan karena trauma akibat melihat atau mengalami kekerasan dan sebagainya.

Sebaliknya, arus balik para pengungsi internal yang kembali ke Sampit akan mempunyai permasalahan tersendiri. Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan dijelaskan tentang gelombang keempat dan kelima migrasi orang-orang Madura di sampit. Gelombang keempat adalah arus migrasi terpaksa keluar dari Sampit, khususnya ke wilayah pulau Madura. Sedangkan Gelombang kelima adalah, saat mereka kembali ke Sampit.

5.7.1. Terpaksa Pergi Ke Madura (2001-2003)

Penanda gelombang keempat ini adalah peristiwa kerusuhan pada bulan Februari 2001 yang bermula dari kota Sampit, dan kemudian menyebar ke kabupaten-kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah (lihat bab 4). Gelombang ini dapat disebut sebagai gelombang migrasi terpaksa (*forced migration*) dari orang-orang Madura ke luar wilayah Sampit dan wilayah Kalimantan Tengah. Berbeda dengan gelombang lainnya yang mempunyai durasi yang cukup panjang, yaitu sekitar 30 tahunan. Namun, dalam migrasi terpaksa ini karakter waktunya sangat singkat,

namun melibatkan jumlah orang yang sangat banyak dan melibatkan aparat negara yang jumlahnya sangat signifikan. Namun, dalam bagian ini, selain akan ditampilkan proses pengungsian orang-orang Madura keluar dari Sampit, terdapat berbagai cerita yang menggambarkan situasi manusiawi antara orang-orang Dayak maupun non-Dayak dari para tetangga orang-orang Madura yang merasa sangat berat ditinggalkan oleh orang-orang Madura.

Dalam bagian ini akan diangkat narasi-narasi tentang situasi saat-saat orang-orang Madura harus segera meninggalkan tanah dan rumahnya, tinggal di pengungsian sementara di Sampit, dikirimkan ke luar sampit, khususnya ke wilayah pulau Madura. Persepsi umum yang ada diluar orang-orang Madura, para pengungsi Madura itu sebetulnya tidak mengungsi ke pulau Madura tetapi “pulang kampung” ke pulau Madura. Persepsi ini terbangun karena pemahaman bahwa orang-orang Madura di Sampit adalah orang dari pulau Madura, atau minimal mempunyai kerabat di pulau Madura.

Kerusuhan Februari 2001 di Sampit ternyata tidak hanya berdampak di kota Sampit saja, tetapi terjadi pengungsian¹³ besar-besaran orang Madura ke beberapa daerah. Sifat dari migrasi terpaksa ini adalah orang yang terpaksa pindah tidak mempunyai banyak pilihan untuk memilih tempat tujuan. Berbeda dengan konsep migrasi swakarsa (*spontaneous migration*) yang selalu pilihannya berdasarkan daya penarik (*pull factors*) dan penekan (*push factors*). Mereka yang pindah karena memang harus segera pindah untuk keamanan jiwanya. Walaupun dalam banyak kasus, perpindahan secara terpaksa ini dilakukan tanpa meminta persetujuan dari orang yang harus pindah itu. Aparat keamanan maupun aparat dari pemerintah daerah seringkali

¹³ Dalam ranah kajian migrasi terpaksa (*forced migration*), istilah pengungsi mempunyai konotasi yang khusus, yaitu perpindahan orang-orang dari tempat asalnya secara terpaksa karena alasan politik, keamanan dan bencana ekologis dengan melintasi batas negara. Perpindahan yang terpaksa tanpa melintasi batas negara ini disebut dengan *Internally Displaced Persons* (IDP's) atau secara harfiah disebut dengan pengungsi lokal. Istilah pengungsi, pengungsi lokal maupun IDP's akan disebut secara bergantian dengan konotasi yang sama

melakukan tindakan paksa untuk membawa orang-orang pindah dengan alasan keamanan.

Pengungsian Terpaksa

Hampir semua orang Madura yang diwawancarai tentang proses pengungsian mempunyai jawaban yang hampir sama tentang kerusuhan, yaitu mereka tidak mengetahui adanya kerusuhan, tidak mengetahui secara pasti disebelah mana terjadi kerusuhan dan siapa yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Memang hampir semua orang Madura dan orang-orang di Sampit mengetahui adanya perkelahian di kota Sampit, tetapi tidak tahu pasti dimana letak perkelahiannya. Karena seperti yang ada dalam Bab IV tentang kronologi kerusuhan, perkelahian dan saling membakar rumah Dayak dan Madura terlokalisir di daerah yang sangat spesifik di daerah kecamatan Baamang.

Narasi Bibi Nurani sebagai seorang perempuan Madura, kelahiran Sampit yang tidak pernah mengetahui kampung orang tuanya di Madura, merupakan hal yang paling banyak terjadi di kalangan Madura-Sampit, yaitu orang-orang Madura kelahiran Sampit, khususnya generasi tahun 1965-1970'an. Kebanyakan orang-orang Madura di Sampit tidak mengetahui apa yang terjadi mulai tanggal 18 Februari 2001. Sekarang ini, kebanyakan dari mereka lupa tanggal berapa mulainya kerusuhan di kota Sampit, walaupun dalam berbagai tulisan tanggal 18-19 Februari adalah dua hari dimana kota Sampit "dikuasai" oleh orang-orang Madura yang melakukan *sweeping* terhadap orang-orang di kota Sampit. Selanjutnya, ketika orang-orang Dayak dari tempat lain datang ke Sampit untuk membantu orang-orang Dayak disana, mulai tanggal 19 Februari 2001, maka mulailah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Madura yang ada di kota Sampit.

Dari Rumah Menuju Pulau Madura

Narasi pengungsian adalah sebuah narasi tentang ke-tidaktahu-an dan ke-tidakpastian akan masa depan, termasuk situasi tentang penolakan-penolakan yang terjadi di tempat tujuan maupun di Sampit sebelum pengungsian berlangsung. Selain itu, dalam pengungsian yang bersifat masal, kebanyakan dari mereka adalah warga Madura yang tidak terlibat dalam perkelahian antar etnik, maupun yang selama ini tidak terlibat dalam organisasi IKAMA.

Kebanyakan orang-orang Madura, khususnya para informan menceritakan bahwa mereka dijemput oleh petugas keamanan di rumahnya atau di tempat persembunyian. Para petugas ini meminta orang-orang Madura untuk segera mengikuti mereka dan meninggalkan rumahnya. Banyak diantara orang-orang Madura ini tidak sempat berkemas-kemas atau membawa bekal pakaian yang secukupnya, karena perintahnya adalah untuk segera naik ke atas truk yang datang bersama petugas. Informasi yang diberikan oleh petugas pada saat itu tidak jelas. Kebanyakan dari mereka berpikir hanya sementara saja tinggal di barak pengungsian yang ada di kantor bupati Kotawaringin Timur, dan akan kembali kerumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu banyak yang tidak membawa bekal dan pakaian yang mencukupi.

Selama tinggal di barak pengungsian di kantor bupati itu, kebanyakan diantara mereka sangat tidak nyaman. Kondisi barak yang bersifat sementara, dengan keterbatasan air bersih, serta sanitasi yang buruk menjadi keseharian mereka. Tetapi mereka selalu ada harapan untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing, karena mereka awalnya hanya tahu perkelahian antara orang-orang Dayak dan Madura itu hanya bersifat sementara saja, kalau perkelahian itu selesai dan keadaan pulih mereka segera kembali ke rumah masing-masing.

Selain situasi fasilitas barak pengungsian yang tidak nyaman, tantangan lainnya yang cukup berat adalah ejekan-ejekan dari orang-orang dari luar barak pengungsian yang melakukan penghinaan kepada orang-orang Madura yang dianggap tidak tahu cara hidup di kota Sampit. Kemudian tantangan-tantangan untuk melakukan perkelahian

diluar barak pengungsian dan juga ejekan-ejekan bahwa mereka adalah orang-orang pengecut. Orang-orang Madura di pengungsian tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi, karena selama ini tidak pernah ada peristiwa-peristiwa disekitar mereka yang memperlihatkan adanya perkelahian antar etnis. Bagi orang-orang Madura, perkelahian berlatar *carok* memang terjadi di Sampit, tetapi antar orang Madura dan tidak melibatkan pihak lain. Jumlah pengungsi sebesar 87.698 orang yang dianggap sebagai angka resmi oleh Satkorlak memperlihatkan jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi jumlah penduduk Sampit berdasarkan angka resmi dari BPS. Hal ini dimungkinkan, karena pengungsi didatangkan dari daerah-daerah lainnya diluar kora Sampit, seperti Samuda, Seruyan dan wilayah-wilayah kecamatan di Kotawaringin Timur.

Barak pengungsian di kota Sampit pada awalnya adalah sebuah tempat sementara untuk tinggal dalam waktu yang singkat saja.. Mereka percaya kerusuhan yang terjadi hanya akan berlangsung secara singkat, karena yang terdengar hanyalah perkelahian-perkelahian antara orang-orang Madura dan orang Dayak. Perkelahian-perkelahian telah menjadi hal yang biasa bagi sebuah daerah pelabuhan dan kampung-kampung yang padat, seperti di daerah Baamang. Namun banyak orang-orang Madura yang tidak menyadari, kalau diluar barak pengungsian itu sedang terjadi suatu negosiasi yang alot antara tokoh-tokoh Madura dan tokoh-tokoh Dayak di berbagai tempat yang jauh, kebanyakan di pulau Jawa, termasuk Jakarta dan Surabaya. Nasib para pengungsi sedang ditentukan oleh mereka yang tidak terlibat langsung kerusuhan, dan tidak mendengarkan suara dan perasaan para pengungsi yang amat menderita.

Ketika sebagian besar orang-orang Madura di Sampit dalam kondisi penuh ketidakpastian, “perang pernyataan” antara elite Madura dan elite Dayak terjadi. Dari pihak elite Madura mengeluarkan beberapa pernyataan¹⁴, yaitu (1) Mendesak kepada pemerintah di Jakarta agar memberi sanksi yang keras terhadap suku Dayak karena telah melecehkan moral bangsa dan menghancurkan rasa persatuan dan kesatuan (2)

¹⁴ Hasil Pertemuan Ikatan Keluarga Madura Indonesia tanggal 2 Maret 2001 di Hotel Ibis, Surabaya.

Memberikan perlindungan kepada suku Madura khususnya agar tetap bersama-sama dengan suku lain di Kalimantan sebagai kesatuan bangsa Indonesia, (3) Menyediakan bahan makanan yang cukup serta memperhatikan kesehatan mereka selama di pengungsian dan secepatnya mengembalikan mereka ke daerah asalnya Sampit dan Palangka Raya, karena pada hakekatnya mereka adalah warga keturunan Madura (4) Menyerukan kepada suku Dayak agar tidak melakukan lagi tindakan biadab dan keji, karena perbuatan itu bukan merupakan ciri moral bangsa. (5) Memberikan peringatan keras kepada suku Dayak agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan tidak mengganggu lagi suku Madura yang berusaha dan bekerja di Sampit dan Palangka Raya (Kalimantan). (6) Mendesak kepada pemerintah daerah Kalimantan Tengah baik Provinsi maupun Kabupaten agar mengganti harta benda yang hilang dan habis dibakar termasuk menyediakan lapangan kerja serta menampung anak-anak dan perempuan keturunan Madura yang tidak berdosa sebagai akibat dari perlakuan orang Dayak yang biadab dan tidak berperikemanusiaan serta tidak bermoral. (7) Mengutuk sekeras-kerasnya bahwa tindakan pengusiran terhadap suku Madura keluar dari Kalimantan adalah merupakan tindakan yang sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Cara-cara seperti itu, bukan ciri moral bangsa Indonesia yang bersemboyan pada *Bhinneka Tunggal Ika* dan untuk itu kami mendesak kepada pemerintah untuk memberikan sanksi hukum yang seadil-adilnya kepada tokoh-tokoh suku Dayak atau aparat pemerintah daerah Kalimantan yang melakukan provokator.

Hanya berselang empat hari setelah pernyataan pihak Madura, pihak elite Dayakpun memberikan pernyataan sikap¹⁵ yaitu (1) Mendukung keinginan warga Madura dalam situasi konflik tersebut untuk mengungsi (evakuasi) dan juga mendapat persetujuan dari Pemenritah Daerah Kotawaringin Timur maupun Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Evakuasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan konflik antar keduabelah pihak (*cooling down*), melakukan penyelamatan jiwa guna mengurangi korban dan menciptakan rasa aman kedua-belah pihak. (2)

¹⁵ Hasil Pertemuan DPRD Propinsi Kalimantan Tengah dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Kalimantan Tengah di Palangka Raya tanggal 6 Maret, 2001.

Dalam jangka pendek warga etnis Madura harus keluar dari wilayah Kalimantan Tengah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif, seraya berupaya mencari langkah-langkah rekonsiliasi yang arif dan bijaksana menuju integrasi daerah maupun integrasi nasional. (3) Disarankan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya secara benar dan bertanggung jawab terhadap akar konflik antara warga Dayak dengan warga Madura, terutama dalam menghadapi pertemuan-pertemuan atau dialog-dialog yang bernuansa rekonsiliasi, maka diminta kepada pihak pemerintah daerah Kalimantan Tengah menerbitkan “buku Putih” sebagai media publikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat luas, guna mendapatkan pengertian pemahaman yang benar tentang akar konflik kedua warga yang bertikai. Buku putih tersebut hendaknya berisikan tentang hal sebagai berikut : *pertama*, Sekilas konflik warga Dayak pada masa lampau sebelum Rapat damai Tumbang Anoi tahun 1894. *Kedua*, uraian singkat budaya Dayak menuju peradaban moderen kemanusiaan melalui perjanjian Tumbang Anoi. Dalam hal ini keterbukaan warga Dayak terhadap etnik lain dan pemberlakuan hukum adat untuk menyelesaikan konflik. *Ketiga*, akar sumber konflik dan peristiwa konflik antara etnis Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Tengah. *Keempat*, konsep pemikiran kedepan penyelesaian konflik menuju integrasi daerah maupun nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kelima*, aneka aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah (Dayak dan etnis lain), di luar etnis Madura. *Keenam*, penutup dan lampiran yang berisikan bukti peristiwa konflik dan isi perjanjian perdamaian. (4) Mendorong dan menghimbau kepada aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan hukum yang cepat dan kongkrit terhadap warga etnis Madura yang menyimpan, memiliki, menyebarkan dan menggunakan bom (bahan peledak) selama ini di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Begitu juga terhadap pelaku pembunuhan warga etnis Dayak yang dilakukan oleh warga etnis Madura baik secara kelompok maupun perorangan diambil tindakan hukum secara tegas, tuntas, termasuk pelaku utama atau penggerak pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2001 di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kedua bentuk pernyataan tersebut diatas memperlihatkan bagaimana elite-elite, baik Madura maupun Dayak secara tegas menyatakan bahwa permasalahan ini sudah menjadi permasalahan kolektif antara orang-orang Dayak maupun orang Madura. Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh kalangan elite Madura dengan menyebutkan langsung nama etnis Dayak dan tindakan-tindakan yang dianggap tidak beradab. Pada sisi lain, elite Dayak melihat perlu adanya pengungkapan fakta yang sebenarnya mulai dari akar, penyebab dan penyulut terjadinya kekerasan antar etnis. Menjadi menarik, ketika pengungkapan kebenaran (*fact finding*) tidak hanya menarik garis kesejarahan pada penyebab konflik kekinian, melainkan ditarik jauh sebelumnya pada peristiwa Tumbang Anoi tahun 1894 yang oleh kalangan elite Dayak dianggap sebagai “Pakat Dayak Pertama”, atau Kebangkitan identitas orang-orang Dayak. Konstruksi relasi antara “Tumbang Anoi” tahun 1894 dengan peristiwa Februari 2001 terletak pada budaya Dayak yang mengenal aturan dan tradisi untuk menegakkan perdamaian. Kemudian ternyata perdamaian seperti itu dilanggar oleh orang-orang Madura. Dengan demikian ketika tindakan pemenggalan kepala dilakukan, hal itu terkait dengan penggunaan kembali tradisi lama karena adanya pelanggaran terhadap adat orang-orang Dayak.

Perang pernyataan antara elite-elite Dayak dan Madura tidak memberikan situasi yang lebih baik bagi para pengungsi. Para pengungsi yang ada di barak pengungsian di Sampit kemudian dipindahkan ke pulau Jawa dan Madura, sebagian besar ke Pulau Madura. Asumsi pemindahan paksa ini sangat sederhana, yaitu untuk menyelamatkan jiwa orang-orang Madura dari amukan orang-orang Dayak; selain itu rumah, bangunan dan aset orang-orang Madura sendiri kebanyakan dibakar. Selain itu, asumsi lainnya adalah, agar terjadi *cooling down* di Sampit dan beberapa daerah

lainnya di Kalimantan Tengah. Namun, tidak ada suatu batasan waktu *cooling down* untuk berapa waktu dan bagaimana jaminan terhadap aset-aset orang-orang Madura¹⁶

Namun, dalam beberapa wawancara dengan orang-orang Dayak, tidak semua pembakaran dilakukan karena kemarahan orang-orang Dayak. Terdapat kasus-kasus dimana pembakaran rumah itu dilakukan oleh para tetangga yang ingin menyelamatkan jiwa orang Madura, agar orang-orang Madura tidak kembali ke tempat asalnya pada saat kerusuhan masih berlangsung, karena ada kemungkinan dibunuh oleh orang-orang yang marah.

Narasi-narasi Pengungsi di Tanah Madura

Seperti yang disebutkan terdahulu, pengungsi lokal adalah mereka yang terpaksa harus pergi ke tempat lain tanpa diberi kesempatan untuk melakukan pilihan. Berbeda dengan migrasi sukarela (*voluntary migration*) dimana pilihan tempat tujuan dan cara mencapai tempat tujuan ditentukan sendiri oleh orang atau kelompok yang akan melakukan migrasi, yaitu mencari tempat-tempat yang dianggap paling dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan kenyamanan secara sosial dan kultural.

Oleh sebab itu, dalam migrasi sukarela biasanya terjadi gejala migrasi berantai (*chain migration*), yaitu orang yang pindah ke tempat tujuan yang baru biasanya akan mencari tempat tinggal dan ditampung di rumah kerabat atau orang-orang satu kampungnya.

Namun, dalam kasus migrasi terpaksa, karena mengungsi akibat kekerasan antar etnis semuanya berada diluar kehendak si pengungsi. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, namun dipindahkan oleh pemerintah ke tempat yang tidak mereka sukai. Tidak ada *chain migration*, dimana mereka boleh memilih tempat tinggal yang paling

¹⁶ Hal ini berbeda dengan kasus di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tempat terjadinya kekerasan antar etnis Melayu dengan Madura. Pemerintah Kabupaten Sambas mengeluarkan Peraturan Daerah yang melindungi aset-aset orang Madura ini.

aman dan nyaman, namun mereka harus tinggal di barak pengungsian yang jauh dari aman dan nyaman secara fisik maupun psikologis. Narasi dari Bibi Nurani memberikan konfirmasi mengenai nasib pengungsi lokal akibat kekerasan antar etnis. Pertama, ada instruksi untuk segera berangkat ke pengungsian di kantor bupati Kotawaringin Timur. Kedua, ada instruksi untuk berangkat ke pulau Jawa dengan menggunakan kapal. Ketiga, dari kapal di pelabuhan Surabaya tersebut, kemudian dibawa dengan perjalanan darat ke kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Terdapat persepsi bahwa para pengungsi orang-orang Madura apabila dikembalikan ke pulau Madura tidak akan membawa persoalan terlalu besar, karena para pengungsi Madura ini dikembalikan ke kampung halamannya.

Persepsi orang Madura dikembalikan ke kampung halamannya pada tingkat kolektif bisa saja mengandung kebenaran. Namun ketika menyelami kasus per kasus, maka persepsi itu terbantahkan. Pengalaman bibi Nurani ketika diungsikan ke kecamatan Ketapang di Kabupaten Sampang merupakan sebuah narasi yang cukup menarik. Ia merasa terasing di barak pengungsian di Ketapang itu. Bibi Nurani adalah orang Madura kelahiran Sampit (Kotawaringin Timur), sedangkan suaminya adalah orang Madura kelahiran Kapuas, keduanya kabupaten di Kalimantan Tengah. Keduanya merasa terasing di pulau Madura, pulau yang seharusnya menjadi kampung halaman yang dapat menerima mereka setelah mengalami tekanan pada saat tinggal di Sampit. Bibi Nurani dan suaminya merasakan ketidak-ramahan orang-orang Madura di Kabupaten Sampang yang justru mereka mempunyai persepsi bahwa orang-orang Madura dari Sampit adalah mereka yang seringkali membuat keributan dan pada akhirnya menyusahkan orang-orang di pulau Madura dengan kedatangan secara besar-besaran dan membuat citra buruk bagi orang-orang Madura secara keseluruhan. Kisah keluarga bibi Nurani, adalah sebuah narasi tentang “orang kalah” yang mereka alami pada saat kerusuhan dan pada saat pengungsian di pulau Madura. Padahal keluarga ini sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk melawan orang-orang Dayak. Sebagai pedagang, bibi Nurani selalu melihat orang-orang di Sampit, termasuk orang Dayak adalah kosumen yang memberinya daya hidup.

Sedangkan bagi suaminya yang penarik becak, orang-orang di Sampit adalah para pelanggan becaknya, tempat dimana dia mencari nafkah. Jadi sangat tidak mungkin mereka memusuhi orang-orang yang menjadi sandaran hidupnya.

Narasi bibi Nurani ketika ada di pulau Madura, adalah kisa-kisah yang banyak dijumpai pada perempuan-perempuan pengungsi terpaksa yang bukan hanya menanggung beban untuk dirinya sendiri, tetapi juga perannya sebagai ibu yang harus memastikan anak-anaknya mendapatkan makanan dan minuman yang cukup dan layak di tempat pengungsian, serta air bersih yang selalu kekurangan. Selain itu, bibi Nurani bukan hanya mengasuh ketiga anak-anaknya, ia juga dititipi anak perempuan dari adik perempuannya yang meninggal di tempat pengungsian. Sebagai seorang perempuan, yang karena pekerjaannya sendiri dan dari penghasilan suaminya mampu mempunyai rumah dengan ukuran yang layak dan tanah-tanah pertanian yang cukup luas di Sampit; maka apa yang dialaminya ketika tinggal di barak pengungsian di Ketapang Madura selama tiga tahun merupakan situasi yang cukup sulit baginya. Ia mengeluhkan kondisi tempat tinggal di tempat pengungsian yang sangat tidak layak, dengan ukuran 3x3 m untuk setiap keluarga. Kemudian udara pulau Madura yang sangat panas pada siang hari membuat ketidak-nyamanan tersebut bertambah.

Namun, ironi yang terjadi dalam pengurusan pengungsi lokal Madura di Kabupaten Sampang ini menyakitkan para pengungsi, yaitu beredar rumor terjadinya penyalahgunaan keuangan (korupsi) oleh para pengurus “Paguyuban Pengungsi” yang memotong uang jatah hidup pengungsi maupun uang yang seharusnya diberikan kepada para pengungsi untuk pulang kembali ke Sampit. Ironi ini muncul, ketika para pengurus pengungsi itu adalah orang-orang Madura yang juga yang tergabung dalam “Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah”. Korupsi tersebut bersifat sangat sistematis, karena diduga melibatkan bupati dan kepala desa. Selain itu juga berbagai korupsi lainnya, seperti korupsi penggunaan hasil bunga dana pengungsi.

Berbeda dengan narasi Bibi Nurani yang merupakan contoh orang kalah pada saat terjadinya kerusuhan hingga tiba di Madura. Cerita tentang Mashad¹⁷ adalah sebuah narasi tentang bagaimana orang-orang Madura yang berstatus sebagai PNS, walaupun pada satu saat situasi sebagai orang kalah terjadi pada mereka, yaitu terusir dari Sampit dan kehilangan pekerjaan dan jabatan di kantornya. Termasuk kehilangan untuk sementara hak-halnya sebagai pegawai negeri sipil.

Mashad, seperti halnya Bibi Nurani, adalah seorang dari etnis Madura kelahiran Sampit, namun belum pernah menginjakkan kakinya di pulau Madura, sebelum kerusuhan terjadi. Sama seperti Bibi Nurani, ia tidak pernah membayangkan mengenai seperti apa pulau Madura itu. Selain itu, Mashadpun tidak pernah membayangkan akan terjadi kerusuhan yang besar seperti itu, walaupun perkelahian di kota Sampit seringkali terjadi, tetapi perkelahian yang tidak ada kaitannya dengan masalah etnis. Sebagai seorang yang bekerja sebagai juru penerang (jupen) untuk pemerintah kabupaten, Mashad mempunyai kesempatan untuk datang ke seluruh wilayah kabupaten Kotawaringin, termasuk ke wilayah-wilayah pedalaman yang didominasi oleh etnik Dayak. Oleh sebab itu, ia juga menguasai bahasa Banjar dan Bahasa Ngaju yang memudahkannya berkomunikasi dengan orang-orang di pedalaman. Dalam tugasnyapun, orang-orang tidak memperdulikan latar belakang etnis Mashad yang orang Madura.

Dalam situasi yang kacau di kota Sampit pada saat kerusuhan – seperti halnya bibi Nurani --, petugas memberitahukannya untuk pergi ke tempat pengungsi di kantor Bupati hanya untuk sehari saja, kemudian bertambah menjadi seminggu dan kemudian dikirimkan oleh kapal perang ke Surabaya dan selanjutnya ke Sampang Madura. Pengalaman traumatis yang dialami oleh Mashad, ia dan isterinya terpisah pada saat pemberangkatan pengungsi, namun pada akhirnya bertemu di Surabaya.

¹⁷ Kisah tentang Mashad tidak dibahas secara mendalam pada bab 5, karena ia tinggal di Madura. Pada kasus Mashad relasi pasca kerusuhan dengan orang-orang di Sampit tidak terjadi secara intensif.

Namun, berbeda dengan Bibi Nurani yang tidak mempunyai kerabat, Mashad mempunyai kerabat dari isteri yang tinggal di kota Sampang. Memang tidak secara otomatis Mashad dapat langsung bekerja di Madura, karena proses birokrasi yang harus dilaluinya cukup panjang. Selain itu, Mashad tadinya masih ingin bekerja di Sampit, apalagi ia sudah merasakan dirinya sebagai orang Sampit, dimana rumah, pekerjaan, kerabat dan kawan-kawannya semua ada di Sampit. Selain itu sebagai PNS, hak-haknya sebetulnya tidak hilang. Pada akhirnya Mashad bekerja di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang. Pekerjaannya di bagian administrasi. Ketika berkunjung ke rumahnya di kota Sampang Madura, ia menempati rumah yang cukup baik untuk ukuran orang-orang di kota Sampang. Pada saat dikunjungi, iapun kebetulan sedang mengkhitan anak laki-laknya dalam pesta yang cukup besar untuk ukuran acara di kompleks perumahannya. Cerita Mashad, adalah sebuah narasi tentang bangkitnya kembali orang-orang Madura eks-Sampit yang sebelumnya mengalami keterpurukan yang hebat akibat kerusuhan.

5.7.2 Pulang Ke Sampit (2003-sekarang)

Penanda dari gelombang migrasi ini adalah arus balik orang-orang Madura untuk kembali ke Sampit. Proses pengembalian orang-orang Madura ke Sampit ini tidak terjadi melalui gelombang kembalinya orang Madura secara besar-besaran dan terkordinasi. Kembalinya orang-orang Madura ke Sampit justru terjadi karena kuatnya relasi etnisitas antara orang-orang Madura dan orang lokal (terutama dengan orang Dayak) yang memungkinkan orang-orang Madura untuk dapat kembali ke tempat tinggalnya di kota Sampit. Sub judul bagian ini adalah “Pulang ke Sampit”. Frasa “Pulang ke Sampit” saya dapat di sebuah desa di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Ketika itu saya datang ke sebuah desa yang 100% penduduknya mempunyai rumah di Sampit, namun banyak rumah yang kosong. Ketika saya bertanya mengapa rumah-rumah banyak yang kosong, jawabannya adalah penghuninya sedang pulang ke Sampit. Kemudian di beberapa tempat saya juga mendapatkan jawaban yang sama. Bagi saya, jawaban ini mempunyai makna yang

penting yaitu Sampit merupakan habitus bagi orang-orang Madura-Sampit ini, karena memang mereka lahir dan dibesarkan di kota Sampit. Walaupun bagi para elite Dayak, mereka mengatakan bahwa orang Madura adalah “pendatang” di kota Sampit yang harus belajar beradaptasi dengan orang-orang Dayak yang menjadi *host* di Sampit.

Oleh sebab itu, saya sependapat dengan sebagian dari kesimpulan disertasi Dr Sidik Usop yang mengatakan bahwa kerusuhan dan kekerasan etnis yang terjadi di Sampit adalah suatu permasalahan yang bersifat struktural, yaitu peminggiran orang-orang Dayak dari arena ekonomi dan politik di Sampit dan Kalimantan Tengah. Namun menempatkan orang-orang Madura sebagai “pendatang” dan orang-orang Dayak sebagai *host* dari habitus bernama Sampit terlalu simplistik. Karena pada dasarnya kedua kelompok etnik ini pada tingkat kolektif bisa menjadi *host* maupun pendatang dalam konteks kota Sampit. Mengamati gelombang-gelombang migrasi sejak tahun 1920-an, terdapat kelompok-kelompok orang Madura yang mempunyai sejarah asal-usul di kota Sampit, khususnya yang keturunan dari migrant yang datang pada tahun 1920-an. Pulang ke Sampit, bagi saya adalah pernyataan tentang siapa *host* dan pendatang di kota itu.

Walaupun pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk pemulangan pengungsi ke daerah-daerah asal konflik, seperti Sambas dan Pontianak (Kalimantan Barat) dan Sampit serta daerah lainnya di Kalimantan Tengah, namun pemulangan ini tidak dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikordinasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Khusus untuk Kalimantan Tengah, telah ada upaya-upaya yang secara sistematis membatasi pemulangan pengungsi ini melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda no 9 tanggal 6 November 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik (PPDKE). Suatu Perda yang cukup menarik untuk dikaji, mengingat tidak adanya wakil orang-orang Madura di DPRD pada saat itu, tetapi Perda itu membicarakan nasib orang Madura.

Selain itu, dengan semakin menguatnya perjuangan identitas di kalangan masyarakat Dayak¹⁸ setelah kerusuhan, maka berbagai aturan-aturan di daerah seperti Perda (Propinsi dan Kabupaten/Kota) serta Peraturan Gubernur semakin mempersempit ruang gerak bagi orang-orang Madura untuk kembali pada posisi semula di kota Sampit, seperti adanya Peraturan Gubernur tentang *Kademangan*, yaitu suatu institusi pemerintahan adat di Kalimantan Tengah, dimana salah satu syarat untuk menjadi kepala wilayah adat tersebut haruslah dari etnis Dayak. Kemudian Peraturan Daerah tentang tanah-tanah adat semakin menegaskan kepemilikan adanya pada orang-orang Dayak.

Narasi Pertemanan dalam pengembalian pengungsi

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan kabupaten-kabupaten lainnya untuk memulangkan pengungsi Madura secara alamiah, berarti meminimalkan peranan pemerintah daerah dalam pengembalian pengungsi tersebut. Bahkan fungsi pemerintah di daerah menjalankan fungsi pengawasan terhadap gelombang kembalinya orang-orang Madura ke Sampit. Fungsi pengawasan ini dapat dilihat dari adanya kriteria-kriteria bagi orang Madura untuk dapat kembali ke Sampit. Kriteria itu antara lain orang Madura yang diterima kembali kalau orang tersebut menikah dengan orang lokal di Sampit, berstatus PNS, tidak terlibat organisasi IKAMA dan tidak terlibat dalam kerusuhan.

Karena adanya kebijakan pengembalian pengungsi yang bersifat alamiah ini, justru membuktikan adanya relasi pertemanan maupun ketetangaan yang kuat antara orang-orang Dayak dan Madura dalam berbagai kasus. Kenyataan ini semakin

¹⁸ Menguatnya gerakan sosial berbasis etnik pasca orde baru sebetulnya bukan hanya terjadi di Kalimantan Tengah saja, tetapi diseluruh Indonesia. Namun untuk konteks Kalimantan Tengah, faktor “kerusuhan” menjadi penguat kesadaran identitas ini. Selain pada etnis Dayak, beberapa elemen dari etnis Banjar juga membuat organisasi bernama “*Naga Banjar*”, kata Naga berasal dari “*Nanang Galuh*” atau pemuda dan pemudi Banjar. Kelompok ini kebanyakan berasal dari kalangan pedagang asal etnis Banjar yang ada di Kalimantan Tengah.

membuktikan bahwa pada tataran masyarakat biasa tidak terjadi konflik dan kekerasan antara orang-orang Dayak dan orang-orang Madura.

Narasi Kepala Desa Dayak dan Warga Maduranya

Desa Petak Danum secara administratif berada di lingkungan kecamatan Cempaga, sekitar 48 kilometer dari kota Sampit. Pada saat kerusuhan Februari 2001 terjadi, desa ini menjadi lokasi yang strategis untuk menyusup masuk ke kota Sampit. Selain jalan darat yang menghubungkan desa ini dengan Sampit, jalur sungai yang menghubungkan wilayah hulu dengan kota Sampit juga menjadi jalan penting untuk dapat memasuki wilayah kota Sampit.

Menurut keterangan kepala desa, sebagian besar penduduknya adalah orang Dayak yang dalam hasil sensus penduduk di kecamatan Cempaga memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduknya adalah apa yang disebut dengan “Dayak Sampit”, dengan ciri sebagian besar penduduknya beragama Islam. Namun masyarakat Petak Danum sendiri tidak melabel diri sendiri sebagai Dayak Sampit, walaupun diakui dari segi dialek yang digunakan lebih mendekati dialek orang-orang di Sampit. Selain sebagian besar penduduknya beragama Islam, di desa tersebut juga terdapat sebuah Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Gereja Katolik Roma. Penganut Kaharingan juga masih ada tetapi dalam jumlah yang tidak signifikan apabila dibandingkan dengan Islam dan Protestan.

Komunitas Madura di desa ini tinggal pada sebuah “pulau” yang agak terpencil dari pusat desa, yang disebut dengan wilayah Teluk Taretan. Untuk mencapai lokasi tersebut jalan yang tercepat adalah menggunakan perahu bermotor dari Kota Besi, kecamatan tetangga dari kecamatan Cempaga. Namun demikian, menggunakan perahu bermotor dari Petak Danumpun dapat dilakukan, tetapi jalannya agak memutar

Mengingat letaknya yang strategis sebagai jalan masuk dari wilayah Palangkaraya dan Katingan menuju kota Sampit, peranan desa Petak Danum pada saat kerusuhan maupun pasca kerusuhan menjadi sangat penting. Menurut penuturan penduduk, pada saat kerusuhan terjadi wilayah Petak Danum ibarat zona damai antara orang-orang yang hendak ke Sampit untuk membantu masyarakat Dayak setempat, maupun orang-orang Madura yang hendak mengungsi ke wilayah Kalimantan Selatan. Wilayah desa Petak Danum menjadi tempat *transit* diantara kedua kelompok yang bertikai tersebut, namun tidak terjadi upaya saling serang diantara kedua kelompok tersebut ketika mereka sesaat tinggal di wilayah Petak Danum. Bahkan yang terjadi masyarakat lokal Petak Danum menyediakan rumahnya ditinggali oleh orang-orang Madura yang hendak pergi ke wilayah Palangkaraya dan seterusnya ke Banjarmasin.

Penduduk lokal yang bukan orang Madurapun berusaha melindungi harta milik orang-orang Madura yang ditinggalkan begitu saja. Namun ketika adanya gelombang pengusiran yang dilakukan oleh “orang-orang yang tidak dikenal dan berasal dari luar desa”, maka penduduk tidak mampu berbuat apa-apa, selain merelakan penduduk yang dilabel sebagai orang Madura untuk pergi dari desanya untuk keselamatan mereka. Namun setelah penduduk Madura ini pergi ke pulau Madura dan tempat lainnya dan wilayah pulau Jawa lainnya hubungan komunikasi tetap dijalankan. Orang-orang Madura yang berasal dari Petak Danum tetap memonitor situasi keamanan yang ada di Petak Danum melalui warga Dayak di Petak Danum itu sendiri. Harta milik berupa tanah pekarangan dan kebun karet dapat dijaga keamanannya oleh penduduk lokal, tetapi rumah-rumah tidak terselamatkan. Walaupun ada rumor yang mengatakan bahwa rumah-rumah milik orang Madura sengaja dibakar agar mereka terhindar dari amukan pihak yang terlibat dalam kerusuhan. Karena apabila mereka masih ada rumah dan tinggal di daerah terpencil seperti itu, maka sangat sulit untuk mencegah penghancuran dari pihak lain, mengingat situasi kampung mereka yang terpencil.

Kepala desa Petak Danum merupakan salah satu pegiat dari kegiatan *peace building* yang didanai oleh suatu organisasi non pemerintah. Ia telah berulang kali pergi-pulang ke pulau Madura untuk menemui warganya yang berada di pengungsian. Atas usahanya itu beberapa kepala keluarga Madura Warga Petak Danum yang menjadi pengungsi di Madura telah kembali dan menjalani keseharian di kampung mereka yang lama. Kepala desa merasa apa yang dilakukannya wajar-wajar saja, mengingat mereka adalah warga yang sama sekali tidak terlibat dalam kerusuhan di Sampit, bahkan mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Sampit, namun tiba-tiba harus segera meninggalkan desanya tanpa sempat menyelamatkan harta bendanya.

Usaha kepala desa yang mendapat pujian dari kalangan masyarakat Madura dan kalangan ornop ini justru mendapatkan reaksi negatif dari kalangan masyarakat lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh seorang anak muda yang merupakan pendukung dari sebuah partai politik yang pada saat itu mengusung seorang tokoh masyarakat Dayak untuk menjadi calon wakil bupati di Kotawaringin Timur (tahun 2005). Anak muda ini mengatakan bahwa rajinnya kepala desa pulang pergi ke pulau Madura bagian dari usahanya untuk mendapatkan uang dari orang-orang Madura yang ingin kembali ke kampung mereka

Pada saat kunjungan ke kampung orang-orang Madura di desa ini, rumah-rumah telah dibangun kembali. Kebanyakan rumah-rumah masih berupa rumah kayu dengan atap seng yang mereka beli dari hasil menjual karet dan menjual hasil rotan dari kebun rotan yang sempat mereka tinggalkan. Komunitas Madura yang di desa ini pada tahun 2005 telah membangun kembali perumahan-perumahan yang dulunya hancur sama sekali. Kebun-kebun karet telah dibersihkan oleh penduduk Madura yang baru kembali.

Tidak ada Makan Siang Gratis :

Menolong atau Menduduki Harta Orang Madura ?

Salah satu masalah setelah perginya orang-orang Madura keluar dari Sampit adalah adanya pendudukan aset-aset milik orang Madura, seperti rumah dan tanah pertanian. Kemudian bangunan-bangunan yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Madura untuk kepentingan usahanya, seperti warung, toko, hotel dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Orang-orang yang menduduki aset dan properti milik orang Madura terdiri dari orang-orang lokal penduduk Sampit, dan orang yang berasal dari luar daerah Sampit yang menganggap dirinya berjasa untuk mengusir orang-orang Madura untuk keluar dari kota Sampit.

Kelompok-kelompok yang dulunya terlibat dalam usaha mengusir orang-orang Madura dari Sampit dengan cara melakukan pengancaman, pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah orang Madura dikenal dengan sebutan *Pasus* atau Pasukan khusus meniru penyebutan pasukan elite milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian untuk lebih menegaskan identitasnya menjadi *Pasus Dayak*.

Orang-orang yang menduduki rumah, tanah, bangunan dan asset-asset lainnya yang dimiliki oleh orang Madura, merasa berhak untuk mendapatkan uang tunggu apabila orang-orang Madura yang memiliki aset tersebut ingin mendapatkan kembali. Bagi mereka yang menduduki aset-aset orang Madura, kompensasi ini dianggap sebagai “uang penunggu”, karena kalau aset-aset itu tidak dijaga ada kemungkinan dirusak oleh orang-orang yang tidak dikenal. Selain itu, kompensasi yang diberikan oleh orang-orang Madura itu dianggap sebagai uang ganti perawatan rumah atau tanah-tanah.

Cerita kembalinya pak Sadi dari Banyuates, Sampang Madura, tempat pengungsiannya adalah sebuah cerita yang terkait dengan narasi penguasaan aset-aset orang-orang Madura oleh orang-orang lokal Sampit maupun orang-orang yang

berasal dari jauh kota Sampit dan mengatasnamakan dirinya adalah anggota Pasmus Dayak. Kisah pak Sadi dalam hal kembali ke Sampit justru ada pada situasi yang menguntungkan berkat pertemanannya dengan orang-orang Dayak. Sebagai seorang pedagang pengumpul kayu-kayu gelondongan yang ia dapatkan dari hasil penebangan orang-orang di wilayah hulu sungai, Pak Sadi harus tinggal dalam waktu cukup lama pada satu daerah dengan daerah lainnya. Masa tinggal yang cukup lama di satu dan juga jaringan penebangan kayu di wilayah hulu membuat pak Sadi mempunyai hubungan pertemanan yang melintas-batas etnisitas, terutama dengan orang-orang Dayak. Selain itu, pak Sadi mengaku bisa berbahasa *ewen* (bahasa Ngaju), sehingga memudahkannya berkomunikasi dengan orang-orang Dayak. Pertemanannya dengan Pak Pledoi, orang Dayak dari wilayah Kuala Kuayan membuatnya terjamin untuk kembali ke Sampit. Bahkan Pak Pledoi menjanjikan dirinya untuk menjemput Pak Sadi di pelabuhan, namun karena ia ada di tempat lain, maka tidak sempat bertemu Pak Sadi. Dalam pertemuan pertama setelah kerusuhan, Pak Pledoi bahkan menyebut dirinya sebagai adik dari Pak Sadi. Sambil mengatakan bahwa ia tidak perlu takut lagi tinggal di Sampit, karena pak Pledoi akan menjaminnya.

Namun, pak Pledoi sendiri termasuk orang-orang yang menduduki tanah-tanah dan rumah orang-orang Madura yang ada bertetangga dengan Pak Sadi. Walaupun untuk Pak Sadi dia tidak meminta “uang tunggu”, tetapi untuk orang Madura lainnya, khususnya untuk *kaum sugih*, Pak Pledoi meminta uang tunggu tersebut. Orang-orang yang menguasai tanah dan rumah ini menolak untuk menggunakan istilah ganti rugi, karena ketika mereka menunggui rumah-rumah yang ditinggalkan mereka mengusahakan untuk menyambungkan kembali jaringan listrik dan jaringan PAM. Biaya “uang tunggu” ini berkisar antara Rp 2,5 – 8 juta, tergantung dari luasan rumahnya dan hasil negosiasi antara pemilik rumah dengan yang menduduki rumah tersebut.

Tuturan dari Bibi Nurani tentang seorang Dayak yang membantunya mengusir orang-orang Dayak lainnya yang menggangukannya, sekaligus menjamin keamanannya adalah narasi yang terkait dengan penguasaan aset orang-orang Madura juga. Bibi Nurani sering menyebutkan nama pak Bunyamin. Ia adalah seorang pensiunan tentara dan kerja untuk perusahaan yang berasal dari Buntok, di DAS Barito. Nama pak Bunyamin ini juga sering disebut oleh pak Sadi sebagai tokoh LSM yang membantu orang-orang Madura untuk kembali ke Sampit. Bahkan pak Bunyamin ini pernah datang ke Madura bersama beberapa tokoh LSM Dayak lainnya untuk memastikan pemulangan pengungsi, termasuk dengan kepala desa Petak Danum dan Esra, seorang muda dari Buntok yang juga ketua LSM untuk rekonsiliasi antara Dayak dan Madura.

Pada saat berbicara dengan Bibi Nurani, ketika ia menggambarkan pak Bunyamin sebagai seseorang yang selalu siap membantu orang-orang Madura yang baru pulang dari pengungsi di Madura, khususnya yang diganggu oleh orang-orang lokal. Pak Bunyamin bersama Esra adalah orang-orang Dayak yang dianggap melindungi keberadaan orang-orang Madura. Namun, pendapat pak Sakira berbeda dengan isterinya, bibi Nurani. Walaupun pak Sakira menganggap penting jasa-jasa pak Bunyamin, tetapi pada suatu waktu pak Bunyamin meminta orang-orang Madura untuk mengumpulkan KTP yang akan dijadikan bukti untuk pembentukan kelompok untuk pemberdayaan kebun karet. Orang-orang Madura ini mengumpulkan KTP, tetapi proyek kebun karet ini tidak terlaksana.

Pak Bunyamin dan Esra ternyata mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu hubungan antara paman dan kemenakan, keduanya berasal dari DAS Barito yang dikenal dengan sebutan etnis Manyaan. Daerah tempat mereka dilahirkan, juga merupakan tempat kelahiran Sendong, anak muda yang dibunuh oleh orang-orang Madura pada bulan Desember 2000 yang diyakini banyak orang sebagai salah satu pemicu kerusuhan Sampit di bulan Februari 2001. Selain itu, mereka juga satu kampung dengan Emil Tiades, majikan Sendong, desertir militer dan juga pemilik tempat hiburan di Kereng Pangi, tempat asal mula perkelahian antara Sendong dengan orang-

orang Madura. Setelah kerusuhan, Emil kemudian menjalankan usaha hiburan yang sama di lokasi kilometer 12 Palangka Raya. Selain hubungan paman dan kemenakan, ternyata rumah Pak Bunyamin dan Esra bersebelahan di Jalan Teratai IV Sampit. Rumah Esra dan Pak Bunyamin tampaknya rumah yang bersifat sementara. Ketika ditanyakan mengenai status rumah maupun tanahnya mereka mengatakan bahwa mereka menempati tanah yang ditinggal pergi oleh orang Madura sebagai pemiliknya. Mereka menunggui tanah dan rumah di daerah tersebut agar tidak diganggu oleh orang lain.

Pak Bunyamin, Esra dan Pak Pledoi adalah kisah tiga orang lokal yang menguasai tanah-tanah orang Madura dan memposisikan diri sebagai “penunggu” asset orang-orang Madura agar tidak diganggu pihak lain. Ketiganya, bagi beberapa orang Madura dianggap sebagai orang-orang yang menjamin keamanan mereka di Sampit pasca kerusuhan. Namun, bagi orang-orang Madura lainnya yang tanah dan rumahnya dijaga oleh orang-orang ini dan nantinya perlu membayar kompensasi, para penunggu ini dianggap sebagai beban tersendiri. Karena orang-orang Madura yang kembali biasanya tidak mempunyai uang yang cukup.

Narasi Penerimaan Orang-orang Madura di Kota Sampit

Hingga akhir tahun 2010, tidak ada angka pasti mengenai jumlah orang-orang Madura yang telah kembali ke Sampit. Namun dari hasil pengamatan ke beberapa tempat di Sampit yang dikenal sebagai “basis Madura” yaitu di jalan S Parman, Pelalangan, Baamang, jalan menuju Samuda, Jalan kamar 20, Kampung Rel, Pelita menunjukkan bahwa orang-orang Madura telah kembali dari pengungsian sekitar 60%-80%. Hanya sebuah kampung di Baamang yang hingga kini menolak kembali orang-orang Madura. Kampung tersebut memang dikuasai oleh keluarga mantan *pembekal* yang sangat berpengaruh dan juga daerah dimana perkelahian antar etnis yang menuju kerusuhan antar etnis bermula. Kembalinya orang-orang Madura ini, adalah bagian dari konsep “pemulangan alamiah” versi elite Dayak. Yaitu pemulangan pengungsi

dalam jumlah kecil, tidak dilakukan pengorganisasian oleh lembaga pemerintah, difasilitasi oleh warga tetangganya, dan kemudian diterima oleh warga sekitarnya. Pemulangan alamiah ini juga berarti “seleksi alamiah”, yaitu orang-orang yang dianggap terlibat dalam kerusuhan atau terlibat organisasi IKAMA tidak dapat kembali ke Sampit untuk menetap. Namun, warga yang kembali untuk mengurus asset-asset mereka diperkenankan.

Pak Tosan, Masarah, Pak Sadi dan bibi Nurani adalah cerita-cerita yang terkait dengan narasi penerimaan kembali oleh orang-orang lokal yang pada akhirnya diterima dengan baik. Pak Tosan, karena posisinya sebagai mantan lurah dan jaringan pergaulan yang dimilikinya membuatnya agak leluasa untuk dapat kembali bergaul dengan masyarakat lokal Sampit, apalagi dengan cara bicara Pak Tosan yang lebih kental logal Banjar-nya dibandingkan logat Madura membuat ia kembali menjadi warga Sampit yang tidak mengalami hambatan yang besar untuk diterima kembali. Namun, ia tidak menuntut kembali untuk mendapatkan jabatan lurah yang pernah dijabatnya sepuluh tahun lalu. Ia adalah satu-satunya lurah yang berasal dari etnis Madura di kota Sampit.

Pak Masarah dengan masa tinggal yang sangat lama di Sampit, kemudian pergaulannya sebagai pegawai DOLOG dan juga mempunyai warung yang cukup besar di jalan Kamar dua puluh Sampit, menjadikannya mempunyai pergaulan yang luas dengan berbagai lapisan masyarakat. Tokonya yang menjual berbagai kebutuhan sembilan bahan pokok, dan juga keluwesan isterinya terhadap para pembeli dari berbagai etnik di Sampit menjadikannya toko yang penting dan disukai oleh semua orang dan lintas etnik. Walaupun pada saat kerusuhan ternyata dijarah juga oleh orang-orang yang bukan berasal dari Sampit. Perjuangannya selama puluhan tahun dari Pangkalan Bun hingga Sampit ternyata habis dalam hitungan seminggu saja. Namun, relasinya dengan berbagai lapisan masyarakat di Sampit membuatnya dengan mudah diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Walaupun secara kemampuan ekonominya berbeda sebelum kerusuhan.

Pak Sadi, sebelum dan sesudah kerusuhan adalah tokoh panutan orang-orang Madura. Ia sering menjadi orang yang diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan orang Madura, khususnya masalah *carok*. Posisinya yang menentang keberadaan IKAMA membuatnya diterima dengan baik oleh kalangan Dayak dan Madura yang tidak menyukai IKAMA. Selain itu, karena ketokohnya, walaupun ia tidak menyukai tindakan-tindakan IKAMA, para pengurus IKAMA menaruh hormat kepadanya. Selain itu, berbagai pekerjaannya yang berhubungan langsung dengan orang-orang Dayak dari mulai wilayah hulu hingga kota Sampit membuatnya diterima oleh berbagai kalangan Dayak. Hal itulah yang membuatnya diterima kembali dengan baik di Sampit.

Pengalaman tiga laki-laki yang cukup senior dari sisi usia, pengalaman, maupun ketokohnya, berbeda dengan situasi yang dialami oleh Bibi Nurani. Pada awal kembali ke Sampit, statusnya sebagai seorang perempuan Madura yang berusia sekitar pertengahan 30 tahunan, isteri dari seorang tukang becak dan ibu dari tiga anak ini mengalami kepahitan. Penolakan dan pelecehan pernah dirasakannya. Penolakan untuk berjualan kembali di sebuah sekolah yang menyandang label “Madrasah” dan alasan yang diberikan karena ia adalah “orang Madura” merupakan tindakan yang menyakitkan. Apalagi tadinya ia berfikir, institusi seperti madrasah yang merupakan institusi Islam, yang merupakan agamanya justru tidak memberikan perlindungan. Kemudian, ketika tinggal di tempat sementara, orang-orang yang datang dalam keadaan mabuk membuat teror dan mengintip aktivitasnya didalam ruang tempat tinggal sementara itu. Namun, bagi bibi Nurani, jumlah orang-orang yang menolak itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang Sampit yang kembali menerimanya dengan baik, tanpa melihatnya sebagai orang Madura atau latar belakang agamanya.

Kini, warung *pencok* bibi Nurani merupakan tempat *mangkal* dari LSM-LSM yang mengawasi kegiatan penjualan kayu *illegal logging*. Walaupun mereka menamakan dirinya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), namun tujuan utama mereka adalah

memeras para sopir pengangkut kayu dan juga tangki pengangkut BBM, karena mereka selalu membawa *handy cam* dan kamera sebagai bukti bahwa truk-truk membawa kayu ilegal atau BBM bersubsidi yang akan dijual ke perusahaan kelapa sawit. Para “aktivis” LSM ini kebanyakan terlibat dalam kerusuhan Sampit dan mereka sebetulnya terlibat dalam pengusiran orang-orang Madura keluar Sampit. Namun sekarang, mereka justru menjadikan warung Bibi Nurani sebagai “markas” melakukan pemerasan. Selain itu, Bibi Nuranipun bergaul akrab dengan mereka. Suatu ironi, dimana LSM dan Wartawan yang sering disebut sebagai pilar “masyarakat sipil” dalam *good governance*, justru merupakan dua institusi yang akhirnya mendapatkan citra yang buruk di Kalimantan Tengah, karena tindakan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya LSM dan wartawan itu.

Dari kelima orang Madura yang menjadi informan kunci penelitian disertasi ini, tampaknya posisi Ramli yang paling kurang menguntungkan. Sebagai seorang pemuda Madura yang putus sekolah hingga SMP, Ramli pada akhirnya fokus bertani dengan menggarap tanah ayahnya yang merupakan tanah pinjaman dari orang Banjar kepadanya. Namun, karena adiknya mendapat musibah dipukuli oleh sekelompok anak remaja dari wilayah kecamatan Ketapang dan ia ingin para pelakukannya diproses secara hukum --- *sementara si pemilik tanah tempat Ramli tinggal ingin agar peristiwa tersebut diselesaikan melalui jalan damai dan tidak membawanya ke ranah hukum*--. Ramli menolak, dan Ramli kehilangan hak untuk tinggal di tempat itu dan kehilangan hak untuk mengolah tanahnya. Tetapi, bagi Ramli ia sudah mempertahankan kebenarannya, karena ia tahu, orang-orang memperlakukan adiknya seperti itu dikarenakan posisi mereka sebagai orang Madura dengan segala anggapan karakter buruknya.

5.8. Kesimpulan Bab V

Bagian ini membahas tentang berbagai narasi dari orang-orang Madura yang telah kembali ke Sampit. Pada bagian pertama menampilkan kisah dari lima orang Madura

yang mempunyai pengalaman berbeda-beda. Terdapat orang-orang Madura yang dengan mudahnya masuk kembali ke kota Sampit tanpa perlu khawatir karena mendapatkan jaminan dari orang-orang Dayak. Jaminan dari orang-orang Dayak itu diperoleh atas dasar pertemanan pada masa sebelum kerusuhan; membayar kompensasi dalam jumlah tertentu; atau dijadikan bagian dari proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan pemulihan wilayah pasca-konflik. Selain itu, terdapat orang-orang Madura yang mendapatkan penolakan karena identitasnya sebagai orang Madura. Tetapi ada juga orang-orang yang melakukan penghindaran melakukan kontak-kontak dengan orang Dayak.

Narasi-narasi mereka tentang penyebab kerusuhanpun beragam; ada yang mencoba melihatnya dari kesalahan kelompok-kelompok Madura tertentu yang dianggap menantang kelompok Dayak; sebaliknya ada yang melihatnya sebagai bagian dari rencana elite Dayak; namun yang terbanyak tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi pada saat itu. Karena banyak orang Madura yang langsung dibawa ke barak pengungsian di kantor bupati, kemudian di bawa ke Madura.

BAB 6

ANALISIS DAN KESIMPULAN

6.1. Analisis

Ingatan kolektif menjadi konsep yang penting untuk memahami bagaimana orang-orang Madura melakukan pilihan terhadap peristiwa-peristiwa mana saja yang akan terus diingat (*remembering*) dan peristiwa yang akan dilupakan (*forgetting*) untuk meneruskan kehidupannya di kota Sampit. Kalaupun tidak dilupakan, peristiwa-peristiwa tersebut tidak akan diingat dan dijadikan referensi ketika mereka bertindak di ruang publik kota Sampit. Dalam pandangan Halbwach, ingatan kolektif adalah sharing representasi secara kolektif pada masa lalu. Ia menekankan tentang pentingnya memahami komunikasi yang terjadi setiap hari untuk mengembangkan ingatan kolektif. Namun kritik yang diajukan terhadap pemikirannya ini adalah cara berfikirnya yang “*anti individualism*”. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran Durkhemian yang melihat bahwa memori individu ditentukan secara sosial (Kasteiner, 2002 : 181), sehingga menempatkan individu tidak memainkan peran dalam sejarah suatu ingatan kolektif. Oleh sebab itu, selain ingatan kolektif, maka ingatan-ingatan yang bersifat individual juga penting untuk diketengahkan. Sekaligus sebagai revisi dari pemikiran Halbwach yang menegaskan pentingnya peranan individu sebagai produsen dari ingatan.

Tidak semua peristiwa dapat diingat secara kolektif, karena tergantung dari intensitas dan kedekatan antara subyek dengan peristiwa itu sendiri. Orang-orang Madura yang datang ke Sampit pada dekade 1950-1960 masih mengingat dan dapat bercerita dengan baik tentang keberadaan industri kayu *Bryunzyl* dan peranannya secara ekonomi bagi orang-orang Madura. Sebaliknya generasi orang-orang Madura yang lahir atau datang ke Sampit pada decade 1980-an tidak mengenal keberadaan perusahaan kayu tersebut.

Namun, peristiwa kekerasan antar etnis yang terjadi pada bulan Februari 2001 merupakan ingatan kolektif orang-orang Madura dewasa, bahkan hampir semua warga Provinsi Kalimantan Tengah ketika mendengar kata “kerusuhan”, selalu mengasosiasi-kannya dengan masalah “kerusuhan Sampit”. Karena kejadian tersebut baru pertama kali terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, *magnitude* kerusuhan, yaitu jumlah korban tewas dan jumlah pengungsi Madura yang demikian besar keluar dari Kalimantan Tengah menyebabkan kerusuhan Sampit diingat secara kolektif.

Ingatan terhadap peristiwa kerusuhan diperkuat dengan berbagai “monumen” yang sengaja dibuat oleh kelompok tertentu untuk memperingatkan kepada orang-orang Madura dan masyarakat migrant lainnya untuk bersikap saling-menghargai ketika tinggal di Sampit. Terdapat “tugu perdamaian” yang dibangun di jalanan strategis yang menghubungkan kota Sampit dan Pangkalan Bun. Pada jalan yang sama, namun lebih tersembunyi terdapat makam masal korban tragedi 18 Februari 2001. Makam masal tersebut dibuat pada saat kerusuhan untuk menguburkan orang-orang yang meninggal tanpa identitas. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Madura. Pun, ketika orang-orang Madura ingin berziarah ke makam masal, mereka harus melewati tugu perdamaian tersebut. Diantara “tugu perdamaian” dan “makam masal” terdapat kuburan Kristen. Pada salah satu sudut kuburan, terdapat makam dengan nisan yang menuliskan delapan nama. Mereka adalah orang-orang Dayak yang terbunuh pada malam tanggal 18 Februari 2001 dengan cara dibakar hidup-hidup dalam suatu rumah. Kematian keluarga inilah yang menjadi salah satu penyulut kemarahan orang-orang Dayak untuk melakukan tindakan balas dendam.

Didalam “monumen-monumen” yang disebutkan diatas menyebutkan tanggal 18 Februari 2001. Padahal tanggal 18-19 Februari 2001 adalah situasi dimana orang-orang Madura dianggap menguasai kota Sampit. Sehingga penulisan tanggal 18 Februari dimana-mana merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa pada tanggal tersebut telah dimulai kekerasan antar etnis yang dimulai dari penguasaan orang-orang Madura terhadap kota Sampit. Namun, peristiwa yang sesungguhnya traumatic

terjadi sesudah tanggal 19 Februari 2001, yaitu saat orang-orang Dayak dari berbagai wilayah Kalimantan Tengah (bahkan Kalimantan Barat) datang membantu ke kota Sampit sebagai wujud dari mempertahankan identitas kewilayahan mereka. Mulai tanggal itulah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Madura, tidak peduli apakah orang-orang Madura itu terlibat dalam penguasaan kota atau bukan.

Pembuatan “monument” dan “tanggal 18 Februari 2001” secara metafora dapat disamakan dengan *recovered history* (Lewis, 2009 : 12) yaitu peristiwa, gerakan, tokoh dan gagasan yang dalam batas tertentu telah dilupakan dan dengan alasan tertentu ditolak oleh memori kolektif suatu komunitas, kemudian diketemukan kembali oleh para ahli. Proses penemuan kembali ini diiringi dengan rekonstruksi tentang peristiwa tersebut. Namun kata rekonstruksi itu sendiri mengindikasikan berbagai bahaya dari proses kerja tersebut.

Rekonstruksi kesejarahan yang dilakukan oleh para pemenang (*winner*), selain dengan cara membangun berbagai monument fisik, mereka juga menciptakan imajinasi-imajinasi tentang orang-orang Madura dengan sumber informasi yang tidak akurat, atau sumber informasi yang akurat namun dikreasi sedemikian rupa sehingga *mental images* terhadap orang Madura akan penuh prasangka yang negatif. Kompilasi bahan-bahan tertulis yang terjadi pada saat kerusuhan Sampit, kemudian menjadi “buku merah” merupakan medium yang ampuh untuk memberikan kesan bahwa orang-orang Madura melalui IKAMA merupakan ancaman yang harus disingkirkan dari kota Sampit. Pembunuhan telah dianggap sebagai sebuah cara yang disepakati bersama agar kota Sampit tidak jatuh ke tangan orang-orang Madura. Kemudian pengusiran orang-orang Madura ke luar dari Kalimantan Tengah – *walaupun dengan dalih untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi* – merupakan tindakan yang dimaafkan untuk menjaga *petak pahaga danum* (tanah air). Pengusiran terhadap orang Madura, tidak peduli apakah orang tersebut terlibat IKAMA atau tidak; kelahiran kota Sampit atau bukan; kawin-mawin dengan orang lokal atau oranglain; menjauhkan kita dari pemahaman identitas sebagai sesuatu yang cair dan multi-focal.

Identitas orang-orang Madura pada saat itu dibekukan menjadi satu, yaitu sebuah kelompok etnik yang harus keluar dari Kalimantan Tengah.

Bagaimanakah *counter* terhadap sejarah yang ditemukan kembali ini ? Dalam proyek-proyek penciptaan situasi damai (*peace building*), maka metafora tentang sejarah yang ditemu-ciptakan (*invented history*) dapat menjadi pilihan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Disebut metafora, karena sesungguhnya jenis sejarah ini merupakan hasil penemuan dari dan penggalian masa lalu secara kritis dan ilmiah. Penemu-ciptaan sejarah tidak ada kaitannya dengan penemuan data-data historis baru. Ini merupakan praktik klasik untuk menarik mundur ke masa lampau yang jauh dengan tujuan-tujuan tertentu. Sama seperti sejarah yang diingat, sejarah yang ditemu-ciptakan ini juga ada pada setiap masyarakat, seperti terlihat pada mitos-mitos kepahlawanan dalam masyarakat sederhana hingga pada historiografi negara-negara modern (Lewis, 2009 : 14).

Melalui penelusuran ingatan kolektif (dan individual), ditemukan relasi etnis Dayak dan Madura di kota Sampit telah berlangsung kurang dari satu abad, yaitu sejak migrasi pertama orang-orang Madura untuk dipekerjakan di perkebunan gambir sekitar tahun 1920-an. Jumlah orang Madura yang tidak terlalu besar serta pembagian kerja yang tidak menimbulkan pembagian kerja berdasarkan etnisitas menjadikan situasi konfliktual tidak terjadi. Kemudian gelombang migrasi orang-orang Madura yang relative cukup besar terjadi dengan beroperasinya perusahaan kayu milik Belanda, yaitu *NV Bruenzyl Dajak Houdbrijven*. Rantai produksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut menjadikan adanya pembagian kerja berdasarkan etnisitas, yaitu menempatkan orang-orang Madura dalam jumlah besar sebagai pekerja kasar bersama-sama dengan kelompok etnis lainnya, seperti Jawa dan Banjar. Orang-orang Dayak pada saat itu terbagi kedalam dua jenis pekerjaan, yaitu sebagai penebang kayu di hutan dan mendapatkan imbalan berdasarkan banyaknya pohon yang berhasil ditebang. Sedangkan kelompok kecil orang Dayak yang berpendidikan menduduki pekerjaan-pekerjaan di pabrik, bahkan pada kelas *employee*. Pada periode ini tidak

dilaporkan situasi konflikual yang bersifat antar etnis. Selain kasus-kasus perkelahian yang melibatkan sesama orang Madura dan budaya *carok* diantara mereka.

Gelombang migrasi orang-orang Madura yang terjadi sekitar tahun 1970-an jauh lebih besar. Maraknya industri kayu di kota Sampit yang dikenal dengan jaman *banjir kap* menjadikan kota Sampit didatangi oleh migran dari berbagai daerah. Pada gelombang migrasi inilah bibit-bibit konflik terjadi. Migran Madura yang datang ke kota Sampit kurang mempunyai ikatan kebersamaan dengan masyarakat yang sudah datang sebelumnya. Hal ini berbeda dengan migrant Madura gelombang pertama dan kedua yang relative membaaur dengan masyarakat lokal. Migran Madura gelombang inilah yang kemudian menguasai berbagai jenis usaha di kota Sampit, mulai dari usaha sektor informal di pasar hingga pengusaha kontraktor, jasa angkutan, pom bensin dan hotel. Kemudian berdirinya organisasi yang mengatasnamakan etnis Madura menjadikan benih-benih konflik antar etnis mulai terjadi. Organisasi etnis bernama IKAMA ini, walaupun awalnya merupakan *paguyuban*, tetapi perkembangannya menjadi organisasi yang menjadi pelindung bagi orang-orang Madura yang dianggap mempunyai tindakan-tindakan diluar hukum.

Dalam ingatan beberapa orang Madura, keberadaan IKAMA perlu ditolak. Hal ini merupakan upaya untuk dapat melangsungkan hidup di kota Sawpit tanpa perlu dibayang-bayangi lagi perseteruan antar etnis yang lebih disebabkan oleh konflik kepentingan dari organisasi elite.

Penggunaan konsep historisitas dalam studi-studi Antropologi menjadi sangat penting untuk melihat dinamika sosial dan budaya pada tingkat individu dan kelompok , namun dikaitkan dengan permasalahan yang lebih luas pada tingkat negara-bangsa. Konsep historisitas sendiri meleburkan kondisi-kondisi masa kini dengan masa sekarang, artinya hal-hal yang terjadi pada masa kini mempunyai akar kesejarahan dengan masa lalu. Kemudian, dengan memberikan fokus yang lebih dalam kepada

individu-individu dari kalangan “masyarakat biasa” atau “masyarakat korban” terbukti narasi-narasi yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok ini mempunyai kaitan dengan narasi-narasi besar pada tingkat negara bangsa.

Migrasi orang-orang Madura ke Sampit sejak tahun 1920-an, terusir ke pulau Madura tahun 2001 hingga kembali ke Sampit mulai tahun 2003, merupakan potret untuk melihat narasi-narasi besar yang terjadi di Indonesia, mulai dari ekonomi perkebunan jaman kolonial, ekonomi kehutanan pasca kolonial dan orde baru, hingga sisi-sisi gelap desentralisasi yang menumbuhkan etno-nasionalisme, dibandingkan nasionalisme pada tingkat negara-bangsa.

Memberikan fokus pada masyarakat biasa dan masyarakat korban, juga memperlihatkan pentingnya memahami dunia keseharian (*everyday life's of people*) sebagai dunia nyata. Antropologi adalah ilmu yang memotret kehidupan dunia nyata tersebut melalui etnografi. Namun etnografi masa kini adalah etnografi yang multi-situs, melihat keterkaitan satu lokus dengan lokus lainnya. Khususnya dalam studi-studi yang terkait dengan perpindahan manusia (*human flow*) dari satu tempat ke tempat lainnya. Etnografi masa kini tidak dapat mengelak dari keharusan melihat satu konteks tempat dengan konteks tempat lainnya.

6.2. Kesimpulan

Mengambil pembelajaran dari orang-orang Madura yang mencoba meneruskan kehidupannya di daerah pasca-konflik, bahwa konsepsi tentang masa lalu akan berakibat pada *mental image* yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa sekarang telah terkonfirmasi dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka kembali ke kota Sampit dan membangun kembali kehidupannya didasarkan pada pengalaman masa lalunya. Namun, pengalaman masa lalu tidak bersifat statis dan linier, melainkan dinamik, tidak mempunyai pola yang tetap dan kadangkala bersifat tidak terduga. Oleh sebab itu, walaupun ingatan kolektif

bersifat esensial untuk memahami mental image yang membentuk tindakan pada masa kini, namun ingatan-ingatan yang bersifat individual tidak dapat dinegasikan dan mewarnai ingatan kolektif suatu masyarakat. Hal ini tampak dari adanya orang-orang Madura yang demikian mudah kembali dan membangun usahanya kembali di kota Sampit tanpa melalui penghambatan. Tetapi ada orang-orang lain yang kesulitan kembali ke kota Sampit, mengalami penghambatan dan diskriminasi, hingga pelecehan.

Dalam ranah Antropologi, konsep ingatan kolektif ini menjadi penting, karena ingatan kolektif inilah yang menjadi pembentuk identitas. Ingatan kolektif membuat orang-orang menjadi sadar tentang siapa dirinya dan siapa orang lain, tentang apa yang menjadi pembeda antara kelompoknya dan kelompok diluar dirinya. Rangkaian peristiwa yang terjadi pada bulan Februari 2001 di kota Sampit Kalimantan Tengah telah menjadi sebuah ingatan kolektif yang sekaligus menjadi pembeda identitas antara orang-orang Madura dan Dayak di kota itu. Antara kelompok yang merasa menang dan yang merasa kalah.

Kekerasan antar etnis yang terjadi antara orang-orang Dayak dan Madura di kota Sampit dapat ditafsirkan bersifat multi faktor, termasuk peranan pimpinan-pimpinan kelompok etnis yang menggalang kekuatan untuk mengalahkan lawannya. Kemudian faktor eksternal adanya kekerasan etnis yang terjadi di Kalimantan Barat antara orang-orang Dayak dengan Madura dan orang Melayu dengan Madura mempertinggi saling curiga diantara pimpinan kelompok elite, sehingga mereka mempersiapkan diri apabila konflik yang sama terjadi di kota Sampit.

Penggunaan konsep historisitas dan ingatan kolektif dalam studi-studi Antropologi menjadi sangat penting untuk melihat dinamika sosial dan budaya pada tingkat individu dan kelompok, namun dikaitkan dengan permasalahan yang lebih luas pada tingkat negara-bangsa.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan situasi damai di kota Sampit (*peace building*), hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada sisi penggalian ingatan-ingatan. Penggalian ingatan yang dimaksud adalah membayangkan kembali relasi-relasi Dayak dan Madura yang mempunyai kesinambungan sejarah yang berlangsung sejak lama, khususnya situasi-situasi keseharian dimana orang-orang Dayak dan Madura, serta etnis lainnya di kota Sampit pernah hidup berdampingan secara damai. Selain itu, hal-hal yang membangkitkan ingatan yang traumatik seharusnya diminimalkan. Ingatan traumatik itu diantaranya terwujud dalam “tugu perdamaian”, Peraturan Daerah yang diskriminatif, serta rumor yang selalu datang menjelang tanggal 18 Februari. Selain itu, orang-orang Madura diberikan kesempatan untuk kembali menggunakan asset-asetnya tanpa dibebani dengan kompensasi kepada siapapun yang menduduki asset tersebut. Pihak pemerintah bertanggung-jawab untuk menghilangkan berbagai hal yang dapat membangkitkan ingatan traumatik tersebut sambil mengajak organisasi masyarakat sipil membuat program rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Muatan Lokal atau sisipan pendidikan di sekolah diperlukan, utamanya tentang pendidikan multi-kultural yang menghargai berbagai perbedaan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Abdul Rozaki (2007) : *Kyai dan Blater Dalam Masyarakat Madura*. Yogyakarta, LKIS.

Amselle, Jean-Loup (1993). *Anthropology and Historicity*. Journal of History and Theory, Vol 32, No 4, Beiheft 32 : History Making in Africa pp 12-31

Ananta, Aris (2003), *Penduduk Indonesia Berdasarkan Etnis Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000*. Jakarta : Penerbit LP3ES

Anonymous (2008). *Sejarah PT Inhutani III*. Tanpa penerbit.

Arbain, Taufik (2009). *Strategi Migran Banjar*. Yogyakarta : Penerbit LKis.

Arnett, Ronald C (2002). *Paulo Freire's Revolutionary Pedagogy: From a Story-Centered to a Narrative-Centered Communication Ethics*. Journal of Qualitative Inquiry 2002; 8; 489.

Barth, Frederik (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya* (edisi bahasa Indonesia), merupakan terjemahan dari *Ethnic Group in Boundaries*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nining I. Susilo. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Bowen, John R (1993). *Muslims through Discourse : Religion and Ritual in Gayo Society*. New Jersey USA : Princenton University Press

Bowie, Katherine A (2006) . *Of Corvee and Slavery : Historical Intricacies of the Division of Labor and State Power in Northern Thailand* In E Paul Durenberger and Judith Martin (eds) *Labor in Cross-Cultural Perspective*. Society for Economic Anthropology.

Cahyono, Heru (ed) (2002) : *Koflik Kalbar dan Kalteng : Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Jakarta : Penerbit P2P LIPI dan Pustaka Pelajar

Clammer, John (2003). *Neo Marxisme Antropologi : Studi Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit Sadasiva.

Climo, Jacob J and Maria G Cattell (eds.) (2002) . *Social Memory and History : Anthropological Perspectives*. United Kingdom : Altamira Press

Cohn, Bernard S. (1996) *Colonialism and Its Forms of Knowledge : The British In India*. New Jersey : Princeton University Press

Confino, Alon (1997) *Collective Memory and Cultural History : Problem of Method*. Journal of The American Historical Review. Vol. 102, No 5 (Dec, 1997), pp 1386-403.

Commaroff, Jean and John Commarof (1996) *Of Revelation and Revolution : Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa, Volume One*. USA : The University of Chicago Press

Commaroff, John and Jean Commarof (1992). *Ethnography and the Historical Imagination*. Westview Press

Davidson, Jamie Seth ; Henley, David; Moniaga Sandra (editors) (2010) *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta : Penerbit KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.

Davidson, Jamie Seth (2002), *Violence and Politics in West Kalimantan Indonesia*. PhD **Disertasi**, USA : University of Washington.

De Vos, George A (1995), *Ethnic Pluralism : Conclit and Accomodation, The Role of Ethnicity in Social History* **In** Lola Romanucci-Ross and George A Davos (editors), *Creation, Conflict and Accomodation*. 3rd edition. United Kingdom : Altamira Press, 1995

Djuweng, Stepanus; Zakaria, Yando R; Faruk, dkk (1996), *Kisah dari Kampung Halaman : Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit Interfidei

Downman, Scott Andrew (2004). *Intra-Ethnic Conflict and the Hmong in Australia and Thailand*. **Disertasi** Department of International Business and Asian Studies, Griffith University. Australia : Griffith University.

Down To Earth, (2002) *Root and Sources Ethnic Riot in Sampit Central Kalimantan*. United Kingdom : Doe

Edelman, Marc and Angelique Haugerud (2005), *The Anthropology of Development and Globalization : From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. USA, UK and Australia : Blackwell Publishing,

Eriksen, Thomas Hylland. (2001). "Ethnic identity, national identity and intergroup conflict: The significance of personal experiences," diterbitkan dalam Ashmore, Jussim, Wilder (eds.): *Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction*, hal 42-70. Oxford: Oxford University Press, diambil dari www.folk.uio.no .

Escobar, Arturo *Social Movements* (1992) : *Culture, Practice and Politics*. Journal Critique of Anthropology.

Fabian, Johannes (1983) *Time and the Other : How Anthropology Makes Its Object*. New York : Columbia University Press.

Fox, Richard G (ed.) (1991), *Recapturing Anthropology : Working in the Present*, New Mexico, United States of America : School of American Research Press.

Geertz, Clifford (1973) 'The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State' in *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Gingrich, Andre and Richard G Fox (eds). 2002. *Anthropology, By Comparison*. London , UK : Routledge.

Gogali, Lian. *Konflik Poso* (2009) : *Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*. Yogyakarta : Penerbit Galang Press.

Halbwachs, Maurice (1992). *On Collective Memory*. USA : The University of Chicago Press.

Hall, Stuart (1991) "Cultural Identity and Diaspora" dalam Kathryn Woodward dkk. *Identity and Diaspora*. London: SAGE Publication

Harris, Marvin (2001) *The Rise of Anthropological Theory : A History of Theories of Culture* (updated edition). Oxfoed, UK: Altamira Press .

Harris, Marvin (1976). *History and Significance of the Emic/Etic Distinction*. Annual Review of Anthropology, Vol 5. pp 329-350

Hastijanti, R.A.Retno (2005), *Proses Pembentukan Ruang Eksklusif Pada Permukiman Masyarakat Plural. Studi Kasus Konflik Etnis di Sampit Kalimantan Tengah*. **Disertasi** Program Studi Doktor, Bidang Keahlian Arsitektur Jurusan Arsitektur. Surabaya : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Heller, Agnes (1980). *Historicity and Consciousness*. Journal of Phylosophy social Criticism

Horowitz, Donald L. (2005). *Ethnic Group in Conflict*. Berkeley and LC, CA; California University Press.

Kalocsai, Csilla (2000), *The Multi-Sited Research Imaginary : Notes on Transnationalism and the Ethnographic Practice*. Paper presented at Comparative

Research Workshop. 4 Desember 2000. Downloaded dari <http://www.yale.edu/clamcr/kalocsai.doc>

Kansteiner, Wulf (2002). *Finding Meaning in Memory : A Methodological Critique of Collective Memory Studies*. Journal of History and Theory, Vol 4 No 2.pp 179-197

Khoo Khay Jin et.al (2005)., *Ethnicity and Inequality di Kalimantan*. Paper presented at Workshop PMB-CRISE Project. Jakarta : PMB LIPI

Klinken, Gerry van (2007) *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor-KITLV

Klinken, Gerry van. *Colonizing Borneo : State-Building and Ethnicity in Central Kalimantan*

Koentjaraningrat (1990), *Sejarah Teori Antropologi, Jilid 2*. Jakarta : Penerbit UI Press.

Lewis, Bernard (2009) *Sejarah : Diingat, Ditemukan Kembali, Ditemu Ciptakan* (terjemahan). Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2009.

Maunati, Yekti (2004). *Identitas Dayak : Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta : Penerbit LkiS

Miles, Douglas (1976). *Cutlass and Crescent Moon : A Case Study of Social and Political Change in Outer Indonesia*. Sydney : Centre for Asian Studies Sidney University

O'Reily, Karen (2005) , *Ethnographic Methods*.New York : Routledge, 2005

Perelaer, M.T.H (2006) *Desersi : Menembus Rimba Raya Kalimantan*. Jakarta; KPG,

Qoyim, Ibnu (editor) (2003) *Agama dan Pandangan Hidup : Studi tentang "Local Religion" di Beberapa Wilayah Indonesia. Studi tentang Kaharingan di Masyarakat dayak Kalimantan dan Sunda Wiwitan di Masyarakat Badui, Banten*.Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Ramstedt, Martin dan Thufail, Fajar Ibnu (eds) (2011). *Kegalauan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI dan Max Planck Institute for Social Anthropology dan Penerbit PT Grasindo, 2011.

Rini, Kartika (2005), *Tempun Petak Nana Sare : Kisah Dayak Kadori, Komunitas Peladang Pinggiran*. Yogyakarta : Insist Press

Roseberry, William. *Anthropologies and Histories* (1989): *Essays in Culture, History, and Political Economy*. New Brunswick and London : Rutgers University Press.

Rudyansjah, Tony (2009) *Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan*. Jakarta : Penerbit Rajawali Press.

Rutherford, Danilyn (2003) *Raiding the Land of The Foreigners : The Limits of The Nation on An Indonesian Frontier*. USA Princenton University Press

Saifuddin, Achmad Fedyani (2011) *Catatan Reflektif Antropologi Sosialbudaya*. Jakarta : Penerbit Institut Antropologi Indonesia

Saifuddin, Achmad Fedyani (2005) *Antropologi Kontemporer : Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (edisi pertama). Jakarta : Penerbit Kencana

Sari, Riska Opa (1999) *Riska : Memories of A Dayak Girlhood*. Edited by Linda Spalding. Canada : Random House.

Sen, Amartya (2006) *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*. Jakarta : Penerbit Marjin Kiri

Schiller, Anne (1997) *Small Sacrificies : Religious Change and Cultural Identity Among the Ngaju of Indonesia*. New York : Oxford University Press

Sjamsudin, Helius (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Smith, Glen and Helene Bouvier (eds) (2006) *Communal Conflicts in Kalimantan : Perspectives from the LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. Jakarta : PDII LIPI and Lasema France

Smith, C.Q (2005) *The Roots of Violence and Prospects for Reconciliation : A Case study of ethnic conflict in Central Klaimantan*. Washington D.C : World Bank.

Soegiharto, Saraswati, (editor) (2003) . *Persebaran Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Spyer, Patricia (2002) : *Fire Without Smoke and Other Phantoms of Ambon's Violence : Media Effects, Agency, and The Work of Imagination*. Journal of Indonesia 74 (October 2002). Pp

Stoller, Ann Laura (2005). *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Yogyakarta : Penerbit KARSA.

Sukandar, Rudi (2007) *Negotiating Post-Conflict Communication : A Case of Ethnic Conflict in Indonesia*. **Disertasi** USA Ohio : The School of Communication Studies. Ohio University.

Sulhan, Muhammad (2006). *Dayak yang Menang, Indonesia yang Malang : Representasi Identitas Etnik Dayak di Media Massa*. Yogyakarta : Penerbit Fisipol UGM.

Suparlan, Parsudi (2005) *Sukubangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Cetakan ke 2.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (2005), *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Tambiah (1986) *Sri Lanka : Ethnic Fratricide and The Dismantling of Democracy*. USA : The University of Chicago Press

Thung, Ju Lan dkk (2010) , *Klaim, Kontestasi, dan Konflik Identitas : Lokalitas vis-a-vis Nasionalitas*. Jakarta : Institut Antropologi Indonesia.

Tirtosudarmo, Riwanto (2007) : *Mencari Indonesia : Demografi Politik Pasca Soeharto*. Jakarta : LIPI Press bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia

Tomagola, Tamrin Amal (2002), *Bencana Sampit* Makalah yang dipresentasikan pada “Lokakarya Pemberdayaan Legislatif Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Magister Pembangunan Sosial, bekerjasama dengan Live-In, Jakarta 1 Juni 2002

Trijono, Lambang (ed) (2004) *The Making of Ethnic and Religious Conflict in Southeast Asia : ases and Resolutions*. Yogyakarta : CSPA Books.

Tsing, Anna L, Friction (2004) : *An Ethnography of Global Connection*. USA : Princenton University Press

Usop, KMA (penyunting) (2003). *Konflik Etnik di Kalimantan Tengah : Keterpaduan Penyelesaian dengan Proses Pembangunan*. Palangkaraya : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing (YPK-BG).

Usop, Sidik Rahman (2009). *Analisis Struktural atas Konflik dan Kekerasan Etnis di Sampit*. **Disertasi**. Surabaya : Program Studi Ilmu Sosial. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Varshney, Ashutosh (2002). *Ethnic Conflict and Civic life : Hindus and Muslims in India*. USA : Yale University Press

Wahyudi Akmaliah Muhammad (2009) *Menggadaikan Ingatan : Politisasi Islam dalam Kasus Priok*. Yogyakarta : Penerbit Syarikat.

Wiyata, Latief (2002) : *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : Penerbit LKis.

Surat Kabar

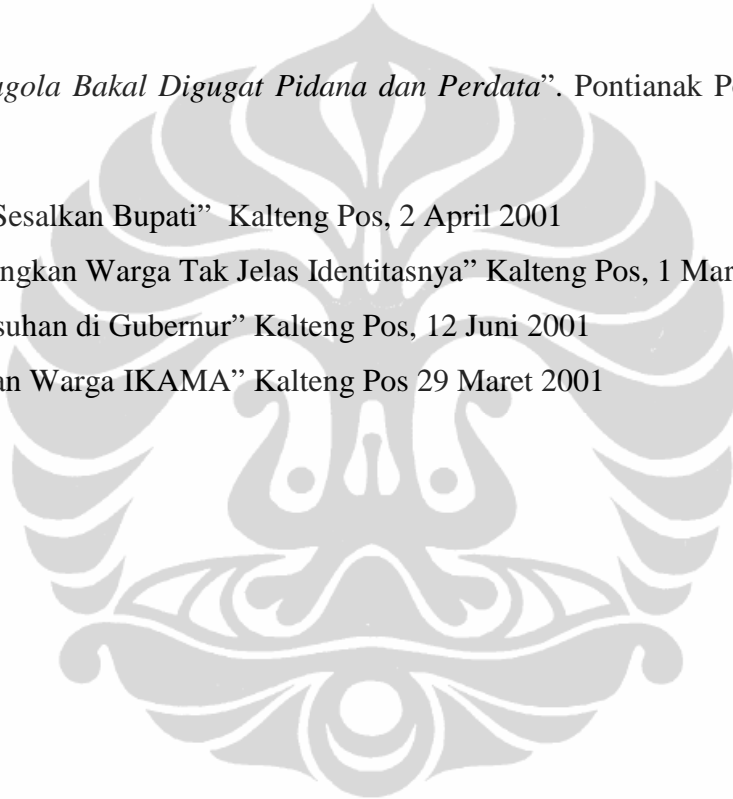
“*Thamrin Tomagola Bakal Digugat Pidana dan Perdata*”. Pontianak Post, Edisi 10 Februari 2011,

“Warga Kobar Sesalkan Bupati” Kalteng Pos, 2 April 2001

“IKAMA : Pulangkan Warga Tak Jelas Identitasnya” Kalteng Pos, 1 Maret 2001

“Spanduk Kerusuhan di Gubernur” Kalteng Pos, 12 Juni 2001

“Ikrar Pernyataan Warga IKAMA” Kalteng Pos 29 Maret 2001



Lampiran : Kronologi Kerusuhan Versi LMMDD KT

Catatan :

Kronologi kerusuhan Sampit seperti yang dilakukan oleh tim investigasi LMMDD KT, yang dibuat oleh 23 orang sebetulnya cukup menarik untuk diamati, yaitu bagaimana konstruksi peristiwa kerusuhan itu terjadi sejak tanggal 16 Desember 2000, yaitu saat meninggalnya Sendong. Kronologi yang dibuat berdasarkan buku, KMA Usop (penyunting), Konflik Etnik di Kalimantan Tengahh : Keterpaduan Penyelesaian Dengan Proses Pembangunan. Diterbitkan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang garing (YPK-BG). February 2003. Kronologi yang dituliskan sebagaimana yang terdapat dalam bagian tulisan mengenai “Kronologis Konflik, Kerusuhan Antar Etnis di Sampit”. Saya tidak melakukan perubahan maupun editing dari bagian tulisan setebal 6 halaman tersebut. Tujuannya agar maksud dari tim penulis tersebut sesuai dengan aslinya, termasuk dalam hal penggunaan kata, konsep dan cara cara mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya

- 1) Rentetan peristiwa meletusnya kerusuhan di Kerengpanngi tanggal 16 Desember 2000, akibat 3 orang Madura membunuh orang Dayak Maanyan yang bernama Sendong sampai hari ini belum tertangkap. Maupun di daerah lainnya termasuk Palangka Raya dari sejak tahun 1982.
- 2) Dalam peristiwa Kereng Pangi tanggal 16 Desember 2000, rumah-rumah warga etnis Madura memiliki bom yang terdapat di rumah kosong dan juga terdapat di Palangka Raya (gereja, ruko dan kompleks perumahan Madura di Jalan Dr Murjani Palangka Raya juga terjadi bom meledak di rumah H Samudi di Jalan Kuburan Muslimin waega Madura tempat perakitan bom. Sehingga satu orang korban dua luka parah anak dan saudara H Samudi yang dirawat di Rumah Sakit Dr Murjani Sampit dinyatakan oleh aparat keamanan adalah bom plastik atau mercon ukuran besar sehingga seluruh biaya pengobatannya ditanggung oleh Bupati Kabupaten Kotim sampai sekarang tidak diusut.
- 3) Rapat pertama di Hotel Rama tanggal 18 Desember 2000 yang dipimpin oleh saudara Fedlik Aser dan Saudara Muhlan Safri mewakili pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, pembahasan atas terjadinya peristiwa Kereng Pangi tanggal 16 Desember 2000 menyusun pernyataan sikap terhadap situasi pasca kerusuhan Kerengpanngi dan situasi kota Sampit karena sikap etnis Madura terlalu bebas membawa senjata tajam dan atas diketemukan bom di tempat-tempat tertentu maupun yang meledak sehingga mengambil kesimpulan keputusan membuat pernyataan sikap tokoh-tokoh masyarakat Dayak yang disampaikan kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan kepada Kapolres Kotawaringin Timur tanggal 22 Desember 2000

- 4) Setelah menyampaikan pernyataan sikap kepada bupati dan kepada Kapolres Kotawaringin Timur langsung diinformasikan telah ditemukan bom yang diambil saudara Rantau dari jalan Kamar 20 kompleks etnis Madura saudara Simin (Madura). Pada waktu itu Bupati dan wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur segera mengambil bom tersebut di Gang Merpati Padat Karya di rumah saudara Rantau pada saat itu juga bom tersebut supaya melihat daya ledak kekuatan di lapangan olahraga kilometer 3 jalan Tjilik Riwur Sampit dengan disaksikan oleh Wakapolres beserta masyarakat saudara Fedlik Aser, M Helmi Juhri, Anang Norali dan A Gozali. Ternyata bahan peledak tersebut adalah benar-benar bom, tetapi dimuat dalam berita mass media itu hanya petasan mercon ukuran besar. Sejak peledakkan percobaan bom tersebut tidak pernah diusut dan dilanjutkan hanya dilaksanakan interogasi pada saudara Simin (Madura)
- 5) Akibat tidak tuntasnya penyidikan pemilik bom dari etnis Madura di Sampit dan tidak ada tanda-tanda untuk proses melalui hukum dari pihak kepolisian Sampit dengan ini masyarakat Kotawaringin Timur beserta tokoh-tokoh masyarakat mengambil langkah dengan jalan menyampaikan pernyataan sikap itu karena sangat meresahkan warga masyarakat Dayak dan warga masyarakat non Madura akibat dari pihak keamanan membiarkan (lalai) melaksanakan tugas untuk merazia beredarnya bom di rumah-rumah orang etnis Madura di berbagai tempat di wilayah Kotawaringin Timur dan Palangkaraya sekitarnya
- 6) Pendapat para tokoh masyarakat Dayak menyikapi atas kerja dari pihak aparat keamanan menangani adanya bom dan sebagainya tidak serius dan terkesan ditutup-tutupi
- 7) Etnis Madura sudah merencanakan penyerangan terhadap warga masyarakat Dayak dan ditetapkan tanggal 26 Pebruari 2011 yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mengusai kota Sampit menjadi Sampang kedia dapat dikuasai sepenuhnya tahun 2009 data tersebut sudah diketahui oleh aparat keamanan
- 8) Masyarakat Dayak mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik antar etnis.
- 9) Dengan modus untuk memancing kemarahan warga masyarakat Sampit non Madura mereka etnis Madura melakukan tindakan-tindakan penjarahan pada siang hari dan terang-terangan merampas sepeda motor yang dikendarai, merampok nasabah Bank serta mencuri mobil dan sepeda motor ditempat-tempat parkir atau di halaman rumah dilakukan siang maupun malam, semakin marak pada bulan Desember 2000 s/d Januari 2001 yang anehnya kendaraan yang hilang hanya milik orang masyarakat lokal non Madura. Sudah beberapa kali melaporkan kepada pihak aparat sampai terjadinya tragedy berdarah antar etnis tidak pernah tertangkap dan diusut. Malah masyarakat Dayak melapor kepada aparat justru

dituding sebagai propokator, Saudara H. Zaini dan Saudara Diun, Saudara Horman, Saudara Hermawan bahwa kendaraan tersebut disembunyikan dan dibawa ke danau Sebuluh, Samuda, Bapinang Kotawaringin Timur

- 10) Pada malam takbiran Hari raya Idul Fitri tanggal 26 Desember 2000, warga etnis Madura membuat keributan untuk memancing situasi supaya malam takbiran tersebut akan terjadi kerusuhan-kerusuhan bernuasa agama, karena terdapat didalam truk H. Satiman membawa bom yang disita oleh aparat, pada waktu itu dapat ditangkap pelakunya yang sudah pasti pemiliknya adalah H. Satiman, baru kemudian ditahan oleh pihak aparat dan dikeluarkan atas jaminan Bapak Bupati Wahyudi K. Anwar.
- 11) Pada bula Desember 2000 setelah Hari Raya Idul Fitri masyarakat Dayak curiga dengan ditemukannya bom dimana-mana di wilayah Kotawaringin Timur tidak pernah ditindak dan ditangkap pelakunya, sehingga masyarakat Dayak berupaya mencari informasi dengan teman orang Madura yang tidak simpatik atas kerja elitelit politik warga Madura, untuk menghancurkan saana-sarana ibadah, ruko, pasar dan menyerang orang Dayak keluar dari wilayah kota Sampit menjadi kota Sampit sebagai Sampang Kedua sehingga dapat penjelasan dan keterangan yang jelas bahwa bom tersebut sudah disebar di beberapa tempat.
 - 11.1. Di Jl. Komplek kamar 20 (Kota Sampit)
 - 11.2. Di rumah Haji Satiman (markas) Jl. Gatot Subroto
 - 11.3. Di belakang bioskop Golden (Jl. Ir. H. juanda)
 - 11.4. Di daerah Baamang (kota Sampit) komplek Padat Karya
 - 11.5. Di Samuda (Kecamatan)
 - 11.6. Di Desa Parebok (wilayah kecamatan Samuda)
 - 11.7. Di Parenggean (Kecamatan)
 - 11.8. Di Kuala Kuayan (Kecamatan)
 - 11.9. Di Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu
 - 11.10. Di Kerengpangi (wilayah kecamatan Kasongan)
 - 11.11. Di Palangka Raya
- 12) Bahwa pernyataan pihak keamanan pembunuh sending lari ke Madura yang diberitakn di Mass media dengan disebar kan identitas 3 (tiga) orang pembunuh tersebut diwilayah seluruh Indonesia. Informasi bahwa mereka tersebut masih bersembunyi di jalan Padat Karya Sampit.
- 13) Pada malam minggu tanggal 18 Pebruari 2001 terjadi peristiwa pembunuhan etnis Madura 5 (lima) orang mati terbunuh, siapa pelaku (tidak tahu), pada saat itu terjadinya pembunuhan sehingga orang Madura mengdakan pembalasan dendam membunuh orang Madura juga sehingga terjadilah perkelahian antar Madura di jalan Pelita Barat karena adalah salah satu keluarga mereka meninggal dari jumlah 5 (lima) orang Madura mati terbunuh pada malam Minggu tanggal 17 Pebruari 2001 di jalan Pada Karya. Persoalan tersebut memancing suasana

terjadinya awal pemicu kerusuhan untuk meyakinkan bahwa warga masyarakat Dayak yang melakukan pembunuhan atau penyerangan lebih dahulu? Yang menjadi pertanyaan dalam peristiwa tersebut sehingga dengan cepat aksi penyerbuan dan pembalasan yang sudah dipersiapkan dengan tidak ada jarak dalam peristiwa pembunuhan 5 (lima) orang etnis Madura. Untuk menguasai kota Sampit karena tidak ada perlawanan dari pihak warga masyarakat Dayak pada tanggal 18 Pebruari 2001 s/d 19 Pebruari 2001.

14) Tragedinya serangan dari etnis Madura yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyerang masyarakat Dayak di kota Sampit.

14.1. Malam minggu tanggal 18 Pebruari 2001 pada jam yang sama warga etnis Madura bertindak brutal (membabi buta) menyerang, membunuh, membakar hidup-hidup didalam rumah warga Dayak Maayan di jalan Tidar dan Komplek perumahan SD Padat Karya Jl. Taman Siswa, Jl. Gatot Subroto Gg. Dusma, Gg. Saruyan, termasuk rumah Bapak Sawang Suling, saudara Yudi I Litang dan Saudara Suling mengakibatkan 24 orang meninggal yang dipimpin oleh H. satiman dengan yel-yel mana orang Dayak dan Panglima Burung.

14.2. Laporan dari Saudara Simpel D Mihing dan Johan Arifin, SH

Pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2001 warga Madura memang sudah siap untuk menyerang sambil arak-arakan truk dan lain-lain dengan aksi memutar mutar arit (celurit) mendatangi rumah-rumah warga masyarakat orang Dayak di beberapa tempat.

- a. Pada jam 08.00 WIB pagi warga etnis Madura menyerang tempat tinggal Saudara Simpei D Mihing Jl. Suprpto no. 66, penyerangan etnis Madura 50 orang sehingga mereka terkurung didalam rumah sebelas orang siap untuk dibakar dengan bensin yang sudah disiram di sekeliling rumah untuk peristiwa tersebut tidak jadi akibat pertolongan pembantu rumah tangga orang Madura melarang etnis Madura membakar rumah tersebut dan membunuh orang Dayak didalamnya.
- b. Laporan Saudra M. Helmi Jauhari, Sigar Gunawan, Tekad Maut. Pada jam 09.00 WIB pagi penyerangan di rumah saudara Drs. M. Helmi Juhari, Saudara Slawi dan Judi dan Saudara Sigar , Gunawan, SH jl Baamang I Sampit tidak membawa korban.
- c. Komplek Perumahan BPD, JL HM arsyad pada jam 10.00 WIB dibakar, orang-orang Dayak berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri keberingasan etnis Madura.
- d. Di Jl. Baamang I hotel Rama terjadi peristiwa pengrusakan milik Drs. Ersa Pahan dituding sebagai tokoh masyarakat menjadi biang biang keladi tidak membawa korban.
- e. Tragedi penembakan senjata api oleh warga Madura dengan Saudara Timel Gg. Saruyan dan jl. Padat karya.

- f. Aparat keamanan pada hari kejadian tanggal 18 Pebruari 2001 s/d 19 pebruari 2001 saat itu membiarkan situasi aksi tersebut oleh etnis Madura tidak melakukan apa-apa atas sweping pada orang-orang dayak untuk membela diri sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, warga Dayak lari mengungsi ke Palangka Raya akibat ketidakadilan aparat meleraikan konplik tersebut. Sasaran pembunuhan pada waktu itu terhadap orang dayak agama tertentu, dengan kata-kata yang dibawa oleh saudara H. Darman (warga Madura) perang agama (bahwa orang muslim diserang oleh agam tertentu) pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2001, sambil memberitahukan kepada warga masyarakat Dayak supaya ikut melawan , dijawab oleh mereka (orang Dayak yang muslim) itu tidak benar.
- g. Pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2001 tokoh-tkroh etnis Madura mengadakan pertemuan di rumah H, satman yang dipimpin oleh H. Marlinggi sebagai otak terjadinya berbagai kejadian di kota Sampit, H. Pusiran dan H. Samsuri (pendana), mendatangkan senjata berbagai jenis termasuk bom, H. Ismail Mursade khusus memsuplai bensin di tempat-tempat kios-kios untuk dipersiapkan bahan membakar rumah-rumah warga Masyarakat Dayak. Dari tanggal 18 s/d 19 Pebruari 2001.
- h. Saudara Sarminto dari etnis Madura (penjual daging), Saudara H. Munir di belakang bioskop Golden, orang-orang tersebut khusus mengadakan negosiasi dengan pihak oknum polisi komandan provos H. Ali satar dan polisi Sabhara Mujono. Misalnya dari kejahatan (perampokan, pencurian, pemerkosaan , pemerasan, pembunuhan dll) supaya diproses melalui jalur hukum dengan mengadakan kolusi.
- 15) Untuk diketahui di dalam peristiwa tersebut pada malam minggu tanggal 18 Pebruari 2001 yang benar-benar mengetahui terjadinya siaya yanag membuat pemicu di dalam tragedy berdarah tersebut sehingga meletus di kota Sampit Kapt. Amin Udin sebagai saksi
- 16) Kapolres Kotawaringin Timur Saudara Benyamin Selawa terindikasi tidak tegas melakukan tugas dalam menyikapi setiap terjadinya bom meledak atau ditemukannya dan disimpan di rumah penduduk warga dayak, dan selalu mengatakan bahwa itu bukan bom, itu adalah bahan peledak mercon dari bahan plastic ukuran besar seolah-olah melindungi tindak kejahatan warga etnis Madura d n tidak pernah diusut dan ditangkap pelakunya sampai sekarang yang sudah pasti otaknya H. Marlinggi, H. satiman, H. Ismail Mursade, H. Pusiran, H. samsuri, H. Muhammad, H. Noor sebagai awal pemicu terjadinya tragedy berdarah di kota Sampit.
- 17) Akibat inilah warga masyarakat Dayak tidak lagi ercaya kepada pihak-pihak aparat keamanan untuk menuntaskan persoalan adanya bom di kota Sampit maupun di daerah lain sehingga terjadi persoalan yang tidak dapat dikendalikan (marah) akibat ketidakjujuran pihak keamanan menangani kasus-kasus bom.

- 18) Pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2001 etnis Madura memakai seragam loreng aparat TNI untuk melakukan pembunuhan dengan cara menyamar seolah-olah petugas keamanan yang akan menolong warga masyarakat Dayak dan supaya segera keluar dari rumah sebelum terjadi penyerangan dari pihak etnis Madura tetapi bukan menolong melainkan membunuh.
- 19) Pada hari senin tanggal 19 Pebruari 2001 dengan sorak sorai menyatakan kemenangan arak-arakan etnis Madur di Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Iskandar dan Jl. Usman dengan yel – yel mana orang Dayak sambil teriak membawa spanduk yang bertuliskan “KOTA SAMPIT SAMPANG KEDUA” “ SELAMAT DATANG DI KOTA MADURA” dan “KOTA SAMPIT SERAMBI MEKAH” seolah-olah memancing persoalan kemarahan orang Dayak sehingga orang Dayak dari berbagai tempat datang spontan melawan etnis Madur tersebut.
- 20) Pada malam Selasa tanggal 20 Pebuari 2001 terjadinya tragedy berdarah antar etnis Madura dan dayak sehingga kota Sampit dapat dikuasai oleh warga Masyarakat Dayak yang berada di sampit dan daerah lainnya non Madura.
- 21) Akibat terjadinya pembunuhan pada malam Minggu tanggal 18 Pebruari 2001 etnis Madura terbunuh 5 (lima) orang korban sebagai pemicu pertikaian antar Madura dari jalan Pelita Barat sebagai balas dendam di jalan Padat Karya/ sawahan, sehingga pad waktu tersebut terpicu prasangka bwa pembunuhan tersebut oleh warga Dayak terhadap etnis Madura.
- 22) Pada waktu kejadian malam minggu tanggal 18 Pebruari 2001 warga masyarakat Dayak yang berada dirumah Timel jalan Gang Seruyan dikepung/diserang etnis Madura, yang tidak melakukan perlawanan apa-apa sehingga tempat mereka dibakar dan seluruh penghuninya diselamatkan oleh aparat keamanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan 2 (dua) orang menjadi korban.
- 23) Dalam penyerangan etnis Madura pada hari selasa tanggal 20 Pebruari 2001 di daerah wilayah Baamang yang dipimpin oleh seorang Kiyai dengan pasukan etnis Madura diperkirakan 150 orang pada waktu itu dalam penyerbuan seorang kiyai meninggal sehingga penyerbuan etnis Madura mundur penyerbuan sampai siang hari rabu tanggal 21 Pebuari 2001 sehingga diketemukan 2 orang kiyai memimpin penyerbuan di wilayah Ketapang sempat melarikan diri di wilayah Desa Parebok (Samuda) pada hari itu juga pengejaran langsung ke markas yang terkuta ang dipimpin oleh 9 kyai yang didatangkan kyai tersebut dari Jawa Timur (Madura) untuk dipersiapkan menyerang warga masyarakat Dayak mengadakan perlawanan untuk merebut kekuasaan kota Sampit Sampang kedua. Akibat komando penyerbuan mereka 10 orang Kyai tersebut meninggal maka tokoh-tokoh Madura minta dievakuasi dengan Bapak Bupati Pemerintah Kabupaten Kotawaringin.

Daftar peristiwa pembunuhan dan pembakaran pada amalm minggu tanggal 18 Pebruri 2001

1. Keluarga Bapak Suling mati dibunuh 1 (satu) orang anak 2 (dua) orang mertua laki-laki/perempuan jumlah yang mati 3 (tiga) orang.
2. Keluarga Dahur Jalan Tidar dari Katingan Desa Tewang Rangkang dibakar hidup-hidup yang belum namanya dari Katingan desa Tewang Rangkang dibakar hidup-hidup 2 (dua) orang anak 2 (dua) orang Bapak mati dibakar dalam rumah jumlah 3(tiga) orang korban.
3. Hari minggu siang mati dibunuh dengan ala ninja dan seragam baju loreng TNI menyamar sebagai petugas keamanan untuk menolong orang-orang warga Dayak, itu bukan menolong tetapi dibunuh sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri beberapa daerah jalan di kota Sampit.
4. Rumah Sawang Suling dibakar tetapi orangnya dapat diselamatkan.
5. Keluarga Jihan komplek Padat Karyajalan Sirotul Mustaqim ditembak memakai senjata M 16 disinyalir oleh H. Satiman dan rumah dibakar korban meninggal 7 (tujuh) orang.

Hasil Laporan Dari :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Simpel D. Mihing | 13. Rantau |
| 2. Johan Arifin | 14. Pupi Emel |
| 3. Drs. M.Helmi Jauhari | 15. Meneng Jaru |
| 4. Sigar Gunawan | 16. H. Zaini |
| 5. Niel Manan | 17. Diun |
| 6. Murai Garang | 18. Horman |
| 7. Anang Rojali | 19. Hermawan |
| 8. Mihel Tundan | 20. Emil |
| 9. Tekat Maut | 21. Esra Pahan |
| 10. Rawing | 22. Yudhi I. Litang |
| 11. Badiansyah | 23. Suling |
| 12. Timei | |

PALANGKA RAYA, 03 MARET 2001
Yang Membuat dan Menerima Laporan

Ketua Presidium,

Pelaksana Tugas Harian
Sekretaris

Prof. H. KMA. M. Usop, MA

Bahing Jimat

Riwayat Hidup

Bio Data :

Nama : Herry Yogaswara
Tempat/Tanggal lahir : Bandung 21 November 1967
Alamat : Bukit Permata Sari A 5 No 42, Ciluar, Bogor
Pekerjaan : Peneliti Bidang Ekologi Manusia, Puslit
 Kependudukan LIPI (sejak 1 April 2012)

Riwayat Pendidikan

1. **Pasca Sarjana (S-3) Antropologi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI),**
2. **Pasca Sarjana (S-2), *Master of Arts* dalam bidang Antropologi di Department of Sociology and Anthropology, Ateneo de Manila University, The Phillipines, lulus 2001**
3. **Sarjana (S-1) Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, lulus 1991**
4. **Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung, lulus 1986**
5. **Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung, lulus 1983**
6. **Sekolah Dasar Kristen 1 BPPK Bandung, lulus tahun 1980**

Kegiatan Penunjang Pendidikan :

- 1997-1998 WWF International, Certificate Training Course on Applied Ethnobotany by People and Plants Initiative. Conducted in Sabah Malaysia and Subic, the Philippines
- 2001, Course on Management for Intellectual Property Rights, Bond University, Queensland Australia
- 2004, Summer Course on Forced Migration. Oxford University, United Kingdom
- Japan Society for Promotion Science (JSPS) Fellow in Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan, 2005
- ASEAN Fellowship in the Asia Research Institute (ARI), The National University of Singapore (NUS), 2007
- The Asian Public Intellectuals (API), The Nippon Foundation, 2001-2002

Kegiatan Penelitian :

- Evaluation Study of World Food Programmed (WFP) on School Feeding Programmed in the District of Sampang, East Java. Funded by UN-WFP, 2012

- Baseline study of Disaster Risk Reduction (DRR) of Hydrometeorology Hazard on climate change adaptation in the Republic of the Phillipines. ICIAR LIPI submitted to UNESCO office Jakarta, 2011
- Member of Social Sciences Ressearch for “Baruna Jaya VIII Joint Expedition between Dikti and LIPI” in Teluk Kendari, Funded by Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Content Development of Climmate Change Information for Farmers, Fisherfolk and Genereal Public Through Community Broadcasting (*Radion Komunitas*) in Serdang Bedagai, North Sumatera. Cooperation between Badan Meteorology Klimatologi dan Geofisika, Indonesia Climmate Change Trust Fund (ICCTF) and LIPI (2010-2011)
- Perception and adaptation among Farmers about Climmate Change in the City of Batu, Malang, East Java. LIPI Project (2011)
- Inventarisation of Indigenous Peoples (*Masyarakat Hukum Adat*), Local Knowledge in relations with Protection and Management of Environments (Ministry of Environemental, 2011)
- Protection of Indigenous Peoples (*Masyarakat Hukum Adat*) in the Border Areas of Indonesia (Badan Pmbinaan Hukum Nasional), 2011
- Study on “Rights to Carbon” for community forest in Central Java and West Papua” (2010)
- Comparative Study on Community Forestry (*Hutan Kemasyarakatan*) in Lampung, Central Kalimantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Funded by Van Vollenhouven Institute, Leiden University, 2010
- Study of Adaptation among Farmers and Fisherfolk in Northern Coast of Java. LIPI 2010
- Study on “ Adaptive Strategy to Climate Change in in Teluk Bone”, South Sulawesi (2010)
- Study on Management Conflict of Delta Mahakam, East Kalimantan (2002, 2003, 2004 and 2005)
- Social Assessment on (Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coremap) in Nias, North Sumatera. Coremap and Asian Development Bank. 2005
- **Smong** : Study on Local Knowledge on Tsunami Prepadness in Simeulue Island of Nangroe Aceh Darussalam (NAD), 2005. LIPI-UNESCO
- Study on “Ethnicity and Horizontal inequality in Central and West Kalimantan” . Cooperation between LIPI and CRISE University of Oxford, UK (2005)
- Study on “Census of Marine Life” (2004)
- Study on People Participation of Watershed Management in DAS Mahakam (East Kalimantan) and DAS Batanghari (Jambi), 2002-2005
- Social Assessment of Coral Reef Rehabilitation and management Programme (Coremap) in Biak Papua (1996), Nias (2005) and Southern Nias (2006)

- Population and International Border in Papua (1997) and East Kalimantan (1998)
- Evaluation Study on “Program Makanan Tambahan Anak Sekolah PMT-AS”, Bappenas
- Impact of Tourism in Biak, Papua (1995)
- Population and Environment in Seram Maluku (1995-1996)
- Study of Nitrate in West Nusa Tenggara (1995)

Pengajaran :

- Anggota tim Pengajar Mata Kuliah “Dampak Pembangunan Terhadap Kebudayaan Daerah”, Jurusan Antropologi FISIP UI, (2 SKS) tahun 1996
- Pengajar Mata Kuliah “Sejarah Kebudayaan Indonesia”, (2 SKS) Fakultas Sastra Universitas Maranatha Bandung tahun 2008
- Pengajar Mata Kuliah “Antropologi Tari”, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta (2010 – sekarang)

